



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

Nomor : UM.006/1/13/DJKA/2024

Jakarta, 12 Februari 2024

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun 2023

Yth. Menteri Perhubungan

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Pasal 26) bahwa Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon I disusun dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya serta disampaikan kepada Menteri Perhubungan paling lambat 45 hari setelah tahun anggaran berakhir. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini dilaporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (revisi terakhir) serta memperthatikan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.
2. Terdapat 3 Sasaran Program dan 7 Indikator Kinerja Program yang dilakukan pengukuran kinerja terhadap target yang ditetapkan dan diperoleh rata-rata capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 106,80%, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
1	SP1 Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,45	0,45	100,00
2	SP2 Keselamatan transportasi perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang handal	IK2 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (<i>rate of accident</i>)	Kejadian Kecelakaan/ 1 Juta Km Tempuh	0,15	0,10	133,33

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
3	SP3 Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan	IK3 Persentase capaian <i>on time performance</i> (OTP) transportasi kereta api	%	91,00	90,33	99,26
		IK4 Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	%	55,68	55,87	100,34
		IK5 Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	%	56,00	59,71	106,63
		IK6 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI	%	92,87	93,85	101,06
		IK7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,45	3,69	106,96
Rata-Rata Capaian Kinerja						106,80%

Berdasarkan Tabel di atas, terdapat 6 dari 7 Indikator Kinerja Program dapat memenuhi target kinerja dan selanjutnya terus dilakukan upaya-upaya perbaikan kinerja serta memastikan target pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dapat tercapai pada akhir periode.

3. Dilaporkan pula realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 sebesar Rp6.546.119.112.828,- atau 84,18% dari alokasi anggaran Rp7.776.454.929.000,- serta realisasi PNBP sebesar Rp763.597.248.089,- atau 63,79% dari target Rp1.197.097.575.000,-.

Dalam rangka pelaporan kinerja sebagai bagian dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta upaya peningkatan kinerja pada periode selanjutnya, bersama ini terlampir disampaikan secara lengkap Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023. Mohon perkenan arahan lanjut Bapak Menteri Perhubungan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan petunjuk Bapak Menteri Perhubungan diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perkeretaapian,



Ir. Mohamad Risal Wasal, A.TD., M.M., IPM
NIP 196706081990031005

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.
2. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.
3. Seditjen Perkeretaapian.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

TAHUN 2023

   ditjenperkeretaapian

 @ditjenperkeretaapian

 djka.dephub.go.id

KATA PENGANTAR

Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator transportasi perkeretaapian melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian serta melaksanakan pembangunan infrastruktur perkeretaapian sesuai prioritas berdasarkan RPJMN dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Penyelenggaraan dan pembangunan perkeretaapian dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan transportasi massal kereta api yang handal dan berdaya saing sehingga dapat mengatasi permasalahan transportasi baik di wilayah perkotaan maupun antar kota.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian, ditetapkan Indikator Kinerja Program yang menjadi tolak ukur keberhasilan/kegagalan dalam melaksanakan peran sebagai regulator transportasi perkeretaapian. Capaian Indikator Kinerja Program mengacu Rencana Kinerja, secara berkala dilakukan pemantauan serta dilaporkan dalam Laporan Kinerja setiap tahun dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 merupakan laporan pelaksanaan rencana kinerja unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja berdasarkan perkembangan yang sangat dinamis pada periode Tahun 2023. Laporan Kinerja disusun dengan mengacu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 menjadi acuan dan referensi dalam rangka evaluasi kinerja tahunan serta upaya meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada masa mendatang. Hal ini sangat diperlukan untuk menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas instansi Pemerintah.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Kinerja yang juga memuat Laporan Monitoring Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Jakarta, Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN


Ir. MOKHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP 196706081990031005

RIKHS KSKUTI

Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator transportasi perkeretaapian sebagai tujuannya untuk lebih meningkatkan pelayanan perkeretaapian dan meningkatkan keselamatan penumpang dan awak kereta api pada tahun 2020 dan Rencana induk perkeretaapian pada tahun 2020.

Di Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kebijakan Kerubandaraan adalah **“Direktorat Jenderal Perkeretaapian berupaya mewujudkan Perkeretaapian yang Handal, Berdaya Saing, Berintegrasi, Berteknologi dan Terjangkau guna mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”**

Untuk mendukung misi tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kuantitas layanan perkeretaapian yang terintegrasi dan berkeadilan
- 2. Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang efisien dan efektif
- 3. Meningkatkan keselamatan transportasi perkeretaapian yang efektif

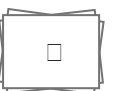
Untuk pelaksanaan terwujudnya perencanaan misi dan visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian di atas, maka telah ditetapkan cara-cara kerja dan indikator Kinerja kerja dan pelaksanaan lebih lanjut sebagai berikut:

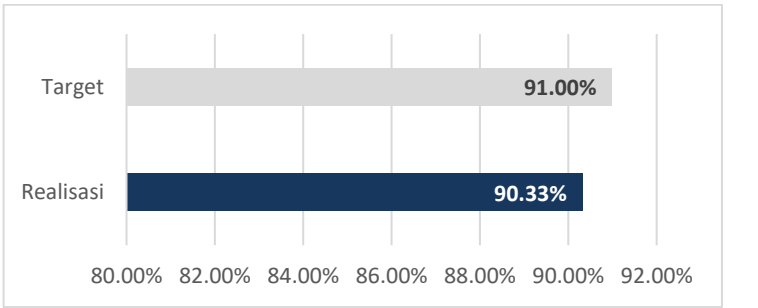
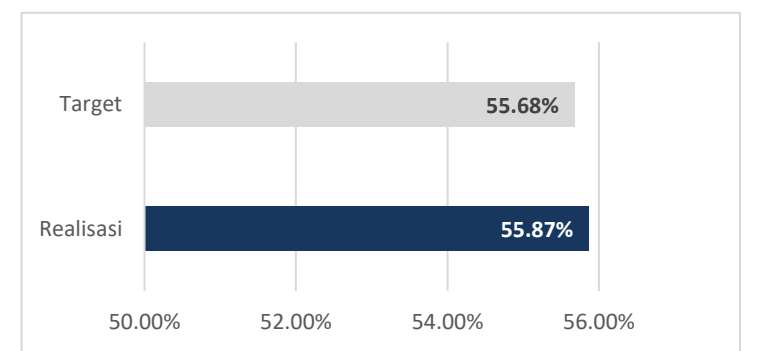
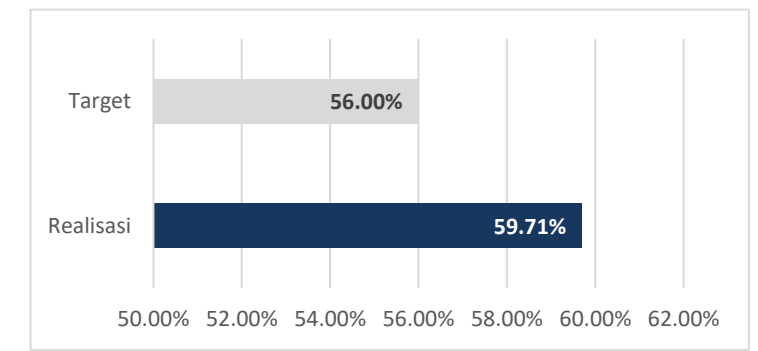
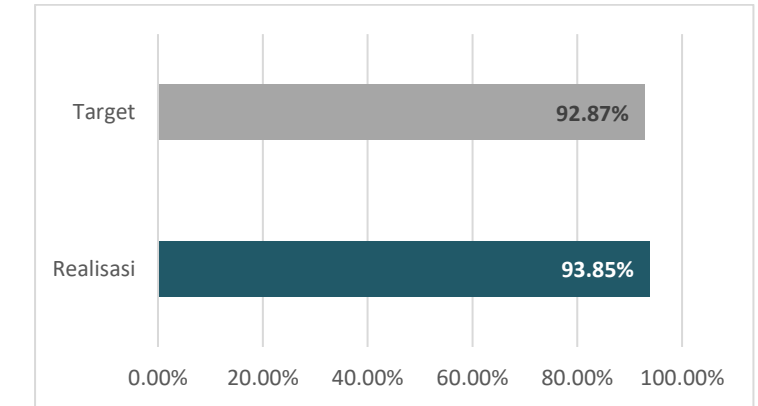
Sasaran	Indikator Kinerja Program	Target
1. Kuantitas Layanan Perkeretaapian dan Diwujudkan dalam pelayanan Infrastruktur	IK1 Rasio Kuantitas perkeretaapian	0,4
2. Keselamatan Transportasi Perkeretaapian dengan berdasar Mautia, Paraca dan Paracara yang ada	IK2 Rasio Keadaan Keselamatan Transportasi Kereta api <i>rate of accident</i>	0,00

Sasaran	Indikator Kinerja Program	Target
<p> Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Transportasi Kereta Api Perkeretaapian dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keperkeretaapian </p>	Indikator Efektivitas dan Efisiensi On Time Performance dan Transportasi Kereta Api	100,00
	IK4 Efektivitas Target Kualitas Pelayanan Kereta Api	100,00
	IK5 Efektivitas Target Kualitas Barisan Kereta Api	100,00
	Indikator Efektivitas dan Efisiensi Jalur Kereta Api dan Kualitas Pelayanan	12,00
	IK6 Indeks Kualitas Masyarakat dan Fasilitas Publik Binaan Perkeretaapian	1,40

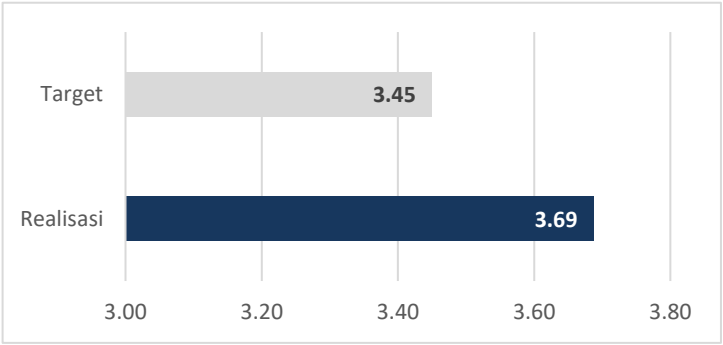
Pada tahun anggaran 2021 kinerja Tahun 2021 diukur rata-rata secara kumulatif sebesar 100,00 dengan rincian sebagai berikut

Indikator Kinerja Program (IKP)	Target dan Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja				
Sasaran 1 - Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Transportasi Kereta Api Perkeretaapian dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keperkeretaapian						
IK1 - Efektivitas dan Efisiensi Kualitas Pelayanan	<table border="1"> <tr> <td>Target</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>Realisasi</td> <td>100,00</td> </tr> </table>	Target	100,00	Realisasi	100,00	100,00
Target	100,00					
Realisasi	100,00					
Sasaran 2 - Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Transportasi Kereta Api Perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas						
IK2 - Efektivitas dan Efisiensi Kualitas Pelayanan Kereta Api (Rate of Accident)	<table border="1"> <tr> <td>Target</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>Realisasi</td> <td>100,00</td> </tr> </table>	Target	100,00	Realisasi	100,00	100,00
Target	100,00					
Realisasi	100,00					



Indikator Kinerja Program IKP	Target dan Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja				
<p>Sasaran 1 Kinerja Pelaksanaan Transportasi Perkeretaapian yang Terpercepat dan Sesuai Keutuhan</p>						
<p>IK1000eretae aia on time performance T tra rta kereta a</p>	 <table border="1"> <tr> <td>Target</td> <td>91.00%</td> </tr> <tr> <td>Realisasi</td> <td>90.33%</td> </tr> </table>	Target	91.00%	Realisasi	90.33%	<p>100,20</p>
Target	91.00%					
Realisasi	90.33%					
<p>IK400e e a Target kuta e a Kereta i</p>	 <table border="1"> <tr> <td>Target</td> <td>55.68%</td> </tr> <tr> <td>Realisasi</td> <td>55.87%</td> </tr> </table>	Target	55.68%	Realisasi	55.87%	<p>100,4</p>
Target	55.68%					
Realisasi	55.87%					
<p>IK000e e a Target kuta Bar Kereta i</p>	 <table border="1"> <tr> <td>Target</td> <td>56.00%</td> </tr> <tr> <td>Realisasi</td> <td>59.71%</td> </tr> </table>	Target	56.00%	Realisasi	59.71%	<p>100,00</p>
Target	56.00%					
Realisasi	59.71%					
<p>IK000eretae e era a a K a e uai de a T</p>	 <table border="1"> <tr> <td>Target</td> <td>92.87%</td> </tr> <tr> <td>Realisasi</td> <td>93.85%</td> </tr> </table>	Target	92.87%	Realisasi	93.85%	<p>100,00</p>
Target	92.87%					
Realisasi	93.85%					



Indikator Kinerja Program (IKP)	Target dan Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja						
Indikator Indeks Keuaaa Masyarakat (KM) terhadap Bidaaa Kerkeretaaa	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Target</td> <td>3.45</td> </tr> <tr> <td>Realisasi</td> <td>3.69</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Nilai	Target	3.45	Realisasi	3.69	100%
Kategori	Nilai							
Target	3.45							
Realisasi	3.69							

Sehingga itu, di samping juga realisasi anggaran Direktorat Jenderal Kerkeretaaa pada Tahun 2022 di peroleh sebesar Rp 4.222, atau **84,18% dari alokasi sebesar Rp 7.776.454.929.000,-**. Realisasi anggaran tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi anggaran Tahun 2022 yaitu sebesar Rp 4,000. Terkait B/D Direktorat Jenderal Kerkeretaaa, di samping juga realisasi capaian kinerja di Tahun 2022 adalah sebesar Rp 24.000, atau 100% dari target Tahun 2022 sebesar Rp 24.000.000, baik berdasarkan

selanjutnya dengan di samping juga kinerja Direktorat Jenderal Kerkeretaaa Tahun 2022 di samping juga dapat memberikan informasi kinerja dan evaluasi pelaksanaan program keajaaban untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pada periode selanjutnya

D AFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RIKHSAS KSKUTI	i
D AFTAR ISI	iii
D AFTAR TUGAS	i
D AFTAR GAMBAR	ii
D AFTAR AMPHIR	i
1. PENDAHULUAN	-
1.1. Latar Belakang	
1.2. Keadaan, Tujuan dan Fungsi	2
1.3. Struktur Organisasi	
1.4. Maksud Maksud	
1.5. Tujuan, Isi dan Tujuan dan	
1.6. Identifikasi	
2. PERENCANAAN KIRJ	-
2.1. Rincian dan Tujuan	2
2.2. Rincian dan KIRJ	2.4
3. KUTIPATSI KIRJ	-
3.1. Tujuan dan KIRJ KIRJ	
3.2. KIRJ dan KIRJ	4
3.3. KIRJ dan Maksud	
3.4. Deskripsi dan Tujuan dan	
3.5. KIRJ dan	
3.6. Rincian dan	
4. PENUTUP	-
4.1. Tujuan dan KIRJ	4
4.2. KIRJ	4
4.3. Rincian dan	4
5. AMPHIR	

D I R T

Tabe 2	Tuua daa cara Ta 2020/2024	2
Tabe 2	Idikatr da Tarat Kiera rra K Direkt rat Je dera erkeretaa ia	2
Tabe 2	Idikatr Kerā Direkt rat Je dera erkeretaa ia Ta 202	2
Tabe 2	Tarat Kiera Direkt rat Je dera erkeretaa ia er Triua Ta 202	2
Tabe 2	erubaa Red Tarat Kiera ada era ia Kiera Direkt rat Je dera erkeretaa ia Ta 202	2
Tabe 2	ka rra er Ke ata Berd arka era ia Kiera Ta 202	2
Tabe 2	ka rra er Idikatr Kiera Berd arka era ia Kiera Ta 202	2
Tabe	e ukura Idikatr Kiera rra Direkt rat Je dera erkeretaa ia	2
Tabe	Tarat da Rea ia ka K K i u Tra rta Ka a a trate da a a a Ter ubu a Jari a Ja ur Kereta i ada Ta 202	
Tabe	a ia Kiera Ra K ekti ita tar ia a er Triua Ta 202	
Tabe	erba di a Tarat da Rea ia Ta 2020/202 u tuk Ra K ekti ita tar ia a	
Tabe	erba di a Tarat Re a a trate da Rea ia Ta 2020/2024	0
Tabe	iai Ra K ekti ita tar ia a	0
Tabe	Ju a Ke adia Ke e akaa er Je Ke adia Ta 202	
Tabe	Ju a Ke adia Ke e akaa er ia a Bai Ta 202	
Tabe	a ia Kiera Ra K ekti ita a tar ia a er Triua Ta 202	
Tabe	erba di a Tarat da Rea ia Ta 2020/202 u tuk Ra Ke adia Ke e akaa Tra rta Kereta i Rate ide t	
Tabe	erba di a Tarat Re a a trate da Rea ia Ta 2020/2024	20
Tabe	Ke adia Ke e akaa erkeretaa ia	2

Table 0000	Realisasi Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Terhadap aktu Tahun 2020	20
Table 0004	Analisa Kinerja Persewaan On Time Performance Terhadap Transportasi Kereta Api Per Triwulan Tahun 2020	20
Table 0000	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Persewaan Per Tiang Persewaan Terhadap Transportasi Kereta Api	20
Table 0000	Perbandingan Target Rencana Rate dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Persewaan Per Tiang Persewaan Terhadap Transportasi Kereta Api	20
Table 0000	Analisa Kinerja Persewaan Target Persewaan Persewaan Kereta Api Per Triwulan Tahun 2020	
Table 0000	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Persewaan Target Persewaan Persewaan Kereta Api	4
Table 0000	Perbandingan Target Rencana Rate dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Persewaan Target Persewaan Persewaan Kereta Api	
Table 0020	Perbandingan Jumlah Persewaan Persewaan Kereta Api	
Table 0020	Analisa Kinerja Persewaan Target Persewaan Barisan Kereta Api Per Triwulan Tahun 2020	40
Table 0022	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Persewaan Target Persewaan Barisan Kereta Api	40
Table 0020	Perbandingan Target Rencana Rate dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Persewaan Target Persewaan Barisan Kereta Api	42
Table 0024	Perbandingan Jumlah Persewaan Barisan Kereta Api	40
Table 0020	Perhitungan Persewaan Jalur Kereta Api dan Persewaan Terhadap Tahun 2020	40
Table 0020	Persewaan Jalur Kereta Api dan Persewaan Terhadap Tahun 2020	40
Table 0020	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Persewaan Persewaan Jalur Kereta Api dan Persewaan Terhadap Tahun 2020	40
Table 0020	Perbandingan Target Rencana Rate dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Persewaan Persewaan Jalur Kereta Api dan Persewaan Tahun 2020	40
Table 0020	Perbandingan Target RKM dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Persewaan Persewaan Jalur Kereta Api dan Persewaan Terhadap Tahun 2020	40
Table 0000	Perbandingan Rairad Infrastruktur Persewaan Persewaan	0
Table 0000	Kategori Kinerja Nilai IKM	4
Table 0002	Analisa Nilai IKM Tahun 2020	4

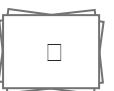


Table 00000	Daftar Isi I-DeK Kelembagaan Masyarakat IKM terdapat e-lisa publik Bidaerkeretaaia Per Triwulan Tahun 2020
Table 00004	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2021 untuk I-DeK Kelembagaan Masyarakat IKM e-lisa publik Bidaerkeretaaia
Table 00000	Perbandingan nilai IKM
Table 00000	Daftar Isi I-DeK Kelembagaan Masyarakat IKM Direktorat Jenderal Keretaaia Tahun 2020
Table 00000	Realisasi Program Direktorat Jenderal Keretaaia Per Bulan Tahun 2020
Table 00000	Realisasi Program Direktorat Jenderal Keretaaia Per Kelembagaan Tahun 2020
Table 00000	Daftar Isi I-DeK Kelembagaan Masyarakat IKM Tahun 2020
Table 00040	Realisasi Program Direktorat Jenderal Keretaaia Tahun 2020
Table 400	Tidak dapat Rekonstruksi Kelembagaan Keretaaia
Table 402	Daftar Isi I-DeK Kelembagaan Masyarakat IKM Direktorat Jenderal Keretaaia Tahun 2020

DOKUMEN

- 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian
- 1.2 Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan
Unit Kerja
- 1.3 Analisis Kinerja Rasio Produktivitas per Triwulan
Tahun 2020
- 1.4 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2021 untuk Rasio
Produktivitas per Triwulan
- 1.5 Perbandingan Target Rasio Efisiensi dan Realisasi Tahun
2020-2024
- 1.6 Dukungetai pelaksanaan Jalur Koridor pelayanan Tahunan
1.7 Dukungetai pelaksanaan Kaitan antara terkoneksi pelayanan
Tahunan perak
- 1.8 Analisis Kinerja Rasio Keadaan Kelelahan Kereta per
Triwulan 2020
- 1.9 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2021 untuk Rasio
Keadaan Kelelahan Transportasi Kereta per Rate Efisiensi
- 1.10 Perbandingan Target Rasio Efisiensi dan Realisasi Tahun
2020-2024
- 1.11 Perbandingan Jumlah Keadaan Kelelahan Kode Beberapa
Pelayanan
- 1.12 Analisis Kinerja perentase per Tipe per Rasio per Transportasi
Kereta per Triwulan Tahun 2020
- 1.13 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2021 untuk perentase
per Tipe per Rasio per Transportasi Kereta per
- 1.14 Perbandingan Target Rasio Efisiensi dan Realisasi Tahun
2020-2024 untuk perentase per Tipe per Rasio per Transportasi
Kereta per
- 1.15 Perbandingan per Tipe per Rasio per Transportasi Kereta per
debeberapa pelayanan
- 1.16 Analisis Kinerja pelaksanaan Target kuota pelayanan Kereta per
per Triwulan Tahun 2020
- 1.17 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2021 untuk
pelaksanaan Target kuota pelayanan Kereta per

Daftar Isi

1. Perencanaan Target Reputasi dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Pemulihan Target Produksi Bara Kereta Api 4

2. Kebijakan Kinerja Pemulihan Target Produksi Bara Kereta Api Triwulan Tahun 2020 40

3. Perencanaan Target dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Pemulihan Target Produksi Bara Kereta Api 4

4. Perencanaan Target Reputasi dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Pemulihan Target Produksi Bara Kereta Api 42

5. Kebijakan Kinerja Perencanaan Pengerjaan Jalur Kereta Api Relai dekap Tol Per Triwulan Tahun 2020 4

6. Perencanaan Target dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Perencanaan Pengerjaan Jalur Kereta Api Relai dekap Tol 4

7. Perencanaan Target Reputasi dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Perencanaan Pengerjaan Jalur Kereta Api Relai dekap Tol 4

8. Perencanaan Target RKM dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Perencanaan Pengerjaan Jalur Kereta Api Relai dekap Tol 4

9. Perencanaan Rancangan Rata-rata Struktur Kualitatif dekap Pengerjaan

10. Kebijakan Kinerja Indeks Kelelahan Masyarakat IKM terhadap Kebijakan Publik Bina Perkeretaaan Per Triwulan Tahun 2020

11. Perencanaan Target dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Indeks Kelelahan Masyarakat IKM terhadap Kebijakan Publik Bina Perkeretaaan

12. Analisis Biaya Kereta Api Makassar – Parepare Talim dan e-Barru – Pakkeng – Mar 2

13. Analisis Biaya Kereta Api RT Jababek 2

14. Dokumen Biaya Perencanaan Kereta Api Makassar – Parepare Talim dan e-Barru – Pakkeng – Mar

15. Dokumen Biaya Perencanaan RT Jababek

16. Dokumen Biaya Perencanaan Kereta Api Gareta Jakarta Bandung

DOKTOR EMPIR

Thesis I Research in the Year 2020

Thesis II Research in the Year 2020

Thesis III Realization of the Year 2020

Thesis I Knowledge and Research in the Year

Thesis II Monitoring Research

Thesis I Data and Research in the Year

Thesis II Data and Research in the Year 2020



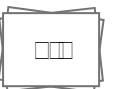
PERDULU

TOR KOG

Saat ini transportasi kereta api terus berubah dengan peningkatan pelayanan baik dan bentuk pelayanan pelayanan, sarana dan DM auau reuau bidaa kereta api rora ebaaua kereta api eara deca tuua eeeeraa kereta api aau e auai era da aadi uctuk eikatka erta edrrek ia aia ebaai a dia aatka daa daada daa r 2 Taau 200 teata kereta api, keudia dituaka daa Reaca Iduk kereta api aia RI erta Reaca tratei bidaa kereta api

Daan rangka eaudka transportasi kereta api aau aada, diperuka ietai aau reati be ar uctuk eikatka daa ai erta daa duku raara da ara kereta api Meiat transportasi kereta api eruaka aau atu bectuk eaca aubik, aka eeri ta e auai taauu aab daa eediaka transportasi tersebut baik eai eka e ebiaaa BB, BD, Ker a a eeri ta da Bada aca KB, dukuca BMBMD, auu aata eeuua

Direktat Jendera kereta api diberika taauu aab uctuk eakuka ebiaa eidiuti eatura, eedaia da eaca aca eeraa kereta api ter auk eberika aca keada aarakat uu ubik da dida a terdaat aek erta uua aba *accountability* eakaa tuu eeri ta baik eara ad i trati auu aaria eai atura da kebiaka aau ditetaka daa eratura reide r 2 Taau 204 teata i te kuitabi ita Kiera I ita eeri ta KIB Berdarka eratura reide tersebut di caaika ba a etia i ita eeri ta aib uctuk e erta uua abka da e i r a i ka kiera da tidaka keada iak aau e i i ki ak atau keeaca uctuk eita keteraca da erta uua aba daa eaudka eeri ta a aau baik *Good Governance* eautca eratura reide r 2 Taau 204 tersebut



ditandatangani di lingkungan Kementerian Perhubungan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor M 20 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penerimaan dan Pengawasan Ketersediaan Fasilitas dan Fasilitas

Perhubungan dan aspek tertentu yang berkaitan dengan *accountability* pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka di lingkungan Kantor Kementerian Perhubungan Tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi kepada jajaran Direktorat Jenderal Perkeretaaptaan dan Direktorat Jenderal Perkeretaaptaan yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan Kementerian Perkeretaaptaan. Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaaptaan dan Direktorat Jenderal Perkeretaaptaan untuk memastikan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

1.1 KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor M 20 Tahun 2022 tentang Rancangan dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, tugas Direktorat Jenderal Perkeretaaptaan adalah untuk melaksanakan kebijakan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perkeretaaptaan serta melaksanakan dan melaksanakan kebijakan dan tindakan teknis di bidang Perkeretaaptaan.

Dasar pelaksanaan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaaptaan menyelenggarakan fungsi dan kegiatan

1. Menentukan kebijakan di bidang penyelenggaraan AU, IRTA, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta melaksanakan kebijakan dan tindakan teknis di bidang Perkeretaaptaan

2. Menentukan kebijakan di bidang penyelenggaraan AU, IRTA, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta melaksanakan kebijakan dan tindakan teknis di bidang Perkeretaaptaan

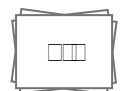
3. Menentukan kebijakan di bidang penyelenggaraan AU, IRTA, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta melaksanakan kebijakan dan tindakan teknis di bidang Perkeretaaptaan

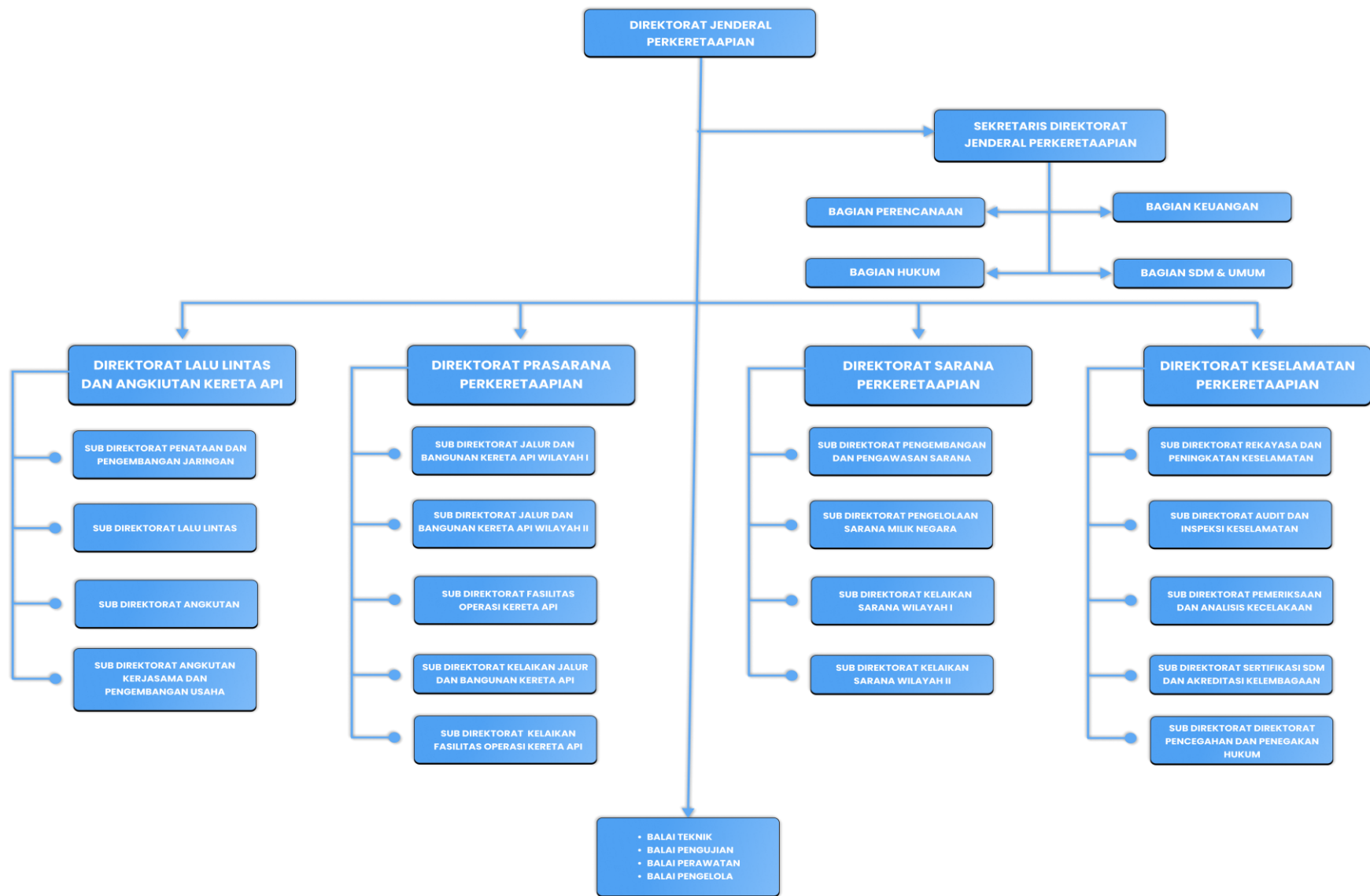
- 4. **Penyusunan** rencana, **anggaran**, **prosedur**, dan **kriteria** di bidang **penyelenggaraan** **dan** **investasi**, **angkutan**, **perantara**, dan **perantara transportasi** kereta api, **serta** **pelaporan** **ke** **atas** **perantara** kereta api
- 5. **Penyediaan** **pelatihan** **bidang** **dan** **operasi** di bidang **penyelenggaraan** **dan** **investasi**, **angkutan**, **perantara**, dan **perantara transportasi** kereta api, **serta** **pelaporan** **ke** **atas** **perantara** kereta api
- 6. **Penyediaan** **evaluasi** dan **pelaporan** di bidang **penyelenggaraan** **dan** **investasi**, **angkutan**, **perantara** dan **perantara transportasi** kereta api, **serta** **pelaporan** **ke** **atas** **perantara** kereta api
- 7. **Penyediaan** **advisi** **terhadap** **Direktorat Jenderal Perkeretaapian**
- 8. **Penyediaan** **laporan** **diberikan** **ke** **Menteri**

III STRUKTUR ORGANISASI

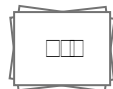
Dasar rangka **penyediaan** **tujuan** dan **fungsi**, **Direktorat Jenderal Perkeretaapian** **memiliki** **struktur organisasi** terdiri dari

- 1. **sekretariat** **Direktorat Jenderal Perkeretaapian**
- 2. **Direktorat** **dan** **Instansi** **dan** **Instansi Kereta Api**
- 3. **Direktorat** **Perantara Perkeretaapian**
- 4. **Direktorat** **Perantara Perkeretaapian**
- 5. **Direktorat** **Ke** **atas** **Perkeretaapian**
- 6. **Unit** **Kerjasama** **Unit** **Penyediaan** **Teknik** **Balai** **Setiakat** **ke** **III**, **dan** **lainnya**
- a. **Balai** **Teknik** **Perkeretaapian** **Ke** **I** **Jakarta**
- b. **Balai** **Teknik** **Perkeretaapian** **Ke** **I** **Bandung**
- c. **Balai** **Teknik** **Perkeretaapian** **Ke** **I** **Semarang**
- d. **Balai** **Teknik** **Perkeretaapian** **Ke** **I** **Surabaya**
- e. **Balai** **Teknik** **Perkeretaapian** **Ke** **I** **Medan**
- f. **Balai** **Teknik** **Perkeretaapian** **Ke** **II** **Padang**
- g. **Balai** **Teknik** **Perkeretaapian** **Ke** **II** **Palembang**
- h. **Balai** **Penyediaan** **Perkeretaapian** **Badan** **Perantara** **dan** **lainnya**
- i. **Balai** **Perantara** **Perkeretaapian**
- j. **Balai** **Penyediaan** **Kereta Api** **Rencana** **Operasi** **dan** **Badan** **Perantara** **dan** **lainnya**



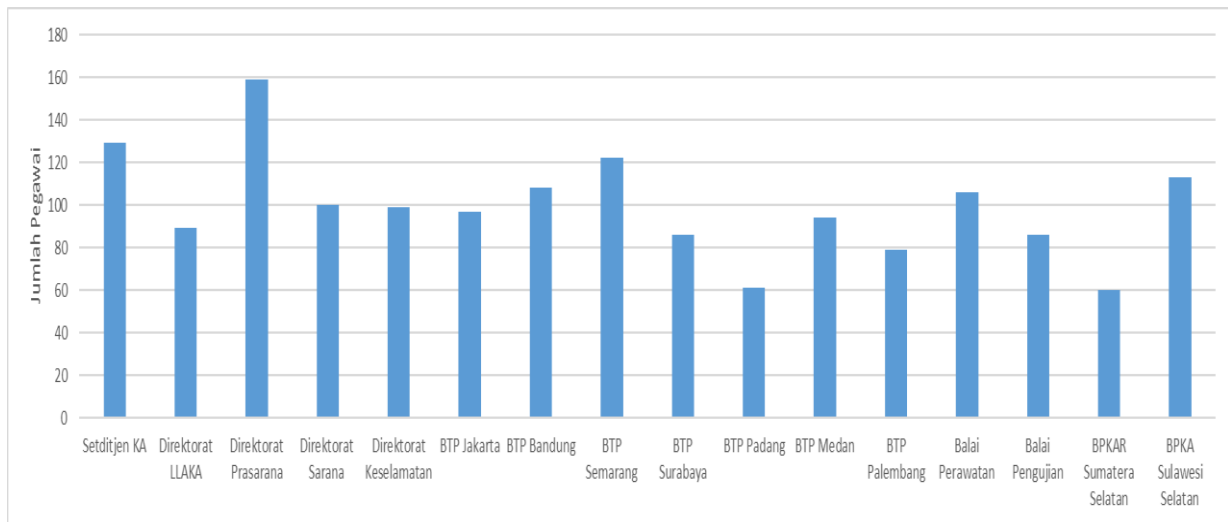


Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian



SUMBER DATA MUSI

Jumlah Data Musi pada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2021 berjumlah 1.000 data riil berupa data keabsahihan pada Kantor Pusat Sekretariat dan Direktorat Teknis dan data terlebar pada 10 Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Jumlah data keabsahihan untuk seluruh unit kerja diuraikan sebagai berikut pada tabel berikut.



Gambar 1. Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan Unit Kerja

POTENSI ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

Perkembangan teknologi, ilmu strategi dan perencanaan terkait perencanaan transportasi perkeretaapian diidentifikasi sebagai berikut.

1. REGULASI

Peraturan perundang-undangan aspek regulasi bidang perkeretaapian dengan pelaksanaan dan pelaksanaan PKK sesuai perkembangan kebutuhan perencanaan perkeretaapian aspek regulasi menjadi isu kritis pada periode Tahun 2021 seiring dengan pelaksanaan teknologi baru baik sarana prasarana maupun sarana seperti kereta cepat, MRT, dan teknologi lainnya. Selain itu, beberapa perencanaan regulasi dibutuhkan untuk perbaikan tata kelola operasi, investasi serta perencanaan, IM dan T.

2. Perencanaan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan data perencanaan regulasi bidang perkeretaapian terdapat beberapa isu kritis Daerah

K

Keputusan Kepala Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai reu'at'ur da'ar' e'ak'aa' tu'aa' da' u'uu', dia'tara'aa' kerkuata' tu'aa' da' u'uu' Ba'ai Tek'ik Perkeretaapian u'tuk e'ii'katka' e'aa'aa'aa' aa'aa' da' ke'e'a'ata' er'aa'aa' kereta a'i e'aa'ui e'be'tuka' a'tua' e'aa'aa' di Ta'u' 202', e'erta' e'uu'aa' ke Ba'ai Tek'ik Perkeretaapian u'tuk e'ee'aa' a'et Perkeretaapian ter'a'uk e'ra'ata' ra'ara'aa' Perkeretaapian i'ik e'ara' aa' aka' di'uai Ta'u' 2024'

2. Keputusan da'ar' kera'ka' e'ee'aa'aa' Perkeretaapian er'u' ditra'uu'ra'ka' dia'tara'aa' de'aa' e'be'tuka' bada' u'aa' e'ee'aa'aa' ra'ara'aa' i'ik e'ara' e'uai a'aa' da'uu' da'uu' uu' r' 2' Ta'u' 200' te'aa' Perkeretaapian da'ar' u'aa' e'uu'dka' u'ui' er'at'ur' aa' ra'ara'aa' Perkeretaapian i'ik e'ara'

i'kr'aa'aa' tu'aa' da' e'ee'aa' ke'e'ba'aa' e'erta' e'ere'aa'aa' e'ba'uu'aa' a'ar' Ke'e'eria'aa' e'ba'aa' de'aa' e'eri'ta' Daera'

P

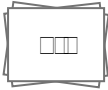
Indikasi kebutuhan i'ee'aa' u'tuk e'ee'ba'aa' Perkeretaapian aa'aa'aa'aa'aa' de'aa' Ta'u' 20' berda'arka' RI'uu' e'aa'aa' aa'aa'aa'2' u'ta' atau e'tara' de'aa' R'uu'0', tri'u' Me'aa'uu' aa'aa' kebutuhan ter'e'but, e'ee'uu'aa' i'ee'aa' aa'aa' aa'aa'at' be'ar' da' ber'aa'uu' aa'aa' B'uu'

2. ke'aa' KB' bida'aa' Perkeretaapian aa'aa' i'aa'aa' ter'bata' da' be'uu' aa'aa'aa' di'aa'aa' e'aa'uu' aa'aa' RI'uu' e'aa'uu'aa' uu'ber' e'be'bia'aa' aa'fer'aa'aa' KB', aa'aa'aa', aa'aa' B'uu' aa'aa'aa' e'bi' d'aa'aa' da'ar' e'be'ba'uu'aa' Perkeretaapian'

Di'er'uka' aa'aa'aa'aa' e'aa'aa'aa' a'et Perkeretaapian u'tuk e'ii'katka' e'aa'aa'aa' e'ara' e'ba'aa'aa' aa'fer'aa'aa'aa' e'bia'aa'aa'

SUM

Ma'aa' be'uu' ter'e'uu'aa'aa' kebutuhan kua'aa'aa' da' kua'aa'aa' DM baik e'ba'aa' reu'at'ur' aa'uu' er'at'ur' e'ee'aa'aa' Perkeretaapian' Berda'arka' RI'uu', kebutuhan DM reu'at'ur' Perkeretaapian e'ba'aa'aa'



2020 raoda DM perat r keretaaia ebaak 0440 raada Ta20 dea berbaai kete

2 perua euaaa da eikata kete DM terada tekiki terki bida keretaaia

S R D P S R

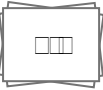
Kebutua ee ba ari kereta a da eikata kaaita raara dea tar et aa a ur kereta a a berera ada Ta2024 ea a 4 k berdaarka tar et RJM Ta2020 2024 da ada Ta20 dea a 24 k eoa ada tar et RI ee ba ari da a a kereta a di ka a erktaa u a aki edek u tuk eura ti kat ke a eta a erktaa

2 Dea re a ee ba ari kereta a a ti, aka kebutua u tuk u a ara a kereta a u a eikat Mea Ta RI, terdat kebutua ara a kereta a ada Ta20 de u a 4 k ti, 24 kereta, 44 erb, da 22 kereta erktaa

Kebutua ee daia da eoa a a keaika ara da ra ara keretaaia a a at e ti u tuk e duku e ikata ke a ata er a a kereta a

4 Kebutua u tuk ea a a er ita a ebida, dia tara a e a ui e ba u a er ita a tidak ebida flyover, underpass, e ikata a i ita ke a ata itu er ita a early warning system da e utu a er ita a ebida i a a ter ebut di er uka u a e i katka a a a on time performance da ke a a er a a kereta a a ke a ara a u ita ada ka i er ita a a ur kereta a de a a

perua e ikata k r di a a tar stakeholders ter a uk duku a i du tri keretaaia da a ke i ata e ba u a ra ara da ara a a ee ba a a a kereta a



UITS DOKUMEN KURTIPI

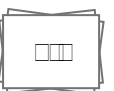
- Keteraduan te raf a tar da tra rta rat di eruka utuk e katka level of service a a tra rta rat erkeretaa ia teruta a ada i u ta u kereta a i te raf a tar da dia tara a e aku keteraduan ad a e a a a, tari da tiket erta a i ita er i da a a tar da di ka i ta u kereta a i
- Ma a e e e ra ik er a a a Kereta i i K ditera ka e uai ri i i u ti er a r
- e i kata ki er a e a a a a kuta kereta a i bara da e u a a ter a uk e e e a a a ke a eri ti da i a te at a a a

TKD IIRMSI

- Di eruka e barua tek n i erkeretaa ia aat i utuk e katka ke a da a, e e u a demand a kuta kereta a i erta e du ku ke e a a a er a a a kereta a i ter a uk e i kuti erke ba a a tek n i erkeretaa ia i ba e e rti kereta e at, *Autonomous Rail Rapid Transit*, ai a a
- e i i a a e a a a a Tek n i I r a i da K u i ka i TIK da a e a a a tra rta rat kereta a i e ba ai u a a e i kata da a ai da kua ita a a a i r a i a te at da akurat, erta a a a da a a a a bertek n i ti i aka e e berika i re i a a baik ter da a a a erkeretaa ia a a u da bertra r a i e bi e der, e i e, da ra a i i ku a a TIK u a er u di i ti a ka utuk e i kata a a a re u at r erkeretaa ia e e rti eri i a, e rti i ka da ai a a

SISTEMTIKPIR

a a a Ki er a Direkt rat Je dera erkeretaa ia Ta u 202 e e berika e e a a e e e ai e e a a ia ki er a Direkt rat Je dera erkeretaa ia de a a e e ba di ka tar get da rea i ta i ada er a i a Ki er a *performance agreement*, e e ba di ka de a a be be a ta u e be u a a erta e e ba di ka e e a a ia berda rka Re a a a trate i Ta u 2020 – 2024



keberhasilan dan kinerja tahunan unit kerja secara rata-rata kinerja yang diidentifikasi pada kinerja *performance gap* untuk perbaikan kinerja di periode berikutnya

Diingat bahwa Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Laporan Kinerja yang ditetapkan pada saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kerja Perhubungan pada tahun tersebut maka laporan keberlanjutan berikut

1. **PDUU** mendapat perhatian yang sangat tinggi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui kedudukan, tugas dan fungsi keberlanjutan pelayanan perkeretaapian, kondisi sumber daya manusia, serta uraian aspek strategi, serta secara rata-rata dapat diidentifikasi unit kerja

2. **PRC** dan **KIRJ** telah melakukan uraian yang sangat terkait Rencana Strategi Tahun 2020 – 2024 di antaranya ini dan ini, tugas, cara dan target kinerja yang akan dilaksanakan itu yang diuraikan indikator kinerja Tahun 2020 melalui cara dan indikator kinerja secara dikumpulkan secara rubrik yang ada pada kinerja keberlanjutan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020

C 3. **KUT** dan **ITS** dan **KIRJ** mendapat uraian yang etas dan dapat diidentifikasi keberlanjutan kinerja yang telah ditetapkan kinerja terhadap cara-cara yang unit kerja dilakukan secara rata-rata kinerja dengan berbanding target dan realisasi kinerja Tahun 2020, berbanding target dan realisasi kinerja beberapa tahun sebelumnya, berbanding realisasi kinerja dengan target yang akan dilaksanakan (Rencana Strategi), berbanding realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di beberapa indikator yang akan dilaksanakan oleh keberhasilan kepastian kinerja dan alternatif yang untuk meningkatkan kinerja, serta akan diidentifikasi secara sumber daya yang ada itu yang diuraikan uraian realisasi keuangan dan pelaksanaan anggaran Tahun 2020

D 4. **P** dan **UTUP** berikhtis tidak akan rekonsolidasi pada laporan kinerja sebelumnya, uraian yang ada dan rekonsolidasi yang akan dilakukan unit kerja untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya

MPIR terdiri dari Rencana Kerja Tahunan RKT, Perencanaan Kerja K
revisi terakhir, kaitan dengan untuk pelaksanaan kerja, prioritas
revisi akhir, data dukung pelaksanaan kerja dan indikator kerja
utama serta dukungan pelaksanaan kerja di tingkat kerangka



PERENCANAAN KIRJ

ROKOK STRTGIS

Di Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan ada slogan “Mewujudkan Perkeretaapian yang Handal, Berdaya Saing, Berintegrasi, Berteknologi dan Terjangkau guna mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”

Keempat dari lima kata kunci dalam kalimat di tersebut diuraikan sebagai berikut

- Handal** diartikan sebagai kualitas pelayanan transportasi kereta api yang tepat, aman, nyaman dan tepat waktu dengan kenyamanan, keamanan, dan reliabilitas yang memadai didukung sarana dan prasarana pendukung serta terampil.
- Berdaya Saing** diartikan sebagai pelaksanaan transportasi kereta api yang efisien, efektif dan dapat berkompetisi dengan moda transportasi lainnya dengan cepat dan ekonomis serta transportasi yang aman, efektif dan efisien, yang didukung oleh SDM yang berkualitas, mandiri, dan produktif.
- Berintegrasi** diartikan sebagai terdapatnya layanan dan layanan transportasi kereta api yang dapat baran yang terintegrasi dengan moda lain dan dapat satu sistem interaksi dan dapat terintegrasi dengan tata ruang wilayah yang efektif dan interaksi yang baik dan diarahkan.
- Berteknologi** diartikan sebagai penerapan teknologi yang sesuai perkembangan dan kebutuhan dengan pelaksanaan perkeretaapian.
- Terjangkau** diartikan sebagai terdapatnya layanan kereta api yang terjangkau oleh semua lapisan ekonomi dan semua masyarakat yang berkeadilan di wilayah KRI yang dibutuhkan keadiraan layanan kereta api.

Untuk mendukung misi tersebut di atas, Direktorat Jenderal Perkeretaapian akan melaksanakan kebijakan berikut:

- 1. Meningkatkan konektivitas antar perkeretaapian antar terdistribusi dan berkeadilan
- 2. Meningkatkan pelayanan transportasi perkeretaapian yang efektif
- 3. Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang efisien dan efektif

Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian di atas merupakan rangkaian berbagai upaya dan kebijakan yang akan ditetapkan secara terencana tidak terbatas pada peningkatan konektivitas, pelayanan dan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian, namun juga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan perkeretaapian nasional, khususnya, Kabupaten Kota dan Kota Baru dan Kawasan ditetapkannya untuk mempercepat indikator pelayanan pelayanan yang di Direktorat Jenderal Perkeretaapian beserta seluruh kementerian dan departemen. Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, tujuan dan cara di dalam kebijakan akan ada Tabel berikut:

Tabel Tujuan dan Sasaran Tahun 2020-2024

Misi	Tujuan	Sasaran Program
Meningkatkan konektivitas antar perkeretaapian antar terdistribusi dan berkeadilan	Peningkatan konektivitas antar perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi	Konektivitas antar perkeretaapian nasional dan diwujudkan dalam pelayanan infrastruktur
Meningkatkan pelayanan transportasi perkeretaapian yang efektif	Peningkatan pelayanan transportasi perkeretaapian yang cepat	Kelayanan transportasi perkeretaapian yang didukung oleh Subsidy Dana Masyarakat, sarana dan prasarana yang memadai
Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang efisien dan efektif	Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang tinggi	Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terencana dan sesuai kebutuhan

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024

Cara-cara tersebut ke depan diuraikan dalam Indikator Kinerja yang akan ditetapkan sebagai target kebijakan terkait kinerja periode 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel Indikator dan Target Kinerja Program IKP Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.1.1 Konektivitas perkeretaapian di kawasan pedesaan dan perbatasan struktural	IK1 Rasio Konektivitas di kawasan	Rasio	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
2.1 Kelembagaan perkeretaapian desentralisasi dan desentralisasi kelembagaan	IK2 Rasio kelembagaan perkeretaapian dan rate of accident	Kelembagaan perkeretaapian dan rate of accident	0,24	0,24	0,20	0,20	0,22
3.1 Kinerja perkeretaapian dan kelembagaan perkeretaapian	IK3 Perentase On Time Performance Tren Kereta api	%	94	95	95	90	92
	IK4 Perentase target angkutan kereta api	%	90	92	94	95	90
	IK5 Perentase Target angkutan Barang Kereta Api	%	95	92	94	95	90
	IK6 Perentase kelembagaan dan kelembagaan TII dan II	%	95	95	95	90	94

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024

PERJAJIAN KIRJ

Perencanaan Kinerja Tahun 2020 merupakan peta jalan terhadap target kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaaiaan Tahun 2020 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (KIU) yang ada untuk berbagai aspek terdapat serta pelaksanaan Rencana Strategi Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaaiaan Tahun 2020-2024.

Pada Tahun 2020, telah dilaksanakan review terhadap Indikator Kinerja Utama (KIU) yang tidak dapat rekonsiliasi Kementerian RB dengan peta jalan yang ada. Cara-cara Strategi berdasarkan Rencana Strategi Tahun 2020 – 2024 Review terhadap indikator kinerja tersebut telah ditetapkannya melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaaiaan dan Ker K/DJK/0 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kelembagaan Dit Ker di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaaiaan. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaaiaan tersebut telah ditandatangani dan perencanaan Kinerja Tahun 2020 di dalam Direktorat Jenderal Perkeretaaiaan sebagai cara-cara yang ada dan indikator kinerja yang ada di dalam pelaksanaan struktur Kolektif.

Menyusun pada saat ini, Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Perkeretaaiaan diuraikan sebagai berikut: a. a. a. a. indikator terhadap kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound) sebagai berikut:

Tabel-1 Indikator Kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

INDIKATOR KIRJ	SIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Rasio Konektivitas antar wilayah	Konektivitas antar wilayah transportasi strategis nasional dan layanan KA s.d Tahun 2024	Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung Jaringan dan Layanan KA s.d Tahun Berjalan Rasio Konektivitas antar wilayah = $\frac{\text{Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung Jaringan dan Layanan KA s.d Tahun Berjalan}}{\text{Rencana Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/Kawasan Strategis Nasional yang Terhubung dengan Jaringan dan Layanan KA sesuai RIPNAS 2030}}$	TARGET ditetapkakan secara bertahap, target Rencana dan pelaksanaan pada kegiatan pendidikan aministrasi terdida	Kelembagaan Indikator Kinerja Utama pada Rencana Kerja, Kerubuan, Kelembagaan RI 2020-2024 Fungsi teraduk Core Business Ditjen Perkeretaapian	TARGET ditetapkakan secara bertahap pada Tahun 2024
Rasio Kelembagaan Kerubuan transportasi Kereta rate of accident	Merupakan cara untuk menetapkan transportasi perkeretaapian	Jumlah kelembagaan kerubuan transportasi, tabrakan Kerubuan dan kecelakaan pada tahun berjalan dibagi dengan total (Kerubuan Traveled) pada tahun berjalan dan satu juta KM Tempuh Rasio Kejadian Kecelakaan = $\frac{\text{Jumlah Kejadian Kecelakaan KA pada tahun berjalan}}{\text{KM tempuh pada tahun berjalan}} \times 1.000.000 \text{ Km tempuh}$ Referensi <ul style="list-style-type: none"> Association of American railroads (https://www.aar.org/charts); European Union Agency For Railways; Indian Railway Catering and Tourism Corporation (https://indianrlynews.wordpress.com/tag/train-accidents-per-million-kilometers/) 	TARGET ditetapkakan secara bertahap, target Rencana dan pelaksanaan pada kegiatan pendidikan aministrasi terdida	Kelembagaan Indikator Kinerja Utama pada Rencana Kerja, Kerubuan, Kelembagaan Rencana Core Business Ditjen Perkeretaapian	TARGET ditetapkakan secara bertahap pada Tahun 2024

INDIKATOR KIRJ	INDIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
<p>Perentase On Time Performance TPT Transportasi Kereta Api</p>	<p>Merupakan rata-rata waktu rata-rata ketepatan waktu keberangkatan KA untuk angkutan penumpang dan barang</p>	<p>Jumlah kedatangan dan keberangkatan KA penumpang dan barang tepat waktu pada tahun berjalan</p> <p>Jumlah kedatangan dan keberangkatan KA penumpang dan barang</p> $\text{Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang tepat waktu pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang pada tahun berjalan}} \times 100\%$	<p>TARGET ditetapkakan secara berkala secara berkala, target Rencana dan pelaksanaannya terdapat dalam dokumen Renstra</p>	<p>Merupakan indikator kinerja yang berkaitan dengan pelayanan penumpang dan barang</p>	<p>TARGET ditetapkakan secara berkala pada tahun 2024</p>
<p>Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api</p>	<p>Jumlah realisasi angkutan penumpang kereta api pada tahun 2020-2024 sesuai dengan Rencana</p>	<p>Jumlah realisasi angkutan penumpang kereta api pada tahun 2020-2024 sesuai dengan Rencana</p> $\text{Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Penumpang KA pada tahun 2020 s.d tahun berjalan}}{\text{Jumlah Target Angkutan Penumpang KA Tahun 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 100\%$	<p>TARGET ditetapkakan secara berkala, target Rencana dan pelaksanaannya terdapat dalam dokumen Renstra</p>	<p>Merupakan indikator kinerja yang berkaitan dengan pelayanan penumpang dan barang</p>	<p>TARGET ditetapkakan secara berkala pada tahun 2024</p>

INDIKTOR KIRJ	SIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
<p>Indikator Kinerja Utama Barak Kereta Api</p>	<p>Jumlah angkutan barang per kapita rata-rata per kilometer dan per kilometer dan dioperasikan dengan kereta api dan peralatan kereta api dan peralatan kereta api dan peralatan kereta api</p>	<p>Jumlah realisasi angkutan barang kereta api pada tahun 2020 dan tahun berikutnya dibandingkan dengan jumlah target angkutan barang kereta api tahun 2020-2024 sesuai dengan Rencana Strategis</p> $\text{Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Barang KA pada tahun 2020 s.d tahun berjalan}}{\text{Jumlah Target Angkutan Barang KA Tahun 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 100\%$		<p>ditetapkan pada Rencana 2020-2024 dan RI 2020</p>	
<p>Percepatan pelaksanaan Jalur Kereta Api dengan Dampak TI</p>	<p>Merupakan rasio untuk mengukur tingkat kualitas layanan kereta api yang berdampak terhadap tingkat pelayanan dan kenyamanan kereta api</p>	<p>Persentase jalur kereta api yang telah diukur dengan hasil TQI kategori I dan II dibandingkan dengan total panjang jalur kereta api</p> $\text{Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II} = \frac{\text{Panjang Jalur KA yang Telah Diukur dengan Hasil TQI Kategori I dan II pada Tahun Berjalan}}{\text{Total Panjang Jalur KA pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$ <p>Referensi: Mendagri dan Kementerian Perhubungan</p>	<p>Target ditetapkan oleh pemerintah pusat, target berbasis target Rencana dan pelaksanaan pada kegiatan pendidikan tertentu yang tersedia</p>	<p>berdasarkan indikator dan target dan RKM dan 2020-2024</p>	<p>Target ditetapkan secara bertahap berturut-turut Tahun 2024</p>

INDIKTOR KIRJ	SIS SMART																															
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)			ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)																									
<p>Indek Keuaa Maarakat IKM terada eaa subik Bidaa erkeretaa</p>	<p>Meruaka aatu ara eter diuakauuk eukur kuaia eakaa tu da uuaa eaa subik a di diaka ee Direktat Je dera erkeretaa ebaai reuata erkeretaa</p>	<p>Rata rata aia Indek Keuaa Maarakat IKM terada eaa subik di e e araka e it e e e ara eaa subik di ikuua Dit e erkeretaa e uai er eaa 4 Taau 20 te ta ed a e uuaa urai Keuaa Maarakat</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1.00 – 2.5996</td> <td>25.00 – 64.99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2.60 – 3.064</td> <td>65.00 – 76.60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3.0644 – 3.532</td> <td>76.61 – 88.30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3.5324 – 4.00</td> <td>88.31 – 100.00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017</p>			Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik	2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik	3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik	4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik	<p>Tar et ditetaka e eratika aia ta u ebeu da eaa u ada ke iata e dukuu a a ka teredia</p>	<p>e ara de aa Idikatr Kiera ta a ada e e Ke e teria erubu a, e ara de aa Tu a da Fuua eerta Core Bussiness Dit e erkeretaa</p>	<p>Tar et ditetaka e ara berta a eerta u d Taau 2024</p>
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																												
1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik																												
2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik																												
3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik																												
4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik																												

SASARAN PROGRAM DIKOTORD TORGOT KIRAJ

Pada Tahun 2020, Direktorat Jenderal Perkeretaapian melakukan dua kali revisi perencanaan Kinerja dikarebakan perubahan kebijakan strategi dan kebijakan operasional serta perubahan berdaa aara daa dat ee ee aru ee caaia tua, terasuk perubahan i i ca di i kuca Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdaarka perencanaan Kinerja Tahun 2020 reji terakhir, Direktorat Jenderal Perkeretaapian ee i iki a ara rora da i idikator Kinerja rora daa di caai eaui rora i ra struktur Kolektita

Target kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020 diuraikan per periode triuian ebaai berikut

Tabel- Target Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triuian Tahun

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triuian			
				T I	T II	T III	T IV
Kolektita Jari ca Perkeretaapian da ca a a Di u u d k a D a a e e e d i a a I r a t r u k t u r	IK Ra K o l e k t i t a o t a r i a c a	Ra	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
2 Ke e a a t a T r a t a r t a i Perkeretaapian De ca a u b e r D a c a M a u d i a, c a r a c a D a c a r a c a c a a d a	IK2 Ra Ke adia Ke e a k a a T r a t a r t a i K e r e t a o o i R a t e o f A c c i d e n t	Ke adia Ke e a k a a o o t a K T e u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K i e r a e a c a a T r a t a r t a i Perkeretaapian a a Ter e r a c a D a e u a i K e b u t u c a a	IK e e e t a e a a i a O n T i m e P e r f o r m a n c e T T r a t a r t a i K e r e t a o o i		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
	IK4 e e e u c a a T a r e t o o k u t a e e u c a a K e r e t a o o i		00,00	00	44	40	00,00
	IK e e e u c a a T a r e t o o k u t a B a r a a K e r e t a o o i		00	40	00	00	00

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan			
				T I	T II	T III	T IV
	IK Percepatan Pelayanan Jasa Korupsi Desa		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	IK Indeks Kelembagaan Masyarakat terhadap Publik Bina Perkeretaaan	isi	4	4	4	4	4

Ta 2023-2024 Perencanaan Revisi Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Capaian			Target Renstra 2023	Target PK			Keterangan
			2020	2021	2022		PK Awal	Revisi I	Revisi II	
SP1 Konektivitas Jaringan Perkeretaapian Nasional yang Diwujudkan dalam Penyediaan Infrastruktur	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,330	0,416	0,436	0,350	0,450	0,450	0,450	<ul style="list-style-type: none"> Baseline 2022: Jumlah PKN/PKW sebanyak 65 lokasi (PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional 51 lokasi, simpul bandara 6 lokasi, simpul pelabuhan 8 lokasi). Target penambahan Tahun 2023 yaitu akses Pelabuhan Tanjung Mas dan PKW Sawahlunto.
SP2 Keselamatan Transportasi Perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang Handal	IK2 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>rate of accident</i>)	Kejadian Kecelakaan/ 1 Juta Km Tempuh	0,19	0,23	0,18	0,23	0,18	0,18	0,15	<ul style="list-style-type: none"> Indikasi jumlah kejadian kecelakaan sebanyak 12 kejadian dengan KM tempuh sebesar 82.242.606 km (mempertimbangkan capaian kinerja periode sebelumnya).
SP3 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian yang Terpercaya dan Sesuai Kebutuhan	IK3 Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	%	78,6	91,69	90,57	80,00	91,00	91,00	91,00	<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata kedatangan dan keberangkatan kereta api penumpang dan barang tepat waktu indikasi sebanyak 621.605 KA dari keseluruhan kedatangan dan keberangkatan kereta api penumpang dan barang sebanyak 686.293 KA.
SP3 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian yang Terpercaya dan Sesuai Kebutuhan	IK4 Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	%	10,14	17,86	32,33	73,00	44,00	44,00	55,68	<ul style="list-style-type: none"> Target angkutan penumpang kereta api Tahun 2023 semula 312.871.743 penumpang naik menjadi 425.107.168 penumpang (mempertimbangkan capaian kinerja periode sebelumnya).
	IK5 Pemenuhan Target Angkutan Angkutan Barang Kereta Api	%	12,45	25,80	40,58	68,00	56,00	56,00	56,00	<ul style="list-style-type: none"> Target angkutan barang kereta api Tahun 2023 sebanyak 62.493.953 ton (meningkat 5% dari realisasi pada Tahun 2022).
	IK6 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI	%	82,83	90,70	91,37	90	91,37	92,42	92,87	<ul style="list-style-type: none"> Mengacu hasil pengukuran TQI Periode II 2023, dimana panjang jalur KA yang beroperasi sesuai dengan TQI I dan II (Kecepatan 80 s.d 120 Km/jam) sepanjang 5.481,43 Km dari total panjang jalur KA yang diukur sepanjang 5.902,03 km.

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Capaian			Target Renstra 2023	Target PK			Keterangan
			2020	2021	2022		PK Awal	Revisi I	Revisi II	
	IK7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	-	-	-	-	3,45	3,45	3,45	<ul style="list-style-type: none"> Merupakan nilai rata-rata capaian dari survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat LLAKA, Direktorat Prasarana, Direktorat Sarana, Direktorat Keselamatan, dan unit kerja BLU (BPKAR Sumatera Selatan dan Balai Pengujian Perkeretaapian).

KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN

Untuk anggaran Direktorat Jenderal Kereta Api berdasar Perjanjian Kinerja Tahun 2021 terdapat terdapat Rincian 44.220.000,00 sebagai berikut

Tabel Rincian Anggaran Per Kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Kegiatan	Rincian Anggaran (Rp)		
		PK Awal	PK Revisi I	PK Revisi II
01	Program Infrastruktur Konektivitas	7.084.140.667.000		
	a) Infrastruktur Konektivitas Kereta Api	7.084.140.667.000	7.084.140.667.000	7.084.140.667.000
	b) Kelembagaan dan Kelembagaan Kereta Api	4.200.000.000.000	4.200.000.000.000	4.200.000.000.000
	c) Kelembagaan dan Kelembagaan Kereta Api	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000
	d) Kelembagaan dan Kelembagaan Kereta Api	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000
02	Program Dukungan Manajemen	521.755.666.000		524.706.571.000
	a) Kelembagaan dan Kelembagaan Kereta Api	4.000.000.000.000	4.000.000.000.000	4.000.000.000.000
	b) Kelembagaan dan Kelembagaan Kereta Api	4.000.000.000.000	4.000.000.000.000	4.000.000.000.000
	c) Kelembagaan dan Kelembagaan Kereta Api	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000
	d) Kelembagaan dan Kelembagaan Kereta Api	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000
	Jumlah	7.605.896.333.000	7.605.896.333.000	7.608.847.638.000

Taun 2023 Alokasi Anggaran Per Indikator Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target PK 2023	Alokasi Anggaran (Rp.)
SP1 Konektivitas Jaringan Perkeretaapian Nasional yang Diwujudkan dalam Penyediaan Infrastruktur	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,45	1.937.414.278.000
SP2 Keselamatan Transportasi Perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang Handal	IK2 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>rate of accident</i>)	Kejadian kecelakaan/ 1 juta km tempuh	0,15	946.539.320.000
SP3 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian yang Terpercaya dan Sesuai Kebutuhan	IK3 Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	%	91	4.200.187.069.000
	IK4 Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	%	55,68	
	IK5 Pemenuhan Target Angkutan Angkutan Barang Kereta Api	%	56	
	IK6 Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI	%	92,87	
	IK7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,45	
Jumlah				7.084.140.667.000

Keterangan: Jumlah Alokasi Anggaran untuk Program Infrastruktur Konektivitas (tidak termasuk Program Dukungan Manajemen)

KU T I T S K I R J

T P P GUKUR K I R J

Seukuran pencapaian kinerja pada rencana Kinerja perusahaan merupakan evaluasi terhadap Materi Perencanaan yang di M Ta 2020 serta pencapaian kinerja di tingkat perusahaan. Berikut ini beberapa Formula perhitungan pencapaian kinerja sebagai berikut :

Kondisi pertama, apabila nilai yang terrealisasi lebih baik pencapaian kinerja, maka perusahaan akan mendapatkan nilai

$$\text{Capaian Kinerja} = \left[\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right] \times 100\%$$

Kondisi kedua, apabila nilai yang terrealisasi lebih rendah pencapaian kinerja, maka perusahaan akan mendapatkan nilai

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

Nilai pencapaian kinerja ini akan ada 0

Tujuan yang dilakukan dalam pengukuran pencapaian kinerja yaitu

Membandingkan target dan realisasi kinerja berdasarkan Rencanan Kinerja Tahun 2020 terhadap pencapaian aktual penyebab keberhasilan atau kegagalan kinerja, benchmark kinerja serta alternatif yang akan dilakukan untuk mengatasi kinerja di masa mendatang

Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2020 dengan target dan beberapa tahun terakhir

Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2020 dengan target jika ada pencapaian yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis unit kerja

Mengukur pencapaian kinerja perusahaan yang berda

Meuraikaan pencapaian keberagaman layanan

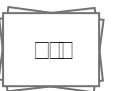
Meuraikaan realisasi anggaran unit kerja

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian dan KDDJK Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kelembagaan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, tata cara pengukuran pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Pengukuran Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Perkeretaapian

No	Indikator Kinerja Utama	Pengukuran
1	IK1 Rasio Konektivitas antar wilayah	<p>Jumlah wilayah yang memiliki transportasi strategis pada tahun berjalan dibandingkan dengan wilayah yang memiliki transportasi strategis pada tahun berjalan sesuai Rencana Induk Perkeretaapian dan RI 2030</p> $\text{Rasio Konektivitas antar wilayah} = \frac{\text{Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung Jaringan dan Layanan KA s.d Tahun Berjalan}}{\text{Rencana Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/Kawasan Strategis Nasional yang Terhubung dengan Jaringan dan Layanan KA sesuai RIPNAS 2030}}$
2	IK2 Rasio Kelembagaan Kelembagaan Transportasi Kereta (rate of accident)	<p>Jumlah kejadian kecelakaan KA (tabrakan, terdempak, tabrakan dengan KA dan lain-lain) terbakar pada tahun berjalan dibandingkan dengan total (traveled) pada tahun berjalan data Keta</p> $\text{Rasio Kejadian Kecelakaan} = \frac{\text{Jumlah Kejadian Kecelakaan KA pada tahun berjalan}}{\text{KM tempuh pada tahun berjalan}} \times 1.000.000 \text{ Km tempuh}$
3	IK3 Perencanaan time Performance Transportasi Kereta	<p>Jumlah kedatangan dan keberangkatan angkutan KA dan barang tepat waktu pada tahun berjalan dibandingkan dengan keseluruhan kedatangan dan keberangkatan angkutan KA dan barang</p> $\text{Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang tepat waktu pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang pada tahun berjalan}} \times 100\%$

No	Indikator Kinerja Program	Pengukuran																									
4	IK4 Realisasi Target angkutan penumpang Kereta Api	<p>Jumlah realisasi angkutan penumpang kereta api pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target angkutan penumpang kereta api tahun 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis</p> $\text{Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Penumpang KA pada tahun 2020 s.d tahun berjalan}}{\text{Jumlah Target Angkutan Penumpang KA Tahun 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 100\%$																									
	IK5 Realisasi Target angkutan barang Kereta Api	<p>Jumlah realisasi angkutan barang kereta api pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target angkutan barang kereta api tahun 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis</p> $\text{Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Barang KA pada tahun 2020 s.d tahun berjalan}}{\text{Jumlah Target Angkutan Barang KA Tahun 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 100\%$																									
	IK6 Percentaje Operasional Jalur Kereta Api sesuai Rencana TII dan II	<p>Persentase jalur kereta api yang telah diukur dengan hasil TQI kategori I dan II dibandingkan dengan total panjang jalur Kereta Api pada tahun berjalan</p> $\text{Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II} = \frac{\text{Panjang Jalur KA yang Telah Diukur dengan Hasil TQI Kategori I dan II pada Tahun Berjalan}}{\text{Total Panjang Jalur KA pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$																									
	Indeks Keuasan Masyarakat IKM terhadap pelayanan publik Bidadia Kereta Api	<p>Rata-rata penilaian Indeks Keuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diukur berdasarkan metode pengisian kuisioner Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai perencanaan pada 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan survei Keuasan Masyarakat</p> <table border="1" data-bbox="582 1568 1316 1758"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1.00 – 2.5996</td> <td>25.00 – 64.99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2.60 – 3.064</td> <td>65.00 – 76.60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3.0644 – 3.532</td> <td>76.61 – 88.30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3.5324 – 4.00</td> <td>88.31 – 100.00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017</p>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik	2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik	3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik	4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																							
1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik																							
2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik																							
3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik																							
4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik																							



000 P00GUKUR00 C0P0I00 KI00RJ0

Direkt0rat Je0dera00erkeretaa0ia0 0e0ak0a0aka0 tar0et 0e0e0e000araa0 0erkeretaa0ia0 berda0arka0 0ti0a00a0ara0 0r00ra0 da0 0tu0000dikatr Ki0er0a 0r00ra0 0a00 di0a0ai 0e0a0ui 0r00ra0 I0ra0struktur K00kti0ita00 Berikut uraia0 0e00ukura0 0a0aia0 ki0er0a Ta0u0 20200

0000 K000KTI0IT0S J0RI0G00 P0RK0R0T00PI00 00SI0000 000G DI0 UJUDK00 D000M P0000DI000 I0R0STRUKTUR

R0SI0 K000KTI0IT0S 00T0R 0 I00000

Baseline ra00 k00kti0ita0 0ebe0ar 0,400 de00a0 0u0 0a0 0K000K0 0i0 0u0 Tra0000rta00Ka0a0a0 0trate00 0a000a0 0eba00ak 00 0ka00 0K000K0 0Ka0a0a0 0trate00 0a000a0000 0ka00, 00 0u0ba0dara 0 0ka00, 00 0u0e00e0abu0a0 00ka00diba0di00ka0 tar0et Re00a0a I0duk 0erkeretaa0ia0 0a000a0 0eba00ak 040 0ka00 0K000K0 0Ka0a0a0 0trate00 0a000a0004 0ka00, 00 0u0ba0dara 00 0ka00, 00 0u0e00e0abu0a0 20 0ka000

Berda0arka0 0er000ia0 Ki0er0a Ta0u0 20200 0e000 terak0ir0, diteta0ka0 tar0et ra00 k00kti0ita0 a0tar 0i0a0a0 tra0000rta00 0erkeretaa0ia0 0ebe0ar 0,400 de00a0 0u0 0a0 tar0et 0K000K0 0i0 0u0 Tra0000rta00Ka0a0a0 0trate00 0a000a00a00 0er0ubu00 de00a0 0ari00a0 kereta a00 0eba00ak 00 0ka000 Terda0at 2 re00a0a 0e0a0 ba0a0 k00kti0ita0 0ari00a0 kereta a00 0ada Ta0u0 20200 0aitu ak0e0 0e0u0 0K0 0a0a00ut0 0erta 00 0u0e00e0abu0a0 Ta0u000 Ma00

Me00a0u 0ada tar0et ter0ebut, diuraika0 ba00a ak0e0 000r kereta a00 0e0u0 0e0abu0a0 Ta0u000 Ma0te0a0 0e0e0ai 0000 0erta te0a0 di0ak0a0aka0 0e00u0ia0 ke0aika0 0ra0ara0a 0erkeretaa0ia0 u0tuk 0e0000era0ia000a00eda00ka0 u0tuk ak0e0 000r kereta a00 di 0K0 0a0a00ut0, ke0jata0 0e0i00kata0reakti0a00 000r kereta a00 0uda0 0e0e0ai 0a0 u00 a000 terke0da0a 0e0ak0a0aa0 0e00u0ia0 ke0aika0 0ra0ara0a di0 a0a d0ku0 e0teki00a00 dibutu0ka0 u0tuk 0er0arata0 0e00u0ia0 be0u0 di0er0e0 dari 0T0 K0I 0eba0ai 0i0ak 0a00 0e0akuka0 0e0i00kata0reakti0a00 ter0ebut0

0e0ai0 itu, 0u0a di0akuka0 0e00utak0ira0 data 0K000K0 0i0 0u0 Tra0000rta00Ka0a0a0 0trate00 0a000a00a00 0er0ubu00 de00a0 0ari00a0

kereta api di mana ditegaskan bahwa infrastruktur transportasi yang belum terdata dan telah dikembangkan dengan jalur kereta api yaitu sebagai Taqum Perak yang telah beroperasi untuk melayani angkutan kereta api barang

Rincian target dan realisasi yang terdapat dalam Taqum 2020 diuraikan sebagai berikut

Tabel- Target dan Realisasi Lokasi PK/PK Si pu Transportasi Khasan Strategis Nasional yang Terdukung Jaringan Jalur Kereta Api pada Tahun

No	PK/PK Si pu Transportasi Khasan Strategis Nasional	Tahun	
		Target PK	Realisasi
Pusat Kegiatan Nasional Pusat Kegiatan Istimewa Khasan Strategis Nasional			
1	Mebidang	√	√
2	Perkataan Padang – Lubuk – Paria	√	√
3	Padang	√	√
4	Badang	√	√
5	Padang	√	√
6	Padang	√	√
7	Jabodetabek	√	√
8	Padang	√	√
9	Bandung Raya	√	√
10	Kediri	√	√
11	Padang	√	√
12	Jakarta	√	√
13	Jakarta	√	√
14	Malang	√	√
15	Bandung Raya	√	√
16	Rantau Rantau	√	√
17	Padang	√	√
18	Tebing Tinggi	√	√
19	Kidul	√	√
20	Paria	√	√
21	Lubuk	√	√
22	Muaras	√	√
23	Baturaja	√	√
24	Padang	√	√
25	Padang	√	√
26	Kabupaten	√	√



No	PK/PK (Si pu Transportasi) Kawasan Strategis (asi na)	Tahun	
		Target PK	Realisasi
2	Ra ka bitu	√	√
2	ika ek	√	√
2	ukabu i	√	√
0	Idra au	√	√
	Ta k a a a	√	√
2	ika ek ik	√	√
	Te a	√	√
4	eka	√	√
	e u	√	√
	ur kert	√	√
	Kebu e	√	√
	Ki ate	√	√
	e a	√	√
40	B e r	√	√
4	Madiu	√	√
42	Je ber	√	√
4	Ba u a i	√	√
44	rb i	√	√
4	B i tar	√	√
4	a urua	√	√
4	Tu a u	√	√
4	Kediri	√	√
4	Barru	√	√
0	a ka e e	√	√
	Mar Ma i a ata	√	√
2	a a u t	√	
Si pu Transportasi andara			
	Ba dar andara Kua a a u	√	√
2	Ba dar andara I ter a a a Mi a kabau	√	√
	Ba dar andara e kar a ta	√	√
4	Ba dar andara u fa Ma ud Badaruddi II	√	√
	Ba dar andara di e ar	√	√
	Ba dar andara	√	√
Si pu Transportasi Pe a u an			
	e abu a T r i k	√	√



No	PK (Kategori Sasaran Strategis)	Tahun	
		Target PK	Realisasi
2	Kelembutan Kualitas Transportasi	√	√
	Kelembutan Merak	√	√
4	Kelembutan Kualitas Kertaniti	√	√
	Kelembutan Teuk Barur	√	√
	Kelembutan Irian	√	√
	Kelembutan Tarakan	√	√
	Kelembutan Sarangkani	√	√
	Kelembutan Tapanuli	√	√
10	Kelembutan Tapanuli Merak	-	√
Total			

Berdasarkan Tabel di atas, diperoleh realisasi KKK (Kategori Sasaran Strategis) transportasi KKK kategori sasaran terdistribusi dengan layanan kereta api sebanyak 10 kali KKK (Kategori Sasaran Strategis) sasaran terdistribusi, 10 sub-bidang 1 kali, 10 sub-bidang 10 kali dan dibagikan target Realisasi Indikator Kereta Api sasaran sebanyak 4 kali KKK (Kategori Sasaran Strategis) sasaran 04 kali, 10 sub-bidang 1 kali, 10 sub-bidang 2 kali. Untuk itu, diperoleh rata-rata koefisien aktual di bidang pada Tahun 2021 sebesar 0,40.

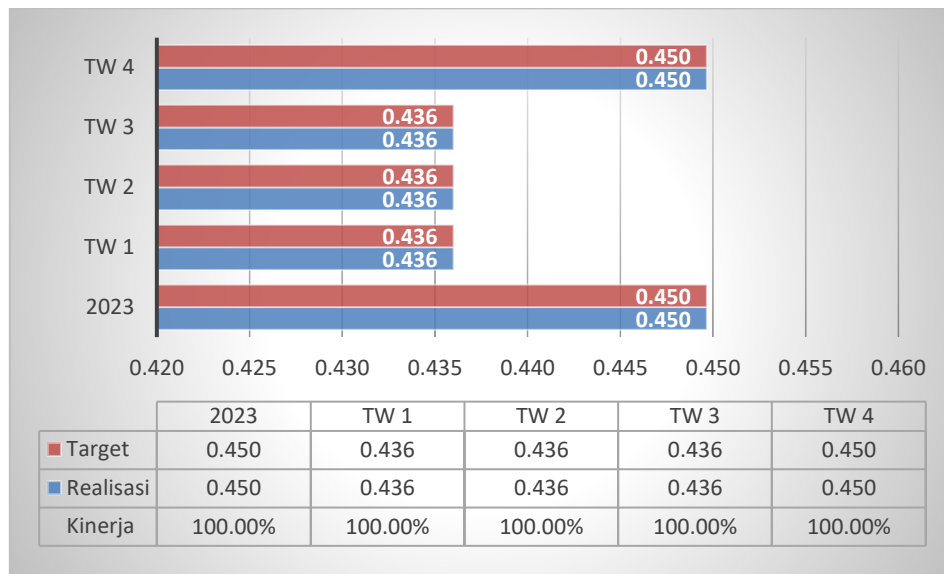
Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi rata-rata koefisien aktual di bidang pada Tahun 2021 sebesar 0,40, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan Tahun 2021 sebesar 0,40. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja triwulan, keefektifan capaian kinerja dapat terpenuhi sesuai target triwulan (kinerja 100%) Realisasi kuantitatif triwulan dapat dilihat pada Tabel data sebagai berikut.



Tabel 1.1. Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah Per Triwulan Tahun 2020

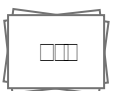
Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	100	100	100	100	100



Gambar 1.1. Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah Per Triwulan Tahun 2020

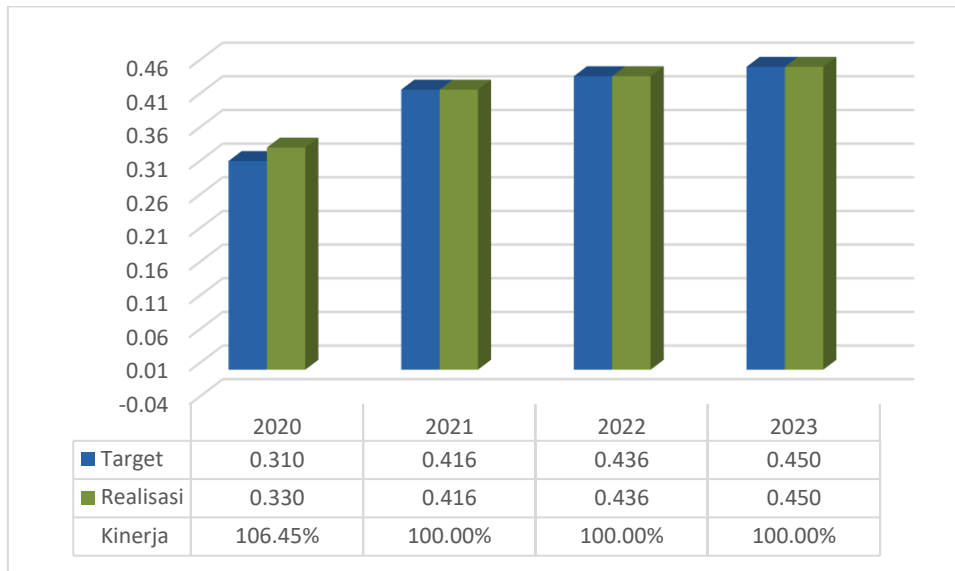
1.1. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun TerakHIR

Berdasarkan realisasi kinerja pada Tahun 2020 dan tahun terakhir yaitu periode 2020 dan 2020, diperoleh bahwa rasio Rasio Konektivitas Antar Wilayah setiap tahunnya selalu mencapai dari rasio 0,40 pada Tahun 2020 yang berarti rasio 0,40 pada Tahun 2020 atau mencapai keaikaan dengan pelaksanaan sebanyak 20 kali KKKM ini untuk Transportasi Kargo dan transportasi air yang terdapat di wilayah kereta api dan pelabuhan pada target RI Tahun 2020 pada periode tersebut yang diperoleh bahwa seluruh target kinerja tahunannya dapat tercapai kinerja 100 atau lebih. Perbandingan target dan realisasi periode 2020 dan 2020 dapat dilihat pada Tabel data di bawah berikut.



Tabel 1.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2023 untuk Rasio Konektivitas Antar Wilayah

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,310	0,416	0,436	0,450	0,330	0,416	0,436	0,450



Gambar 1.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2023 untuk Rasio Konektivitas Antar Wilayah

1.1.1 Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

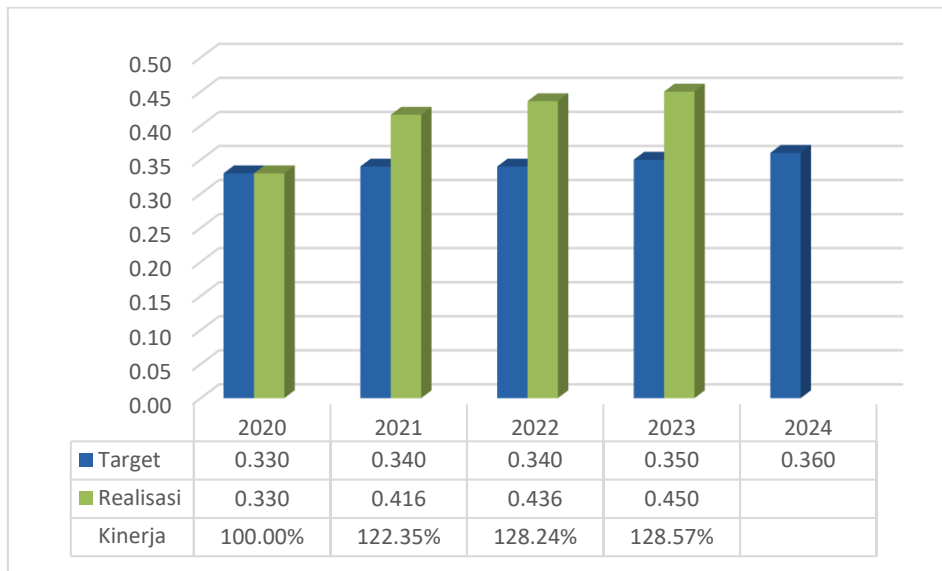
Realisasi Rasio Konektivitas Antar Wilayah Tahun 2023 sebesar 0,45, melampaui target Tahun 2023 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebesar 0,45. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja sebesar 100% atau Melampaui target pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024, bahwa Rasio Konektivitas Antar Wilayah setiap tahun dapat tercapai (kinerja 100% atau lebih) dan melebihi keaikaan setiap tahunnya. Demikian juga untuk target Rencana Strategis kumulatif Tahun 2024 telah dapat dipenuhi target, yang juga telah diwujudkan secara bertahap di Tahun 2024 terutama terdapat peningkatan yang ditargetkan pada Tahun 2023 yang belum tercapai oleh Kabupaten.



Tabel 10-1 Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Kelektifitas Antar moda	Rasio	0,33	0,4	0,4	0,33	0,33	0,330	0,416	0,436	0,450	0,360

*) Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan Target Renstra Tahun 2024



Gambar 10-1 Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024

10.1 Perbandingan Kinerja di Organisasi Internasional

Perbandingan kinerja dilakukan dengan cara membandingkan capaian kinerja Rasio Kelektifitas Antar moda perkeretaaan dengan Rasio Kelektifitas Antar moda bina perkeretaaan dengan Rasio Kelektifitas Antar moda bina perkeretaaan di dunia berdasarkan bobot rasio kelektifitas antar moda pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 meliputi transportasi perkotaan dengan bobot 100 persen, transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara dan transportasi perkeretaaan dengan bobot 20,000 persen perbandingan nilai Rasio Kelektifitas Antar moda pada Tahun 2020 diuraikan pada Tabel berikut

Tabel 10-2 Nilai Rasio Kelektifitas Antar moda

No	Relevansi Moda	Rasio Kelektifitas
1	Transportasi Perkeretaaan	0,330
2	Perkeretaaan	0,400

ada Tabe di ata, di er e ba a Ra K ekti ita tar i a a bida
erkeretaa ia a a e bi re da diba di ka ti kat a i a e u ru
da a a ter e but dia t ra a a kare a a r i a a da a a a a kereta a i a a
ter edia ada i a a a u a u Ja a, e ba a a u a u u a a da a u a e i,
e da a a a a a i a a a darat, a u t, udara a a erata a a i r di e u ru i a a
l d e i a

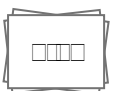
tuk erba di a a titik ka i a a terk e k i, tra a a r t a i erkeretaa ia
e e berika duku a a k ekti ita i a a e ba a a k a titik dari u a a 02
titik a, a a a a ter u bu e e ara a a a a e i u ti a a titik Ka a a a
a t r a e i a a a, Daera Ter e e i e e r b a t a a a Ke u a u a a da a u a t
Ke i a a a a a a, 0 0 i i u u e a b u a a e r t a 2 a i i u u b a a d a r u d a r a

analis Ke erasian Kegagalan Penapaian Target

ada Ta u 202, ditar e t ka e e a a b a a a ka i a a a te a a ter u bu
a r i a a a u r da a a a a a kereta a i a i t u K a a a a u i t da a i i u u
e e a b u a a Ta u a a Ma d e a a a u r a i a a r e e e e b a a i berik u t

a Reakti a a a u r kereta a i a a a a u i t – Muar ka a b a a, te a a di a k u k a
e a T K I beru a ke i a a e e i a k a a a u r K e e a k u
e e i a k a a e e e d a r i R a a e a d i R 4 2 di t a i u Muar Ka a b a a da
t a i u a a a a u i t e b a a a k a u i t, e e i a k a a a a a re d i
e e a e e e t a i u Muar ka a b a a e a a a a a 0 e t e r d a r i R 2
b a t a a b e i e e a d i R 4 2 B a t a a a B e t a, da e r k u a t a e r e e d e a a
e e e e u a k a a b r a a a a a a T K I u a a e a k u k a e r b a i k a a k a a t i
M a k l t a da kereta u t u k e e u a a a a u a e d u k u a a a a a d i K
a a a a u i t

e a a u t a a di e r u k a a t a a a a e e u i a a da e r t i k a i k e a i k a
k u u u a a a u r kereta a i a a a a u i t – Muar ka a b a a, di a a a a a a i
d e a a Ta u 202 e e u i a a b e u a d a t di a k a a k a a e u b u a a
d k u e e e r e a r a t a d a r i T K I b e u d i a a a i k a a k e a d a D i r e k t r a t
J e d e r a a e r k e r e t a a i a D i r e k t r a t a r a r a a da B T a d a a a a
D i r e k t r a t J e d e r a a e r k e r e t a a i a e b e u a a a t e a a e a k u k a
k a r d i a a i da e r e i t a a k e e a k a a a d k u e e e r e a r a t a e e u i a a
a r a r a a a k e a d a i a k t e r k a i t a e a u i u r a t D i r e k t u r a r a r a a



Perkeretaaiaan K0000K0DJK202 ta000a000 Mei 2020
Perencanaan D0ku0e Perarata Per0000a Pertiika0 00
Perta0a Ja0r da0 Ba00u0a0 Kereta 00i 00ta0 Pa0a000t0 -
Muaraka0ba00 Perta beberapa u0a0a k00rdi0a0i 0e0 BT0 Pa0a000
Pa0u0 Pa00ai de00a0 ak0r Ta0u0 2020, d0ku0e0 Perarata0
e0ak0a0aa0 e00u0ia0 be00 da0at di0a0 Paika0 0e0 0T0K00

b0 0e0 ba00u0a0 a0r kereta a0i 0e0u0 0e0abu0a0 Ta0000 Ma0 ta0a0 0
0e0a0a00 0,04 k0 00 da0 ta0a0 2 0e0a0a00 0000 k0 00 te0a0 0e00ai
de00a0 0r00re0 00ik 0ebe0ar 0000, Perta Pa0a De0e0ber 2020 te0a0
di0ak0a0aka0 0e00u0ia0 a0r da0 ba00u0a0 kereta a0i u0tuk
0e0000era0ia00

0e0ai0 itu, Pa0a Ta0u0 2020 00a terda0at beberapa ke0jata0 0e0duku00
0e000kata0 k00kti0ita0 Perkeretaa0ia0 ai000a a0tara ai00

a0 0e0000era0ia0 a0r K0 Kreu00 Ma0e - Kuta B0a00 Pa0a Ju0i 2020
0e000i 0er0a0a000a0 a0a0a0 K0 0eri0ti0 0ut Meutia0 0e0ai0 itu 00a
di0ak0a0aka0 a00uta0 0e0 ba00u0a0 a0r K0 Krue00 0e0u0e0u0 - Pa000
de00a0 0r00re0 k000truk0i 0000 00a 0e0a0000a di0ak0a0aka0
0e00u0ia0 ke0aika0 Perta 0er0ia0a0 0e0000era0ia0 u0tuk 0er0a0a000a0
a0a0a0 K0 0eri0ti0 0ut Meutia0

b0 0e0000era0ia0 0RT Jab0debek 0e00e0 Duku000ta0 - Pa0a000 - Beka0i
Ti0ur da0 Pa0a000 - 0ibubur Pa0a 00u0tu0 2020 00a 0e000katka0
k00kti0ita0 di 0i0a0a0 Jab0detabek0

00 0e0000era0ia0 Kereta 0e0at Jakarta - Ba0du00 0e00e0 Pa0i0 -
Te0a00ar Pa0a 0kt0ber 2020 0e0ai0 itu 00a di0ak0a0aka0 ke0jata0
0e0duku00 a0a0a0 K0 Pa0a0ara00 - Ba0du00 0eba0ai feeder Kereta
0e0at Jakarta - Ba0du00 0e0i0uti 0e000kata0 a0i0ita0 000era0i, 0e0ataa0
e00a0e0e0 0ta0iu0, 0e0 ba00u0a0 skybridge, da0 ai000a de00a0
0r00re0 0000 0

d0 0er0ia0a0 0e0000era0ia0 a0r K0 Ra0tau0ra0at - 000d0k 00, di0a0a
te0a0 di0akuka0 0e00u0ia0 Perta0a a0r, a0i0ita0 000era0i, ba00u0a0 da0
0e0bata0 K0 Perta Pa0at i0i 0eda00 da0a0 0r00e0 ti0dak a00ut a0i0
0e00u0ia0 da0 safety assessment. 0e0000era0ia0 0eba0ia0 0e00e0
0Ra0tau 0ra0at 00ek 0abara0 dire00a0aka0 Pa0a Ta0u0 2024

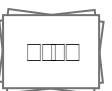
dikarencanakan terjadi secara bertahap pada masa pelaksanaan
rencana saat ini dan dalam tahun berjalan DOD pelaksanaan
rencana tersebut direncanakan perbaikan pada Tahun 2024
e. Kelembagaan pendidikan kerangka kerja Makasar yang direncanakan
diartikan pelaksanaan ambalan BARRU – palaran de
penerapan, dan rencana kejuruan penerapan ambalan
ajar K Makasar – rencana keberlanjutan 44 tahun ini untuk beberapa
kelembagaan pendidikan lainnya, ambalan pendidikan, ambalan
penerapan perencanaan dan *overpass* pada akhir Tahun 2020
telah dilaksanakan *switch over* dan pelaksanaan ini telah dilaksanakan di
tahun Mada untuk pendidikan kerangka kerja pada Tahun
2024

pada Tahun 2020 telah dilakukan untuk data KKK ini
Transportasi KKK dan strategi penerapan yang terdapat dalam
kereta yang sesuai untuk penerapan dan pelaksanaan, di mana ditekan
transportasi yang realisasi telah terkendali dengan jalur kereta api dan
telah beroperasi untuk ambalan angkatan kereta api barisan yaitu
Tahun perantara KKK ambalan penerapan ambalan angkatan kereta api
barisan yang terdapat dalam perencanaan dan pelaksanaan tahun
KKK ambalan pelaksanaan barisan yang terdapat dalam pelaksanaan Tahun
perantara dan telah beroperasi pada Tahun 2020 pelaksanaan
tahun perencanaan Kota – tahun KKK ambalan penerapan KKK
kerangka ambalan KKK dan perencanaan

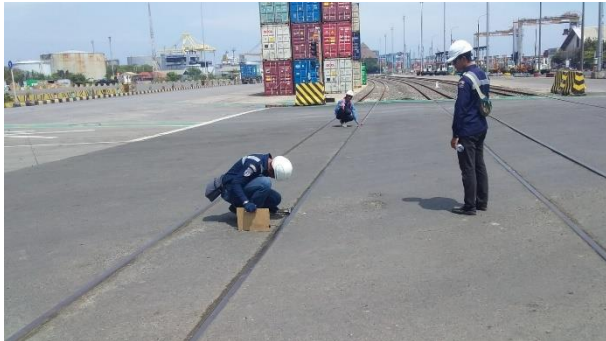
Terakhirnya target IKK RKK KKK ini akan dilaksanakan dengan
keterlibatan ambalan jalur dan ambalan kereta api diartikan
outcome diartikan

a. pelaksanaan ambalan pendidikan berkeadilan yang akan dilaksanakan untuk
berperan dan berprestasi dari satu tahun ke tahun lain dengan
tujuan dan hasil

b. pelaksanaan ambalan pendidikan yang akan dilaksanakan dan
distribusi yang akan dilaksanakan ini akan dilaksanakan dan
diartikan



- □e□□□kata□ ek□□□□ i □i□ā□a□ da□ kua□ita□ □idu□ Ma□□ararat de□□a□ ke□□uda□a□ □e□□ak□e□ ebi□ ba□□ak □i□□a□ da□ ā□a□a□, □e□erti □e□didika□, ke□e□ata□, da□ □ibura□□



Ga□□ar □-□D□ku□entasi Pengu□ian Ja□ur K□□kses Pe□□u□an Tanjung Mas



Ga□□ar □-□D□ku□entasi Peres□ian Stasiun Kai□□as □ang ter□neksi Pe□□u□an Tanjung Perak

□□ Upa□a Peningkatan Kinerja

□□a□a □e□□□kata□ ki□erā ter□ada□ ra□□ k□□ektī□ita□ a□tar □i□ā□a□ □ada □eri□de berikut□□a dia□tara□□a□

- K□□rdi□a□ ā□□uta□ de□□a□ □TKI□ u□tuk □e□e□u□a□ d□ku□e□ tek□□ □a□□ di□er□uka□ da□ā □e□□u□i□a□ ke□a□ika□ ā□ur K□ a□tara □a□a□□u□t□ – Muar□ka□āba□ ter□a□uk □e□i□□kata□ □e□□a□a□a□ di □ā□a□□a□ de□□a□ □e□□□□ti□ a□ka□ □era□ aktī□Ba□i□□atua□ □e□ā□a□a□□
- M□□it□ri□□ da□ e□a□u□a□ ter□ada□ ke□i□ata□ □e□duku□□ ra□□ k□□ektī□ita□ a□tar □i□ā□a□ dia□tara□□a □erba□ika□ □□□□□ra□□a□ b□e□a□ di □e□□e□ □ek □abara – □□□d□k □□ da□ Barru – □a□ā□r□□
- K□□rdi□a□ □e□□i□a□a□ d□ku□e□ tek□□da□□ □e□bia□aa□ u□tuk □e□duku□□ re□□a□a □e□ba□□u□a□ □erkeretaa□ia□ di □i□ā□a□ Ba□i□da□ IK□.

kegiatan itu, diumumkan bahwa beberapa cara penyelesaian terhadap strategi kebijakan, aktifitas perusahaan serta kebijakan abata perusahaan untuk mendukung perusahaan lainnya, diantaranya

a) **Penyesuaian Strategi/Kebijakan** perusahaan Rencana Strategi Bidang Perkeretaaian Tahun 2020-2025 untuk menjadi acuan utama kegiatan pendukung korektivitas perkeretaaian

b) **Penyesuaian Aktivitas dan Anggaran** perusahaan dan hak terhadap penyelesaian aktivitas pendukung korektivitas dengan adanya kebijakan *Automatic Adjustment* Tahun 2024 secara Surat Menteri Keuangan Nomor 02/MK/02/2020 yang telah diumumkan secara resmi dan perusahaan terdapat

c) **Penyesuaian Penempatan Jabatan/Pegawai** Diumumkan secara bebas dan kebijakan perusahaan untuk korektivitas perkeretaaian untuk meningkatkan efisiensi perkeretaaian dan pelaksanaan tugas dan fungsi utama perusahaan di Balai Teknik Perkeretaaian

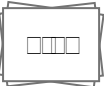
KONSUMEN TRANSPORTASI PERKERETAPIAN DENGAN SUMBER DAFTAR MUSIKSARUNG DAN PRASARANA GAGAS

RISIKO KEDIDANGAN KONTAK TRANSPORTASI KERETAPIAN RATE OF ACCIDENT

Rate of Accident merupakan salah satu ukuran untuk mengukur kondisi perkeretaaian di Indonesia dengan cara menghitung kecelakaan perkeretaaian secara luas pada waktu kejadian kereta api, tabrakan, terbalak, tabrakan dengan kendaraan lain atau kecelakaan lainnya dibarengi dengan K *Traveled* pada tahun tersebut

Pada Tahun 2020, dilakukan inventarisasi ulang terkait kategori kejadian kecelakaan kereta api sebelum era secara luas pada 02 Tahun 2000 tentang Laporan Kejadian Transportasi dan didetetapkan Kecepatan berdasar kata ketetapan sebagai berikut

02 Tahun 2000 tentang Peraturan Kereta Api dan Peraturan "Daftar materi referensi perusahaan sebagai acuan di akud



ada a cat 2019 dan a cat 2020 yang disebabkan kecelakaan, maka kami buka buku buku keretakan kecelakaan kereta api”, di mana

- a. cat 2019 yaitu ada peristiwa pada antara jalur kereta api dengan jalur jalan raya di sebut dengan peristiwa pada diucapkan untuk jalur jalan atau jalur jalan khusus, sebagai jalur jalan pada diucapkan peristiwa kereta api
- b. cat 2019 yaitu sebagai jalur jalan pada atau jalur jalan raya bujur di peristiwa pada

2. M. Untuk Tahun 2020 di mana kecelakaan K. ada ada ada peristiwa atau kejadian kecelakaan cara kereta api yang diakibatkan keretakan cara kereta api, korban jiwa, dan atau kerugian harta benda

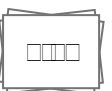
Untuk itu, kejadian kecelakaan kereta api yang disebabkan oleh peristiwa kecelakaan kereta api, terdapat, tabrakan K. dengan K. dan terbakar kecelakaan di jalur kereta api berdasar disebabkan oleh kejadian yang disebabkan oleh kecelakaan pada peristiwa pada tidak diteliti sebagai kecelakaan kereta api

Berdasarkan penelitian K. Tahun 2020 telah terakumulasi, target rata-rata kejadian kecelakaan kereta api *Rate of Accident* sebesar 0,00. Kejadian kecelakaan jiwa K. Terjadi pada tahun akhir Tahun 2020 sesuai indikator kejadian kecelakaan kereta api, terdapat kejadian kecelakaan kereta api dengan jiwa K. Terjadi sebesar 2004 K. Berdasarkan data tersebut, maka diperkirakan realisasi rata-rata kejadian kecelakaan kereta api Tahun 2020 ada sebesar 0,00

raikan data kejadian kecelakaan kereta api pada Tahun 2020 di mana maka ada Tabel berikut

Tabel 1-1. Jumlah Kejadian Kecelakaan per Jenis Kejadian Tahun 2020

No	Jenis Kecelakaan	Jumlah Kejadian
1	Tabrakan K. dengan K.	0
2	Tabrakan	0
3	Terdampar	0
4	Salib Terbakar	0
Jumlah		0

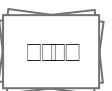


Ta₀₀-₀ Ju₀₀ a₀ Kejadian Ke₀₀elakaan per₀₀ i₀₀a₀ a₀₀ai Ta₀₀un₀₀₀₀

i ₀₀ a ₀₀ a ₀₀ ai	D ₀₀ P ₀ DI ₀₀ R ₀	u ₀₀ an												Ju ₀₀ a ₀₀
		Jan	e ₀	Mar	pr	Mei	Jun	Ju ₀₀	gt	Sep	kt	000	Des	
BT ₀₀ Jakarta	Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BT ₀₀ Ba ₀₀ du ₀₀	Ba ₀₀ du ₀₀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ireb ₀₀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BT ₀₀ e ₀₀ ara ₀₀	e ₀₀ ara ₀₀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ur ₀₀ kert ₀₀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0000akarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BT ₀₀ uraba ₀₀ a	Madiu ₀₀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	uraba ₀₀ a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je ₀₀ ber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pu₀₀au Ja₀₀a		-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	0
BT ₀₀ Meda ₀₀	e ₀₀ da ₀₀ u ₀₀ atera tara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BT ₀₀ ada ₀₀	u ₀₀ atera Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BT ₀₀ a ₀₀ e ₀₀ ba ₀₀	u ₀₀ atera e ₀₀ ata ₀₀	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a ₀₀ u ₀₀	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pu₀₀au Su₀₀atera		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ju₀₀ a₀₀ Ja₀₀a₀₀ Su₀₀atera₀₀		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

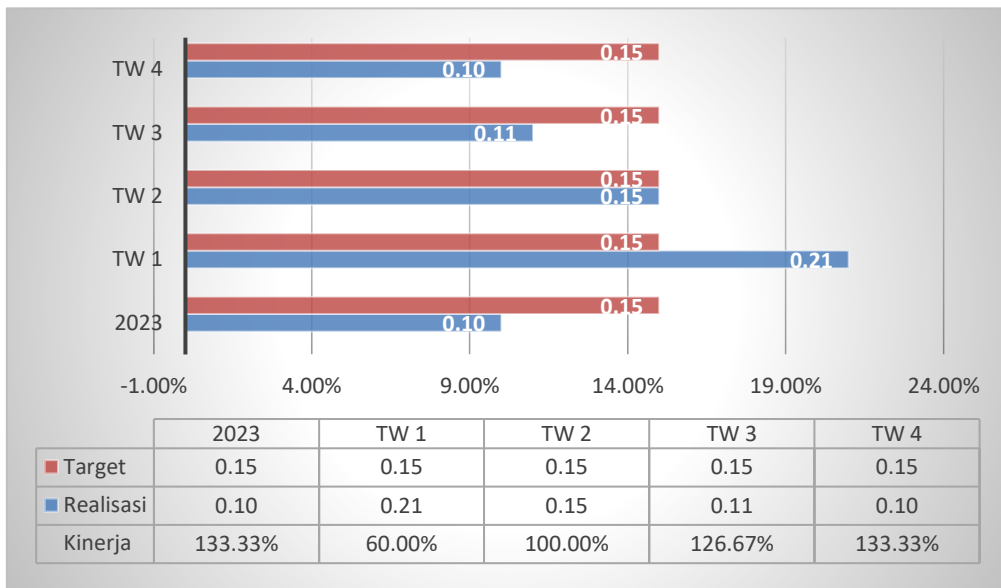
Per₀₀bandingan Target Tri₀₀u₀₀an dan Ta₀₀unan dengan Rea₀₀isasi Kinerja

De₀₀na₀₀ rea₀₀isasi ra₀₀ ke₀₀adia₀₀ ke₀₀el₀₀akaan₀₀ tra₀₀₀₀₀₀ta₀₀ ker₀₀ereta₀₀a₀₀ Ta₀₀u₀₀ 202₀₀ e₀₀be₀₀ar 0,00, aka di₀₀er₀₀e₀₀ a₀₀a₀₀ia₀₀ ki₀₀er₀₀a₀₀ e₀₀be₀₀ar 000,000 dari tar₀₀et a₀₀ diteta₀₀ka₀₀ Ta₀₀u₀₀ 202₀₀ e₀₀be₀₀ar 0,0000ada e₀₀ri₀₀de tri₀₀u₀₀a₀₀ I tar₀₀et ki₀₀er₀₀a₀₀ tidak da₀₀at ter₀₀e₀₀u₀₀ (ki₀₀er₀₀a₀₀ 0000 dikare₀₀aka₀₀ ba₀₀₀₀ak₀₀a ke₀₀adia₀₀ ke₀₀el₀₀akaan₀₀ a₀₀ ter₀₀adi, eda₀₀₀₀ka₀₀ ada Tri₀₀u₀₀a₀₀ II u₀₀ a₀₀ ke₀₀adia₀₀ ke₀₀el₀₀akaan₀₀ ber₀₀a₀₀berkura₀₀ da₀₀ ki₀₀er₀₀a₀₀ da₀₀at e₀₀00a₀₀ai tar₀₀et (ki₀₀er₀₀a₀₀ 0000 Rea₀₀isasi ku₀₀u₀₀ati₀₀₀₀er tri₀₀u₀₀a₀₀ da₀₀at di₀₀at ada Tabe₀₀da₀₀ a₀₀ bar berikut



Tabel 1. Capaian Kinerja Rasio Konektivitas antar moda Per Triwulan Tahun 2023

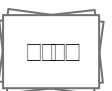
Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)	
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api <i>Rate of accident</i>	Rasio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	000,00	20,00	000,00	000,00



Gambar 1. Capaian Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Kereta Api Per Triwulan 2023

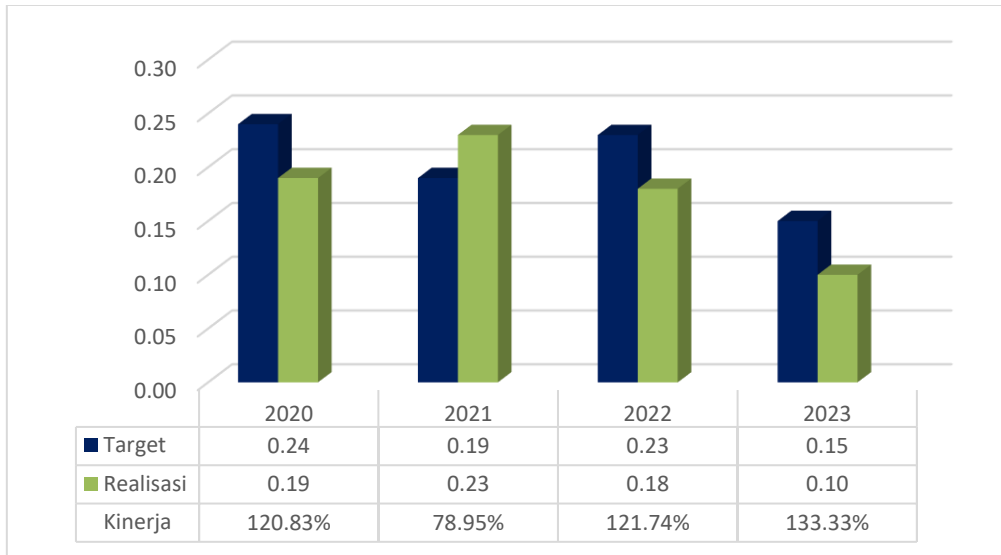
Perbandingan Realisasi dan Target Tahun TerakHIR

Pada Tahun 2023 dan tiga tahun terakhir, realisasi indikator Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api *Rate of Accident* cenderung berfluktuatif dengan nilai kinerja rata-rata sebesar 0,00. Kinerja tersebut ada terdapat pada Tahun 2023 dengan nilai Rasio sebesar 0,20, sedangkan kinerja tertinggi pada Tahun 2023 dengan nilai Rasio sebesar 0,00. Dibandingkan dengan target kinerja tahunan, maka kinerja pada periode Tahun 2020-2023 tidak tercapai sama sekali pada Tahun 2023. Hal ini dikarenakan realisasi kinerja dengan target kinerja Tahun 2020 dan 2023 untuk indikator Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api *Rate of accident* diuraikan pada Tabel dan gambar berikut.



Tabel 10-10 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2023 untuk Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (Rate of Accident)

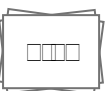
Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (Rate of Accident)	Rasio	0,24	0,19	0,23	0,15	0,19	0,23	0,18	0,10



Gambar 10-10 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2023 untuk Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (Rate of Accident)

10.1 Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

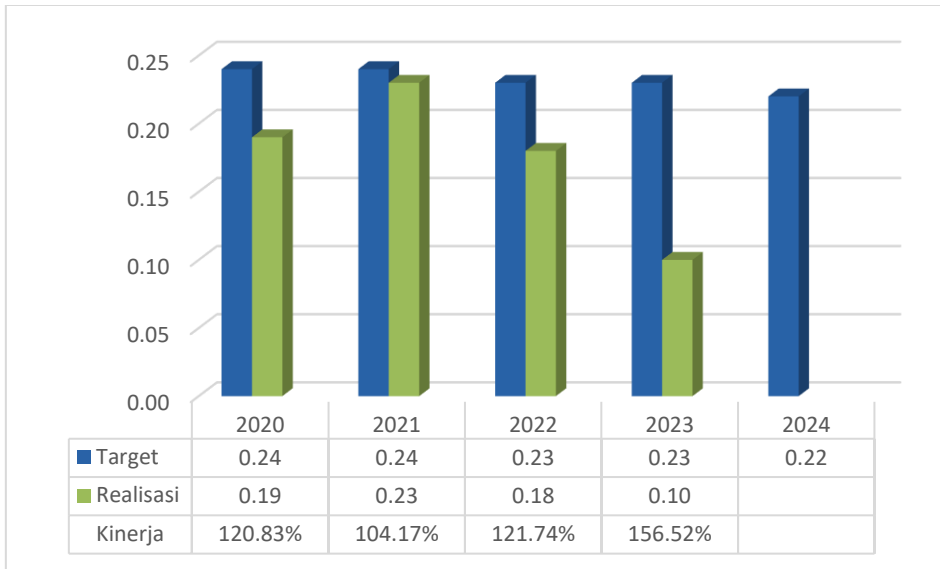
Realisasi rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (rate of accident) pada Tahun 2023 sebesar 0,10 kejadian kecelakaan per juta km, sedangkan target Tahun 2023 adalah 0,15 kejadian kecelakaan per juta km, selisihnya dikarenakan kinerja sebesar 20,4% secara keseluruhan, selisihnya indikator rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api telah tercapai secara penuh pada target pada Rencana Tahun 2020-2024 (kinerja 100%) dengan rata-rata kinerja sebesar 100% dan realisasi tertinggi terjadi pada Tahun 2023 yaitu sebesar 0,10. Demikian juga apabila dibandingkan dengan target Tahun 2024 berdasarkan Rencana Strategi Tahun 2020-2024, selisihnya Tahun 2023 adalah selisihnya target yang ditetapkan dan dikarenakan selisihnya tersebut tetap dapat dipastikan di Tahun 2024.



Tabel 10-10 Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (rate of accident)	Rasio	0,24	0,24	0,23	0,23	0,22	0,19	0,23	0,18	0,10	0,00

*) Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan Target Renstra Tahun 2024



Gambar 10-10 Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024

10.1 Perbandingan Kinerja di Organisasi Internasional

Jumlah kejadian kecelakaan kereta api diakibatkan berbagai penyebab di antara lain karena pada tubirka pererita pererika perikat dan Beina deca keadia keeakaa kereta api a diitu beruca derailment aakaa da collision tabraka Berdarka data tersebut, diperce baqa keadia keeakaa kereta api di ldeia aq ebiti dari Beina da ebi re da dari pererika perikat Deikia wa aabiā eperit baqa qaaur kereta api, aka kiera ldeia aq di baqa Beina da ebi baik dari pererika perikat Data keadia keeakaa di beberapa epara di a aika ada Tabe berikut

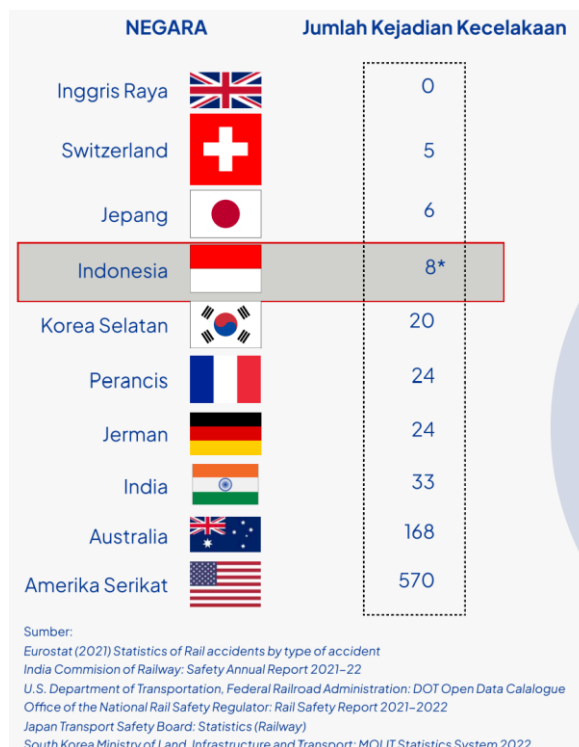
Tabel 1. Kejadian Kecelakaan Perkeretaapian

No	Negara	Panjang Jalur KKM (km)	Kejadian Kecelakaan	Rasio Jumlah Kecelakaan per Panjang Jalur KKM
1	Amerika Serikat	40004	570	0,0014
2	Belgia	2000	5	0,00025
3	Indonesia	42000	8*	0,00019

Sumber No.1 : Website U.S. Department of Transportation

Sumber No.2 : Portal Open Data Infrabel

Menurut data beberapa sumber lain, data kecelakaan perkeretaapian di beberapa negara sebagai berikut:



Gambar 1. Perbandingan Jumlah Kejadian Kecelakaan KKM dengan Beberapa Negara

1. Analisis Keperasan Kegagalan Penapaian Target

Beberapa faktor penyebab kecelakaan pada Tahun 2021 ditunjukkan

a. Kelelahan pekerja perkeretaapian antara lain akibat beban kerja yang berat dan bertubi-tubi keajaiban dan ketidakpastian kerja yang berat dan berat, serta ketidakpastian kerja yang berat dan berat DM perkeretaapian baik secara fisik maupun mental.

b. Kelelahan pekerja perkeretaapian antara lain akibat ideologi daerah rawan kecelakaan, pemeriksaan rampcheck dan inspeksi

kelelahan, safety assessment serta evaluasi keadaannya terhadap keselamatan keretanya

- Koordinasi pelaksanaan IM untuk evaluasi prasarana keselamatan diikhtisarkan dapat diperbaiki sesuai ketetapan dan kondisi laik operasi

Pada Tahun 2021, terjadi kejadian kecelakaan saat aktivitas di stasiun Stasiun Barat saat ada persilangan kereta api barang ke stasiun saat itu terjadi penyebab kejadian kecelakaan kereta api barang kumulatif di Stasiun Barat saat ada persilangan di stasiun tersebut akibat K/Babaran dengan beban muatan akibat K/B saat pelaksanaan dan adanya rangkaian kereta api saat pelaksanaan persilangan tersebut serta iktisarkan persilangan saat pelaksanaan 00 persilangan K/B saat kejadian dapat disebabkan terjadi persilangan di stasiun kelelahan kondisi prasarana dan sarana kereta api setelah itu teringat dari kejadian kecelakaan saat di stasiun beruba akibat kejadian kelelahan prasarana dan sarana perhubungan dapat perhatian

Terhadap pelaksanaan target Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (*Rate Of Accident*), diperbaiki outcome sebagai berikut

- a. Meningkatkan keselamatan persilangan kereta api kumulatif dengan dapat adanya lebih aman dan adanya persilangan di stasiun kelelahan dan sedera dapat diijinkan adanya persilangan dapat lebih berkeselamatan keadaannya
- b. Meningkatkan keselamatan publik dengan adanya lebih persilangan kereta api sebagai ada transportasi saat persilangan
- Berkaitan dengan reduksi dan efisiensi persilangan akibat kereta api di stasiun kejadian kecelakaan dapat diakibatkan oleh kereta api tidak dapat diawasi dan persilangan kereta api terancam akibatnya keterbatasan persilangan kereta api saat itu, rencana kejadian kecelakaan yang akan berbanding lurus dengan rencana kebutuhan sumber daya saat diperbaiki prasarana dan sarana kereta api dengan terjadi efisiensi

□□ **Upa□a Peningkatan Kinerja**

□□a□a □e□□□kata□ ki□erā □ada □eri□de berikut□□a diuraika□ □eba□ai berikut□

a□ □a□□uta□ □e□ak□a□aa□ audit □MK□ ter□ada□ Bada□ □□a□a □erkeretaa□ia□□

b□ □a□□uta□ □e□□□kata□ k□□ □ete□□i □DM re□u□at□r □e□ā□ui □erti□ika□i da□ □e□ati□a□ tek□i□ u□tuk □e□duku□□ □e□ak□a□aa□ □e□□e□da□ia□ da□ □e□□a□a□a□ □e□□e□e□□□araa□ □erkeretaa□ia□□

□□ □ri□rita□ ke□iata□ □□der□i□a□i □i□te□ □er□i□□a□a□ da□ te□ek□□u□ika□i k□u□u□□□a u□tuk □ā□ur kereta a□i □a□□ □a□i□ □e□□□u□aka□ □i□te□ □eka□ik□

d□ □□a□ua□i da□ □erbaika□ ter□ada□ □□□ □e□□□□era□ia□ kereta a□i □u□a □e□□□kata□ ke□e□ā□ ata□ □erkeretaa□ia□□

□e□ai□ itu, diu□u□ka□ □□a bebero□a □a□ □e□□e□uaia□ ter□ada□ □trate□i□kebi□aka□, akti□ita□□a□□□□ara□, □erta □e□e□□ata□ □abata□□□e□a□ai u□tuk □e□duku□□ □e□□a□aia□ ki□erā, dia□tara□□a□

a□ **Penyesuaian Strategi/Kebijakan**□

□□ □e□□□□ti□ a□a□ □e□□e□e□□□araa□ IM□ □ada Ta□u□ 2024 de□□a□ □e□ak□a□aa□ □era□ata□ □ra□ara□a □erkeretaa□ia□ □e□Ba□ai Tek□ik □erkeretaa□ia□ □e□uai de□□a□ □i□a□a□ ke□e□a□□a□□□□a□

2□ Dikare□aka□ ke□adia□ ke□e□akaa□ □a□□□ka□, ter□u□i□□□, tabraka□ K□ de□□a□ K□ da□ terbakar□□a□□ di□ebabka□ □e□ □e□a□□□ara□ □ada □er□□t□□□□a□ □ebida□□ tidak di□itu□□ □eba□ai ke□e□akaa□ kereta a□i, □aka di□er□u□ka□ □e□□e□uaia□ uraia□ □a□ara□, i□dikat□r ki□erā da□ □r□□□ra□ ke□iata□ □e□duku□□ terkait □e□a□□a□a□ □er□i□ta□a□ □ebida□□ □ada Re□□a□a □trate□i□ Ta□u□ 202□202□□

b□ **Penyesuaian Aktivitas/Anggaran**□ □□a□ua□i da□ □ak ter□ada□ □e□□e□uaia□ a□□□□ara□ ke□iata□ □e□duku□□ ke□e□ā□ ata□ □erkeretaa□ia□ de□□a□ ada□□a kebi□aka□ *Automatic Adjustment* Ta□u□ 2024 □e□□a□u □urat Me□ter□ Keua□□a□ □□□ □r □□□021MK02202□ □u□a □e□a□□ut□□a di□er□u□ka□ □e□□□□ti□ a□a□ a□□□□ara□ □a□□ ter□edia□

□□ **Penyesuaian penempatan jabatan/pegawai**

- Diwujudkan secara langsung oleh data pegawai *inpassing* Jabatan Fu... Terte... bida... Kereta... sesuai k... ete... m...a untuk ... da... a... te... di Balai ... Kereta...
- 2□ Diwujudkan secara ... da... oleh data pegawai ... k... ete... i... ektur ... untuk ... kata... a... a... e... e... ara... Kereta... k... u... a untuk ... e... a... ke... dia... ke... aka... da... e... aka... tu... da... u... a... a... a... di Balai Teknik Kereta...

□□□□ **KIRI P... TR... SI P... R... PI... G T... RC... D... S... I... UTU...**

... ki... e... a... tra... rta... Kereta... a... ter... da... sesuai kebutuhan diukur de... I... Ki... a... r... K... aitu ... *On Time Performance* ... e... e... Tar... kuta... Kereta ... e... da... Bara..., ... e... era... Ja... Kereta ... a... sesuai de... T... , ... I... Ke... Ma... arakat ter... e... a... ubik Bida... Kereta...

P... T... S... C... I... ON TIME PERFORMANCE ... TP...

Tar... e... a... *On Time Performance* ... tra... rta... kereta a... a... diteta... da... e... a... Ki... Ta... 202... re... terak... e... e... baik untuk a... kuta... kereta a... e... a... da... Bara... a... e... a... ke... a... da... kedata... da... e... a... kereta a... De... u... a... rea... a... kedata... da... ke... a... kereta a... e... a... da... Bara... te... a... ta... Ta... 202... e... a... 4... K... diba... di... de... u... a... kedata... da... ke... a... kereta a... e... a... da... Bara... e... a... K..., ... a... di... e... rea... a... e... a... *On Time Performance* ... Ta... 202... e... e... 0,000 ... Ri... data ... a... a... kereta a... te... a... a... bu... da... di... ta... Ta... berikut

Tabel 10-10 Realisasi Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu Tahun 2020

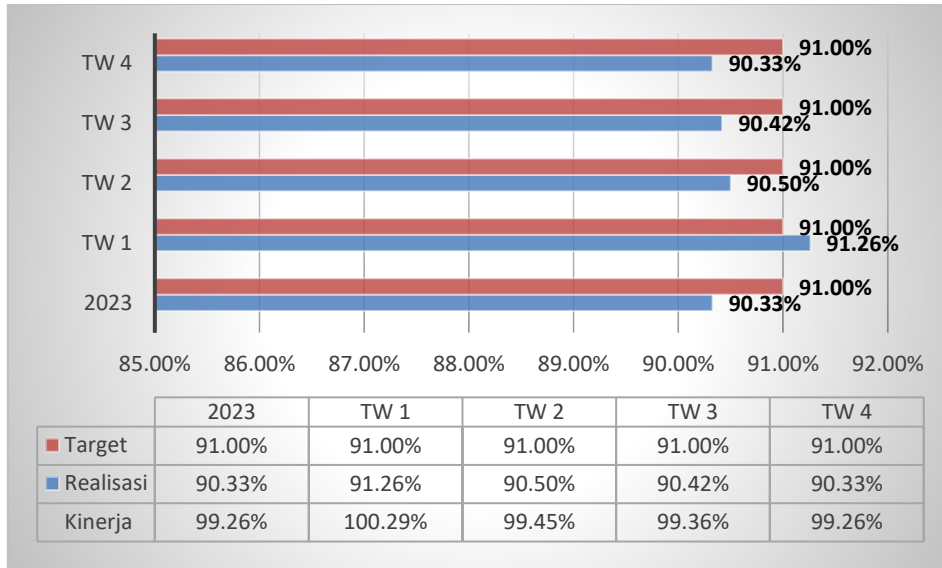
Bulan	Realisasi Perjalanan		Realisasi Kedatangan Tepat Waktu		Realisasi Keberangkatan Tepat Waktu		Rata-Rata		Persentase Capaian	
	jumlah	kuantitas	jumlah	kuantitas	jumlah	kuantitas	jumlah	kuantitas	jumlah	kuantitas
Jan	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	100,00	100,00
Feb	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	100,00	100,00
Mar	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	100,00	100,00
Apr	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	100,00	100,00
Mei	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	100,00	100,00
Jun	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	100,00	100,00
Juli	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	100,00	100,00
Agus	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	100,00	100,00
Sep	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	100,00	100,00
Ok	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	100,00	100,00
Nov	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	100,00	100,00
Des	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	100,00	100,00

10.1 Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Devisa realisasi *On Time Performance* Transportasi kereta api pada Tahun 2020 sebesar 100,00%, maka di periode pelaksanaan kinerja sebesar 100,00% dari target Tahun 2020 sebesar 100,00%. Target triwulan pada periode Tahun 2020 beraktualisasi, devisa nilai TP terdapat sebesar 100,00% terdapat pada Triwulan II dan TP tertinggi sebesar 100,00% terdapat pada Triwulan III. Realisasi kuantitas per triwulan dapat dilihat pada Tabel data di bawah berikut.

Tabel 10-11 Capaian Kinerja Persentase *On Time Performance* TP Transportasi Kereta Api Per Triwulan Tahun 2020

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Perentase Devisa <i>On Time Performance</i> Transportasi Kereta Api	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



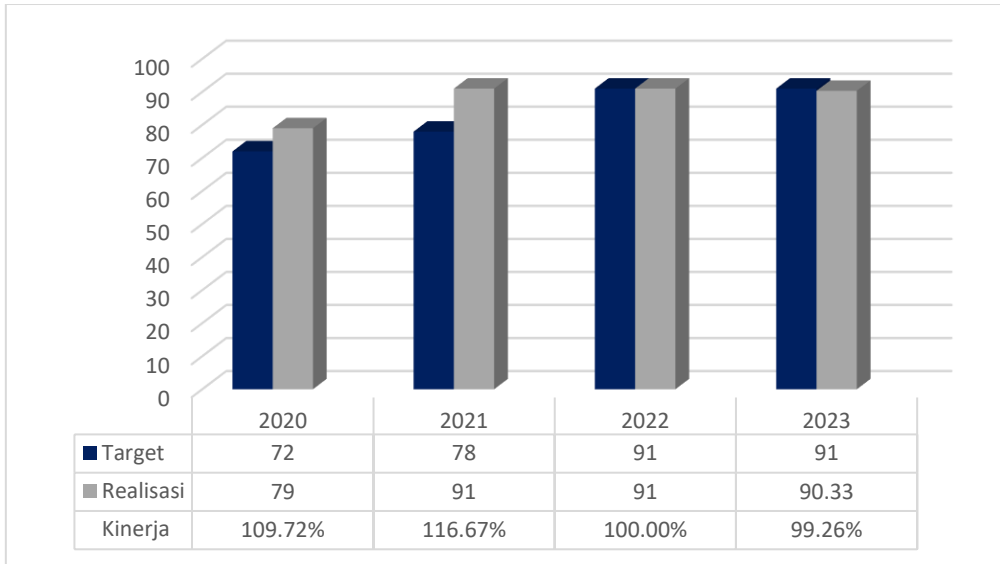
Gambar 3.10 Capaian Kinerja Persentase On Time Performance (TP) Transportasi Kereta Api Per Triwulan Tahun 2023

Perbandingan Realisasi dan Target Tahun TerakHIR

Realisasi kinerja Tahun 2023 dan tahun terakHIR untuk indikator kinerja On Time Performance (TP) transportasi kereta api di periode tersebut cenderung berfluktuatif dengan nilai realisasi TP rata-rata pada periode tersebut sebesar 90,33%. Kinerja tersebut terjadi pada Tahun 2020 dengan nilai TP sebesar 90,33%, sedangkan kinerja tertinggi pada Tahun 2021-2022 dengan nilai TP sebesar 99,26% dan terendah di periode 2020 dan 2023 dapat dilihat pada Tabel data di bawah berikut.

Tabel 3.11 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2023 untuk Persentase On Time Performance (TP) Transportasi Kereta Api

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Indikator Kinerja Utama (IKU) On Time Performance (TP) transportasi kereta api	%	91	91	91	91	90,33	91,26	90,50	90,33



Gambar 1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2023 untuk Persentase On Time Performance TP Transportasi Kereta Api

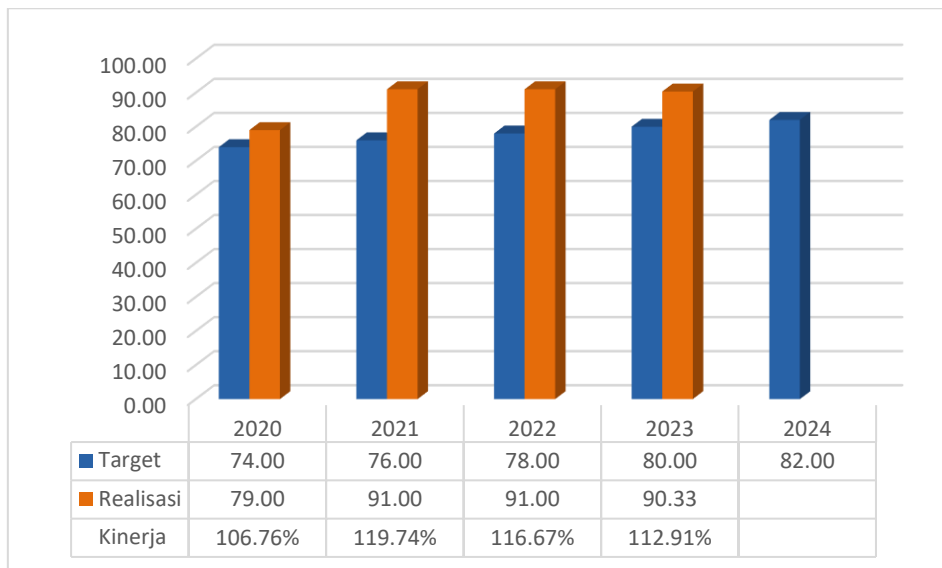
1.1 Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Realisasi kinerja On Time Performance TP transportasi kereta api Tahun 2023 sebesar 90,33%, berdasarkan target tahunan yang ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebesar 91%. Peningkatan kinerja ini dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai target pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Kinerja ini menunjukkan bahwa rata-rata kinerja sebesar 90,33% di atas realisasi tertinggi terjadi pada Tahun 2021-2022 yaitu sebesar 91%. Demikian pula apabila dibandingkan dengan target Tahun 2024 berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, kinerja Tahun 2023 masih di bawah target yang ditetapkan namun diarahkan kinerja tersebut dapat ditingkatkan di Tahun 2024.

Tabel 1.1 Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2023 untuk Persentase On Time Performance TP Transportasi Kereta Api

Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kinerja Kinerja Kinerja On Time Performance TP Transportasi Kereta Api	Rasio	72	78	91	91	91	79	91	91	90.33	91

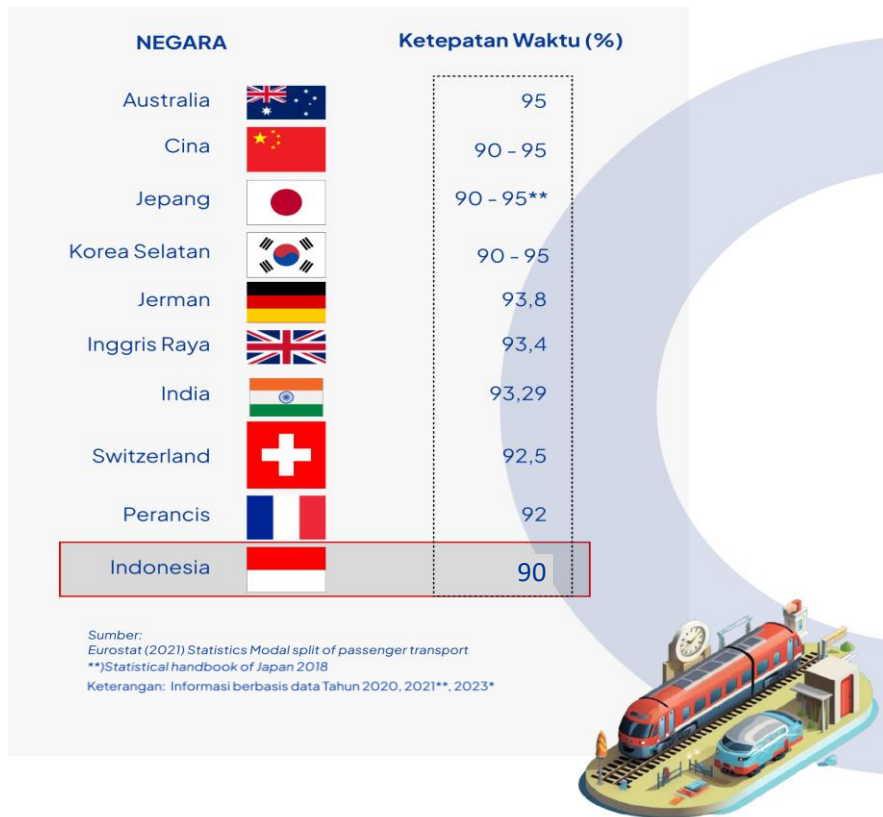
*) Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan Target Renstra Tahun 2024



Gambar 1-11 Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api

1.1 Perbandingan Kinerja di Lempasasi Internasional

Perbandingan kinerja di Lempasasi Internasional *On Time Performance* (OTP) dilakukan dengan membandingkan beberapa negara yang ditargetkan oleh Badan Publikasi Eurostat (*Statistics Modal Split of Passenger Transport*) dan *Statistical Handbook of Japan*. Berdasarkan data tersebut, di Lempasasi beberapa negara yang ditargetkan di Lempasasi adalah Jepang, Cina, Korea Selatan, India dan Australia. Data kinerja OTP di beberapa negara di Lempasasi sebagai berikut:



Gambar 1. Perbandingan On Time Performance (TP) Transportasi Kereta Api dengan beberapa negara

1.1 Analisis Keberhasilan Kegagalan Pencapaian Target

Pada Tahun 2021, pencapaian On Time Performance (OTP) terdapat terjadi pada Juni 2021 yaitu 4,2% di antara periode tersebut merupakan angka rata-rata. Kemudian Tahun 2022 pada periode bulan Februari dan Desember mencapai nilai tertinggi di antara kinerja ini. Hal ini menunjukkan faktor tidak tercapainya target OTP ditargetkan.

a) Kondisi keterlambatan dari faktor luar rencana rata-rata sebesar 4,24%, kehadiran angka sebesar 11,40%, dan faktor perencanaan rata-rata sebesar 11,04%.

b) Rendahnya rencana kinerja On Time Performance secara keseluruhan dari rencana KR Jabodetabek dengan rencana rekayasa perantara sekitar 0% dari total rencana kereta api Berdampak secara rata-rata. Kemudian Tahun 2021, tercatat ketepatan waktu terdapat pada rencana KR dengan rata-rata ketepatan waktu per bulan pada range 0% dengan rekayasa perantara K per bulan mencapai

00000 keberangkatan dari titik keberangkatan seluruhnya sekitar 2000 per bulan

Keterlambatan operasi KRL yang dikarekakan akibatnya banyak yang akan datang karena kebutuhan aktualnya, terjadinya beberapa tindakan yang menimbulkan akibatnya, seperti adanya beberapa tindakan kereta api, serta adanya keterlambatan beberapa tindakan yang menimbulkan akibatnya di beberapa tindakan operasi yang terdapat kerucut yang terjadi akibat keterlambatan untuk meningkatkan kinerja operasi secara keseluruhan

dan untuk meningkatkan kinerja *On Time Performance* transportasi kereta api dicarakan beberapa indikator *outcome* sebagai berikut

a. Meningkatkan keterlambatan publik di area depot kereta api yang tepat waktu dapat meningkatkan pelayanan yang baik serta pelayanan keterlambatan seluruhnya terdapat adanya transportasi kereta api yang berbeda yang dibayarkan pada transportasi lainnya

b. Mendukung pemerintah untuk meningkatkan transportasi umum yang kereta api yang lebih efisien khususnya di perkotaan dengan dapat mengurangi kecelakaan yang terjadi dan mengurangi emisi yang rusak karena keterlambatan waktu kereta api yang beroperasi yang akan dapat meningkatkan kinerja operasi yang lebih baik dan transportasi yang diutamakan untuk meningkatkan efisiensi

Upaya Peningkatan Kinerja

Beberapa indikator kinerja yang terdapat berikut ini ditargetkan

a. Meningkatkan pelayanan dan koordinasi dengan petugas di lapangan untuk meningkatkan dan mengurangi tindakan operasi yang menimbulkan kereta api yang terjadi, seperti kualitas buruk, beberapa area, tindakan *vandalism*, terdapat beberapa tindakan yang menimbulkan akibatnya

b. Berencana dengan lebih lanjut pada kereta api di titik utama Jawa dan Sumatera agar lebih efektif dan efisien dengan memperhatikan kereta api

□□ □e□a□□a□a□ □e□at ketika terādi ke□e□akaa□ kereta a□i □au□u□ ke□e□akaa□ □□□ kereta a□i □a□□ □e□□□a□□□u □□era□□□a□a□ar āur kereta a□i da□at □e□era diāui da□ □eraāa□a□ □e□era □□r□a□ke□ba□i, ter□a□uk di□er□uka□ □e□□ediaa□ da□ □e□e□ □ata□ □ara□a □e□duku□□ □e□a□□a□a□ ke□e□akaa□ □a□□ □ia□ □□era□ di bebero□a □ka□i □trate□i□□ □e□ai□ itu, diu□u□ka□ □u□a bebero□a □a□ □e□□e□uaia□ ter□ada□ □trate□i□kebiāaka□ da□ akti□ita□a□□□ara□ □erta □e□e□ □ata□ □abata□□□e□a□ai u□tuk □e□duku□□ □e□□a□aia□ ki□erā, dia□tara□□a□

a□ **Penyesuaian Strategi/Kebijakan** □ Me□d□r□□□ □e□□u□u□a□ □□□□K□ □e□□e□ eri□ta□ □e□aku □e□i□ik □ra□ara□a □i□ik □e□ara □erta □e□□a□a□a□ āu □ita□kereta a□i □e□ara i□te□□i□□

b□ **Penyesuaian Aktivitas/Anggaran** □

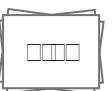
□□ □□a□ua□i da□□ak ter□ada□ □e□□e□uaia□ a□□□ara□ ke□iata□ □e□duku□□ □e□i□□kata□ □T□ tra□□□□rta□i □erkeretaa□ia□ de□□a□ ada□□a kebiāaka□ *Automatic Adjustment* Ta□u□2024 □e□□a□u □urat Me□teri Keua□□a□ □□□□r □□□02□MK□02□202□ □u□a □e□ā□ut□□a di□er□uka□ □e□□□□ti□ a□ā□ a□□□ara□ □a□□ ter□edia□

2□ Diu□u□ka□ ke□iata□ da□ a□□□ara□ □a□□ dibutu□ka□ u□tuk □e□duku□□ □e□□a□a□a□ āu □ita□kereta a□i de□□a□□ □e□□□u□aka□ tek□□□□i i□□□r□ a□i□

□□ **Penyesuaian penempatan jabatan/pegawai** □ Diu□u□ka□ □e□a□ ba□a□ da□ □e□e□ □ata□ □e□a□ai □a□□k□□ □ete□u□tuk □e□duku□□ □e□□u□u□a□ □□□□K□ □e□□e□ eri□ta□ □e□aku □e□i□ik □ra□ara□a □i□ik □e□ara□

P□M□□U□□□ T□RG□T □□GKUT□□ P□□UMP□□G K□R□T□ □PI

□e□e□u□a□ tar□et a□□kuta□ □e□u□ □a□□ kereta a□i diukur □e□āui □er□e□ta□e a□tara rea□i□a□i □u□ ā□ a□□kuta□ □e□u□ □a□□ kereta a□i diba□di□□ka□ de□□a□ tar□et □u□ā□ a□□kuta□ □e□u□ □a□□ kereta a□i □a□□ te□ā□ diteta□ka□ berda□arka□ Re□□a□a □trate□i□ Ta□u□ 2020 – 2024□ Rea□i□a□i □u□ā□ □e□u□ □a□□ tera□□kut de□□a□ kereta a□i □ada Ta□u□202□ di□er□e□ □eba□ak 42□□□4□□0 □e□u□ □a□□ de□□a□ ri□□ia□ □eba□ai berikut□



- a. Jumlah pelayanan kereta api komersial di TKI K Barak Jauk
eksekutif, bi, ek i dan K kaeksekutif, bi da
ek i dan ebaak 2 pelayanan
- b. Jumlah pelayanan kereta api komersial di TKI K Bandara
ebaak 0 pelayanan
- c. Jumlah pelayanan kereta api komersial di TK *Railink* kereta api
Bandara Kuaa u dan akarta k re ebaak 0
elayanan
- d. Jumlah pelayanan kereta api ek i a a KR
Jab detabek ebaak pelayanan
- e. Jumlah pelayanan kereta api ek i a a KR Jab detabek
ebaak 240 pelayanan
- f. Jumlah pelayanan kereta api eriti ebaak 404 pelayanan
- g. Jumlah pelayanan MRT Jakarta ebaak 440 pelayanan
- h. Jumlah pelayanan RT Jakarta ebaak 024 pelayanan
- i. Jumlah pelayanan RT Jab debek ebaak 42 pelayanan
- j. Jumlah pelayanan Kereta e at Jakarta Ba du ebaak
elayanan

De a u a rea i a i pelayanan kereta api Ta u 2020 d 2022 ebaak
02 pelayanan Ta u 2020 ebaak 2000 pelayanan,
Ta u 202 ebaak 2200 pelayanan da Ta u 2022 ebaak
0 pelayanan da u a pelayanan ada Ta u 202 ebaak
4240 pelayanan, aka di er e u a rea i a i pelayanan
ku u a i dari Ta u 202 a ai de a Ta u 202 ebaak
02 pelayanan Ju a tersebut e a u a a diba di ka de a
tar et r duk i a kuta pelayanan tra rta i kereta api ada eri de
2020 – 2024 eba ai a a ada Re a a a trate i Ta u 2020 – 2024 aitu
0 pelayanan, aka di er e rea i a i e e u a a tar et
a kuta pelayanan kereta api ada Ta u 202 ebe ar 0,000

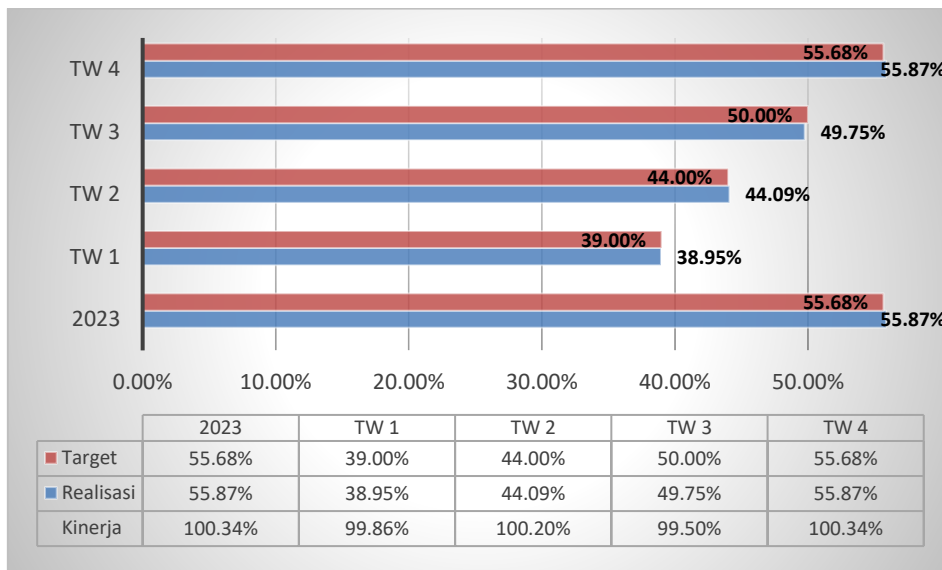
Perbandingan Target Tri uan dan Ta unan dengan Realisasi Kinerja

De a rea i a i e e u a a tar et a kuta pelayanan kereta api ada
Ta u 202 ebe ar 0,000, aka di er e a a ia i ki er a ebe ar
00,4 ter ada tar et Ta u 202 ebe ar 0,000 ada Ta u 202,

Produksi angkutan penumpang cenderung berfluktuatif dan cenderung terdapat target per triwulan, dimana secara keseluruhan pencapaian keaikaan devisa penumpang beberapa titik pencapaian baru Realisasi kuota per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan gambar berikut

Tabel 4.10 Capaian Kinerja Penjualan Target Angkutan Penuh pang Kereta Api Per Triwulan Tahun 2023

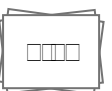
Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Penjualan Target Angkutan Penuh Kereta Api	Orang	100,00	25	44	30	100,00	100,00	44,00	40,00	100,00	100,00	100,20	100,00	100,04	100,04



Gambar 4.10 Capaian Kinerja Penjualan Target Angkutan Penuh pang Kereta Api Per Triwulan Tahun 2023

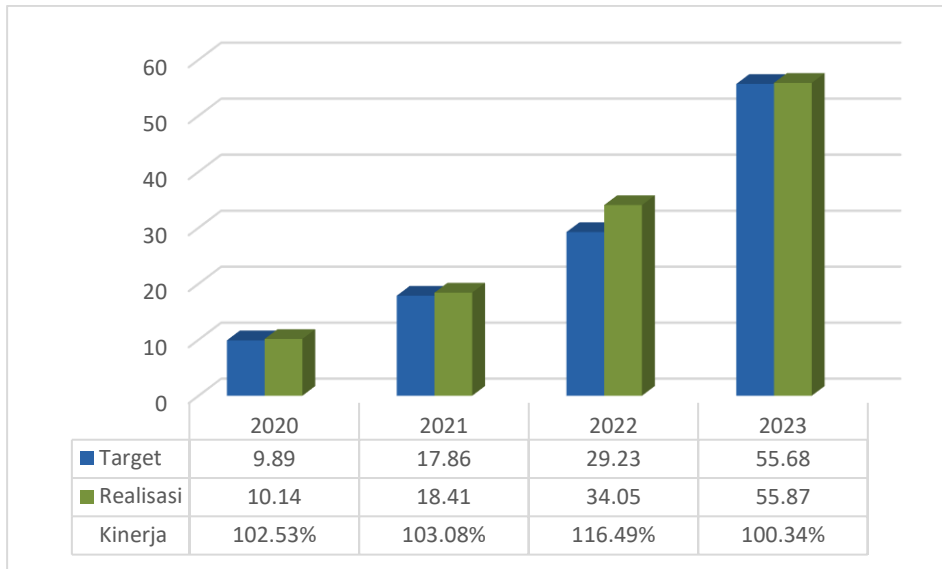
Perbandingan Realisasi dan Target Tahun Terakir

Realisasi kinerja Tahun 2023 dan tahun terakhir untuk pencapaian target angkutan penumpang kereta api di seluruh bangsa target dapat tercapai setiap tahun pada periode tersebut kinerja 100% dimana rata-rata pencapaian dari Tahun 2020-2023 sebesar 100,24% dan pencapaian tertinggi pada Tahun 2023 sebesar 100,04% dan tersebut merupakan dampak kebijakan pemerintah sebagai Keajaiban Masyarakat 100KM yang di luncurkan pada Tahun 2023 dimana target dan realisasi periode Tahun 2020 dan 2023 dapat dilihat pada Tabel dan gambar berikut



Tabel 4.10 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2023 untuk Peningkatan Target Pengkutan Penuh-pang Kereta Api

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Peningkatan Target Pengkutan Penuh-pang Kereta Api	Million	10,00	18,00	29,23	55,68	10,14	18,41	34,05	55,87



Gambar 4.10 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2023 untuk Peningkatan Target Pengkutan Penuh-pang Kereta Api

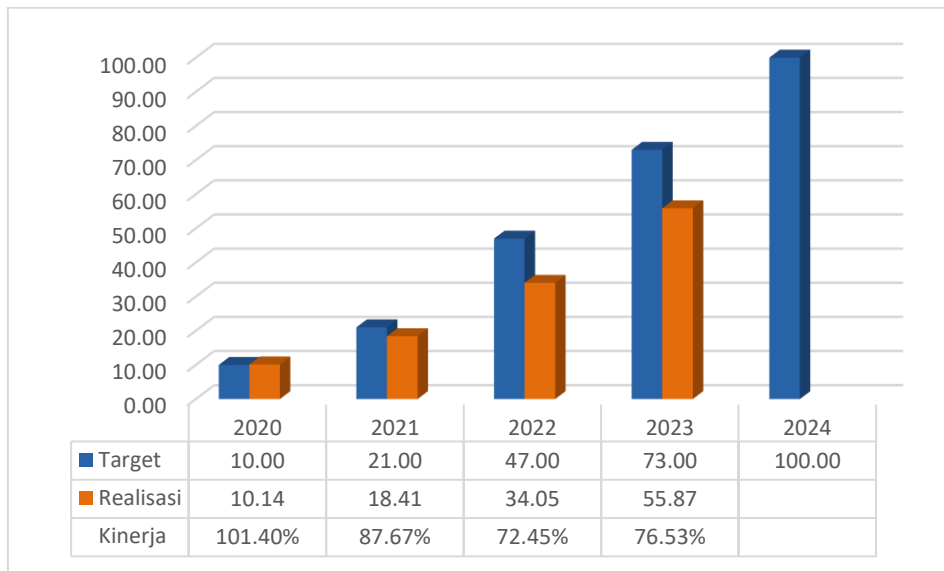
Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Realisasi peningkatan target angkutan penuh-pang kereta api pada Tahun 2020 sebesar 10,14, sedangkan target Tahun 2020 yang tercapai pada Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 adalah 10,00. Peningkatan di era ini sebesar 10,14 menunjukkan indikator peningkatan target angkutan penuh-pang kereta api keunggulannya tidak melebihi target pada Rencana Strategis di awal pada Tahun 2020-2022 dan ini diakibatkan oleh kondisi pandemi COVID-19, di sisi lain target Rencana Strategis ditetapkan dalam kondisi normal tidak mempertimbangkan kondisi luar biasa pandemi COVID-19. Untuk itu, apabila dibandingkan dengan target Tahun 2024 pada Rencana Strategis diperkirakan akan lebih tercapai karena akan lebih banyak penumpang di seluruh sebesar 44% dari Target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.10 Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Peningkatan Target Pengkutan Penuh pang Kereta Api

Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Indikator Kinerja Target angkutan penumpang Kereta Api	juta penumpang	10	21	47	73	100	10,14	18,41	34,05	55,87	

*) Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan Target Renstra Tahun 2024



Gambar 3.10 Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Peningkatan Target Pengkutan Penuh pang Kereta Api

Perbandingan Kinerja di Organisasi Internasional

Kinerja angkutan penumpang kereta api di Indonesia diakukan perbandingan dengan Malaysia, Singapura dan Britania Raya sebagai referensi perbandingan angkutan penumpang kereta api diuraikan pada Tabel berikut

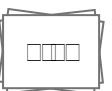
Tabel 3.11 Perbandingan Jumlah Pengkutan Penuh pang Kereta Api

No	Negara	Panjang Jalur Km	Rata-Rata Jumlah Penuh pang per tahun orang	Rata-Rata Jumlah Penuh pang Panjang Jalur Km per tahun
1	Britania Raya	4000	100000000	24000
2	Malaysia	1000	100000000	100000
3	Singapura	200	100000000	500000
4	Indonesia	10000	100000000	10000

Sumber No.1 : Office of Rail and Road Publication (diolah, rata-rata per bulan)

Sumber No.2 : Portal Prasarana Malaysia Berhad (diolah, rata-rata per bulan)

Sumber No.3 : Website Departement of Statistics Singapore (diolah, rata-rata per bulan)

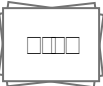


Berdasarkan data di atas, diperkirakan bahwa jumlah penumpang kereta api di Indonesia akan lebih rendah dibandingkan Britania Raya dan Singapura serta lebih tinggi dari Malaysia dan Arab Saudi. Jumlah penumpang kereta api di Indonesia akan meningkat secara signifikan, karena jumlah kereta api penumpang di Indonesia akan lebih banyak ketika kereta tersebut akan berangkat dari stasiun-stasiun di seluruh negeri. Berdasarkan data di atas, diperkirakan bahwa jumlah penumpang kereta api di Indonesia akan meningkat secara signifikan dibandingkan dengan Britania Raya, Malaysia dan Singapura yang akan berangkat dari stasiun-stasiun di seluruh negeri.

Analisis Keberhasilan Kegagalan Pencapaian Target

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian Target Jumlah Penumpang Kereta Api ditunjukkan sebagai berikut:

- a) Beroperasinya Kereta Api Makasar – Parepare pada Maret 2020 sebagai alternatif transportasi di wilayah Sulawesi Selatan
- b) Beroperasinya MRT Jabodetabek pada Agustus 2020 sebagai alternatif transportasi massal dari kendaraan pribadi ke transportasi umum untuk beraktivitas di wilayah Jabodetabek
- c) Beroperasinya Kereta Api Pat Jakarta – Bandung pada Oktober 2020 sebagai alternatif transportasi massal yang menghubungkan Jakarta, Bandung dan wilayah sekitarnya
- d) Percepatan layanan KRI di Bandara Kualanaram pada Desember 2020 sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat Bandara Kualanaram
- e) Diperkerasinya angkutan feeder pada angkutan kereta api ditunjukkan pada diperkerasinya Kereta Api Pat Jakarta – Bandung, MRT Jabodetabek dan MRT Sumatera Selatan



- □e□□□katak □e□□□□u□aa□ a□□kuta□ kereta a□□ □er□□ta□□ dia□□tara□□a □K□
Ba□dara □□□ □e□□a□ ba□a□ □ekue□□ □er□□aa□□a□ □a□□ diba□□ □e□□adi □K□
Ba□dara □□□ da□ □k□□re□□, □K□ Ba□dara □□□□ □ada□□a □eruba□a□ tari□
□a□□ □ebe□□□□a rata□rata □R□□□□000 □e□□adi □R□□□□000□, ter□a□uk
□e□□□katak □e□□□□u□aa□ □K□□ Jab□detabek da□ □MRT Jakarta□
- Bebera□a □□□e□ □ibur □a□□□□□ dia□□tara□□a □ada □a□a□
□e□□e□□□araa□ a□□kuta□ □ebara□, □ata□ da□ Ta□u□ Baru □a□□
□e□□dr□□□□ □e□□□katak □e□□□□u□aa□ □a□a□a□ □K□ a□□tar k□ita□
- □e□□□katak □a□a□a□ □K□ ke□ada □a□□arakat □e□□a□□ □e□□a□a□a□
□a□a□a□ kereta a□□ di □ta□u□ da□ □er□□aa□a□ kereta a□□ □e□□uai □ta□dar
□e□□aa□a□ Mi□□□u□ □
- i□ □e□□edia□□k□□ □e□□a□□ ke□ada □e□□u□ □a□□□a□□ terda□ □ak □a□□□□□a□
□er□□aa□a□ kereta a□□ □e□□□□□a tidak □e□□uru□ka□ ke□er□a□aa□
□e□□□□□a □□da kereta a□□

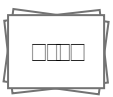
Ki□er□□ □e□□e□□□a□ Tar□et □□□kuta□ □e□□u□ □a□□□ Kereta □□□ di□□ara□ka□ da□at
□e□□□a□□ika□ *outcome* □eba□ai berikut□

- a□ □e□□□ura□□□a□ ke□adada□□ ke□a□eta□ □a□u □ita□ □aa□ ra□a □erta□
□e□□□ura□□□a□ □e□□□□ □a□ ru□□a□ kaa□ k□u□u□□□□a di □ia□□a□ □er□□ta□□
de□□a□□ □e□□□kat□□□a □e□□□□u□aa□ tra□□□□□ta□□□ u□□u□ □a□□a□□ kereta a□□
diba□□di□□ka□ de□□a□ □e□□□□u□aa□ ke□daraa□ □ribadi□
- b□ □e□□□katak □□iat □□□e□□ta□□ □□ra□□truktur □er□er□eta□□ia□ de□□□a□
ti□□□□□□a *demand* □e□□□□u□aa□ tra□□□□□ta□□□ kereta a□□, ter□a□uk
duku□□□a□ □e□□□e□□ ba□□□a□ da□ □e□□□katak □a□ur, □ta□u□, da□ □a□□□□ta□
□a□a□a□ □ai□□□□a□

□□ Upa□a Peningkatan Kinerja

□□a□a □e□□ □erta□a□ka□ da□ □e□□□□katka□ □a□□aia□ ki□er□□ □ada □er□□de□
□e□□data□□ dia□□tara□□□a□

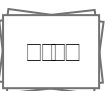
- a□ □er□e□ata□ □e□□□□□er□□ia□ □ada □a□□□□□a□□ □e□□ ba□□□□□a□ □ra□□ara□a□
□er□er□eta□□ia□ dia□□tara□□□a □Kru□e□□ □e□□u□ke□□□ – □a□□□, Ra□□tau□ra□at –
□□□□□□k □□, □erta □er□□a□□□□□a□ □a□a□a□ □K□ di □□ka□□ □ai□□□□a□
- b□ □e□□e□□□□a□ kebutu□a□ a□□□□ara□ u□tuk □a□a□a□ □ub□□di □K□ □er□□□□□□
□e□□uai kebutu□a□ a□□ar □a□a□a□ teru□□ berke□□□□□ta□□□



- a. Alokasi barang kereta api di Stasiun Jawa Tengah sebesar 200000 ton, dengan rincian per komoditi sebagai berikut
- 1. Ganti kepal sebesar 100000 ton
 - 2. BBM sebesar 100000 ton
 - 3. Gelas sebesar 100000 ton
 - 4. Batu bara sebesar 100000 ton
 - 5. Rantai kereta api sebesar 100000 ton
 - 6. Gelas sebesar 100000 ton
 - 7. Rantai kereta api Back Indonesia, Bea KCB, Alokasi di Jawa, Alokasi di Pulau Jawa, Muli, Bea Indonesia sebesar 4400 ton

- b. Alokasi barang kereta api di Stasiun Sumatera sebesar 400000 ton, dengan rincian per komoditi sebagai berikut
- 1. Batu bara sebesar 200000 ton
 - 2. Gelas sebesar 400000 ton
 - 3. BBM sebesar 100000 ton
 - 4. Alokasi kebetulan, gula, kayu, gandum sebesar 200000 ton
 - 5. Ganti kepal sebesar 400000 ton
 - 6. Karet dan kikir sebesar 100000 ton
 - 7. Rantai kereta api Back Indonesia, Bea KCB, Alokasi di Jawa, Alokasi di Pulau Jawa, Muli, Bea Indonesia sebesar 200000 ton
 - 8. Rantai kereta api sebesar 400000 ton

Demikian ini adalah alokasi barang kereta api Tahun 2020 dan 2022 sebesar 2000000 ton Tahun 2020 sebesar 4000000 ton, Tahun 2022 sebesar 10000000 ton dan Tahun 2022 sebesar 10000000 ton dan realisasi pada Tahun 2020 sebesar 4200000 ton, maka di periode ini adalah realisasi barang terangkut kereta api dari Tahun 2020 dan 2022 sebesar 20000000 ton. Jumlah tersebut diharapkan dapat mencapai target produksi alokasi barang kereta api Tahun 2020 dan 2024 berdasarkan Rencana strategi yaitu sebesar 4000000 ton, dengan demikian ini adalah target alokasi barang kereta api pada Tahun 2020 sebesar 1000000 ton.

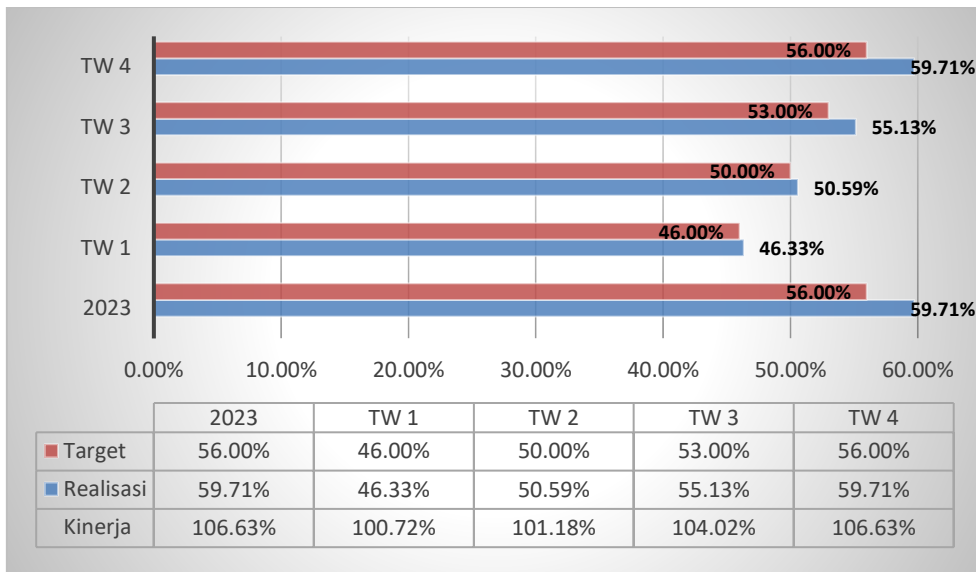


Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Target yang ditetapkan berdasarkan Perencanaan Kinerja Tahun 2023 terdiri terakumulasi sebesar 400 juta Realisasi yang melebihi target akumulasi baru-baru kereta api Tahun 2023 sebesar 400 juta, maka diperoleh selisih kinerja sebesar 0,00 dari target yang ditetapkan. Produk akumulasi setiap triwulan pada Tahun 2023 berdasarkan realisasi yang tercatat yaitu pada Triwulan I sebesar 104 juta ton, Triwulan II sebesar 104 juta ton, Triwulan III sebesar 100 juta ton dan Triwulan IV sebesar 92 juta ton. Pada Triwulan I dan II tersebut, kecurangan periode dapat tercapai sesuai target triwulan kinerja 100% Realisasi target dan realisasi per triwulan Tahun 2023 di dalam rangka pada Tabel dan gambar berikut.

Tabel 1. Capaian Kinerja Penjualan Target Angkutan Barang Kereta Api Per Triwulan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)	
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Realisasi Target Akumulasi Barang Kereta Api	juta	400	104	104	100	92	104,00	104,00	100,00	92,00	100,00	104,02	104,02	100,00	92,00	106,63



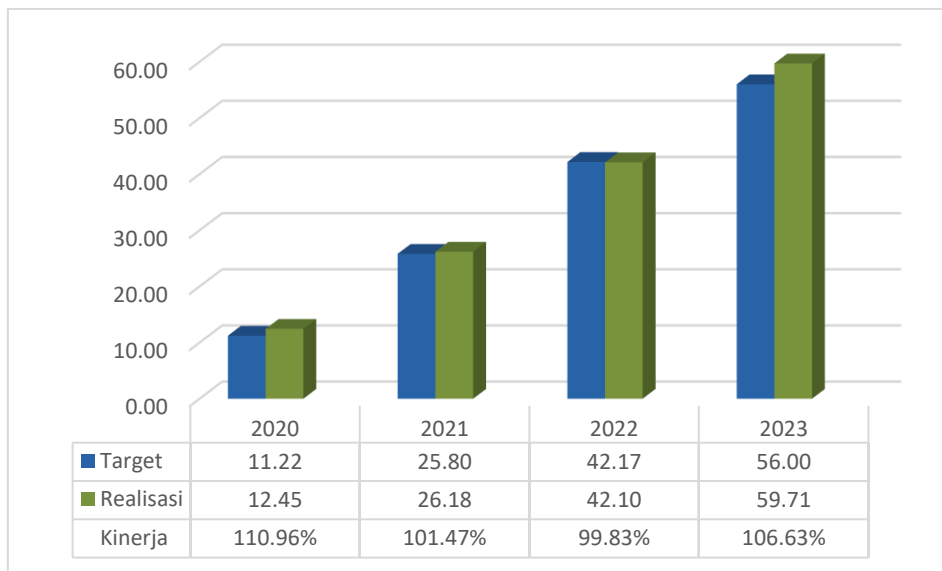
Gambar 1. Capaian Kinerja Penjualan Target Angkutan Barang Kereta Api Per Triwulan Tahun 2023

Perbandingan Realisasi dan Target Tahun TerakHIR

Pada Tahun 2020-2023, pencapaian kinerja cenderung berfluktuatif dan secara keseluruhan per tahun dapat memenuhi target tahunan kinerja 100%. Realisasi pencapaian target angkutan barang kereta api di periode secara kumulatif pada periode Tahun 2020-2024 dengan rata-rata peningkatan dari Tahun 2020-2023 yaitu sebesar 2,24% per tahunnya berdasarkan target dan realisasi periode 2020-2023 dapat dilihat pada Tabel dan gambar berikut.

Tabel-1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2023 untuk Peningkatan Target Angkutan Barang Kereta Api

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Pencapaian Target Angkutan Barang Kereta Api	%	11,22	25,80	42,17	56,00	12,45	26,18	42,10	59,71



Gambar-1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2023 untuk Peningkatan Target Angkutan Barang Kereta Api

Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

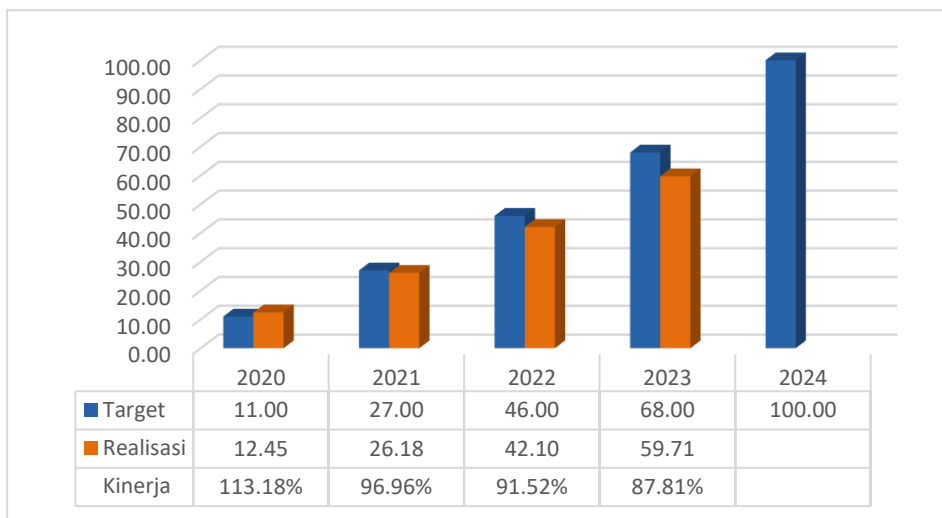
Realisasi pencapaian target angkutan barang kereta api pada Tahun 2020 sebesar 12,45%, sedangkan target Tahun 2020 ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebesar 11,00% sehingga di periode pencapaian kinerja sebesar 113,18% pencapaian tersebut terdapat selisih dari Tahun 2020 yang berkisar 1,45% atau 13,18% dari Tahun 2020 yang berkisar 11,00% selisih tersebut Revisi Rencana Strategis, dikarenakan karena sifat ekonomis

kereta api angkutan barang yang berdampak akibat aktivitas *double handling* sehingga akan berakibat menurunnya daya angkut yang akan berdampak pada target Tahun 2024 pada Rencana Strategis, oleh karena itu akan besar karena akan terdapat cara-cara yang sudah diuji coba sebesar 40% dari Target yang telah ditetapkan

Tabel 4.1 Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Peningkatan Target Angkutan Barang Kereta Api

Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Capaian Target Angkutan Barang Kereta Api	%	11	27	46	68	100	12,45	26,18	42,10	59,71	100

*) Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan Target Renstra Tahun 2024



Gambar 4.1 Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Peningkatan Target Angkutan Barang Kereta Api

Perbandingan Kinerja di Perusahaan Internasional

Kinerja angkutan barang perusahaan kereta api dibandingkan dengan kinerja perusahaan lain yaitu British Rail yang berada di Inggris dan Office of Rail and Road yang berada di Inggris. Kinerja angkutan barang perusahaan kereta api diuraikan pada Tabel berikut

Tabel-1 Perbandingan Jumlah Angkutan Barang Kereta Api

No	Negara	Panjang Jalur Kereta Api (km)	Rata-Rata Jumlah Angkutan Barang per Tahun	Rata-Rata Jumlah Angkutan Barang per Panjang Jalur Kereta Api per Tahun
1	Britania Raya	40000	2000000	50
2	Indonesia	10000	400000	4

Sumber No. 1 : Office of Rail and Road Publication (diolah, rata-rata per bulan)

Berdasarkan data di atas, diperoleh bahwa rata-rata angkutan barang kereta api di Indonesia per bulan lebih rendah apabila dibandingkan dengan Britania Raya. Hal ini menunjukkan bahwa angkutan barang per kereta api, khususnya kereta api barang di Indonesia lebih baik dibandingkan Britania Raya dengan rata-rata 50 TPK per bulan, sedangkan Britania Raya hanya 4 TPK per bulan.

Hal tersebut disebabkan titik utilitas angkutan kereta api di Indonesia untuk angkutan barang cukup tinggi dan sudah diduduki kekapasitas berdasar atas terutama batubara di Sumatera. Bahkan beberapa perusahaan angkutan kereta api untuk transportasi baik domestik batubara ke luar negeri maupun ke luar negeri ekspor.

1. Analisis Kerjasama Kegagalan Pencapaian Target

Diperoleh angkutan barang yang didominasi dengan komoditi batubara di Sumatera. Bahkan beberapa perusahaan di Sumatera untuk keperluan ekspor. Faktor-faktor yang menyebabkan target antara lain:

- a. Tidak adanya rekayasa angkutan kereta api barang yang diduduki dengan kapasitas kapasitas perkeretaapian yang memadai khususnya *mainline* di Pulau Jawa dan Sumatera. Bahkan beberapa di antaranya dengan kapasitas angkutan barang.
- b. Publikasi informasi aktif untuk memberikan informasi dan angkutan barang angkutan kereta api dengan berbagai keunggulan yang dimiliki, terutama dalam mencari potensi angkutan barang melalui mitra ekspansi atau baru oleh Badan Usaha Perkeretaapian.

Meingkatkan efisiensi dan produksi barang yang diakibatkan
baiknya pelayanan angkutan kereta api Barab, diajarkan pada
angkutan bus, angkutan kereta api dan angkutan lainnya

Sebelumnya Target angkutan Barab Kereta api diarahkan dapat
menghasilkan *outcome* sebagai berikut

a. Menurunkan kepadatan lalu lintas jalan raya dengan menyediakan
sebagai besar angkutan barang truk sendiri pelayanan kereta api
Dengan menurunkan tersebut juga dapat lebih menurunkan biaya
perawatan jalan, di mana apabila jalan terus menerus diobati truk
angkutan logistik akan mengakibatkan biaya operasi 40 ton akan lebih
ringan sebagai besar kendaraan di struktur, kendaraan
struktur bahan jalan dan lainnya sehingga pengeluaran biaya ekstra
dalam perawatan

b. Menurunkan kepadatan lalu lintas jalan raya dengan menurunkan truk
angkutan barang yang beroperasi di jalan juga dapat meningkatkan
kelembatan transportasi, karena kereta api sendiri tidak
kelembatan sebagai lebih tinggi dibandungkan pelayanan truk angkutan
logistik akan lebih ringan sebagai untuk kendaraan keaduan
kelembatan akibat kelebihan beban muatan, titik *blind spot*, kelembatan
pengemudi, cuaca buruk, pelanggaran aturan lalu lintas dan lainnya

Upaya Peningkatan Kinerja

Untuk memastikan dan meningkatkan kualitas kinerja pada
periode selanjutnya antara lain

a. Menjalankan jalan angkutan kereta api barang dengan diawali dari bus
sebelumnya yang sudah terdapat jalur kereta api untuk mendirikan
barang ekspor, diajarkan sebelum Tarung Priok, sebelum
Tarung Ma, sebelum Tarung Perak, sebelum Kuala Tarung,
sebelum Parangkajene

b. Menjalankan *market* berdaya untuk mengidentifikasi kebalikan angkutan
barang ekspor sedebare sebelum Tarung Priok terangkut terutama
interaksi biaya dari angkutan lain take order antar transportasi
barang kereta api lebih kompetitif

kegiatan itu, diumumkan bahwa beberapa cara penyelesaian terhadap strategi kebiyakan dan aktivitas perusahaan untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya

a. **Penyesuaian Strategi/Kebijakan** pelaksanaan Rencana Strategi Bidang Perkeretaaiaan Tahun 2023-2024 terkait rediktor target angkatan barisan kereta api dengan cara lain yang ada untuk pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan anggaran dan biaya

b. **Penyesuaian Aktivitas/Anggaran**

1. Diumumkan kegiatan pendukung dan aktivitas berupa Kajian Pelaksanaan Operasi Jalur Kereta Api Barisan yang terdapat dalam statistik pada Tahun 2024 untuk mendukung Indikator kinerja yang ditetapkan Tahun 2020 tentang pelaksanaan kegiatan

2. Pelaksanaan dan pelaksanaan aktivitas aktivitas kegiatan pendukung cara lain bidang Perkeretaaiaan dengan adanya kebijakan *Automatic Adjustment* Tahun 2024 pelaksanaan Surat Menteri Keuangan yang No 2/MK/02/2023 untuk pelaksanaan diumumkan pelaksanaan aktivitas yang terdapat

PERSYARIFAN PERSEKUTUAN JURKOR GSSU ID GTOI

Peraturan realisasi perencanaan pelaksanaan jalur kereta api yang sesuai dengan TOI pelaksanaan pada tahun pelaksanaan berdasar atas Direktorat Jenderal Perkeretaaiaan dengan TOI Kereta Api Indonesia di Indonesia yang Jaqaa dan kualitasnya *Track Quality Index* TOI terbagi menjadi beberapa kategori yaitu Kategori I dan II TOI dengan kecepatan 0-20 km/jam dan Kategori III dan IV TOI dengan kecepatan 40-60 km/jam

Pada Tahun 2023, pelaksanaan TOI dilakukan dengan metode tripartit pada seluruh stasiun utama di Indonesia yang dan kualitasnya Data pelaksanaan yang diumumkan sebagai data pencapaian Tahun 2023 adalah pelaksanaan kereta api kategori III data kategori I dan II TOI dengan kecepatan data dengan nilai yang terukur dengan nilai 100,44 km/jam pada tahun pelaksanaan yang jalur kereta api diumumkan untuk Kategori I dan II pelaksanaan

0000,000 k , Beda00ka0 Ca00a000 a0ur kereta a0i Kate00ri III da0 I0 ada00
 0e0a00a00 000,000 K0 0Ri00ia0 0a000e00ukura0 T0I 0e000u0aka0 kereta
 ukur diuraika0 0eba0ai berikut0

Ta0e00-00 Per0itungan Persentase Ja0ur Kereta 0pi 0ang Sesuai dengan T0I

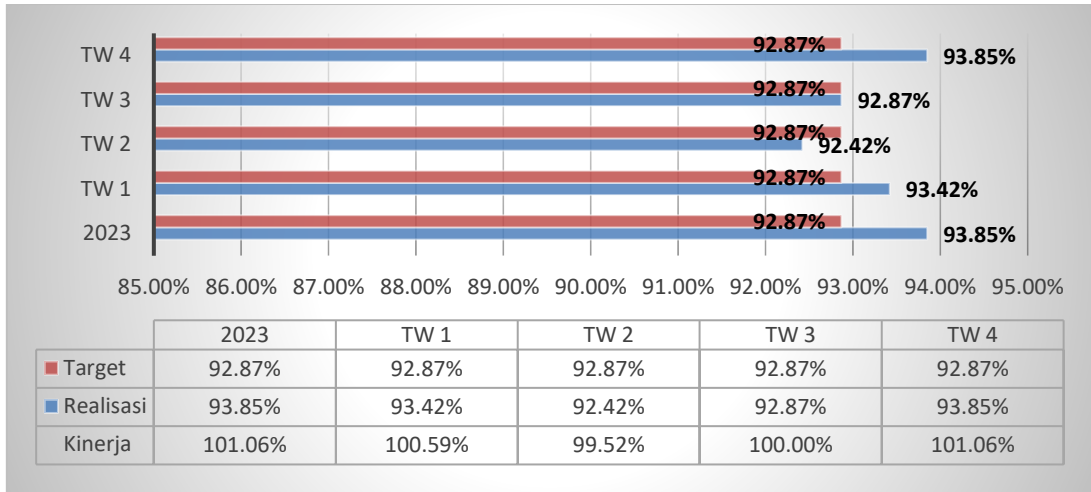
Klasifikasi T0I	Kualifikasi				Ja0ur Terukur Ta0un 0000 K0 Ja0ur0		
	T0I A (Ke0e0ata0 00 0d 020 K0 0a00 0)	Kate00ri I	Ke0e0ata0	0	000 0d 020 k0 0a0	0000,044	0000,000
K00di0			0	00a0 a0			
Kate00ri II		Ke0e0ata0	0	00 0d 000 k0 0a0			
		K00di0	0	00 a0			
T0I B (Ke0e0ata0 40 0d 00 K0 0a00 0)	Kate00ri III	Ke0e0ata0	0	00 0d 00 k0 0a0	000,000		0,000
		K00di0	0	0 a00ada			
	Kate00ri I0	Ke0e0ata0	0	40 0d 00 k0 0a0			
		K00di0	0	Ba0a0a			

00 Per0andingan Target Tri0uan dan Ta0unan dengan Realisasi Kinerja

De00ca0 tar0et 0er0e0ata0e a0ur kereta a0i 0a00 0e0uai de00ca0 T0I
 berda0arka0 0era00ia0 Ki0er0a Ta0un 2020 0e00i terak0ir00ebe0ar 02,000
 da0 rea0ita0i 0a000e00ukura0 T0I di0er0e0 0ebe0ar 00,000 , 0aka 0a0aia0
 ki0er0a Ta0un 2020 ada0a0 0ebe0ar 00,000 00a0aia0 ki0er0a 0ada 0a0000
 0a000 0eri0de tri0ua0 ber00ktuati0, 0a0u0 0e0ara ku0uati00ada Tri0ua0 III
 00 di0er0e0 ba00a tar0et da0at ter0e0ui 0ki0er0a 0000 0de00ca0 0er0e0a0
 data 0e00ukura0 T0I berda0arka0 0a00k00rdi0a0i de00ca0 0T0K0I0Rea0ita0i
 ku0uati00er tri0ua0 0eba0ai a0a di00at 0ada Tabe0da0 0a0 bar berikut0

Ta0e00-00 Persentase Ja0ur Kereta 0pi 0ang sesuai dengan T0I Per Tri0uan Ta0un 0000

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Ta0unan	Target Kinerja Tri0uan				Realisasi Kinerja Tri0uan				Capaian Kinerja Tri0uan 0000				Capaian Kinerja Ta0unan 0000
			I	II	III	I0	I	II	III	I0	I	II	III	I0	
0er0e0ata0e 0e0000era0ia0 Ja0ur K0 0a00 0e0uai de00ca0 T0I	0	02,00	02,00	02,00	02,00	02,00	00,42	02,42	02,00	00,00	000,00	00,02	000,00	000,00	000,00



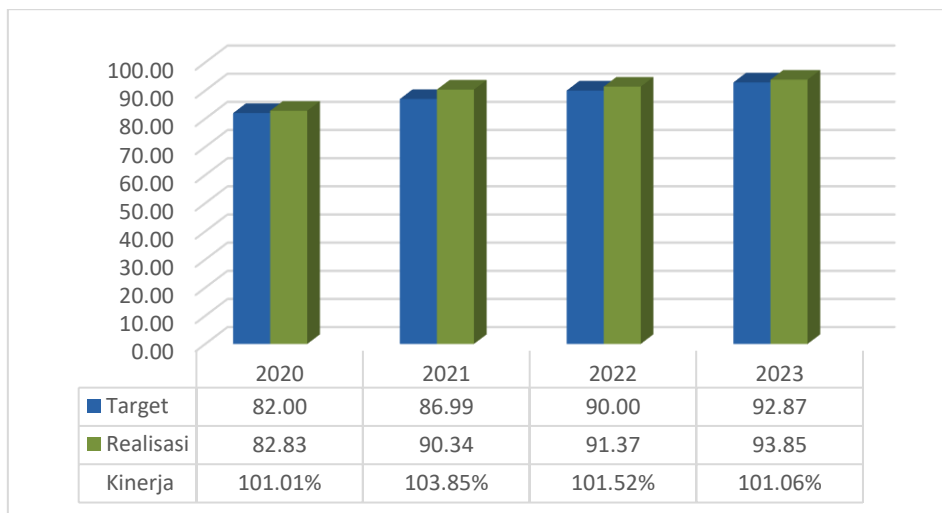
Gambar 4.10 Capaian Kinerja Persentase pengoperasian jalur Kereta api sesuai dengan TPI Per Triwulan Tahun 2023

Perbandingan Realisasi dan Target Tahun TerakHIR

Perbedaan kemampuan pemeliharaan kereta api yang terjadi dengan TPI pada tahun terakHIR dapat tercapai sesuai target kinerja 100%, dimana realisasi TPI cenderung melebihi keaikaan yang diijinkan dengan persentase sebesar 102% dari Tahun 2020.

Tabel 4.11 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2023 untuk Persentase Pengoperasian Jalur Kereta api sesuai dengan TPI

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Persentase pemeliharaan Jalur Kereta api sesuai dengan TPI	%	82,00	86,99	90,00	92,87	82,83	90,34	91,37	93,85



Gambar 4.11 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2023 untuk Persentase Pengoperasian Jalur Kereta api sesuai dengan TPI

Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Realisasi kinerja pelaksanaan jalur K yang sesuai dengan T pada Tahun 2023 sebesar 93,85, sedangkan target Tahun 2023 adalah 90,00. Pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebesar 100,00. Pelaksanaan kinerja ini sebesar 94,20. Pelaksanaan kinerja pada periode 2020-2023 secara rata-rata dapat tercapai sesuai target. Hal ini berbeda dengan Rencana Strategis dengan pelaksanaan kinerja rata-rata sebesar 100,00 dan kinerja tertinggi pada Tahun 2023 sebesar 93,85 dari target tahunan pada Rencana Strategis. Hal ini disebabkan dengan Target Tahun 2024 pada Rencana Strategis, dimana pelaksanaan sebesar 93,40. Untuk itu, diharapkan agar dapat pelaksanaan pelaksanaan jalur kereta api pada Tahun 2024 agar dapat mendukung pelaksanaan T yang sesuai target dapat tercapai.

Tabel 4.1 Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2023 untuk Persentase Pengoperasian Jalur K yang sesuai dengan T

Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kinerja pelaksanaan jalur K yang sesuai dengan T	%	83,00	85,00	87,00	90,00	94,20	82,83	90,34	91,37	93,85	93,40

*) Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan Target Renstra Tahun 2024



Gambar 4.1 Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2023 untuk Persentase Pengoperasian Jalur K yang sesuai dengan T

Sehingga itu, persentase pelaksanaan anggaran KPA sesuai dengan TPI juga ditargetkan pada Rencana pelaksanaan Jangka Menengah tahunan RPJM Tahun 2020-2024 dimana pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar 80% dan realisasi persentase pelaksanaan anggaran KPA sesuai dengan TPI Tahun 2020 sebesar 82,83, maka di periode selanjutnya sebesar 84,2% berdasarkan target pada RPJM tersebut. Demikian juga untuk Tahun 2020-2022, dimana kinerja persentase pelaksanaan anggaran KPA sesuai dengan TPI selalu tercapai dengan rata-rata kinerja sebesar 80% dan realisasi tertinggi pada Tahun 2020 sebesar 80% dari target tahunan pada RPJM Tahun 2020-2024.

Tabel 4.11 Perbandingan Target RPJM dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Persentase Pengoperasian Anggaran sesuai dengan TPI

Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pelaksanaan anggaran KPA sesuai dengan TPI	%	80,0	80,0	80,0	84,0	82,83	80,34	81,37	83,85	84,28	80,00



Gambar 4.11 Perbandingan Target RPJM dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Persentase Pengoperasian Anggaran sesuai dengan TPI

Perbandingan Kinerja di Beberapa Organisasi Internasional

Berdasarkan kualitas sarana prasarana perkeretaaian di beberapa survei yang dilakukan oleh *World Economic Forum* dan *Forum for the Future* serta data dari *Global Competitiveness Index* yang diterbitkan oleh lembaga survei tersebut, dapat dilihat bahwa kualitas sarana prasarana perkeretaaian di beberapa negara dapat dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Berikut ini adalah data kinerja kualitas sarana prasarana perkeretaaian di beberapa negara yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Perbandingan *Railroad Infrastructure Quality* dengan Negara-Sekeloa

No	Ranking	Negara	<i>Railroad Infrastructure Quality</i>
1	1	Swedia	5,0
2	2	Malaysia	4,0
3	3	Indonesia	4,0
4	4	Korea	3,0
5	5	Taiwan	2,0
6	6	Filipina	2,4

Sumber : *World Economic Forum (WEF)*

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dilihat bahwa kualitas infrastruktur jalur kereta api di Indonesia cukup baik apabila dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki peringkat 1 dari 6 negara. Demikian juga apabila dibandingkan dengan ke-6 negara lainnya yang memiliki peringkat 2,0 dan 2,4 dari 6 negara. Beberapa perbedaan yang dapat dilihat antara lain adalah kualitas sarana prasarana perkeretaaian di Indonesia dapat dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Berikut ini adalah data kinerja kualitas sarana prasarana perkeretaaian di beberapa negara yang disajikan dalam tabel berikut.

NEGARA	Nilai Kualitas
Jepang 	6,8
Switzerland 	6,4
Korea Selatan 	5,9
Amerika Serikat 	5,2
Perancis 	5,0
Jerman 	4,9
Indonesia 	4,7
Cina 	4,5
Australia 	4,4
India 	4,4
Inggris Raya 	4,3

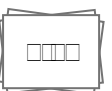
Sumber: The Global Economy

Gambar 1.1 Perbandingan Railroad Infrastructure Quality dengan Negara Non S

Analisis Keberhasilan Kegagalan Pencapaian Target

Daerah-daerah di era tersebut beberapa daerah di antara beberapa data data diri yang untuk berbagai faktor tertentu *threshold* yang diumumkan dalam beberapa TPI dan beberapa terdapat antara pada Tahun 2020 untuk beberapa faktor TPI lain itu, beberapa data yang diumumkan TPI diumumkan Kereta per hari Tahun 2020 beberapa hari diumumkan oleh PT KAI dengan koordinasi Direktorat Jenderal Perkeretaaian

dan keberhasilan daerah-daerah di era tersebut beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu kegiatan untuk kereta api di antara dan atau atau periode Tahun 2022-2023. Beberapa kegiatan tersebut di antara dan atau Media Beban Tahun I oleh Media Sabana dengan rasio 00, Kinerja – Manajamuda dengan rasio 4,2, dan – atau a dengan rasio 4,00, dan dan diri dengan rasio 2,2, Jeberkaiat dengan rasio dan terdapat



terkecila keterlambatan rencana, dan Manajerialnya dengan rencana
00,000 0

Kejari itu, juga berfokus pada pembangunan jalur pada K di beberapa lokasi
yaitu Morkert – Petajahan dengan rencana 000, Bandung – Cikarang
Taka 2 dengan Kiara dengan rencana 000 dan jalur jalur elevated Medan – Biak dengan
rencana 40,200 0

Keajaiban tersebut diharapkan jalur K akan sesuai dengan T di
dikembangkan secara outcome sebagai berikut

- a. Peningkatan kualitas layanan angkutan kereta api dengan perbaikan
kecepatan kereta api serta perbaikan waktu tempuh
- b. Peningkatan kapasitas angkutan kereta api dengan perbaikan
frekuensi layanan kereta api atau dapat mengakomodir lebih banyak
layanan kereta api
- c. Peningkatan keselamatan layanan kereta api di area pelayanan
jalur kereta api terutama pada aspek keselamatan

00 Upaya Peningkatan Kinerja

000a. Untuk memastikan dan meningkatkan kinerja kinerja pada
periode 0000 tercapai dan rangka keajaiban target RJM dan
Rencana Strategi Tahun 2020 – 2024 diartikan

- a. Peningkatan pelayanan jalur kereta api baik kecepatan layanan atau
kecepatan baru di beberapa lokasi diartikan atau antara lain Kiara –
Mabangga – Padang, Medan – Belau Taka II,
Jember Barat – Jember, Jawa Barat – Cirebon,
Taka – Cirebon, Manajerial, Jawa Timur – Jember,
tercapai pada pembangunan jalur pada kereta api *at grade* dan *elevated* di
kota-kota di Jawa dan Sumatera
- b. Meningkatkan dan evaluasi pelaksanaan kecepatan pelayanan jalur kereta
api, pembangunan jalur pada kereta api serta peningkatan jalur kereta
api ekspansi cara berkala
- c. Peningkatan pendapatan untuk mendukung kinerja T di

d) **Penyesuaian Tarif** berdasar devisa TKI dan rangka pelaksanaan
untuk pelaksanaan

keini itu, diungkapkan ada beberapa hal penyelesaian terdapat
strategi kebijakan, aktifitas sarana, serta penyelesaian abatan-pemakai
untuk pendidikan pelaksanaan kinerjanya ditargetkan

a) **Penyesuaian Strategi/Kebijakan** Diungkapkan kebijakan terkait target
TKI serta pelaksanaan devisa dan pelaksanaan TKI pada rata-rata
perkeretaaan yang dioperasikan keini oleh TKI

b) **Penyesuaian Aktivitas dan Anggaran** yang ada dan tidak terdapat
penyelesaian anggaran kegiatan pendidikan pendidikan TKI devisa
ada pada kebijakan *Automatic Adjustment* Tahun 2024 dengan Surat
Menteri Keuangan nomor 02/MK/02/2024 yang selanjutnya
diungkapkan pelaksanaan anggaran yang tersedia

c) **Penyesuaian Penempatan Jabatan/Pegawai** Diungkapkan penyelesaian
kebutuhan pendidikan kementerian keini untuk
penyelesaian pelaksanaan TKI yang pendidikan rencana pelaksanaan TKI
devisa penyelesaian kereta ukur milik Direktorat Jenderal
perkeretaaan

INDUKS KUPUS MERSURKOT IKM TRONDIP P PUBLIK IDG PARKROTPI

Penyusunan Idek Kelembagaan Masyarakat IKM dilakukan terdapat
kegiatan publik yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal
perkeretaaan yang selanjutnya RB nomor 4 Tahun 2024 tentang
pedoman penyusunan survei Kelembagaan Masyarakat ini IKM Direktorat
Jenderal perkeretaaan meliputi aspek administratif pemerintahan sebagai
reputasi penyelesaian perkeretaaan meliputi, pertikaian, keluhan,
dan lain-lain serta aspek aspek kereta api yang dilaksanakan oleh unit
kerjasama yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal perkeretaaan

ini IKM Direktorat Jenderal perkeretaaan diperoleh dari hasil survei
kelembagaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat yang ditata dan
diketahui Kereta Api, Direktorat Rata-rata perkeretaaan, Direktorat sarana



Perkeretaaiaan, Direktorat Kereta Api Perkeretaaiaan, Balai Penelitian Kereta Api Riset BKKR Sumatera Selatan dan Balai Penelitian Perkeretaaiaan dan Industri IKM dibagi menjadi 4 kategori, yaitu

Tabel-10 Kategori Kinerja Balai IKM

Skala Persepsi	Skala Interaksi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,000 – 2,000	D	Tidak Baik
2	2,000 – 3,000	C	Kurang Baik
3	3,000 – 4,000	B	Baik
4	4,000 – 5,000	A	Sangat Baik

Berdasarkan permasalahan Kinerja Tahun 2020 yang terakumulasi ditetapkannya target nilai IKM Tahun 2020 sebesar 4,400 dan pelaksanaan yang dilakukan pada tahun 2020 di seluruh Balai rata-rata IKM sebesar 4,00 dan raihannya per unit kerja dan per bulan sebagai berikut

Tabel-11 Rasi Survei Balai IKM Tahun 2020

Unit Kerja	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sep	Oktr	Nov	Des
Ditjen K	4,00	4,02	4,04	4,04	4,00	4,00	4,00	4,04	4,00	4,00	4,00	4,00
Ditjen Perkeretaaiaan	4,00	4,02	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,04	4,00	4,00
Ditjen Perkeretaaiaan	4,04	4,02	4,00	4,00	4,04	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,02	4,00
Ditjen Kereta Api	4,00	4,00	4,04	4,00	4,04	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,02
BKKR Sumatera Selatan	4,02	4,04	4,04	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
BKKR Sumatera Selatan Pusat	4,04	4,04	4,00	4,00	4,00	4,02	4,02	4,00	4,02	4,02	4,00	4,00
Balai Penelitian	4,40	4,40	4,40	4,42	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
Rata-rata per Bulan	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Rata-rata Tahun 2020												4,00

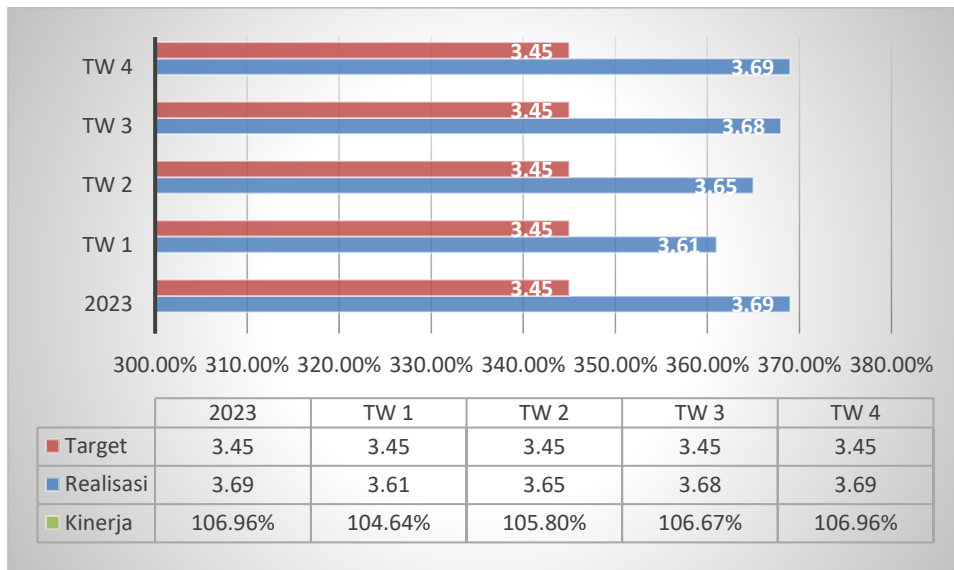
Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Berdasarkan rata-rata pelaksanaan yang dilakukan terhadap pelaksanaan publik bina perkeretaaiaan Tahun 2020, di seluruh Balai IKM sebesar 4,000 nilai tersebut dibandingkan dengan target nilai IKM berdasarkan permasalahan Kinerja Tahun 2020 yang terakumulasi yaitu sebesar 4,400, maka di seluruh Balai kinerja sebesar 400,000 pada Tahun 2020, nilai IKM per triwulan secara kumulatif mencapai ke-4000 dari Triwulan I sebesar 4,000 dan Triwulan II

Realisasi kinerja kuwartal triwulan sebelumnya akan diilustrasikan pada Tabel dan gambar berikut.

Tabel 1. Capaian Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2023

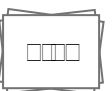
Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,00	104,40	100,00	100,00	100,00	100,00



Gambar 1. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2023

Perbandingan Realisasi dan Target Tahun Terakhir

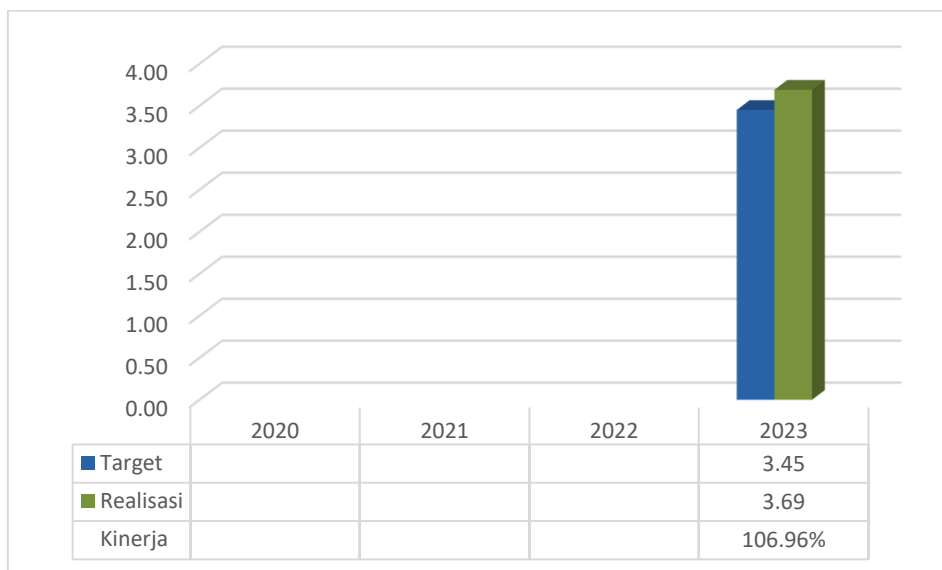
Indikator Kinerja untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik Bidang Perkeretaapian merupakan indikator yang sudah diimplementasikan pada Tahun 2020 sesuai arahan dari Kementerian RB yang dilaksanakan dengan pendekatan *cascading*. Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik sektor Transportasi. Untuk itu, indikator IKM belum terdapat sebelum tahun 2020 dan 2022, demikian juga dengan realisasinya akan belum diumumkan perhitungannya di Tingkat Kabupaten terkait IKM pelayanan publik Bidang Perkeretaapian karena belum ada data yang terdapat pada aplikasi.



Indikator kinerja diukur dengan metode Keefektifan Perencanaan, dan dapat diartikan sebagai nilai IKM untuk Tahun 2020 sebesar 3,00 dan Tahun 2022 sebesar 3,00 yang menunjukkan bahwa pada periode tersebut cenderung mengalami peningkatan baik pada Tahun 2020 maupun di tahun realisasi periode 2020 dan 2022 dan dapat dilihat pada Tabel dan gambar berikut.

Tabel 4.10 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2023 untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,00	3,00	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,00

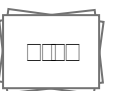


Gambar 4.10 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2023 untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian

4.1 Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Indikator Kinerja untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian tidak tercapai dalam Rencana Strategis Keefektifan Perencanaan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024 untuk itu, perbandingan realisasi dengan Target pada Rencana Strategis tidak dapat diabaikan.

4.2 Perbandingan Kinerja di Lempengasi dan Internasional



Perbaikan kinerja di beberapa lokasi akurasi terdapat pada kinerja IKM dibandingkan dengan beberapa kriteria perubahaan pada Tahun 2020 perbaikan nilai IKM tersebut diuraikan pada Tabel berikut

Tabel 1. Perbandingan nilai IKM

No	Unit Kerja	Nilai IKM
1	Kelembagaan perubahaan	1,00
2	Ditjen Kereta Api	1,00

Catatan: Nilai IKM dihitung kumulatif selama Tahun 2023

Berdasarkan data di atas, diperoleh bahwa nilai IKM Direktorat Jenderal Kereta Api lebih rendah dari nilai IKM Kelembagaan perubahaan. Hal ini dikarenakan beberapa kata kunci untuk evaluasi kinerja di Kelembagaan perubahaan atau lainnya.

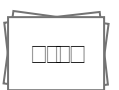
1. Analisis Keberhasilan Kegagalan Pencapaian Target

Salah satu bidang kereta api yaitu layanan administrasi perijinan sebagai regulator perijinan, sertifikasi, regulasi, lisensi serta layanan angkutan kereta api dan dioperasikan oleh PT KeraiB di lingkungan Direktorat Jenderal Kereta Api Balai Operasi Kereta Api Riwayat Operasional Keberhasilan dalam pelaksanaan kinerja didukung dengan pelaksanaan sistem informasi, keandalan DM dan perbaikan layanan, ketepatan waktu pelayanan layanan, tercapainya kualitas dan layanan layanan sesuai standar bisnis yang telah ditetapkan pada Tahun 2020, seluruh unit kerja akan dilaksanakan survei IKM yang sudah dilaksanakan apabila IKM akan dikemas oleh Petunjuk Kelembagaan perubahaan dengan nilai-nilai yang memadai dari seluruh unit kerja terkait.

Pelaksanaan target kinerja untuk Indeks Keunggulan Masyarakat IKM terdapat salah satu bidang kereta api diarahkan sebagai indikator outcome berupa beberapa kecerdasan bisnis yang dilaksanakan bersama masyarakat era digital terdapat layanan pelayanan kereta api.

2. Upaya Peningkatan Kinerja

Salah satu upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja pada periode mendatang ditargetkan



a) Tidak dapat diurus oleh kedua pemerintah daerah
Direktorat Jenderal Kereta Api terakut akan berka terada
diperbaiki di eride berikut

b) Peningkatan kemampuan TIK digital berupa integrasi data,
perencanaan terakut dan kemampuan *dashboard* teradu
terada beberapa bida Kereta Api, erika,
eua, ai

erai itu, diuka beberapa eua terada
tratekbiaka, aktitaraa
erta eeata abataeai
uuk eedukuaa kiera diaara

a) **Penyesuaian Strategi/Kebijakan** Dikuaka *benchmarking*
eakraa aaaa eeeraa traarta terakut
eakraa uru IKM ada ut ker a berkeri ebi baik di
ikuKa Keeria erubuaa uuk auka tratekbiaka

b) **Penyesuaian Aktivitas/Anggaran**

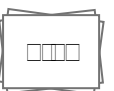
Dukuaa keiaa daaara a e adai uuk Peningkatan
euaaata inte TIK digital berupa integrasi data,
perencanaan terakut dan kemampuan *dashboard* teradu
terada beberapa bida Kereta Api, erika,
eua

2) Puaa daak terada euaa aara keiaa
eedukuaa eikata ai IKM deaa adaa kbiaka
Automatic Adjustment Tahun 2024 eeau urat Meeri
Keuaa er 02MK02202 uua eautta dieruka
eeerai a aara a teredia

Penyesuaian Penempatan Jabatan/Pegawai Dikuaka eakraa
erai uuk eikata kete eeai daa eberia
a a keada aarakat uua eedukuaa eikata ai IKM
Direktorat Jenderal Kereta Api

ISIS ISI SI SUM R D

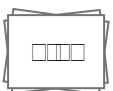
eakraa rra da keiaa Direktorat Jenderal Kereta Api
ebutuka dukuaa dari berbaai uuber daa aar inte dat beria



depan baik pelaksanaan kekuatan cara tepat guna dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang diarahkan dapat meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap unit di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaaian. Kinerja suatu organisasi dikatakan baik apabila pelaksanaan sumber daya dan dana yang tersedia lebih efektif dan efisien.

Dari sisi keterediaan dan kualitas sumber Daya Manusia (DM), perusahaan yang memiliki kemampuan, cara dan target kinerja unit kerja yang perlu untuk dicek sesuai kebutuhan dan didukung dengan kompetensi keahlian yang memadai pada Tahun 2021, yang akan dicapai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaaian sebagai salah satu pencapaian. Dari total pencapaian Direktorat Jenderal Perkeretaaian tersebut, 100% pencapaian diartikan telah memiliki sertifikat kompetensi keahlian 100,4% dari total pencapaian Direktorat Jenderal Perkeretaaian baik kompetensi teknis, inspektur, auditor, pemeliharaan, administrasi, lain-lain dan juga kompetensi profesional tertentu ke depan. DM yang akan dikembangkan di bidangnya tersebut untuk memenuhi keberadaannya sebagai tugas organisasi yang dibuktikan dengan pencapaian target kinerja dari indikator kinerja secara keseluruhan pada Tahun 2021 dengan rata-rata kinerja 100,40% kriteria *on the right track* 100%.

Dari sisi pelaksanaan sumber daya alam, Direktorat Jenderal Perkeretaaian juga telah melakukan efisiensi anggaran di antara beberapa target indikator kinerja secara keseluruhan telah tercapai 100% dengan nilai terdapat data anggaran dari tahun yang dikalkulasikan pada Tahun 2021. Rincian efisiensi sumber daya alam yang akan dicapai pada Tabel berikut.



Ta 2023-2024 Analisis Efisiensi Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Keuangan				Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Pagu	Realisasi	Penyerapan Anggaran	Sisa Anggaran Efisiensi Pada Indikator yang Menapai Target Kinerja (Rp)	
Rasio Efektivitas Operasional	Rasio	0,4	0,4	100,00	2000000000000	2000000000000	4,2	2200000000000	Pada tahun 2023, Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi operasional, seperti melalui restrukturisasi, digitalisasi, dan peningkatan kualitas layanan. Dengan demikian, tercapainya target efisiensi operasional sebesar 100% menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah berhasil meningkatkan efisiensi operasionalnya.
Rasio Kelembagaan Kelembagaan Transportasi Perkeretaapian	Kelembagaan Kelembagaan Unit Kerja	0,00	0,00	0,00	0000000000000	0000000000000	0,00	0000000000000	Pada tahun 2023, Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi kelembagaan, seperti melalui digitalisasi, restrukturisasi, dan peningkatan kualitas layanan. Dengan demikian, tercapainya target efisiensi kelembagaan sebesar 0% menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah berhasil meningkatkan efisiensi kelembagaannya.
Perentase Pelaksanaan On Time Performance (OTM) Transportasi Kereta Api	%	100	100,00	100,2	4000000000000	2000000000000	0,00	0000000000000	Pada tahun 2023, Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi transportasi, seperti melalui digitalisasi, restrukturisasi, dan peningkatan kualitas layanan. Dengan demikian, tercapainya target efisiensi transportasi sebesar 100% menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah berhasil meningkatkan efisiensi transportasinya.

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Keuangan				Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Pagu	Realisasi	Penerapan Anggaran	Sisa Anggaran Efisiensi Pada Indikator yang Menapai Target Kinerja (Rp)	
Keleluasaan Target angkutan perkeretaaan	%	100,00	100,00	100,04					Tercepatnya dan terpenuhi kebutuhannya, terdapat indikator kinerja yang tidak tercapai. TTD, efisiensi tidak terdapat efisiensi yang berdampak
Keleluasaan target angkutan barang kereta api	%	100	100,00	100,00					
Percepatan pelayanan di Stasiun Kereta Api dan di Stasiun	%	120,00	100,00	100,00					
Indeks Kecepatan Perjalanan KM tercapai di jalur publik Bidor Perkeretaaan	nilai	1,40	1,00	100,00					
Jumlah									

DUKUNGAN PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM IDUNG PARKIR TERPILIH

Perencanaan strategis yang ada akan dan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah Daerah, dan atau Badan yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dan rangka usaha kegiatan kerah dan kegiatan keantariksaan antariksa perencanaan yang akan ditetapkannya melalui peraturan perundang-undangan dilaksanakan dengan prioritasnya untuk meningkatkan akses infrastruktur dan atau pusat kegiatan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbagai kegiatan dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan

Berikut merupakan dukungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terhadap perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020

PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM PS-S-SIPD TUGAS

Kereta Api Makasar – Parepare Talap I Segenarru – Pangkep – Maras

a. Manfaat

Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas antariksa dan terdapatnya dukungan pada transportasi antariksa dan teknologi yang efektif dan efisien itu infrastruktur perkeretaapian yang dapat menjadi mendorong pertumbuhan ekonomi dengan membuka peluang investasi, daya tarik pariwisata dan kegiatan lainnya

b. Progres

1. Pembangunan sarana perkeretaapian dengan rencana konstruksi Barru – Makassar 000 km saat ini telah selesai dan akan dilanjutkan Barru – Makassar 000 km, Makassar-Maras 000 km, Makassar-Majene 000 km, Siding Majene – Talap 000 km, Maras – Majene 000 km

2. Perencanaan oleh pemerintah RI melalui kebijakan dan regulasi lainnya untuk kereta api Makassar – Parepare Talap I dengan Barru – Makassar – Maras pada tahun 2020





Gambar 1.1 Perancangan Kereta Api Makasar – Parepare Takap I Segmen
Garung – Pangkep – Maros

Kereta Api Ringan RT Terintegrasi di Wilayah Jabodetabek

a. Manfaat

Melihat perkembangan teknologi transportasi dan perkembangan sarana
dukungan pada transportasi kereta api akan efektif serta
ekonomis beban biaya perawatan jika menggunakan rata-rata
teknologi beban perawatan itu infrastruktur transportasi
kereta api dapat menjadi alternatif untuk pertumbuhan ekonomi dan
integrasi keberadaannya RT Jabodetabek dapat menarik perhatian investor
dan penduduk yang akan membangun sekitar

b. Progres

Konstruksi sarana transportasi lebar 1000 mm akan di
000, dan akan dibuka 000, dan akan dibuka 000 dan
2020 direvisi revidetannya 2020, beresada pada
tahun 2000-2000 IB dengan 2 titik akses
yaitu Dukut – dan – araukti dan Dukut –
dan – ai Jatiuh



Gambar 1.2 Perancangan RT Jabodetabek

High Speed Railway Jakarta – Bandung

a. Manfaat

Meningkatkan akomodasi dan fasilitas masyarakat dan terdapat sarana dukung pada transportasi kereta api dengan teknologi modern yang terdapat akomodasi di stasiun yang rata-rata telah terdapat beberapa stasiun itu infrastruktur kereta api yang dapat menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang dibuka untuk investasi, peningkatan pariwisata dan perekonomian yang akan datang.

b. Progres

- 1. Perencanaan investasi sebesar Rp 00
- 2. Perencanaan investasi pada tahun 2020 Oktober 2020
- 3. Perencanaan investasi sebesar Rp 40 miliar dengan target *ultimate* perencanaan Rp 00 miliar

Double Track Seatan Jawa – Segmen Mojokerto – Sepanjang

a. Manfaat

Meningkatkan kapasitas pelayanan kereta api untuk mendukung fasilitas masyarakat dengan pelayanan kereta api yang efisien, cepat dan aman yang itu, beberapa stasiun yang ada dan dapat meningkatkan pelayanan kereta api.

b. Progres

- 1. Mojokerto – Pematang Rp 00 tahun 2020
- 2. Telah dilakukan proses penulisan dan verifikasi keaika pelayanan kereta api serta *switch over* pada Desember 2020

PROROK STRATEGIS SISI PROGRES ON PROGRES

No	Kegiatan	Status
1	Double Track Seatan Jawa Pematang Bukabumi	Perencanaan awal konstruksi saat ini selesai BPR – diurus selesai Rp 00 dan saat ini dalam proses keajutan peningkatan investasi keaika dan keaika seuru Pematang Bukabumi dengan perencanaan Rp 00,00 Rp 2020-2024
2	Double Track Seatan Jawa Pematang Kiaracondong – Pematangka	1. Tahun ini selesai edebate – tahun 2020-2022



No	Kegiatan	Status
		<p>b) Tawar II selesai Kiara—deba dan aur—paka ktruk M 2022 2024</p>
□	<p>Infrastruktur K di KaiaaTiur</p>	<p>reerat i teaeai ora tuda Keaka da daa rre euaa i keretaa kuu keada uberur KaiaaTiur ebaai JK</p>
□	<p>K Raat au Raat – Kta iiaa Tarjet eeiaa Taau 2024 iiaa k</p>	<p>a) ee Raat k teaeai 00 , aat i edaa eriaa eeeraia iitu teaa diaakaka tiadk aut eeuaa terta da Safety Asseesment</p> <p>b) ee k Kta iiaa berre eadaa ta eai M bebar reaia 0 bidaa dari kebutua 2 bidaa, ua tta²</p>
□	<p>K di KatKertaati</p>	<p>ee Raat – rabuu – Kertaati edaa ktruk eara berta di a teaa diaakaka eadadaa eriaa K aara DJK deaa T K I erer r r K2024 DJK202 da r K02 K202 ta a2 ee te ber 202</p>
□	<p>RT ee dr eMaarai</p>	<p>a) <i>Groundbreaking</i> ebaaua RT Jakarta Face B ada ta a 0 ktber 202 di i i ee Meeri erubua RI beraa uberur DKI Jakarta</p> <p>b) aiaa rre iik er Jauari 2024 bebar 4,04 , di a teuai rre aa teaa diaakuka eeraa e aara rrek, <i>site clearing</i> da ebaaa, reka utiia, da eeraa <i>bored pile</i> da <i>pilecap</i>.</p>
□	<p>Jakarta MRT North-South Phase 2</p>	<p>a) Face 2024,42 ee ee B I – ar i 4,0 , ee ee 2 ar i – Kta 0,04</p> <p>b) Face 2B</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teaa terbit eretuua traee dari Meub da eeetaa traee ee uberur DKI Jakarta • ebaai a a Kaiaa aterati De MRT Face 2, ditetaka ka De berada di ee ee aat i T MRTJ edaa berkordia eara iteodeaa ik terkait ata tiadk aut dari aaraa uberur terebut • euaa ee biaaa ee baaua teateratu daa <i>Green Book</i> 202
□	<p>MRT Jakarta East-West Phase I</p>	<p>a) Teaa diaakuka <i>pledge</i> ta a De ee ber 202</p> <p>b) BOT a eeraa <i>Engineering Services</i> MRT aat ee ada ta a Jauari 2024</p> <p>Teaa diterbitka ererk terkait K Ke baara da ee bebaa biaa aara eeerita uat da eeerita Daera daa ee baaua MRT aat ee ada Jauari 2024</p> <p>d) Teaa diaakuka eadadaa <i>Minutes of Discussion</i> MD keada ee raiaa uuk aa Ktruk ee JI, Ke eeub, Ba ea, da ee r DKI</p>

□□	Kegiatan	Status
		<ul style="list-style-type: none"> □ Teā□ diāka□aka□ <i>review environmental safeguard</i> □□ Ti□ □DB□ □□ □eda□□ diākuka□ □e□ba□a□a□ □e□□u□u□a□ <i>draft loan agreement</i> □e□ JI□□ da□ Ke□ e□teria□ Keua□□a□□

□□□ **C□P□I□□□ KI□□RJ□ □□I□□□□□**

□ada Ta□u□ 202□, Direkt□rat Je□dera□ □erkeretaa□ia□ da□ u□it kerā diba□a□□□a □e□ □er□e□ bebera□a □a□aia□ ki□erā ai□□□a, dia□tara□□a□

□□ □ere□□ ia□ □a□□□e□ ba□□u□a□ da□ □e□□□□era□ia□ āūr kereta a□i Maka□□ar – □are□are Ta□a□ I □e□□e□ Barru – □a□□ke□ – Mar□□ □e□ □re□ide□ RI □ada 2□ Maret 202□□



Ga□ □ar □-□□ D□ku□ entasi Peres□ian Kereta □pi Makasar – Parepare Ta□ap I Seg□ en □arru – Pangkep – Mar□

2□ □ere□□ ia□ □a□□ □e□ba□□u□a□ da□ □e□□□□era□ia□ □RT Jab□debek □e□ □re□ide□ RI □ada 2□ □□u□tu□202□□



Ga□ □ar □-□□ D□ku□ entasi Peres□ian □RT Ja□□de□ek

Peresmian dan pelepasan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung di Stasiun RI pada 2 Oktober 2022



Gambar Dokumentasi Peresmian Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung

Peringkat Terbaik Pertama di antara Kategori Terbaik Tahunan pada acara Kekaayaan Awards yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekaayaan dan Kerjasama Kelembagaan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Perhubungan Laut sebagai juara keria di antara BM terbaik di Indonesia yang meraih Juara Tetap yaitu realisasi terbit sertifikat hak pakai sebagai bidaan pada Tahun 2022

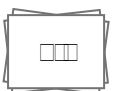
RESISI GGR

Untuk anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tahun 2022 sebesar Rp2.200.000,00, pada tahun untuk berdiskusi perihal Kieria reji terakhir pada Desember 2022 terdapat perubahan menjadi Rp0.420.000,00 dan tahun terakhir pada akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp0.442.000,00 dan perubahan tersebut diuraikan sebagai berikut

1. Untuk reji anggaran berupa pembekalan *Automatic Adjustment* sebesar Rp0.000.400,00 pada tanggal 2 Desember 2022 tidak perubahan
2. Penerimaan cadangan BBAI sebagai Perkeretaapian sebesar Rp4.000.000,00 pada tanggal 2 Februari 2022
3. Saluran transmisi anggaran BBAI Tahun 2022 sebesar Rp2.422.000,00 pada tanggal 24 Februari 2022 terdiri dari anggaran pada BT Meda sebesar Rp2.000.000,00,



- b. Luapula pada BT Bandung sebesar Rp400000,
- 4. Luapula pada BT Bandara B Taun 2022 sebesar Rp24000000000,
 - a. Luapula pada BK Luapula di Kota sebesar Rp224000000000,
 - b. Luapula pada BT Medan sebesar Rp000000000000000,
 - c. Luapula pada BT Semarang sebesar Rp004000000,
- Luapula pada catatan anggaran DI di lingkungan Ditjen Perkeretaaiaan sebesar Rp000000000000000,00 dan reangka anggaran untuk pemenuhan berbagai kebutuhan anggaran Beasas pemakai dan Kelelagaan pririta ai laca sebesar Rp240000000000000,00 tidak erubah cacu
- Luapula Reji anggaran T 202 dan cacu anggaran berubah beraca pererera anggaran Bank Automatic Adjustment Beasas pemakai di lingkungan Ditjen Perkeretaaiaan, Kelelagaan perubuaa ke B B sebesar Rp0000400400000,00
- Luapula Reji anggaran T202 dan cacu anggaran berubah aitu pererera anggaran I ke sekretariat Jendera sebesar Rp2000000000000 pererera anggaran dari Direktorat Jendera Perkeretaaiaan ke sekretariat Jendera beruuber pada Ruia Muri sebesar Rp0000000000000,00 untuk kekurangan Beasas pemakai
- Luapula Reji anggaran T202 dan cacu anggaran berubah aitu pererera anggaran I ke sekretariat Jendera sebesar Rp2000000000000,00 untuk kelelagaan pemenuhan Kuuika dan laca aji ubik pererera anggaran dari Direktorat Jendera Perkeretaaiaan ke sekretariat Jendera beruuber pada Ruia Muri sebesar Rp0000000000000,
- Luapula Reji anggaran dan cacu anggaran teta berubah pemenuhan catatan anggaran DI di lingkungan Ditjen Perkeretaaiaan sebesar Rp0000200400000,00 dan reangka anggaran untuk pemenuhan kelelagaan pririta ai laca sebesar Rp000040000040000,00
- Luapula Reji anggaran dan cacu anggaran berubah beraca M pada rrek strateji anggaran pada 4 kaitatker Ditjen Perkeretaaiaan, Kelelagaan pririta pemenuhan II T 202 ata 2 bida, deca luataa 000040002



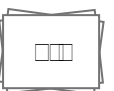
Adapun untuk realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2020 di seluruh Rinci 4 2020, Rp 4,000, deca uraian sebagai berikut

Tabel-01 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Jenis Belanja Tahun 2020

No	Jenis Belanja Pelaksanaan	Pagu (Rp)		Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Pagu Sesuai PK Revisi Terakhir	Pagu Terakir	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	44.000.000,00	44.000.000,00	4.000.000,00	9,09	2.000.000,00	4,55
2	Belanja Barang	22.000.000,00	22.000.000,00	4.000.000,00	18,18	22.000.000,00	100,00
3	Belanja Modal	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	2.440.000,00	61,00
Total		68.000.000,00	70.000.000,00	12.000.000,00	17,14	28.440.000,00	40,63

Tabel-02 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Kegiatan Tahun 2020

No	Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi Anggaran	
		Pagu Sesuai PK Revisi Terakhir	Pagu Terakir	Nilai (Rp)	%
1	Program Infrastruktur	68.000.000,00	70.000.000,00	12.000.000,00	17,65
	a. Infrastruktur Kolektif Transportasi Perkeretaapian	44.420.000,00	2.000.000,00	0.400,00	0,90
	b. Belanja Transportasi Perkeretaapian	4.200.000,00	4.200.000,00	2.220.000,00	52,86
	c. Kelembagaan dan Kelembagaan Transportasi Perkeretaapian	2.000.000,00	4.000.000,00	424.000,00	21,20
	d. Bantuan Teknis Transportasi Perkeretaapian	2.440.000,00	2.440.000,00	2.000.000,00	81,97
2	Program Dukungan Manajemen	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. Pemeliharaan Prasarana dan DM Transportasi Perkeretaapian	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Pemeliharaan Perencanaan Keuangan BM dan Bantuan Transportasi Perkeretaapian	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
	c. Pemeliharaan dan Teknis Transportasi Perkeretaapian	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	d. Pemeliharaan Koneksi dan Infrastruktur Publik Transportasi Perkeretaapian	0,00	0,00	44.000,00	0,00

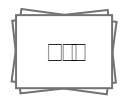


No	Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi Anggaran	
		Pagu Sesuai PK Revisi Terakhir	Pagu Terakir	Nilai (Rp)	%
	Revisi kegiatan dan kegiatan Transportasi	2.000.000.000	2.000.000.000	2.044.400.000	104,44
TITIP					

Tabel-10.14 Revisi Anggaran Per Sasaran dan Indikator Kinerja Program Tahun 2019

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Pagu (Rp)		Realisasi Anggaran	
		Pagu Sesuai PK Revisi Terakhir	Pagu Terakir	Nilai (Rp)	%
Konektivitas Koridor Koridor Koridor Koridor Koridor Koridor	IK Rasio Konektivitas Koridor	4.420.000.000	2.000.000.000	4.400.000.000	102,27
2 Kelelahan Koridor Koridor Koridor Koridor Koridor	IK2 Rasio kelelahan Koridor Rate of accident	4.200.000.000	4.000.000.000	4.200.000.000	100,00
Kinerja Koridor Koridor Koridor Koridor Koridor Koridor	IK Persepsi Koridor Koridor Koridor Koridor Koridor Koridor	4.200.000.000	4.200.000.000	4.200.000.000	100,00
	IK4 Persepsi Koridor Koridor Koridor Koridor Koridor Koridor				
	IK Persepsi Koridor Koridor Koridor Koridor Koridor Koridor				
	IK Persepsi Koridor Koridor Koridor Koridor Koridor Koridor				

Keterangan: Jumlah Alokasi Anggaran untuk Program Infrastruktur Konektivitas (tidak termasuk Program Dukungan Manajemen)

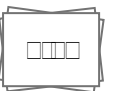


Realisasi ini, di samping lain merupakan realisasi APBD Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp4.000,00 atau 100% dari target Tahun 2020 sebesar Rp4.000.000.000 baik berdasarkan jumlah maupun berdasarkan Rincian realisasi APBD pada Tahun 2020 berdasarkan tabel sebagai berikut

Tabel-1.1 Realisasi Penerimaan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020

No	Jenis Pendapatan	Target Tahun 2020 (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Fungsi	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00
	Sesuai PP			
	a) Pendapatan Perkeretaapian	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00
	b) Pendapatan Pertijauan, Pertijakan dan Kaibran Bidadari	22.000,00	220.000,00	1,00
	c) Pendapatan Jasa Transportasi	4.000.000,00	4.000.000,00	100,02
	d) Pendapatan Perumahan dan Perkeretaapian lainnya	2.000.000,00	4.000.000,00	200,00
2	Pendapatan Lain	0,00	0,00	0,00
	a) Pendapatan Jasa Operasional Barak dan Jasa Lainnya	0,00	20.000,00	420,00
	b) Pendapatan Pajak Kerjasama	0,00	2.000.420,00	240,00
	c) Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	444,00	0,00
	d) Perkiraan Keibran Barak dan Tahunan	0,00	224.220,00	0,00
	e) Pendapatan Lain dari Rupa Rupa	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Non Fungsi	0,00	0,00	0,00
	a) Pendapatan dari Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
	b) Pendapatan dari Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,442	0,00
	c) Pendapatan dari Sewa dan Jasa BM Lainnya	0,00	4.000,00	0,00
	d) Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	2.040,00	0,00
	e) Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	2.000,00	0,00
	f) Pendapatan dari Sewa lainnya	0,00	0,00	0,00
	g) Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	200.442,00	0,00
	h) Pendapatan Devisa Lainnya	0,00	0,00	0,00
	i) Perkiraan Keibran Perumahan dan Tahunan	0,00	4.220,00	0,00
	j) Perkiraan Keibran Barak dan Tahunan	0,00	220.400,00	0,00

No	Jenis Pendapatan	Target Tahun (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Kerjasama Kelembagaan Masyarakat Tahunan		2024	
	Pendapatan Lainnya		4	
	Jumlah			



Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak lanjut
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan evaluasi audit MKO terhadap badan usaha perkeretaaiaan ▪ Koordinasi pertemuan terkait kegiatan evaluasi sarana IM untuk evaluasi infrastruktur fisik secara tetap dirapat dan dioperasikan sesuai ketentuan serta dalam koordinasi pelaksanaan ▪ Melakukan kegiatan DM rekrutmen pegawai tertentu untuk pendidikan akademik dan profesional evaluasi perkeretaaiaan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pada Tahun 2020 telah diakukakan audit MKO pada PT MRT Jakarta, PT KAI, dan PT RT Jakarta pada tahun 2024 ditargetkan evaluasi audit MKO pada Badan usaha perkeretaaiaan ▪ Melakukan IM telah dikordinasikan dengan PT KAI dan telah diakukakan kontrak pada Desember 2020 ▪ Pada Tahun 2020 telah diterbitkan sebanyak 20 sertifikat inspektor perkeretaaiaan, 20 sertifikat asesor, 20 sertifikat auditor perkeretaaiaan serta sertifikat evaluasi sarana dan sarana perkeretaaiaan sebanyak 20 sertifikat, sehingga total telah diterbitkan kurang untuk DM rekrutmen sebanyak 20 sertifikat
<p>IK Persentase Capaian on time performance TP transporasi kereta api</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan realisasi operasi dan PT kuantitas untuk operasi KR dengan operator K tertentu secara rata-rata untuk KR kuantitas Jabodetabek dengan pelaksanaan atau pelaksanaan BT ▪ Koordinasi Badan usaha perkeretaaiaan sarana dan BT untuk pelaksanaan kegiatan perijinan K akibat kondisi sarana dan keberlanjutan pelaksanaan sarana, di mana penyebab kegiatan faktor luar re dan kegiatan evaluasi, 2020 pada Triwulan III 2020 ▪ Melakukan saat ketika terjadi kecelakaan K atau kecelakaan keceakaan K sehingga luar K dapat segera diadani dan perijinan K secara rata-rata ke bait 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan tiga bulan sejak Direktorat KR telah diakukakan rapat evaluasi akademik operasi dan PT Direktorat sarana, Direktorat sarana, Direktorat Kelembagaan, Balai dan Unit B ▪ Telah diakukakan koordinasi antara B dan BT dalam pelaksanaan dengan pelaksanaan Tahun batasan kelestarian pada untuk kondisi sarana perkeretaaiaan terbaik serta dapat terdapat keberlanjutan pelaksanaan sarana ▪ Melakukan akan rata-rata beberapa kali dapat pelaksanaan kegiatan perijinan kereta api terakumulasi perijinan DM untuk aktivitas pelaksanaan pada ekotri di lokasi luar kereta api telah diakukakan beracara dengan KKT dan operator untuk pelaksanaan kuota data 2020 dan Tahun Baru akan dilakukan pelaksanaan keceakaan dapat diakukakan di BT Bandung

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak lanjut
<p>IKP Penurunan Target Pengkutan Penuangan Kereta Api</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dukung pelaksanaan Kereta Api Jakarta – Bandung secara komersial yang direncanakan pada Oktober 2023 dan diarahkan dapat meningkatkan kapasitas pelayanan untuk mendukung transportasi kereta api ▪ Lakukan pelaksanaan KCRK kumulatif RT Jabodetabek secara berkala untuk pemeliharaan sarana yang ada ▪ Dukung pelaksanaan rekayasa lalu lintas antar kota pada periode libur panjang hari raya untuk memenuhi transportasi perintis antar kota 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kereta Api Jakarta – Bandung telah beroperasi komersial pada tanggal 10 Oktober 2023 yang didukung dengan KCRK Feeder yang beroperasi secara gratis yang berfokus di stasiun padat, stasiun sibuk dan stasiun Bandung ▪ Secara periodik telah dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RT Jabodetabek, yang dilakukan pada Desember 2023 oleh Direktorat Kereta Api dengan badan usaha MTKI, PT KCI Karya, PT LKQ, PT SMI, PT Siemens Mobility Indonesia dan lain-lain yang telah dilakukan rekayasa perantara, <i>on time performance</i>, kualitas pelayanan, kondisi sarana dan realisasi angkutan yang ada ▪ Pada tahun pelaksanaan angkutan data 2023 dan Tahun Baru 2024, telah dioperasikan 4 kereta api jarak jauh tambahan untuk memenuhi transportasi perintis antar kota
<p>IKP Penurunan Target Pengkutan Barang Kereta Api</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Percepatan pelaksanaan angkutan kereta api barang pelayanan akses jalur kereta api dengan pelayanan Tahunan ▪ Percepatan pemeliharaan jalur angkutan barang di jalur Makasar – Parepare serta pelaksanaan reduksi dan koordinasi dengan operator KCRK untuk meningkatkan angkutan barang kereta api dengan kelas Rolling highway 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pada Desember 2023 telah dilakukan pemeliharaan kereta api dan saat ini sedang ditindaklanjuti beberapa keluhan yang terjadi beberapa waktu terakhir dengan cara perbaikan dan diutamakan ada perbaikan terhadap keluhan ▪ Pada Juli 2023, PT RT Jakarta sudah melakukan Surat Perintah Revisi KCRK Barabisa Makassar-Parepare yang sudah memenuhi kebutuhan reduksi terkait kelas Rolling
<p>IKP Persentase pengoperasian jalur KCRK yang sesuai dengan TPI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Capaian pelaksanaan jalur kereta api di beberapa titik yaitu Sumatera Utara (Medan – Sabua), Kalimantan (Mabuhuda dan Sumatera Barat Padang – Pauh) yang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Percepatan pelaksanaan jalur KCRK <ul style="list-style-type: none"> o pelaksanaan jalur KCRK Medan – Sabua Tahun I oleh Medan – Sabua yang telah selesai 100% dan pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	<p>keberhasilan dalam meningkatkan kualitas layanan kereta api di grade dan elevated di stasiun utama Jawa dan Sumatera. Selain itu, juga terdapat beberapa kegiatan peningkatan pelayanan di Stasiun Tanjung 202, di antaranya peningkatan layanan KSI di stasiun-stasiun prioritas, perbaikan Kaitat dan Managemen lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan uji coba peningkatan di stasiun Jawa dengan menggunakan kereta ukur milik Direktorat Jenderal Perkeretaapian kereta ukur pribadi dengan konsep Ide-tita cara-cara yang sudah ada Triwulan I 2020 	<p>akan diikutkan dengan peningkatan layanan KSI Medan, Belawan, Tanjung II dengan tujuan Belawan</p> <ul style="list-style-type: none"> o Peningkatan layanan KSI Kirana-Mambanuda berfrekuensi 400 o Peningkatan layanan KSI Padang-Lampung berfrekuensi 1000 o Peningkatan layanan KSI prioritas berfrekuensi 2,200 o Peningkatan layanan KSI Surabaya-Banung dengan Jember-Kaitat berfrekuensi 100, terdapat terkecuali keterediaan redaksi o Peningkatan layanan KSI Managemen lainnya berfrekuensi 10000 • Uji coba peningkatan di stasiun Jawa dengan menggunakan kereta ukur milik DJK telah dilakukan
<p>IKI Indeks Kepuasan Masyarakat IKM terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan berkala dengan unit kerja pelaksanaan untuk memastikan kualitas layanan dan proses bisnis sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan • Melakukan pelaksanaan survei IKM kepada stakeholder perkeretaapian untuk pelaksanaan rencana aksi dan dapat diertakan sebagai 	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa unit kerja telah melakukan kegiatan terdapat pelaksanaan survei IKM kepada stakeholder terkait terhadap evaluasi per triwulan terdapat pelaksanaan IKM

Hal ini juga diartikan sebagai upaya yang telah dilakukan untuk mendorong perbaikan budaya kerja organisasi di antaranya

1. Melakukan analisis *fingerprint* di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
2. Melakukan analisis *survey* dengan *Case Survey Management System* untuk survei IKM Balai Belian Perkeretaapian
3. Melakukan analisis *IKI* untuk proses peningkatan, pelaksanaan dan evaluasi *IKI* di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

- 4. **Penyusunan Dashboard Manajemen Risiko** untuk perencanaan pelaksanaan risiko pelaksanaan kegiatan, kebijakan risiko dan pelaksanaan realisasi tidak terduga di tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
- 5. **Penyusunan google form** untuk data login pengguna ke layanan perkeretaapian
- 6. **Penyusunan aplikasi** e-Kinerja Kelembagaan berbasis data dan keadilan digital di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
- 7. **Pelaksanaan** terdapat rekayasa perencanaan pembangunan dan evaluasi kepastian pelaksanaan kereta api yang sudah diabaikan kepada stakeholder terkait

KESIMPULAN

Program Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 diuji coba secara bertahap periode 2024-2024 untuk meningkatkan kinerja pelayanan Masyarakat Tahun 2020 untuk meningkatkan dan kinerja untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 dengan bimbingan dan arahan dari indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 dengan tujuan pada target kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan dan Rencana Strategi Kelembagaan Binaan Perkeretaapian Tahun 2020-2024 Rata-rata kinerja Tahun 2024 diarahkan sebesar 0,00 yang akan diarahkan pada Tabel berikut

Tabel-1. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Konektivitas layanan perkeretaapian yang dapat diakses oleh masyarakat	IK1 Rasio Konektivitas antar wilayah	Rasio	0,40	0,40	100,00%
2	Kecepatan transportasi perkeretaapian dengan keberagaman	IK2 Rasio kehadiran keekonomian transportasi kereta	Kecepatan keekonomian unit kumulatif	0,00	0,00	0,00%

□□□	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja □□□
	Ma□u□ia, □ara□a da□ □ra□ara□a □a□□ □a□da□	a□ □rate of accident□				
□	□□□□Ki□erā □e□a□a□a□ tra□□□□rta□ □erkeretaa□ia□ □a□□ ter□er□a□a da□ □e□uai kebutu□a□	IK□ □er□e□ta□e □a□aia□ on time performance □□ T□□tra□□□□rta□ kereta a□	□	□□□	□0,□□□	□□,2□□
		IK4 □e□ □e□u□a□ Tar□et □□□kuta□ □e□u□ □a□□ Kereta □□	□	□□,□□□	□□,□□□	□00,□4□
		IK□ □e□ □e□u□a□ Tar□et □□□kuta□ Bara□□ Kereta □□	□	□□□	□□,□□□	□0□,□□□
		IK□ □er□e□ta□e □e□□□□era□ia□ □a□r K□ □a□□ □e□uai de□□a□ T□□	□	□2,□□□	□□,□□□	□0□,0□□
		IK□ I□dek□ Ke□ua□a□ Ma□□arakat □KM□ ter□ada□ □e□a□a□a□ □ubik Bida□□ □erkeretaa□ia□	□iai	□,4□	□,□□	□0□,□□□
Rata-rata Capaian Kinerja						□□□□□□

□□□ R□K□M□□□D□SI

Berda□arka□ □a□□□e□□ukura□ □a□aia□ ki□erā Ta□u□ 202□, di□er□uka□ u□a□a□ □e□□□kata□ ki□erā □u□a□ □e□ a□tika□ tar□et da□at ter□e□u□ □ada □eri□de berikut□□, □□t□□□ itu, direk□□ □e□da□ika□ □a□□□a□ berda□arka□ I□dikator Ki□erā □r□□ra□ □e□ba□ai berikut□

□□ IKP□ Rasi□ K□nekti□itas □ntar □ ia□a□□

a□ K□□rdi□a□ □a□□uta□ de□□a□ □T□K□I u□t□□□ □e□ □e□u□a□ d□ku□ □e□ tek□□□ □a□□ di□er□uka□ da□□ □e□□u□ia□ ke□a□ika□ □a□r K□ a□tara □a□a□□u□t□ – Muar□ka□āba□ ter□ a□t□□ □e□□□kata□ □e□□a□a□a□ di □a□a□□a□ de□□a□ □e□□□□□ti□ a□ka□ □era□ a□kti□ Ba□ai□□atua□ □e□a□a□a□□

- b. Melakukan dan evaluasi terhadap kegiatan pendidikan rasional keaktifan antar siswa diajarkan perbaikan organisasi belajar di kelas-kelas – Padang dan Barru – Padang
- c. Koordinasi pelaksanaan diskusi teknik dan pembinaan untuk pendidikan remaja berbasis perkeretaaan di siswa Bait dan IK
- d. Melakukan Rencana Strategi Binaan Perkeretaaan Tahun 2021-2022 untuk evaluasi awal untuk kegiatan pendidikan keaktifan perkeretaaan

IKP Rasio Kejadian Keelakaan Transportasi Kereta *Rate Of Accident*

- a. Melakukan pelaksanaan audit SMK terhadap Badan Badan Perkeretaaan
- b. Melakukan evaluasi kegiatan koreksi DM reaktor evaluasi vertikal dan evaluasi teknik untuk pendidikan pelaksanaan pendidikan dan pelaksanaan pelayanan perkeretaaan
- c. Prioritas kegiatan koordinasi di tingkat perantara dan teknik untuk kuantitas untuk jalur kereta api pada bagian pendidikan tingkat eksekutif
- d. Melakukan dan perbaikan terhadap sistem pelayanan kereta api untuk evaluasi kegiatan keefektifan perkeretaaan
- e. Melakukan evaluasi pelayanan IM pada Tahun 2024 dengan pelaksanaan pelayanan prasarana perkeretaaan oleh Balai Teknik Perkeretaaan sesuai dengan standar keefektifan

IKP Persentase Capaian *On Time Performance* TP Transportasi Kereta *On Time*

- a. Melakukan pelaksanaan dan koordinasi dengan ketua di lapangan untuk pelaksanaan dan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan kereta api pada terdapat, seperti kualitas buruk, bencana alam, tidak ada, terancam, terancam kegiatan keaktifan di tingkat pelayanan
- b. Melakukan pelaksanaan pelayanan jalur pada kereta api di tingkat lapangan dan penerapan agar lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan pelayanan kereta api

□□ □e□a□□a□a□ □e□at ketika terjadi ke□e□akaa□ kereta a□i □au□u□ ke□e□akaa□ □□□ kereta a□i □a□□ □e□□□a□□□u□ □□era□□□a□a□ar □a□ur kereta a□i da□at □e□era di□a□ui da□ □er□a□a□a□ □e□era □□r□a□ke□ba□i, ter□a□uk di□er□uka□ □e□□ediaa□ da□ □e□e□ □ata□ □ara□a □e□duku□□ □e□a□□a□a□ ke□e□akaa□ □a□□ □ia□ □□era□ di beba□ra□a □ka□i □trate□□□

□□ **IKP □Pe□enu□an Target □ngkutan Penu□ pang Kereta □pi□**

- a□ □er□e□ata□ □e□□□□era□ia□ □ada □a□i□□□a□i□ □e□ba□□u□a□ □ra□ara□a □erkeretaa□ia□ dia□tara□□a Krue□□ □eukeu□ – □a□□□, Ra□tau□ra□at – □□□d□k □□, □erta □er□a□□a□□a□ □a□a□a□ K□ di □ka□i □ai□□□a□
- b□ □e□e□u□a□ kebu□u□a□ a□□□ara□ u□tuk □a□a□a□ □ub□idi K□ □eri□iti□ □e□uai kebu□u□a□ a□ar □a□a□a□ teru□berke□a□□uta□□
- □a□ua□i □e□□□□era□ia□ □a□a□a□ K□ □a□□ baru be□□era□i dia□tara□□a K□ Maka□□ar – □are□are, □RT Jab□debe□, Kereta □e□at Jakarta□ Ba□du□□ □e□ara beka□a □u□a □e□□□□iti□ a□a□ □a□a□a□ □a□□ □a□da□□
- d□ K□□rdi□a□i de□□a□ □e□eri□ta□ Daera□ u□tuk □e□□ediaa□ a□□kuta□ □e□eder □a□□ □□iti□ a□□ e□duku□□ □a□a□a□ K□ □eba□ai ba□kb□□e □ta□a ter□a□uk □e□ak□a□aa□ □□□ia□i□a□i □ub□ika□i □e□□□u□aa□ tra□□□□rta□i K□ □a□□ teri□te□ra□i ba□k a□tar□ □da □au□u□i □ter□ □da□

□□ **IKP □Pe□enu□an Target □ngkutan □arang Kereta □pi□**

- a□ □e□□□□□iti□ a□a□ □a□a□a□ a□□kuta□ kereta a□i bara□□ □e□u□u□dari □□ □u□□ □e□a□bu□a□ □a□□ □uda□ ter□ub□u□□ □a□ur kereta a□i u□tuk □e□□iri□a□ bara□□ ek□□□r, dia□tara□□a □e□a□bu□a□ Ta□□u□□ □ri□k, □e□a□bu□a□ Ta□□u□□ Ma□, □e□a□bu□a□ Ta□□u□□ □erak, □e□a□bu□a□ Kua□a□ Ta□□u□□, □e□a□bu□a□ □ar□□□k□□□□
- b□ □e□a□□a□ata□ □arket be□a□a□ u□tuk □e□□□□du□ka□ ke□ba□i□ a□□kuta□ bara□□ ek□□□r □edeba□e □e□u□u□ Ta□□u□□ □ri□k ter□a□uk □er□u□□a□ i□ter□e□□i bia□a□ dari □a□i□□□□□ a□i□□ □take□□□der a□ar tari□ a□□kuta□ bara□□ kereta a□i □ebi□k□□ □etiti□□
- □e□ak□a□aa□ Ka□ia□ □e□i□□kata□ □iti□i□a□i Ja□ur Kereta □□i □e□a□a□a□ □□□kuta□ Bara□□ □a□□ ter□ub□u□□ de□□a□ □u□at □□□i□tik □ada Ta□u□ 2024 □u□a□ □e□duku□□ I□□truk□i □re□i□de□ □□□□ □r □ Ta□u□ 2020 te□ta□□ □e□ataa□ □k□□i□te□ □□□i□tik □a□□□a□□

□□ **IKP** **Persentase Pengoperasian Jalur Kereta yang Sesuai Dengan TPI**

a. Penyelesaian pekerjaan jalur kereta api baik ke stasiun baru atau ke stasiun baru di beberapa titik diantaranya antara lain Kiriara – Mambanuda – Madan – Madan, Medan – Belau – Tala II, Sumatera Barat – Padang – Bukittinggi, Jawa Barat – Cikarang – Cirebon, Tegay – Padang, Medan – Medan, Jawa Timur – Klaten – Jember, termasuk pembangunan jalur kereta api *at grade* dan *elevated* di titik-titik tersebut.

b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pekerjaan jalur kereta api, pembangunan jalur kereta api serta peningkatan jalur kereta api ekspansi secara berkala.

□□ Penyelesaian pedesaan untuk peningkatan kinerja TPI

d. Peningkatan TPI berdasar data TKI dan rangka pelaksanaan untuk penyelesaian, termasuk pemenuhan kebutuhan pekerjaan kementerian terkait untuk penyelesaian data TPI dan penduduk rencana peningkatan TPI penyelesaian kereta ukur milik Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

□□ **IKP** **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian**

a. Tidak dapat diukur kedua masyarakat dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk akan berka terdapat dan untuk perbaikan di periode berikutnya.

b. Penilaian dan pelaksanaan TIK di tingkat berca i data, peretuan terdapat dan pelaksanaan dan board terdapat terdapat berka dan bida Perkeretaapian, sertifikasi, dan lain-lain.

Penelitian dan diukur dan Kiriara Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020, diarahkan dan perbaikan indikator kinerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk menjadi acuan dan penyelesaian kinerja pada periode berikutnya.

Lampiran I
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun 2023

RENCANA KINERJA TAHUNAN

DIREKTORAT JENDERAL
PERKERETAAPIAN
TAHUN 2023

15 TH
DJKA
Membangun
Perkeretaapian
Nasional



MELAYANI NEGERI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN





KATA PENGANTAR

Puji Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya maka penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2023 disusun sebagai tahun keempat dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024 bidang Perkeretaapian, dimana telah diberlakukannya restrukturisasi program dan kegiatan pembangunan di seluruh kementerian/lembaga, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja masing-masing unit kerja didasarkan kepada tugas pokok dan fungsi unit kerja masing-masing.

Secara umum Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2023 memuat kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan secara khusus membahas kebijakan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan penganggaran berbasis kinerja, baik yang terkait dengan kebijakan APBN maupun yang diarahkan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan transportasi perkeretaapian.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2023 disamping dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023, secara substansi juga sejalan dengan

Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan 2020–2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2020-2024 yang telah ditetapkan.

Semoga Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2023 ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan perkeretaapian agar semakin terarah dalam pengembangan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang.

Jakarta, Februari 2022

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Ir. Zulfikri, M.Sc., DEA.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19620709 199203 1 002



B A B 4

RENCANA KINERJA TAHUN 2023

4.1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tahun 2020 – 2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, serta mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi.

Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi adalah Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi adalah:

- a) Pengembangan jaringan dan layanan kereta api antar kota dan perkotaan.
- b) Reaktivasi jalur kereta api non-operasi.
- c) Pembangunan akses kereta api menuju pelabuhan dan bandara.

2. Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian yang Optimal

Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal adalah Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal dengan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal adalah:

- a) Peningkatan kapasitas lintas jalur kereta api eksisting.

- b) Penerapan teknologi baru perkeretaapian.
- c) Peningkatan kinerja layanan kewajiban pelayanan publik dan angkutan perintis

3. Peningkatan Keselamatan Transportasi Perkeretaapian yang Andal.

Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang andal adalah Keselamatan transportasi perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang andal. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang andal adalah:

- a) Sertifikasi SDM Perkeretaapian.
- b) Sertifikasi sarana perkeretaapian.
- c) Sertifikasi prasarana perkeretaapian.
- d) Peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan dan pengujian.
- e) Pemasangan perangkat Sistem Keselamatan Kereta Api Otomatis (SKKO).
- f) Pemenuhan kebutuhan IMO.
- g) Penyusunan pedoman identifikasi daerah rawan kecelakaan dan rawan bencana.
- h) Penyusunan prosedur tindak lanjut akibat kecelakaan.
- i) Pelaksanaan kajian identifikasi rawan kecelakaan kereta api.

4.2 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023

Program pembangunan tahun 2023 difokuskan untuk penyelesaian KDP/ kegiatan lanjutan, kegiatan kontrak tahun jamak dan pelaksanaan/implementasi dari Peraturan/Instruksi Presiden terkait bidang perkeretaapian. Fokus tersebut diwujudkan dalam program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian dan diuraikan menjadi pokok-pokok kegiatan sesuai dengan outcome Kementerian Perhubungan yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan keselamatan dan keamanan, diantaranya kegiatan:
 - a) Infrastructure Maintenance and Operation;
 - b) Penanganan perlintasan sebidang;
 - c) Peningkatan jalur, jembatan fasilitas operasi KA;
 - d) Pengadaan kereta kerja (inspeksi, kereta ukur, crane);
 - e) Peningkatan Kualitas SDM Perkeretaapian;
 - f) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Perkeretaapian (audit, penegakan hukum, sosialisasi).
2. Peningkatan kapasitas dan aksesibilitas, diantaranya kegiatan: a.
 - a) Pembangunan Jalur KA Trans Sumatera;
 - b) Pembangunan Jalur KA Trans Sulawesi;
 - c) Pembangunan Jalur Ganda Sumbagsel dan Lintas Selatan Jawa;

- d) Pembangunan KA perkotaan (Jabodetabek, Palembang, Bandung, Yogyakarta – Solo, Surabaya);
 - e) Reaktivasi jalur KA;
 - f) Pengembangan akses jalur KA ke Pelabuhan dan Bandara.
3. Peningkatan kualitas layanan transportasi, diantaranya kegiatan:
- a) Subsidi perintis;
 - b) Subsidi angkutan motor gratis pada masa Lebaran
 - c) Penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan tahun baru
 - d) Pengelolaan PSO;
 - e) Pemantauan dan evaluasi SPM, tarif dan kinerja angkutan KA.
4. Tata Kelola dan regulasi, diantaranya kegiatan: a.
- a) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria termasuk penyederhanaan perijinan;
 - b) Belanja pegawai;
 - c) Layanan perkantoran;
 - d) Administrasi kegiatan.

4.3 RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi, mulai tahun 2021-2024 Direktorat Jenderal Perkeretaapian memiliki dua program dan sembilan kegiatan terdiri dari:

1. Program Infrastruktur Konektivitas, terdiri dari kegiatan:
 - a. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian.
 - b. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian.
 - c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian.
 - d. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian.
2. Program Dukungan Manajemen, terdiri dari kegiatan:
 - a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian.
 - b. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian
 - c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian.
 - d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian.
 - e. Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian.

Penjabaran Rencana Kinerja Tahun 2023 disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024 pada Program Infrastruktur Konektivitas akan dijelaskan sebagai berikut:

4.3.1 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Pelayanan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2023 yaitu:

1. Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari Studi Perencanaan Teknis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api baik Prioritas Nasional (PN) dan non PN;
2. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, terdiri dari Pedoman Teknis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
3. Pelayanan Publik Lainnya, terdiri dari Subsidi Angkutan Motor Melalui Kereta Api;
4. Prasarana Bidang Perkeretaapian, terdiri dari Jalur Kereta Api, Jembatan Kereta Api, Terowongan Kereta Api, Stasiun Kereta Api, Persinyalan Perkeretaapian, Telekomunikasi Perkeretaapian, Listrik Aliran Atas, Infrastruktur Perkeretaapian;
5. Pelayanan Publik Lainnya, terdiri dari Subsidi Perintis Perkeretaapian (Prioritas Nasional);
6. Prasarana Bidang Perkeretaapian (Prioritas Nasional), terdiri dari Jalur Kereta Api, Jembatan Kereta Api, Terowongan Kereta Api, Stasiun Kereta Api, Persinyalan Perkeretaapian, Telekomunikasi Perkeretaapian, Listrik Aliran Atas, Infrastruktur Perkeretaapian, Dokumen Perencanaan Teknis.

Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO untuk tahun 2023 :

**Tabel 4.1 Target Rincian Output (RO)
Kegiatan Pelayanan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2023**

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET RENSTRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)
ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana			42.029.780
ABF.001	Studi Perencanaan Teknis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	rekomendasi	10	35.477.828
ABF.002	Studi Perencanaan Teknis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Prioritas Nasional)	rekomendasi	2	6.551.952
AFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria			12.094.226
AFA.001	Pedoman Teknis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	NSPK	8	12.094.226
BAH	Pelayanan Publik Lainnya			52.126.641
BAH.002	Subsidi Angkutan Motor Melalui Kereta Api	layanan	1	52.126.641
CBA	Prasarana Bidang Perkeretaapian			16.653.472
CBA.001	Jalur Kereta Api	Paket	1	6.663.712
CBA.002	Jembatan Kereta Api	Paket	1	550.000
CBA.003	Terowongan Kereta Api	Paket	1	1.100.000
CBA.004	Stasiun Kereta Api	Paket	1	1.100.000
CBA.005	Persinyalan Perkeretaapian	Paket	1	1.100.000

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET RENSTRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)
CBA.006	Telekomunikasi Perkeretaapian	Paket	1	1.100.000
CBA.007	Listrik Aliran Atas	Paket	1	1.100.000
CBA.008	Infrastruktur Perkeretaapian	Paket	1	3.939.760
QAH	Pelayanan Publik Lainnya			265.239.748
QAH.001	Subsidi Perintis Perkeretaapian (Prioritas Nasional)	Layanan	6	265.239.748
RBA	Prasarana Bidang Perkeretaapian (Prioritas Nasional)			7.641.121.116
RBA.001	Jalur Kereta Api	Km'sp	1	7.629.781.115
RBA.002	Jembatan Kereta Api	Paket	1	1.100.000
RBA.003	Terowongan Kereta Api	Paket	1	1.100.000
RBA.004	Stasiun Kereta Api	Paket	1	1.100.000
RBA.005	Persinyalan Perkeretaapian	Paket	1	1.100.000
RBA.006	Telekomunikasi Perkeretaapian	Paket	1	1.100.000
RBA.007	Listrik Aliran Atas	Paket	1	1.100.000
RBA.008	Infrastruktur Perkeretaapian	Paket	1	3.630.000
RBA.009	Dokumen Perencanaan Teknis	Dokumen	1	1.210.000

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

4.3.2 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2023 yaitu:

1. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, terdiri dari Studi Pedoman Teknis Bidang Keselamatan dan Keamanan Perkeretaapian;
2. Sertifikasi Produk, terdiri dari Sertifikasi Sarana Perkeretaapian dan Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian;
3. Sertifikasi Profesi dan SDM, terdiri dari Sertifikat Kompetensi SDM Perkeretaapian Sertifikasi Sarana Perkeretaapian;
4. Akreditasi Lembaga, terdiri dari Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian;
5. OM Prasarana Bidang Perkeretaapian terdiri dari Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO), Perawatan Prasarana Perkeretaapian dan Operasi Prasarana Perkeretaapian;
6. OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian, terdiri dari Operasi Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian dan Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian.

Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO untuk tahun 2023 :

**Tabel 4.2 Target Rincian Output (RO)
Kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2023**

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET RENSTRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)
AFA	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria			6.084.302
AFA.001	Studi Pedoman Teknis Bidang Keselamatan dan Keamanan Perkeretaapian	NSPK	5	6.084.302
ADC	Sertifikasi Produk			26.184.036
ADC.001	Sertifikasi Sarana Perkeretaapian	Produk	3	17.200.183
ADC.002	Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	Produk	4	8,983.853
ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM			20.930.771
ADI.001	Sertifikasi Kompetensi SDM Perkeretaapian	Orang	5	20.930.771
ADE	Akreditasi Lembaga			560.171
ADE.001	Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian	Lembaga	2	560.171
CDA	OM Prasarana Bidang Perkeretaapian			1.940.627.048
CDA.001	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	Km	1	1.500.000.000
CDA.002	Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Km	2	439.527.048
CDA.003	Operasi Prasarana Perkeretaapian	Paket	1	1.100.000
CCK	OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian			4.027.782
CCK.003	Operasi Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	Paket	1	1.100.000
CCK.004	Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	Paket	2	2.927.782

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

4.3.3 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Pelayanan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2023 yaitu:

1. Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari Rencana Induk Pengembangan Transportasi Perkeretaapian, Pra Studi Kelayakan (Preliminary Feasibility Study), Studi Kelayakan (Feasibility Study), Rencana Induk (Master Plan), Studi Lingkungan, Survei, Investigasi dan Rancangan Dasar, Rancangan Rinci (Detailed Design/Engineering Design) dan Studi Evaluasi Hasil/Manfaat Proyek;
2. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, terdiri dari Pedoman Teknis Bidang Prasarana Perkeretaapian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana Perkeretaapian;

3. Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian terdiri dari Sarana Kerja Bidang Konektivitas Perkeretaapian, Sarana Penumpang Bidang Konektivitas Perkeretaapian, Sarana Kerja Bidang Konektivitas Perkeretaapian (Prioritas Nasional) dan Sarana Penumpang Bidang Konektivitas Perkeretaapian (Prioritas Nasional);
4. OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian terdiri dari Operasi Sarana Perkeretaapian, Perawatan Sarana Perkeretaapian, Operasi Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian, Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian, Operasi Peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian dan Perawatan Peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian;
5. Prasarana Bidang Perkeretaapian, terdiri dari Jalur Kereta Api, Jembatan Kereta Api, Terowongan Kereta Api, Stasiun Kereta Api, Persinyalan Perkeretaapian, Telekomunikasi Perkeretaapian, Listrik Aliran Atas dan Infrastruktur Perkeretaapian.

Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO untuk tahun 2023 :

Tabel 4.3 Target Rincian Output (RO)
Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Perkeretaapian Transportasi Tahun 2023

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET RENSTRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)
ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana			87.478.692
ABF.001	Rencana Induk Pengembangan Transportasi Perkeretaapian	rekomendasi	-	-
ABF.002	Pra Studi Kelayakan (<i>Preliminary Feasibility Study</i>)	rekomendasi	1	1.650.000
ABF.003	Studi Kelayakan (<i>Feasibility Study</i>)	rekomendasi	1	1.650.000
ABF.004	Rencana Induk (<i>Master Plan</i>)	rekomendasi	1	1.650.000
ABF.005	Studi Lingkungan	rekomendasi	14	29.703.088
ABF.006	Survei, Investigasi dan Rancangan Dasar	rekomendasi	1	1.650.000
ABF.007	Rancangan Rinci (<i>Detailed Design/ Engineering Design</i>)	rekomendasi	26	42.991.605
ABF.008	Studi Evaluasi Hasil/ Manfaat Proyek	rekomendasi	5	8.148.000
AFA	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria			219.224.100
AFA.001	Pedoman Teknis Bidang Prasarana Perkeretaapian	NSPK	10	205.000.000
AFA.002	Pedoman Teknis Bidang Sarana Perkeretaapian	NSPK	6	14.224.100
CAK	Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian			500.205.958
CAK.001	Sarana Kerja Bidang Konektivitas Perkeretaapian	Unit	36	368.205.958
CAK.002	Sarana Penumpang Bidang Konektivitas Perkeretaapian	Unit	10	110.000.000

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET RENSTRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)
CAK.003	Sarana Kerja Bidang Konektivitas Perkeretaapian (Prioritas Nasional)	Unit	1	11.000.000
CAK.004	Sarana Penumpang Bidang Konektivitas Perkeretaapian (Prioritas Nasional)	Unit	1	11.000.000
CCK	OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian			128.645.629
CCK.001	Operasi Sarana Perkeretaapian	Tahun	1	7.852.900
CCK.002	Perawatan Sarana Perkeretaapian	Tahun	1	116.354.857
CCK.003	Operasi Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	Tahun	1	1.100.000
CCK.004	Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	Tahun	1	
CCK.005	Operasi Peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian	Tahun	1	1.100.000
CCK.006	Perawatan Peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian	Tahun	1	1.100.000
CBA	Prasarana Bidang Perkeretaapian			4.772.769.722
CBA.001	Jalur Kereta Api	Km'sp	15	200.000.000
CBA.002	Jembatan Kereta Api	Paket	1	1.100.000
CBA.003	Terowongan Kereta Api	Paket	1	1.100.000
CBA.004	Stasiun Kereta Api	Paket	1	1.100.000
CBA.005	Persinyalan Perkeretaapian	Paket	1	1.100.000
CBA.006	Telekomunikasi Perkeretaapian	Paket	1	1.100.000
CBA.007	Listrik Aliran Atas	Paket	1	1.100.000
CBA.008	Infrastruktur Perkeretaapian	Paket	63	4.566.169.722

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

4.3.4 Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian Tahun 2023 yaitu:

1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, terdiri dari Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, Bimbingan Teknis Bidang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Bimbingan Teknis Bidang Sarana Transportasi Perkeretaapian, Bimbingan Teknis Bidang Prasarana Transportasi Perkeretaapian dan Bimbingan Teknis Bidang Keselamatan Transportasi Perkeretaapian;
2. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal, terdiri dari Monitoring dan Evaluasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Monitoring dan Evaluasi Bidang Sarana

Perkeretaapian, Monitoring dan Evaluasi Bidang Prasarana Perkeretaapian, Monitoring dan Evaluasi Bidang dan Keselamatan Perkeretaapian;

3. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, terdiri dari Layanan Urusan Organisasi dan Layanan Tata Kelola Internal;
4. Layanan Prasarana Internal, terdiri dari Gedung dan Bangunan. Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO untuk tahun 2023:

**Tabel 4.4 Target Rincian Output (RO)
Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian Tahun 2023**

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET RENSTRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)
EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			23.714.924
EAB.001	Bimbingan Teknis Bidang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	layanan	4	1.626.564
EAB.002	Bimbingan Teknis Bidang Sarana Transportasi Perkeretaapian	layanan	5	3.597.606
EAB.003	Bimbingan Teknis Bidang Prasarana Transportasi Perkeretaapian	layanan	5	2.693.138
EAB.004	Bimbingan Teknis Bidang Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	layanan	15	15.797.616
EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal			76.852.472
EAL.001	Monitoring dan Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	layanan	27	31.241.689
EAL.002	Monitoring dan Evaluasi Bidang Sarana Transportasi Perkeretaapian	layanan	15	12.754.001
EAL.003	Monitoring dan Evaluasi Bidang Prasarana Transportasi Perkeretaapian	layanan	25	18.058.745
EAL.004	Monitoring dan Evaluasi Bidang Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	layanan	24	14.798.036
EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			1.513.444
EAH.001	Layanan Urusan Organisasi	layanan	1	412.512
EAH.002	Layanan Tata Kelola Internal	layanan	3	1.100.932
EAE	Layanan Prasarana Internal			47.511.705
EAE.001	Gedung dan Bangunan	tahun	1	47.511.705

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

Selanjutnya, penjabaran Rencana Kinerja Tahun 2023 disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024 pada Program Dukungan Manajemen akan dijelaskan sebagai berikut:

4.3.5 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Tahun 2023 yaitu:

1. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, terdiri dari Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal;
2. Layanan SDM, terdiri dari Layanan SDM.

**Tabel 4.5 Target Rincian Output (RO)
Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Tahun 2023**

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET RENSTRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)
EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			24.989.773
EAH.001	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	layanan	10	24.989.773
EAF	Layanan SDM			11.245.209
EAF.001	Layanan SDM	orang	18	11.245.209

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

4.3.6 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian Tahun 2023 yaitu:

1. Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari Kebijakan Perencanaan;
2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, terdiri dari Layanan Perencanaan;
3. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal, terdiri dari Monitoring dan Evaluasi Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Keuangan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Hukum dan Monitoring dan Evaluasi Bidang Kepegawaian dan Umum;
4. Layanan Umum, terdiri dari Layanan Organisasi dan Rumah Tangga;
5. Layanan Perkantoran, terdiri dari Gaji dan Tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan Kantor;
6. Layanan Sarana Internal, terdiri dari Kendaraan Bermotor, Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi dan Peralatan fasilitas perkantoran;
7. Layanan Prasarana Internal, terdiri dari Gedung dan Bangunan;

Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO untuk tahun 2023.

Tabel 4.6 Target Rincian Output (RO) Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian Tahun 2023

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET RENSTRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)
ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana			13.996.433
EAH.001	Kebijakan Perencanaan	Rekomendasi	17	13.996.433
EAB	Layanan Perencanaan dan Penggangan Internal			5.447.361
EAB.001	Layanan Perencanaan	Layanan	11	5.447.361
EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal			44.734.238
EAL.001	Monitoring dan Evaluasi Bidang Perencanaan	Tahun	23	14.206.057
EAL.002	Monitoring dan Evaluasi Bidang Keuangan	Tahun	39	22.060.858
EAL.003	Monitoring dan Evaluasi Bidang Hukum	Tahun	5	3.534.870
EAL.004	Monitoring dan Evaluasi Bidang Kepegawaian dan Umum	Tahun	10	4.932.454
EAC	Layanan Umum			111.588.968
EAC.001	Layanan Organisasi dan Rumah Tangga	Layanan	102	111.588.968
EAA	Layanan Perkantoran			230.783.808
EAA.001	Gaji dan Tunjangan	Layanan	22	139.273.269
EAA.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	84	91.510.539
EAD	Layanan Sarana Internal			103.504.352
EAD.001	Kendaraan Bermotor	Unit	3	5.856.219
EAD.002	Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi	Unit	9	6.306.595
EAD.003	Peralatan Fasilitas Perkantoran	Unit	9	91.341.539
EAE	Layanan Prasarana Internal			23.968.487
EAE.001	Gedung dan Bangunan	Unit	1	23.968.487

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

4.3.7 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian Tahun 2023 yaitu Layanan Data dan Informasi. Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO untuk tahun 2023.

Tabel 4.7 Target Rincian Output (RO) Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian Tahun 2023

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET RENSTRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)
EAJ	Layanan Data dan Informasi			2.567.280.
EAJ.001	Layanan Data dan Informasi	layanan	3,0	2.567.280.

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

4.3.8 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian Tahun 2023 yaitu Layanan Kehumasan dan Protokoler. Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO untuk tahun 2023.

Tabel 4.8 Target Rincian Output (RO) Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian Tahun 2023

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET RENSTRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)
EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler			14.945.656.
EAI.001	Layanan humas dan protokoler	layanan	22,0	14.945.656.

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

4.3.9 Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan legislasi dan litigasi transportasi perkeretaapian tahun 2023 yaitu layanan hukum. Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO untuk tahun 2023

Tabel 4.9 Target Rincian Output (RO) Kegiatan Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian Tahun 2023

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET RENSTRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)
EAG	Layanan Hukum			2.634.205
EAG.001	Layanan Hukum	layanan	3,0	2.634.205.

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

4.4 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Sesuai dengan struktur sasaran dan indikator kinerja program penyelenggaraan perkeretaapian tahun 2020-2024 yang disampaikan sebelumnya serta untuk mendukung sasaran pembangunan nasional, maka dengan mempertimbangkan kebutuhan sesuai perkembangan lingkungan strategis serta kemampuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dari hasil evaluasi pelaksanaan Renstra 2015-2019, telah ditetapkan target sasaran program penyelenggaraan perkeretaapian untuk periode Renstra 2020-2024 sebagaimana disampaikan berikut:

Tabel 4.10 Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023

NO.	TUJUAN/ SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	BASE LINE TAHUN 2021*	TARGET RENSTRA TAHUN 2023**
1.	Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi			
	Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur	IKP1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	0,416	0,350 *** <i>(0,443)</i>
2.	Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal			
	Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan	IKP2 Persentase capaian <i>on time performance</i> (OTP) transportasi kereta api	90,72	80
		IKP3 Pemenuhan target angkutan penumpang kereta api	18,41	73
		IKP4 Pemenuhan target angkutan barang kereta api	26,18	68
		IKP5 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI I dan II	90,34	90 *** <i>(89,94)</i>
3.	Peningkatan Keselamatan Transportasi Perkeretaapian yang Handal			
	Keselamatan transportasi perkeretaapian	IKP6 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (<i>rate of accident</i>)	0,19	0,23

Sumber:

- * Baseline Tahun 2021 berdasarkan Capaian Kinerja hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2021;
- ** Target 2023 berdasarkan Rencana Strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian,;
- *** Target 2023 berdasarkan IKK Direktorat Prasarana Perkeretaapian.

Lampiran II
Revisi Perjanjian Kinerja
Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun 2023



**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohamad Risal Wasal
Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Budi Karya Sumadi
Jabatan : Menteri Perhubungan
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2023

Pihak Kedua,
Menteri Perhubungan

Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Perkeretaapian

BUDI KARYA SUMADI

MOHAMAD RISAL WASAL

**RINGKASAN PROGRAM KERJA TAHUNAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAPIAN**

No	SISWA PROGRAM	INDIKTOR KERJA	SATUAN	TARGET	
SP1	Konektivitas Jaringan Perkeretaapian Nasional yang Diwujudkan dan Penyediaan Infrastruktur	IKP1	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	100%
SP2	Keselamatan Transportasi Perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia Sarana dan Prasarana yang Aman	IKP2	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>rate of accident</i>)	Kejadian Kecelakaan per Juta Kilometer Tempuh	100%
SP3	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian yang Terpercepat dan Sesuai Keutuhan	IKP1	Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	%	100%
		IKP2	Penuhan Target Angkutan Penuh Kereta Api	%	100%
		IKP3	Penuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	%	100%
		IKP4	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TPI	%	100%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
		IKP7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,45

Kegiatan

Anggaran

- | | | |
|--|----|-------------------|
| 1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian | Rp | 1.937.414.278.000 |
| 2. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian | Rp | 4.200.187.069.000 |
| 3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian | Rp | 917.127.181.000 |
| 4. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian | Rp | 29.412.139.000 |
| 5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian | Rp | 7.151.791.000 |
| 6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian | Rp | 481.177.257.000 |
| 7. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian | Rp | 15.818.517.000 |
| 8. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian | Rp | 17.991.687.000 |
| 9. Legislasi dan Litigasi Transportasi | Rp | 2.567.319.000 |

Disetujui
Menteri Perhubungan

Jakarta, Desember 2023
Direktur Jenderal Perkeretaapian



BUDI KARYA SUMADI

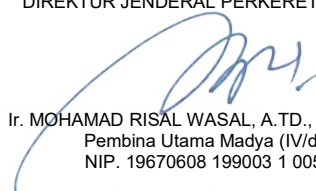


MOHAMAD RISAL WASAL

**RENCANA AKSI PADA REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB	
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12			
SP1 Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,45	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (pembangunan jalur KA baru, reaktivasi jalur KA, termasuk penyiapan dokumen perencanaan dan lahan)	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,450	1.917.956.264.000	Setditjen Perkeretaapian, Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA
SP2 Keselamatan transportasi perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang handal	IK2 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (<i>rate of accident</i>)	Kejadian kecelakaan/1 juta km tempuh	0,15	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (pengujian dan sertifikasi kelaikan sarana, prasarana dan kompetensi SDM, perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara, pembinaan dan pengaturan/pengendalian/pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian)	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	975.090.612.000	Dit. Keselamatan Perkeretaapian, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, Balai Pengujian, Balai Perawatan, BTP, BPKA
SP3 Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan	IK3 Persentase capaian on time performance (OTP) transportasi kereta api	%	91	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda kereta api dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian baik jalur kereta api dan fasilitas operasi dan lainnya)	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	4.190.700.838.000	Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA
	IK4 Pemenuhan target angkutan penumpang kereta api	%	55,68		36%	37%	39%	41%	42%	44%	46%	48%	50%	52%	54%	55,68%			
	IK5 Pemenuhan target angkutan barang kereta api	%	56		44%	44%	46%	48%	49%	50%	51%	52%	53%	54%	55%	56%			
	IK6 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI I dan II	%	92,87		92,87%	92,87%	92,87%	92,87%	92,87%	92,87%	92,87%	92,87%	92,87%	92,87%	92,87%	92,87%			
	IK7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,45		3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45			

Jakarta, Desember 2023
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN


 Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 19670608 199003 1 005

Lampiran III

Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023



REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	4600 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	7,151,791,000	0	0	0	0	0	0	0	7,151,791,000
		REALISASI	0.00%	7,082,559,953 (99.03%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7,082,559,953 (99.03%)
		SISA	0	69,231,047	0	0	0	0	0	0	0	69,231,047
2	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	PAGU	144,616,902,000	327,441,337,000	9,511,971,000	0	0	0	0	0	0	481,570,210,000
		REALISASI	141,936,482,873 (98.15%)	322,118,476,520 (98.37%)	9,454,611,712 (99.40%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	473,509,571,105 (98.33%)
		SISA	2,680,419,127	5,322,860,480	57,359,288	0	0	0	0	0	0	8,060,638,895
3	4602 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	11,742,587,000	4,075,930,000	0	0	0	0	0	0	15,818,517,000
		REALISASI	0.00%	11,499,145,790 (97.93%)	3,366,776,068 (82.60%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14,865,921,858 (93.98%)
		SISA	0	243,441,210	709,153,932	0	0	0	0	0	0	952,595,142
4	4603 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	17,991,687,000	0	0	0	0	0	0	0	17,991,687,000
		REALISASI	0.00%	17,344,139,625 (96.40%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	17,344,139,625 (96.40%)
		SISA	0	647,547,375	0	0	0	0	0	0	0	647,547,375
5	4604 Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	2,567,319,000	0	0	0	0	0	0	0	2,567,319,000
		REALISASI	0.00%	2,347,646,038 (91.44%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2,347,646,038 (91.44%)
		SISA	0	219,672,962	0	0	0	0	0	0	0	219,672,962
6	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	313,228,046,000	3,886,055,771,000	0	0	0	0	0	0	4,199,283,817,000
		REALISASI	0.00%	306,337,756,451 (97.80%)	2,962,974,532,583 (76.25%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3,269,312,289,034 (77.85%)
		SISA	0	6,890,289,549	923,081,238,417	0	0	0	0	0	0	929,971,527,966
7	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	679,122,400,000	266,556,073,000	0	0	0	0	0	0	945,678,473,000
		REALISASI	0.00%	634,219,744,778 (93.39%)	247,204,909,065 (92.74%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	881,424,653,843 (93.21%)
		SISA	0	44,902,655,222	19,351,163,935	0	0	0	0	0	0	64,253,819,157



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

8	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	PAGU REALISASI	0 0.00%	397,270,548,000 390,578,839,148 (98.32%)	1,679,710,428,000 1,460,479,894,869 (86.95%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	2,076,980,976,000 1,851,058,734,017 (89.12%)
		SISA	0	6,691,708,852	219,230,533,131	0	0	0	0	0	0	225,922,241,983
9	4644 Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	PAGU REALISASI	0 0.00%	27,452,634,000 27,218,846,957 (99.15%)	1,959,505,000 1,954,750,398 (99.76%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	29,412,139,000 29,173,597,355 (99.19%)
		SISA	0	233,787,043	4,754,602	0	0	0	0	0	0	238,541,645
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	144,616,902,000 141,936,482,873 (98.15%)	1,783,968,349,000 1,718,747,155,260 (96.34%)	5,847,869,678,000 4,685,435,474,695 (80.12%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	7,776,454,929,000 6,546,119,112,828 (84.18%)
		SISA	2,680,419,127	65,221,193,740	1,162,434,203,305	0	0	0	0	0	0	1,230,335,816,172



REALISASI BELANJA PER SUMBER DANA

NO	(Kode) Sumber Dana	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	(A) RUPIAH MURNI	PAGU REALISASI	144,616,902,000 141,936,482,873 (98.15%)	1,747,211,795,000 1,682,485,544,916 (96.30%)	1,076,891,632,000 984,850,317,260 (91.45%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	2,968,720,329,000 2,809,272,345,049 (94.63%)
		SISA	2,680,419,127	64,726,250,084	92,041,314,740	0	0	0	0	0	0	159,447,983,951
2	(B) PINJAMAN LUAR NEGERI	PAGU REALISASI	0 0.00%	0 0.00%	50,672,383,000 48,779,776,097 (96.27%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	50,672,383,000 48,779,776,097 (96.27%)
		SISA	0	0	1,892,606,903	0	0	0	0	0	0	1,892,606,903
3	(D) PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PAGU REALISASI	0 0.00%	0 0.00%	4,342,200,000 3,398,085,360 (78.26%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	4,342,200,000 3,398,085,360 (78.26%)
		SISA	0	0	944,114,640	0	0	0	0	0	0	944,114,640
4	(F) BADAN LAYANAN UMUM	PAGU REALISASI	0 0.00%	36,756,554,000 36,261,610,344 (98.65%)	31,272,839,000 30,537,428,398 (97.65%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	68,029,393,000 66,799,038,742 (98.19%)
		SISA	0	494,943,656	735,410,602	0	0	0	0	0	0	1,230,354,258
5	(T) SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA	PAGU REALISASI	0 0.00%	0 0.00%	4,684,690,624,000 3,617,869,867,580 (77.23%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	4,684,690,624,000 3,617,869,867,580 (77.23%)
		SISA	0	0	1,066,820,756,420	0	0	0	0	0	0	1,066,820,756,420
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	144,616,902,000 141,936,482,873 (98.15%)	1,783,968,349,000 1,718,747,155,260 (96.34%)	5,847,869,678,000 4,685,435,474,695 (80.12%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	7,776,454,929,000 6,546,119,112,828 (84.18%)
		SISA	2,680,419,127	65,221,193,740	1,162,434,203,305	0	0	0	0	0	0	1,230,335,816,172

Lampiran IV
Komitmen Rekomendasi Peningkatan
Kinerja

KOMITMEN RUMAH SAMPUNG GIGI KIRI
PERDASARKAN PERATURAN KIRI DIRKTRT JODOR PERKURTP IPTU

No	RUMAH SAMPUNG GIGI KIRI	KTU PKS	PIC
1	<p>Sektor Konektivitas Jaringan Perkeretaapian Nasional yang Diwujudkan dalam Peningkatan Pengamanan di Lapangan dengan Mengoptimalkan Peran Aktor Satuan Pelebaran INDIKTOR KIRI Rasio Konektivitas Antar Stasiun</p>	<p>Triwulan I - III Tahun 2020</p>	<p>• Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Direktorat Kesejahteraan Perkeretaapian • TP Padang • Balai Pengujian Perkeretaapian</p>
2	<p>Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pendukung rasio konektivitas antar stasiun diantaranya perbaikan infrastruktur pesawat di segmen Aek Nara – Pondok S dan Arru – Palan</p>	<p>Triwulan I - III Tahun 2020</p>	<p>• Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian</p>
3	<p>Kordinasi penyiapan dukungan teknis dan pelaksanaan untuk mendukung rencana pembangunan perkeretaapian di stasiun dan IKN</p>	<p>Triwulan I - II Tahun 2020</p>	<p>• Direktorat AKA • Direktorat Sarana Perkeretaapian</p>
4	<p>Penyiapan Rencana Strategis Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2025 untuk menjadi acuan usulan kegiatan pendukung konektivitas perkeretaapian</p>	<p>Triwulan I - IV Tahun 2020</p>	<p>• Setditjen Perkeretaapian • Direktorat AKA • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian</p>
5	<p>Sektor Kesejahteraan Transportasi Perkeretaapian Dengan Sumber Daya Manusia Sarana Dan Prasarana yang Aman INDIKTOR KIRI Rasio Kejadian Kelelahan Transportasi Kereta Api Rate Of Accident</p>	<p>Triwulan I - IV Tahun 2020</p>	<p>• Direktorat Kesejahteraan Perkeretaapian</p>
6	<p> Lanjutan pelaksanaan audit SMKP terhadap Badan Usaha Perkeretaapian</p>	<p>Triwulan I - IV Tahun 2020</p>	<p>• Direktorat Kesejahteraan Perkeretaapian</p>

No	RUMAH SUSTAINABLE IN-GOVT KIR	KTU PKS	PIC
2	Anjutan peningkatan kompetensi SDM regulasi dan pelatihan teknis untuk mendukung pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penanggulangan perkeretaapian	Triwulan I - II Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Kesejahteraan Perkeretaapian Setditjen Perkeretaapian
□	Prioritas kegiatan modernisasi sistem persinanon dan teknologi unikasi khususna untuk jalur kereta api yang asis menggunakan sistem mekanik	Triwulan I - IV Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Prasarana Perkeretaapian Daai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
□	Evaluasi dan perbaikan terhadap SOP pengoperasian kereta api guna peningkatan kesejahteraan perkeretaapian	Triwulan I – II Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat AKA
□	Pengoptimalan penanggulangan IM pada Tahun 2020 dengan pelaksanaan perataan prasarana perkeretaapian dan Daai Teknik Perkeretaapian sesuai dengan iainna keenanganna	Triwulan I - IV Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Prasarana Perkeretaapian Daai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
C	SUR Kinerja Pelaksanaan Transportasi Perkeretaapian yang Terperna Dan Sesuai Keputusan DIKTOR KIR Persentase Capaian On Time Performance TP Transportasi Kereta api		
□	Peningkatan pengawasan dan koordinasi dengan petugas di lapangan untuk mengantisipasi dan menangani gangguan operasiona lintas kereta api yang terjadi seperti cuaca buruk bencana alam tindakan vandais terasuk peningkatan keamanan di perlintasan sedang	Triwulan I - IV Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> Daai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
2	Percepatan penelasaan jalur ganda kereta api di lintas uta-a Jawa dan Sumatera agar lebih efektif dan efisien dalam pengaturan perjalanan kereta api	Triwulan I - III Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Prasarana Perkeretaapian Daai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
□	Penanganan cepat ketika terjadi keakaaan kereta api maupun keakaaan n kereta api yang mengganggu operasiona agar jalur kereta api dapat segera diain dan perjalanan segera nraake-ai terasuk diperukan penediaan dan penecepatan sarana pendukung penanganan keakaaan yang siap operasi di beberapa kasi strategis	Triwulan I - IV Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Kesejahteraan Perkeretaapian Direktorat Sarana Perkeretaapian Daai Perataan Perkeretaapian
D	SUR Kinerja pelaksanaan transportasi perkeretaapian yang terperna dan sesuai keputusan DIKTOR KIR Penuan Target Angkutan Penu pang Kereta api		
□	Percepatan pengoperasian pada asis-asis peangunan prasarana perkeretaapian diantaranya Krueng Geukeu – Pa Rantauprapat – Pndk S serta perpanjangan lanan KA di kasi lainna	Triwulan I - III Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Prasarana Perkeretaapian Direktorat Kesejahteraan Perkeretaapian Direktorat AKA

No	RUMAH SUSTAINABLE GROWTH KIR	KKTU PKS	PIC
			<ul style="list-style-type: none"> • Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
2	Penyusunan keutusan anggaran untuk layanan subsidi KA perintis sesuai keutusan agar layanan terus berlanjut	Tribun I - II Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat AKA • Setditjen Perkeretaapian • Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
□	Evaluasi pengoperasian layanan KA yang baru beroperasi diantaranya KA Makassar – Parepare RT Janda Bek Kereta Cepat Jakarta-andung secara berkala guna pengoptimalan layanan yang anda	Tribun I - IV Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat AKA • Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
□	Koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk penediaan angkutan feeder yang optimal mendukung layanan KA sebagai backbone utama termasuk pelaksanaan sosialisasi/publikasi penggunaan transportasi KA yang terintegrasi baik antar moda maupun inter moda	Tribun I - III Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat AKA • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
□□	SSR Sasaran Kinerja Pelaksanaan Transportasi Perkeretaapian yang Terperoleh dan Sesuai Keutusan IDIR KIR Peutusan Target angkutan Barang Kereta Api		
□	Pengoptimalan layanan angkutan kereta api barang menuju dari simpul peutusan yang sudah terdukung jalur kereta api untuk pengirisan barang ekspordiantaranya Pelabuhan Tanjung Priuk Pelabuhan Tanjung Mas Pelabuhan Tanjung Perak Pelabuhan Kuala Tanjung Pelabuhan Garngng	Tribun I - IV Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat AKA • Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
2	Pemanfaatan market persa untuk mengduplikan keca angkutan barang eksp Gedeage menuju Tanjung Priuk termasuk perunaan intervensi caa dari asing-asing stakeholder agar tarangkutan barang kereta api lebih kecil	Tribun I - II Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat AKA
□	Pelaksanaan Kajian Peningkatan Utilisasi Jalur Kereta Api Pelayanan Angkutan Barang yang terdukung dengan Pusat Logistik pada Tahun 2020 guna mendukung Instruksi Presiden Nomor Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional	Tribun I - III Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat AKA

No	RUMAH SUSTAINABLE IN-GOVT KIR	KKTU PKS	PIC
1	<p>SSR Kinerja Pelaksanaan Transportasi Perkeretaapian yang Terperinci Dan Sesuai Keutuhan DIKTOR KIR Persentase Pengoperasian Jalur Kereta yang Sesuai Dengan TPI</p>		
1	<p>Penyelesaian peningkatan jalur kereta api baik kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru di beberapa lokasi diantaranya Sumatera Utara (Kisaran – Mangrove – Padang Lawas Medan – Medan Tap II Sumatera Barat (Padang – Pauk a Jaja Barat (Cikahek – Cirebon Tengah (Sungai Mangrove-Cikap Jaja Timur (Kaikat – Jermer terasuk perencanaan jalur ganda kereta api (<i>at grade</i> dan <i>elevated</i>) di lintas utama Jaja dan Sumatera</p>	<p>Triwulan I - III Tahun 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Prasarana Perkeretaapian Direktorat Kesejahteraan Perkeretaapian Unit terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
2	<p>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan jalur kereta api perencanaan jalur ganda kereta api serta pemeriksaan jalur kereta api eksisting secara berkala</p>	<p>Triwulan I - IV Tahun 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Prasarana Perkeretaapian Unit terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
1	<p>Penyusunan pedoman untuk pengukuran kinerja TPI</p>	<p>Triwulan I - III Tahun 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Prasarana Perkeretaapian
1	<p>Pengukuran TPI bersama dengan PT KAI dalam rangka pelaksanaan tugas pengaasan terasuk perencanaan keutuhan peningkatan kompetensi pegawai untuk pengeamanan pengukuran data TPI guna mendukung rencana pengukuran TPI menggunakan kereta ukur milik Direktorat Jenderal Perkeretaapian</p>	<p>Triwulan I - III Tahun 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Prasarana Perkeretaapian
G	<p>SSR Kinerja Pelaksanaan Transportasi Perkeretaapian yang Terperinci Dan Sesuai Keutuhan DIKTOR KIR Indeks Kepuasan Masyarakat IKM terhadap Pelaksanaan Publik Bidang Perkeretaapian</p>		
1	<p>Tindak lanjut seluruh pengaduan masyarakat pengguna layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terasuk analisa berkala terhadap hasil survei untuk perbaikan di periode berikutnya</p>	<p>Triwulan I - IV Tahun 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat AKA Direktorat Prasarana Perkeretaapian Direktorat Sarana Perkeretaapian Direktorat Kesejahteraan Perkeretaapian PKAR Susse Unit Pengujian Perkeretaapian

No	Rencana Misi Peningkatan Kinerja	Kategori Pangkat/KS	PIC
2	Optimisasi pelayanan sistem TIK digitalisasi berupa integrasi data persetujuan terpusat dan pemanfaatan e-dukasi dasboard terpadu terhadap pelayanan layanan bidang perkeretaapian (perijinan sertifikasi pengujian lainnya)	Tingkatan I - III Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat AKA • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Direktorat Sarana Perkeretaapian • Direktorat Kesehatan Perkeretaapian • PKAR Susse • Balai Pengujian Perkeretaapian

Jakarta, Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN



Ir. M. AMAD RISA, ASA, ATD, MIM, IPM

Pejabat Utama Madia (IVd)

NIP 0000000000000000

Lampiran V
Monitoring Rencana Aksi

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

Bulan: Oktober, Tahun: 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
KONEKTIVITAS JARINGAN PERKERETAAPIAN NASIONAL YANG DIWUJUDKAN DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR	RASIO KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH	Lokasi	0,45	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (pembangunan jalur KA baru, reaktivasi jalur KA, termasuk penyiapan dokumen perencanaan dan lahan)	-	-	0.436	-	853.708.547.500	13.03	0.436	873.188.340.953	100%	102.28%	Rasio konektivitas pada Oktober Tahun 2023 masih sama dengan baseline Tahun 2022 yaitu sebesar 0,436 dengan jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional sebanyak 65 lokasi (PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional 51 lokasi, simpul bandara 6 lokasi, simpul pelabuhan 8 lokasi) dibandingkan target Rencana Induk Perkeretaapian Nasional sebanyak 149 lokasi (PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional 104 lokasi, simpul bandara 16 lokasi, simpul pelabuhan 29 lokasi). Dengan realisasi rasio konektivitas antar wilayah pada Triwulan III Tahun 2023 sebesar 0,436, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 100,00% dari target Triwulan III dan capaian kinerja sebesar 96,96% dari target Tahun 2023.	Upaya peningkatan kinerja terhadap pencapaian rasio konektivitas antar wilayah pada periode berikutnya antara lain: a. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil reaktivasi jalur kereta api jalur kereta api antara Sawahlunto – Muarokalaban serta mengecek kembali kelengkapan dokumen perizinan dan dokumen teknis yang ada; b. Berkoordinasi intensif dengan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang dan PT. Kereta Api Indonesia (persero) untuk menyusun Dokumen Teknis yang belum ada dan pengoperasian kereta yang telah dilakukan; c. Bersurat kepada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang untuk melakukan pengawasan pembangunan dan peningkatan jalur kereta api sesuai dengan tugas dan kewenangan Balai Teknik Perkeretaapian; d. Berkoordinasi intensif dengan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang terkait dengan terkait pemenuhan data dukung pengujian dan berkoordinasi dengan Balai Pengujian terkait rencana jadwal pengujian track; e. Berkoordinasi dengan Biro LPBMN terkait dengan rencana pengadaan Rel dan Wesel MYC 2023-2024 terkait dengan percepatan pencantuman ekatalog produk Rel, Wesel dan Bantalan Wesel; f. Evaluasi rencana penyerapan anggaran dan akan dilakukan rekomposisi anggaran MYC TA 2023 dan TA 2024 untuk pengadaan rel dan wesel berkaitan dengan keterlambatan kontrak pekerjaan; g. Evaluasi Anggaran dilingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara berkala terkait dengan Rencana Penyerapan Akhir Tahun Anggaran 2023 termasuk diperlukan pemetaan dan penyesuaian anggaran untuk kegiatan yang terkendala dan dialihkan untuk kegiatan yang berjalan; h. Evaluasi Target Kinerja serta perubahan Rencana Aksi atas Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2023	Setditjen Perkeretaapian, Direktorat LLAKA, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA YANG HANDAL	RASIO KEJADIAN KECELAKAAN TRANSPORTASI KERETA API (RATE OF ACCIDENT)	Rasio	0,15	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (pengujian dan sertifikasi kelaikan sarana, prasarana dan kompetensi SDM, perawatan dan pengoperasian sarana perkeretaapian milik negara, pembinaan dan pengaturan/pengendalian/pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian)	-	-	0.15	-	708.934.681.920	23	0.11	202.625.987.620	73.33%	28.58%	Sampai dengan Oktober Tahun 2023, terdapat 7 kejadian kecelakaan kereta api dengan jumlah Km Tempuh sebesar 61.268.289 Km. Dengan menggunakan formula Rate of Accident (RoA) pada uraian sebelumnya dan jumlah 7 kejadian kecelakaan kereta api serta Km Tempuh sebesar 61.268.289 Km sampai dengan Triwulan III 2023, maka diperoleh rasio kejadian kecelakaan Triwulan III Tahun 2023 sebesar 0,11 Kejadian Kecelakaan/1 Juta Km Tempuh. Dengan realisasi rasio kejadian kecelakaan tersebut, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 136,53% dari target Triwulan III dan target Tahun 2023.	Upaya meningkatkan kinerja pada periode berikutnya diperlukan hal-hal sebagai berikut: a. Penyelenggaraan rampcheck baik sarana, prasarana dan keselamatan pada angkutan natal dan tahun baru 2024. b. Pencegahan dan pengawasan pelanggaran di bidang perkeretaapian untuk mencegah gangguan faktor eksternal terhadap keselamatan operasional kereta api termasuk di lokasi perlintasan sebidang. c. Monitoring dan evaluasi terhadap sertifikat kompetensi SDM operator perkeretaapian.	Direktorat Keselamatan, Direktorat Prasarana, Perkeretaapian Direktorat Sarana Perkeretaapian, Balai Pengujian, Balai Perawatan, BTP, BPKA
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	PERSENTASE CAPAIAN ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	91	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda KA dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian perkotaan, peningkatan prasarana perkeretaapian baik jalur KA dan fasilitas operasi, dan lainnya)	90	1092	91	8.33	3.144.740.760.750	14.57	90.39	2.104.866.589.439	99.33%	66.93%	Pada Oktober Tahun 2023, diperoleh jumlah realisasi kedatangan dan keberangkatan kereta api (penumpang dan barang) tepat waktu sebanyak 515.636 KA dari total kedatangan dan keberangkatan kereta api (penumpang dan barang) sebanyak 554.901 KA. Untuk itu, diperoleh realisasi On Time Performance (OTP) sebesar 90,39%	Upaya meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya antara lain: a. Penyelesaian pembangunan jalur ganda kereta api (Mojokerto –Sepanjang, Bandung – Cicalengka) dan fasilitas operasi (Padalarang – Bandung) termasuk pengamanan perlintasan sebidang. b. Pemantauan dan evaluasi penerapan GAPEKA 2023 secara berkala untuk mendorong operator kereta api menjalankan jadwal perjalanan kereta api secara tepat waktu. c. Koordinasi dengan operator untuk percepatan aktivitas bongkar muat angkutan barang serta pembahasan intensif agar kegiatan pembangunan/peningkatan pada lintas operasional tidak mengganggu jadwal perjalanan. d. Menjaga agar Perjalanan Kereta Api sesuai dengan Grafik Perjalanan KA (GAPEKA) yang berlaku; e. Mendorong agar Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Balai Teknik Perkeretaapian mengantisipasi kelambatan Perjalanan Kereta Api akibat pekerjaan Satker dan Perawatan Prasarana pada triwulan III tahun 2023 sebagai penyebab kelambatan faktor Jalur Rel dan Jembatan sebesar 52,83%	Dit. LLAKA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN PENUMPANG KERETA API	%	55,68	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda KA dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian perkotaan, peningkatan prasarana perkeretaapian baik jalur KA dan fasilitas operasi, dan lainnya)	49	544	52	9.56	-	-	49.74	-	95.65%	-	Pada Triwulan III Tahun 2023 diperoleh jumlah penumpang terangkut kereta api sebanyak 308.384.962. Dengan jumlah realisasi penumpang kereta api Tahun 2020 s.d 2022 sebanyak 669.019.172 penumpang (2020 sebanyak 199.255.108 penumpang, 2021 sebanyak 162.572.707 penumpang dan 2022 sebanyak 307.191.357 penumpang) dan jumlah penumpang pada periode Triwulan III Tahun 2023 sebanyak 306.764.555 penumpang, maka diperoleh jumlah realisasi penumpang kumulatif dari Tahun 2020 sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 sebanyak 977.404.134 penumpang. Jumlah tersebut selanjutnya dibandingkan dengan target produksi angkutan penumpang transportasi kereta api pada periode 2020 – 2024 sebagaimana pada Rencana Strategis Tahun 2020 –2024 yaitu 1.965.065.861 penumpang, maka diperoleh realisasi pemenuhan target angkutan penumpang kereta api pada Triwulan III Tahun 2023 sebesar 49,74%.	Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang diantaranya: a. Pengoperasian Kereta Cepat Jakarta – Bandung secara komersial pada bulan Oktober 2023 diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan moda transportasi kereta api. b. Percepatan penyelesaian jalur ganda kereta api di lintas utama Jawa termasuk peningkatan fasilitas operasi (Mojokerto – Sepanjang, Padalarang – Bandung – Cicalengka). c. Penyediaan inovasi layanan kereta api kompartemen guna menarik minat masyarakat untuk merasakan perjalanan dengan kenyamanan yang lebih tinggi. d. Diperlukan perubahan target pada Perjanjian Kinerja mengingat target tahunan sudah tercapai.	Dit.LLAKA
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN BARANG KERETA API	%	56	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda KA dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian perkotaan, peningkatan prasarana perkeretaapian baik jalur KA dan fasilitas operasi, dan lainnya)	55	602	54	8.97	-	-	55.13	-	102.09%	-	Sampai dengan bulan Oktober 2023, realisasi angkutan barang kereta api sebesar 47.564.576 ton. Dengan jumlah angkutan barang kereta api Tahun 2020 s.d 2022 sebanyak 153.619.326 ton (tahun 2020 sebanyak 45.482.801 ton, tahun 2021 sebanyak 50.038.883 ton dan tahun 2022 sebanyak 58.097.642 ton) dan realisasi pada periode Triwulan III Tahun 2023 sebanyak 47.564.576 ton, maka diperoleh jumlah realisasi barang terangkut dari Tahun 2020 s.d Triwulan III Tahun 2023 sebanyak 201.183.905 ton. Jumlah tersebut selanjutnya dibandingkan dengan jumlah target produksi angkutan barang kereta api Tahun 2020 - 2024 berdasarkan target Rencana Strategis yaitu sebanyak 364.906.806 ton, sehingga diperoleh pemenuhan target angkutan barang kereta api pada Triwulan III Tahun 2023 sebesar 55,13%.	Upaya untuk meningkatkan capaian kinerja periode selanjutnya antara lain: a. Pengusulan Kajian Peningkatan Utilisasi Jalur KA Pelayanan Angkutan Barang yang Terhubung dengan Pusat Logistik pada tahun anggaran 2024 guna mendukung Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. b. Percepatan penyelesaian pembangunan akses jalur kereta api menuju Pelabuhan Tanjung Mas. c. Percepatan penyediaan fasilitas angkutan barang di lokasi Makassar –Parepare untuk implementasi angkutan barang kereta api dengan skema ROLA (rolling highway)	Dit. LLAKA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	PERSENTASE PENGOPERASIAN JALUR KA YANG SESUAI DENGAN TQI	%	92,87	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda KA dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian perkotaan, peningkatan prasarana perkeretaapian baik jalur KA dan fasilitas operasi, dan lainnya)	92	1104	92.87	8.41	-	-	92.87	-	100%	-	Pada Triwulan III Tahun 2023, data pengukuran yang digunakan bersumber dari hasil pengukuran kereta ukur periode II Tahun 2023 dengan jumlah jalur kereta api terukur sepanjang 5.899,269 Km. Adapun hasil pengukuran panjang jalur kereta api diperoleh untuk Kategori I dan II sepanjang 5.454,362 Km, sedangkan panjang jalur kereta api Kategori III dan IV adalah sepanjang 385,550 Km. Dengan target persentase jalur kereta api yang sesuai dengan TQI kategori I dan II berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (revisi terakhir) sebesar 92,42% dan realisasi hasil pengukuran TQI diperoleh sebesar 92,87%, maka capaian kinerja diperoleh sebesar 100,49% terhadap target Triwulan III dan target Tahun 2023.	Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang antara lain: a. Lanjutan peningkatan jalur kereta api di beberapa lokasi yaitu Sumatera Utara (Medan – Labuan, Kisaran – Mambangmuda) dan Sumatera Barat (Padang – Pauhlina) serta pembangunan jalur ganda kereta api (at grade dan elevated) di lintas utama Jawa dan Sumatera. Selain itu, juga terdapat beberapa kegiatan peningkatan yang dimulai tahun 2023, diantaranya peningkatan jalur KA Lintas Solo-Wonogiri, Surabaya-Kalisat dan MaosCilacap. b. Akan dilakukan pelaksanaan uji coba pengukuran dengan menggunakan kereta ukur milik Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada triwulan IV tahun 2023; c. Akan dilakukan Addendum Kontrak pelaksanaan kegiatan sampai dengan TA 2023 untuk kegiatan Peningkatan Jalur KA Lintas Cikampek - Cirebon segmen Kertasemaya - Arjawinangun beserta pekerjaan supervisi dan usulan Anggaran kegiatan Lanjutan pada usulan TA 2024; d. Akan dilakukan realokasi anggaran kegiatan Reviu Desain Jembatan KA antara Kutbalang - Matang Glumpang Lintas kutbalang – Bireun dengan pagu sebesar Rp. 400.000.000,- tidak dilaksanakan pada tahun 2023.	Dit. Prasarana
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,45	Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, BPKAR Sumatera Selatan dan Balai Pengujian Perkeretaapian	3	36	3.45	9.58	-	-	3.68	-	106.67%	-	Nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Balai Pengelola Kereta Api Ringan (BPKAR) Sumatera Selatan dan Balai Pengujian Perkeretaapian. Berdasarkan rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik bidang perkeretaapian pada periode Triwulan III Tahun 2023, diperoleh nilai IKM sebesar 3,68.	Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang antara lain: a. Menjaga kualitas pelayanan dan proses bisnis sesuai dengan prosedur dan alur yang telah ditetapkan; b. Melakukan pemantauan agar survei terkait IKM di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dilaksanakan setiap bulan	Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA

Jakarta, November 2023
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM Pembina
Utama Madya (IV/d)
NIP 196706081990031005

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

Bulan: November, Tahun: 2023

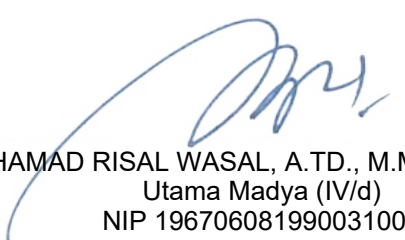
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 11				Realisasi Bulan 11		Realisasi Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
KONEKTIVITAS JARINGAN PERKERETAAPIAN NASIONAL YANG DIWUJUDKAN DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR	RASIO KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH	Lokasi	0,45	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (pembangunan jalur KA baru, reaktivasi jalur KA, termasuk penyiapan dokumen perencanaan dan lahan)	-	-	0.436	-	1.109.821.111.750	16.94	0.436	1.079.450.573.821	100%	97.26%	Rasio konektivitas pada November Tahun 2023 masih sama dengan baseline Tahun 2022 yaitu sebesar 0,436 dengan jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional sebanyak 65 lokasi (PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional 51 lokasi, simpul bandara 6 lokasi, simpul pelabuhan 8 lokasi) dibandingkan target Rencana Induk Perkeretaapian Nasional sebanyak 149 lokasi (PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional 104 lokasi, simpul bandara 16 lokasi, simpul pelabuhan 29 lokasi). Dengan realisasi rasio konektivitas antar wilayah pada bulan November 2023 sebesar 0,436, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 100,00% dari target bulan November 2023 dan capaian kinerja sebesar 96,96% dari target Tahun 2023.	Upaya peningkatan kinerja terhadap pencapaian rasio konektivitas antar wilayah pada periode berikutnya antara lain: a. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil reaktivasi jalur kereta api jalur kereta api antara Sawahlunto – Muarokalaban serta mengecek kembali kelengkapan dokumen perizinan dan dokumen teknis yang ada; b. Berkoordinasi intensif dengan BTP Padang dan PT. Kereta Api Indonesia (persero) untuk menyusun Dokumen Teknis yang belum ada dan pengoperasian kereta yang telah dilakukan; c. Bersurat kepada BTP Padang untuk melakukan pengawasan pembangunan dan peningkatan jalur kereta api sesuai dengan tugas dan kewenangan BTP; d. Berkoordinasi intensif dengan BTP Semarang terkait dengan pemenuhan data dukung pengujian dan berkoordinasi dengan Balai Pengujian terkait rencana jadwal pengujian track; e. Berkoordinasi dengan Biro LPBMN terkait dengan rencana pengadaan Rel dan Wesel MYC 2023-2024 terkait dengan percepatan pencantuman ekatalog produk Rel, Wesel dan Bantalan Wesel; f. Evaluasi rencana penyerapan anggaran dan akan dilakukan rekomposisi anggaran MYC TA 2023 dan TA 2024 untuk pengadaan rel dan wesel berkaitan dengan keterlambatan kontrak pekerjaan; g. Evaluasi Anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara berkala terkait dengan Rencana Penyerapan Akhir Tahun Anggaran 2023 termasuk diperlukan pemetaan dan penyesuaian anggaran untuk kegiatan yang terkendala dan dialihkan untuk kegiatan yang berjalan; h. Evaluasi Target Kinerja serta perubahan Rencana Aksi atas Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2023	Setditjen Perkeretaapian, Direktorat LLAKA, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 11				Realisasi Bulan 11		Realisasi Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA YANG HANDAL	RASIO KEJADIAN KECELAKAAN TRANSPORTASI KERETA API (RATE OF ACCIDENT)	Rasio	0,15	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (pengujian dan sertifikasi kelaikan sarana, prasarana dan kompetensi SDM, perawatan dan pengoperasian sarana perkeretaapian milik negara, pembinaan dan pengaturan/pengendalian/pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian)	-	-	0.15	-	792.887.473.200	25.72	0.11	273.384.906.058	73.33%	34.48%	Sampai dengan November Tahun 2023, terdapat 8 kejadian kecelakaan kereta api dengan jumlah Km Tempuh sebesar 75.251.167 Km (Data Sementara). Dengan menggunakan formula Rate of Accident (RoA) pada uraian sebelumnya dan jumlah 8 kejadian kecelakaan kereta api serta Km Tempuh sebesar 75.251.167 Km sampai dengan bulan November 2023, maka diperoleh rasio kejadian kecelakaan bulan November 2023 sebesar 0,11 Kejadian Kecelakaan/1 Juta Km Tempuh. Dengan realisasi rasio kejadian kecelakaan tersebut, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 138,89% dari target bulan November dan target Tahun 2023.	Upaya meningkatkan kinerja pada periode berikutnya diperlukan hal-hal sebagai berikut: a. Penyelenggaraan rampcheck baik sarana, prasarana dan keselamatan pada angkutan natal dan tahun baru 2024. b. Pencegahan dan pengawasan pelanggaran di bidang perkeretaapian untuk mencegah gangguan faktor eksternal terhadap keselamatan operasional kereta api termasuk di lokasi perlintasan sebidang. c. Monitoring dan evaluasi terhadap sertifikat kompetensi SDM operator perkeretaapian.	Direktorat Keselamatan, Direktorat Prasarana, Perkeretaapian Direktorat Sarana Perkeretaapian, Balai Pengujian, Balai Perawatan, BTP, BPKA
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	PERSENTASE CAPAIAN ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	91	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda KA dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian perkotaan, peningkatan prasarana perkeretaapian baik jalur KA dan fasilitas operasi, dan lainnya)	90	1092	91	8.33	3.564.039.528.850	16.52	90.33	2.329.312.181.790	99.26%	65.36%	Pada November Tahun 2023, diperoleh jumlah realisasi kedatangan dan keberangkatan kereta api (penumpang dan barang) tepat waktu sebanyak 562.232 KA dari total kedatangan dan keberangkatan kereta api (penumpang dan barang) sebanyak 622.422 KA. Untuk itu, diperoleh realisasi On Time Performance (OTP) sebesar 90,33% (Data Sementara)	Upaya meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya antara lain: a. Penyelesaian pembangunan jalur ganda kereta api (Mojokerto –Sepanjang, Bandung – Cicalengka) dan fasilitas operasi (Padalarang – Bandung) termasuk pengamanan perlintasan sebidang. b. Pemantauan dan evaluasi penerapan GAPEKA 2023 secara berkala untuk mendorong operator kereta api menjalankan jadwal perjalanan kereta api secara tepat waktu. c. Koordinasi dengan operator untuk percepatan aktivitas bongkar muat angkutan barang serta pembahasan intensif agar kegiatan pembangunan/peningkatan pada lintas operasional tidak mengganggu jadwal perjalanan. d. Menjaga agar Perjalanan Kereta Api sesuai dengan Grafik Perjalanan KA (GAPEKA) yang berlaku; e. Mendorong agar Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Balai Teknik Perkeretaapian mengantisipasi kelambatan Perjalanan Kereta Api akibat pekerjaan Satker dan Perawatan Prasarana	Dit. LLAKA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 11				Realisasi Bulan 11		Realisasi Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN PENUMPANG KERETA API	%	55,68	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda KA dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian perkotaan, peningkatan prasarana perkeretaapian baik jalur KA dan fasilitas operasi, dan lainnya)	51	544	54	9.93	-	-	51.76	-	95.85%	-	Pada Bulan Oktober 2023 (Data bulan November masih dalam proses kompilasi) diperoleh jumlah penumpang terangkut kereta api sebanyak 348.137.845. Dengan jumlah realisasi penumpang kereta api Tahun 2020 s.d 2022 sebanyak 669.019.172 penumpang (2020 sebanyak 199.255.108 penumpang, 2021 sebanyak 162.572.707 penumpang dan 2022 sebanyak 307.191.357 penumpang) dan jumlah penumpang pada bulan Oktober 2023 sebanyak 348.137.845 penumpang, maka diperoleh jumlah realisasi penumpang kumulatif dari Tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober 2023 sebanyak 1.017.157.017 penumpang. Jumlah tersebut selanjutnya dibandingkan dengan target produksi angkutan penumpang transportasi kereta api pada periode 2020 – 2024 sebagaimana pada Rencana Strategis Tahun 2020 –2024 yaitu 1.965.065.861 penumpang, maka diperoleh realisasi pemenuhan target angkutan penumpang kereta api pada bulan Oktober 2023 sebesar 51,76%	Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang diantaranya: a. Percepatan penyelesaian jalur ganda kereta api di lintas utama Jawa termasuk peningkatan fasilitas operasi (Mojokerto – Sepanjang, Padalarang – Bandung – Cicalengka). b. Penyediaan inovasi layanan kereta api kompartemen guna menarik minat masyarakat untuk merasakan perjalanan dengan kenyamanan yang lebih tinggi. c. Diperlukan perubahan target pada Perjanjian Kinerja mengingat target tahunan sudah tercapai.	Dit.LLAKA
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN BARANG KERETA API	%	56	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda KA dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian perkotaan, peningkatan prasarana perkeretaapian baik jalur KA dan fasilitas operasi, dan lainnya)	56	602	55	9.14	-	-	56.55	-	102.82%	-	Pada Oktober Tahun 2023 (data bulan November 2023 masih dalam proses kompilasi), realisasi angkutan barang kereta api sebesar 52.751.063 ton. Dengan jumlah angkutan barang kereta api Tahun 2020 s.d 2022 sebanyak 153.619.326 ton (tahun 2020 sebanyak 45.482.801 ton, tahun 2021 sebanyak 50.038.883 ton dan tahun 2022 sebanyak 58.097.642 ton) dan realisasi pada periode bulan Oktober 2023 sebanyak 52.751.063 ton, maka diperoleh jumlah realisasi barang terangkut dari Tahun 2020 s.d bulan November 2023 sebanyak 206.370.389 ton. Jumlah tersebut selanjutnya dibandingkan dengan jumlah target produksi angkutan barang kereta api Tahun 2020 - 2024 berdasarkan target Rencana Strategis yaitu sebanyak 364.906.806 ton, sehingga diperoleh pemenuhan target angkutan barang kereta api pada bulan Oktober 2023 sebesar 56,55%.	Upaya untuk meningkatkan capaian kinerja periode selanjutnya antara lain: a. Pengusulan Kajian Peningkatan Utilisasi Jalur KA Pelayanan Angkutan Barang yang Terhubung dengan Pusat Logistik pada tahun anggaran 2024 guna mendukung Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. b. Percepatan penyelesaian pembangunan akses jalur kereta api menuju Pelabuhan Tanjung Mas. c. Percepatan penyediaan fasilitas angkutan barang di lokasi Makassar –Parepare untuk implementasi angkutan barang kereta api dengan skema ROLA (rolling highway)	Dit. LLAKA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 11				Realisasi Bulan 11		Realisasi Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	PERSENTASE PENGOPERASIAN JALUR KA YANG SESUAI DENGAN TQI	%	92,87	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda KA dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian perkotaan, peningkatan prasarana perkeretaapian baik jalur KA dan fasilitas operasi, dan lainnya)	92	1104	92.87	8.41	-	-	92.87	-	100%	-	Pada bulan November Tahun 2023, data pengukuran yang digunakan bersumber dari hasil pengukuran kereta ukur periode II Tahun 2023 dengan jumlah jalur kereta api terukur sepanjang 5.899,269 Km. Adapun hasil pengukuran panjang jalur kereta api diperoleh untuk Kategori I dan II sepanjang 5.454,362 Km, sedangkan panjang jalur kereta api Kategori III dan IV adalah sepanjang 385,550 Km. Dengan target persentase jalur kereta api yang sesuai dengan TQI kategori I dan II berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (revisi terakhir) sebesar 92,42% dan realisasi hasil pengukuran TQI diperoleh sebesar 92,87%, maka capaian kinerja diperoleh sebesar 100,49% terhadap target bulan November dan target Tahun 2023.	Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang antara lain: a. Lanjutan peningkatan jalur kereta api di beberapa lokasi yaitu Sumatera Utara (Medan – Labuan, Kisaran – Mambangmuda) dan Sumatera Barat (Padang – Pauhlima) serta pembangunan jalur ganda kereta api (at grade dan elevated) di lintas utama Jawa dan Sumatera. Selain itu, juga terdapat beberapa kegiatan peningkatan yang dimulai tahun 2023, diantaranya peningkatan jalur KA Lintas Solo-Wonogiri, Surabaya-Kalisat dan MaosCilacap. b. Akan dilakukan pelaksanaan uji coba pengukuran dengan menggunakan kereta ukur milik Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada triwulan IV tahun 2023; c. Akan dilakukan Addendum Kontrak pelaksanaan kegiatan sampai dengan TA 2023 untuk kegiatan Peningkatan Jalur KA Lintas Cikampek - Cirebon segmen Kertasemaya - Arjawinangun beserta pekerjaan supervisi dan usulan Anggaran kegiatan Lanjutan pada usulan TA 2024; d. Akan dilakukan realokasi anggaran kegiatan Reviu Desain Jembatan KA antara Kutubalung - Matang Glumpang Lintas kutubalung – Bireun dengan pagu sebesar Rp. 400.000.000,- tidak dilaksanakan pada tahun 2023.	Dit. Prasarana
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,45	Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, BPKAR Sumatera Selatan dan Balai Pengujian Perkeretaapian	3	36	3.45	9.58	-	-	3.69	-	106.96%	-	Nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Balai Pengelola Kereta Api Ringan (BPKAR) Sumatera Selatan dan Balai Pengujian Perkeretaapian. Berdasarkan rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik bidang perkeretaapian pada Bulan November 2023, diperoleh nilai IKM sebesar 3,69.	Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang antara lain: a. Menjaga kualitas pelayanan dan proses bisnis sesuai dengan prosedur dan alur yang telah ditetapkan; b. Melakukan pemantauan agar survei terkait IKM di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dilaksanakan setiap bulan	Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA

Jakarta, Desember 2023
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN


Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM Pembina
Utama Madya (IV/d)
NIP 196706081990031005

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

Bulan: Desember, Tahun: 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
KONEKTIVITAS JARINGAN PERKERETAAPIAN NASIONAL YANG DIWUJUDKAN DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR	RASIO KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH	Lokasi	0,45	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (pembangunan jalur KA baru, reaktivasi jalur KA, termasuk penyiapan dokumen perencanaan dan lahan)	-	-	0.45	-	1.937.414.278.000	29.57	0.443	1.685.768.788.173	98.44%	87.01%	Rasio konektivitas pada Desember Tahun 2023 sebesar 0,443 dengan jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional sebanyak 66 lokasi (PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional 51 lokasi, simpul bandara 6 lokasi, simpul pelabuhan 9 lokasi) dibandingkan target Rencana Induk Perkeretaapian Nasional sebanyak 149 lokasi (PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional 104 lokasi, simpul bandara 16 lokasi, simpul pelabuhan 29 lokasi). Dengan realisasi rasio konektivitas antar wilayah pada bulan Desember 2023 sebesar 0,443, dengan tercapainya target keterhubungan jalur kereta api dengan simpul transportasi pelabuhan tanjung mas dan target belum tercapai yaitu PKW Sawahlunto. Maka diperoleh capaian kinerja sebesar 98,44% dari target Tahun 2023.	Usulan target 2024 pada indikator kinerja kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian sebesar 0,450 dengan penambahan rasio keterhubungan pembangunan akses integrasi Stasiun Ketapang dengan Pelabuhan Ketapang. Penentuan target tahun 2024 berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2023 (Challenging) dan rencana pembangunan konektivitas jalur kereta api dengan PKN/PKW/Simpul Transportasi yang ditargetkan selesai pada tahun 2024.	Setdijen Perkeretaapian, Direktorat LLAKA, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA YANG HANDAL	RASIO KEJADIAN KECELAKAAN TRANSPORTASI KERETA API (RATE OF ACCIDENT)	Rasio	0,15	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (pengujian dan sertifikasi kelaikan sarana, prasarana dan kompetensi SDM, perawatan dan pengoperasian sarana perkeretaapian milik negara, pembinaan dan pengaturan/pengendalian/pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian)	-	-	0.15	-	946.539.320.000	30.71	0.1	906.750.944.295	66.67%	95.8%	Sampai dengan Desember Tahun 2023, terdapat 8 kejadian kecelakaan kereta api dengan jumlah Km Tempuh sebesar 82.659.006 Km (Data Sementara). Dengan menggunakan formula Rate of Accident (RoA) pada uraian sebelumnya dan jumlah 8 kejadian kecelakaan kereta api serta Km Tempuh sebesar 82.659.006 Km sampai dengan bulan Desember 2023, maka diperoleh rasio kejadian kecelakaan bulan Desember 2023 sebesar 0,10 Kejadian Kecelakaan/1 Juta Km Tempuh.	Upaya meningkatkan kinerja pada periode berikutnya diperlukan hal-hal sebagai berikut: a. Pencegahan dan pengawasan pelanggaran di bidang perkeretaapian untuk mencegah gangguan faktor eksternal terhadap keselamatan operasional kereta api termasuk di lokasi perlintasan sebidang. b. Monitoring dan evaluasi terhadap sertifikat kompetensi SDM operator perkeretaapian.	Direktorat Keselamatan, Direktorat Prasarana, Perkeretaapian Direktorat Sarana Perkeretaapian, Balai Pengujian, Balai Perawatan, BTP, BPKA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	PERSENTASE CAPAIAN ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	91	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda KA dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian perkotaan, peningkatan prasarana perkeretaapian baik jalur KA dan fasilitas operasi, dan lainnya)	90	1092	91	8.33	4.200.187.069.000	19.46	90.28	3.260.729.310.546	99.21%	77.63%	Pada Desember Tahun 2023, diperoleh jumlah realisasi kedatangan dan keberangkatan kereta api (penumpang dan barang) tepat waktu sebanyak 620.093 KA dari total kedatangan dan keberangkatan kereta api (penumpang dan barang) sebanyak 686.881 KA. Untuk itu, diperoleh realisasi On Time Performance (OTP) sebesar 90,28% (Data Sementara)	Upaya meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya antara lain: a. Penyelesaian pembangunan jalur ganda kereta api (Bandung – Cicalengka) dan fasilitas operasi (Padalarang – Bandung) termasuk pengamanan perlintasan sebidang. b. Pemantauan dan evaluasi penerapan GAPEKA 2023 secara berkala untuk mendorong operator kereta api menjalankan jadwal perjalanan kereta api secara tepat waktu. c. Koordinasi dengan operator untuk percepatan aktivitas bongkar muat angkutan barang serta pembahasan intensif agar kegiatan pembangunan/peningkatan pada lintas operasional tidak mengganggu jadwal perjalanan. d. Menjaga agar Perjalanan Kereta Api sesuai dengan Grafik Perjalanan KA (GAPEKA) yang berlaku; e. Mendorong agar Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Balai Teknik Perkeretaapian mengantisipasi kelambatan Perjalanan Kereta Api akibat pekerjaan Satker dan Perawatan Prasarana	Dit. LLAKA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN PENUMPANG KERETA API	%	55,68	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda KA dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian perkotaan, peningkatan prasarana perkeretaapian baik jalur KA dan fasilitas operasi, dan lainnya)	-	544	55.68	10.24	2.332.090.096.075	100	-	-	-	-	Pada Bulan November 2023 (Data bulan Desember masih dalam proses kompilasi) diperoleh jumlah penumpang terangkut kereta api sebanyak 387.301.870. Dengan jumlah realisasi penumpang kereta api Tahun 2020 s.d 2022 sebanyak 669.019.172 penumpang (2020 sebanyak 199.255.108 penumpang, 2021 sebanyak 162.572.707 penumpang dan 2022 sebanyak 307.191.357 penumpang) dan jumlah penumpang pada bulan November 2023 sebanyak 387.301.870 penumpang, maka diperoleh jumlah realisasi penumpang kumulatif dari Tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober 2023 sebanyak 1.056.321.042 penumpang. Jumlah tersebut selanjutnya dibandingkan dengan target produksi angkutan penumpang transportasi kereta api pada periode 2020 – 2024 sebagaimana pada Rencana Strategis Tahun 2020 –2024 yaitu 1.965.065.861 penumpang, maka diperoleh realisasi pemenuhan target angkutan penumpang kereta api pada bulan November 2023 sebesar 53,75%	Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang diantaranya: a. Percepatan penyelesaian jalur ganda kereta api di lintas utama Jawa termasuk peningkatan fasilitas operasi (Padalarang – Bandung – Cicalengka). b. Penyediaan inovasi layanan kereta api kompartemen guna menarik minat masyarakat untuk merasakan perjalanan dengan kenyamanan yang lebih tinggi. c. Diperlukan perubahan target pada Perjanjian Kinerja mengingat target tahunan sudah tercapai.	Dit.LLAKA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN BARANG KERETA API	%	56	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda KA dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian perkotaan, peningkatan prasarana perkeretaapian baik jalur KA dan fasilitas operasi, dan lainnya)	-	602	56	9.3	-	-	-	-	-	-	Pada November Tahun 2023 (data bulan Desember 2023 masih dalam proses kompilasi), realisasi angkutan barang kereta api sebesar 58.282.744 ton. Dengan jumlah angkutan barang kereta api Tahun 2020 s.d 2022 sebanyak 153.619.326 ton (tahun 2020 sebanyak 45.482.801 ton, tahun 2021 sebanyak 50.038.883 ton dan tahun 2022 sebanyak 58.097.642 ton) dan realisasi pada periode bulan November 2023 sebanyak 58.282.744 ton, maka diperoleh jumlah realisasi barang terangkut dari Tahun 2020 s.d bulan November 2023 sebanyak 211.902.070 ton. Jumlah tersebut selanjutnya dibandingkan dengan jumlah target produksi angkutan barang kereta api Tahun 2020 - 2024 berdasarkan target Rencana Strategis yaitu sebanyak 364.906.806 ton, sehingga diperoleh pemenuhan target angkutan barang kereta api pada bulan November 2023 sebesar 58,07%.	Upaya untuk meningkatkan capaian kinerja periode selanjutnya antara lain: a. Pengusulan Kajian Peningkatan Utilisasi Jalur KA Pelayanan Angkutan Barang yang Terhubung dengan Pusat Logistik pada tahun anggaran 2024 guna mendukung Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. b. Percepatan penyediaan fasilitas angkutan barang di lokasi Makassar –Parepare untuk implementasi angkutan barang kereta api dengan skema ROLA (rolling highway)	Dit. LLAKA

Lampiran I
Data Dukung Capaian Kinerja
Masing-Masing Unit Kerja

Indikator Kinerja
Rasio Konektivitas Antar Wilayah



**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UNIT KERJA SUB DIREKTORAT JALUR DAN BANGUNAN KA WILAYAH I**

Periode Bulan : Desember

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Target Bulan-12		Realisasi Bulan-12		% Capaian Bulan-12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab				
					Target Output	Target Anggaran	Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran							
SK P1	Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Transportasi Kereta Api	IKK P3.2	Rasio Keterhubungan Jalur KA Antar Wilayah	Rasio	0.422	PKN/PKW/Simpul transportasi yang telah terhubung Jalur Kereta Api Wilayah I : Serang, Cilegon, Jabodetabek, Rangkasbitung, Cikampek-Cikopo, Cirebon, Bandung Raya, Sukabumi, Indramayu, Tasikmalaya, Kedungsepur, Cilacap, Surakarta, Tegal, Pekalongan, Cepu, Purwokerto, Kebumen, Klaten, Yogyakarta, Sleman, Malang, Gerbangkertosusila, Bojonegoro, Madiun, Jember, Banyuwangi, Probolinggo, Blitar, Pasuruan, Tulungagung, Kediri, Barru, Pel. Merak, Pel. Tanjung Priok, Pel. Cilacap, Bandara Soetta, Bandara Adi Sumarmo, Bandara Kulon Progo, Maminasata, Pangkajene dan Pelabuhan Garongkong.	0.422	100%	-	-	0.422	-	100.00%	-	Evaluasi : Pada 42 Lokasi PKN/PKW sudah terhubung jalur KA, meliputi wilayah: Serang, Citegon, Jabodetabek, Rangkasbitung, Cikampek-Cikopo, Cirebon, Bandung Raya, Sukabumi, Indramayu, Tasikmalaya, Kedungsepur, Cilacap, Surakarta, Tegal, Pekalongan, Cepu, Purwokerto, Kebumen, Klaten, Yogyakarta, Sleman, Malang, Gerbangkertosusila, Bojonegoro, Madiun, Jember, Banyuwangi, Probolinggo, Blitar, Pasuruan, Tulungagung, Kediri, Barru, Pel. Merak, Pel. Tanjung Priok, Pel. Cilacap, Bandara Soetta, Bandara Adi Sumarmo, Bandara Kulon Progo, Maminasata, Pangkajene dan Pelabuhan Garongkong. Sedangkan progres fisik untuk reaktivasi Jalur Kereta Api antara Stasiun Semarang Tawang - Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan Reaktivasi Jalur KA Antara Stasiun Kalimas - Pelabuhan Tanjung Perak pada Bulan Desember 2023 Sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut : 1. Progres Pekerjaan Semarang Tawang - Pelabuhan Tanjung Mas : Progres fisik sebesar 100% dari rencana sebesar 100 %; Sampai dengan 10 September 2023 untuk rasio Tanjung Mas telah dapat di hitung sebagai capaian dikarenakan untuk jalur telah terhubung dengan progres fisik yang dicapai sebesar 100 % dari rencana sebesar 100 %. Dengan rincian pekerjaan yang telah dilaksanakan pekerjaan track sepanjang 1.661 m/sp dengan rincian Km 0 + 280 s/d 0+714 dan Km 1 + 775 s/d 2+184 (Emplasemen Tanjung Mas), Box Culvert sebanyak 11 Buah dan 6 perlintasan sebidang. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan : - Pelaksanaan 11 Bulan (Oktober 2022 - September 2023) - Telah dilakukan Rapat Pembahasan Persiapan Pengujian Jalur Kereta Api Tanjung Mas - Semarang Tawang pada Tanggal 5 Oktober 2023. Untuk Rencana Pengujian Menunggu Kepastian Jadwal dari Rekan- Rekan Balai Pengujian Perkeretaapian. - Telah Dilakukan Uji Rancang Bangun Fisik yang Dilaksanakan pada Tanggal 20 s.d 24 November 2023 dan Saat Ini dalam Proses Tindak Lanjut Terhadap Hasil Temuan di Lapangan. 2. Pekerjaan Reaktivasi Jalur KA Antara Stasiun Kalimas - Pelabuhan Tanjung Perak : Progres Fisik sebesar 100%; - Reaktivasi ini Merupakan Reaktivasi yang dibangun oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) dimana Merupakan Kolaborasi dengan Antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) beserta PT Pelabuhan Indonesia III dan PT Terminal Peti Kemas Surabaya; - Reaktivasi ini Merupakan Reaktivasi yang dibangun untuk Menghidupkan Kembali Kereta Api Logistik yang Menghubungkan Antara Terminal Peti Kemas Surabaya dengan Stasiun Kalimas; - Dampak Pengoperasian Kereta Api Logistik Dapat Memberikan Kemudahan Bagi Pemilik Barang atau Pelaku Usaha Angkutan Logistik yang Akan Mengirimkan Barang Dari dan Menuju Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, dan Diharapkan Dapat berkontribusi Terhadap Kemajuan Logistik Nasional yang Efektif, Efisien, dan Dapat Mengurangi Beban Logistik di Jalan Raya; - Untuk Frekuensi Saat Ini Masih 0 KA, dikarenakan Kontrak PT KAI dengan Pihak Ketiga belum di Perpanjang; - Reaktivasi Jalur KA Antara Stasiun Kalimas - Pelabuhan Tanjung Perak Sepanjang 2.5 km/sp Peran Direktorat Prasarana Perkeretaapian dalam reaktivasi jalur KA Semarang Tawang - Tanjung Mas : 1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi rutin baik ke lapangan maupun melalui rapat online 2. Memberikan masukan teknis terkait pekerjaan pembangunan	Menunggu jadwal pengujian dari Balai Pengujian Perkeretaapian	Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wil I
				Laporan	1	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalur dan Bangunan KA Wilayah I	1	100%	Rp554,987,000	100%	1	Rp554,918,699	100%	100%	Evaluasi : 1. Telah dilaksanakan Bimtek tata cara dan metode penyambungan rel dengan flashbutt pada Tanggal 6 s.d 7 Maret 2023 di Surabaya. Manfaat : 1. Tercapainya pemahaman tata cara dan metode penyambungan rel yang benar sehingga tercipta Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan profesional serta menghasilkan pembangunan infrastruktur perkeretaapian yang mengutamakan kualitas pekerjaan dan keselamatan kerja; 2. Dapat meningkatkan SDM pegawai Direktorat Prasarana Perkeretaapian tentang prosedur K3 dalam pembangunan infrastruktur perkeretaapian Kendala : -		Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wil I
				Laporan	12	Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalur dan Bangunan KA Wilayah I	12	100%	Rp763,914,000	100%	12	Rp759,308,231	100%	99%	Evaluasi : 1. Melaksanakan Kegiatan Inspeksi (KAIS) Operasi Angkutan Natal 2023 & Tahun Baru 2024 PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Lintas Utara pada tanggal 05 s.d 07 Desember 2023; 2. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Progres Pekerjaan Prasarana Perkeretaapian di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan pada tanggal 08 s.d 10 Desember 2023; 3. Melaksanakan Uji Coba Skybridge Bojonggedde pada tanggal 08 Desember 2023 di Bogor, Jawa Barat; 4. Melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Switch Over 7 di Stasiun Manggarai Lintas Tanah Abang-Bekasi pada tanggal 18 s.d 19 Desember 2023; 5. Melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Jalur Ganda Bogor-Sukabumi pada tanggal 21 s.d 23 Desember 2023; 6. Melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pasca Switch Over Stasiun Cimahi pada tanggal 29 s.d 30 Desember 2023 di Bandung, Jawa Barat. Manfaat : 1. Mendukung tercapainya rasio konektivitas prasarana perkeretaapian pada wilayah Jawa dan Sulawesi 2. Mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil capaian pada Pembangunan Jalur dan Bangunan KA Wilayah I 3. Memeriksa kegiatan Pembangunan Jalur dan Bangunan KA Wilayah I guna mendukung pengoperasian yang aman, selamat dan nyaman 4. Menginventarisir faktor – faktor pendukung dan penghambat pada kegiatan Pembangunan Jalur dan Bangunan KA Wilayah I agar kegiatan selanjutnya dapat lebih berdayaguna dan berhasil-guna. Kendala : -		Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wil I
				IKK P2.1	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II	Persentase	1	Persentase Pengawasan Peningkatan Jalur dan Bangunan KA Wilayah I	1	100%	-	-	100%	-	Evaluasi : 1. Telah dilaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Jalur KA antara Maos-Cilacap pada tanggal 13 s.d 15 Desember 2023 di Cilacap, Jawa Tengah. Kendala : -		Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wil I

SK P2	Meningkatnya KAPASITAS Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Jumlah Responden	24	Jumlah Responden Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	24	100%	-	-	24	-	100%	<p>Evaluasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Telah dilakukan pengisian Survey Kepuasan Masyarakat terkait Permohonan Izin Crossing sebanyak 2 responden pada bulan Januari 2023 Telah dilakukan pengisian Survey Kepuasan Masyarakat terkait Permohonan Izin Crossing sebanyak 2 responden pada bulan Februari 2023 Telah dilakukan pengisian Survey Kepuasan Masyarakat terkait Permohonan Izin Crossing sebanyak 2 responden pada bulan Maret 2023 Telah dilakukan pengisian Survey Kepuasan Masyarakat terkait Permohonan Izin Crossing sebanyak 2 responden pada bulan April 2023 Telah dilakukan pengisian Survey Kepuasan Masyarakat terkait Permohonan Izin Crossing sebanyak 2 responden pada bulan Mei 2023 Telah dilakukan pengisian Survey Kepuasan Masyarakat terkait Permohonan Izin Crossing sebanyak 2 responden pada bulan Juni 2023 Telah dilakukan pengisian Survey Kepuasan Masyarakat terkait Permohonan Izin Crossing sebanyak 2 responden pada bulan Juli 2023 Telah dilakukan pengisian Survey Kepuasan Masyarakat terkait Permohonan Izin Crossing sebanyak 2 responden pada bulan Agustus 2023 Telah dilakukan pengisian Survey Kepuasan Masyarakat terkait Permohonan Izin Crossing sebanyak 2 responden pada bulan September 2023 Telah dilakukan pengisian Survey Kepuasan Masyarakat terkait Permohonan Izin Crossing sebanyak 2 responden pada bulan Oktober 2023 Telah dilakukan pengisian Survey Kepuasan Masyarakat terkait Permohonan Izin Crossing sebanyak 2 responden pada bulan November 2023 Telah dilakukan pengisian Survey Kepuasan Masyarakat terkait Permohonan Izin Crossing sebanyak 2 responden pada bulan Desember 2023 <p>Kendala :-</p>	Kasubdit Jalur dan Bangunan KA WII		
SK P3	Meningkatnya KEHANDALAN Prasarana Perkeretaapian	IKK P3.1	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	75.00	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian Subdit Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I	2	62.5 %	-	-	4	-	93.75%	<p>Evaluasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pedoman Pemeriksaan dan Perawatan Prasarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bidang Jalur dan Bangunan sudah disetujui pada bulan Oktober 2023. Dokumen Sistem dan Prosedur Pemeriksaan Prasarana Perkeretaapian Khusus <i>Automated People Mover System</i> di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta yang sudah disetujui pada bulan November 2023. Dokumen Sistem dan Prosedur Perawatan Prasarana Perkeretaapian Khusus <i>Automated People Mover System</i> Bidang Jalur dan Bangunan di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta yang sudah disetujui pada bulan November 2023 Dokumen Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Tata Kelola dan Perhitungan Biaya Pengoperasian dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara pada Bulan Desember 2023 <p>Kendala :-</p>	Akan dilakukan Revisi Penyusunan PM 60 tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api di tahun 2024	Kasubdit Jalur dan Bangunan KA WII
		IKK P3.2	Persentase Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Izin Perpotongan/ PERSINGGUNGAN Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain Subdit Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I dan Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian yang tepat waktu	%	100	Persentase Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Izin Perpotongan / PERSINGGUNGAN Antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain dan Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian yang tepat waktu	12	100 %	-	-	12	-	100%	<p>Evaluasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Izin Pembangunan Perpotongan Tidak Sebidang Melintasi Jalur Kereta Api berupa Fly Over di lokasi KM 15 + 906 dan KM 16+100 antara Stasiun Waru - Stasiun Gedangan lintas Surabaya - Panarukan kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur - Bali Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, SK Nomor : KP-193 Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023; Izin Pembangunan dan Pengoperasian Perpotongan Sebidang Sementara Antara Jalan dengan Jalur Kereta Api di Lokasi KM 115+ 7/8 Antara Stasiun Serang-Stasiun Karangantu lintas Rangkasbitung - Merak untuk mendukung Pembangunan Perpotongan tidak sebidang berupa Fly Over kepada pemerintah Kota Serang, SK Nomor : KP. 236 Tahun 2023 tanggal 23 Februari 2023; Izin Pembangunan Perpotongan Tidak Sebidang Melintasi Jalur Kereta Api berupa Fly Over di Lokasi Km. 115 + 7/8 Antara Stasiun Serang – Stasiun Karangantu Lintas Rangkasbitung-Merak Kepada Pemerintah Kota Serang, SK Nomor : KP. 237 Tahun 2023 Tanggal 28 Februari 2023; Izin Pembangunan Perpotongan Tidak Sebidang Melintasi Jalur Kereta Api berupa Overpass di Lokasi KM. 332 + 160 Antara Stasiun Legok - Stasiun Karangari Lintas Cirebon - Kroya Kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas, SK Nomor : KP. 348 Tahun 2023 tanggal 27 Maret 2023. Izin Penanaman Pipa Melintasi Jalur Kereta Api pada KM 144+107 antara Stasiun Krenceng – Stasiun Merak lintas Tanah Abang - Merak pada Wilayah Kerjasama Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta kepada PT. Dover Chemical, SK Nomor : KP. 416 Tahun 2023 tanggal 10 April 2023 Izin Pembangunan Perpotongan Tidak Sebidang Melintasi Jalur KA berupa Bangunan Parapet sebagai Sarana Pengendali Banjir Sungai Bogowonto di Lokasi KM. 494+0/1 antara Stasiun Jenar - Stasiun Wojo lintas Bogor - Yogyakarta, SK Nomor : KP. 579 Tahun 2023 tanggal 12 Juni 2023 Izin Pembangunan dan Pengoperasian Perlintasan Sebidang Sementara antara Jalan dengan Jalur KA di Lokasi KM 158+072 antara Stasiun Padalarang - Stasiun Cilame lintas Jakarta Kota - Padalarang untuk Jalan Akses Peralatan Berat dalam rangka Konstruksi Proyek KCJB, SK Nomor : KP. 630 Tahun 2023 tanggal 27 Juni 2023 Izin Penanaman Pipa Air Melintasi Jalur Kereta Api di Lokasi KM 43+100 Antara Stasiun Citayam - Stasiun Bojonggede dan Km 46+900 Antara Stasiun Bojonggede - Stasiun Cilebut Lintas Jakarta Kota-Bogor Pada Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, SK Nomor : KP. 661 Tahun 2023 tanggal 13 Juli 2023 Pemberian Perpanjangan Izin Pembangunan Perpotongan Tidak Sebidang (Fly Over) Melintasi Jalur Kereta Api di Lokasi KM 99+874 antara Stasiun Tobo-Stasiun Kalitidu Lintas Gundih-Surabaya pada Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya Kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), SK Nomor : KP. 662 Tahun 2023 tanggal 13 Juli 2023 Pemberian Izin Perpotongan Tidak Sebidang Melintasi Jalur Kereta Api berupa Fly Over di Lokasi KM 41+0/1 antara Stasiun Citayam - Stasiun Bojonggede Lintas Jakarta Kota - Bogor pada Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, SK Nomor : KP. 940 Tahun 2023 tanggal 25 September 2023 Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Perlintasan Sebidang Sementara antara Jalan dengan Jalur Kereta Api di Lokasi KM. 41 + 0/1 antara Stasiun Citayam - Stasiun Bojonggede Lintas Jakarta Kota - Bogor untuk Jalan Akses Peralatan Berat Dalam Rangka Pembangunan Perpotongan Tidak Sebidang (Fly Over) pada Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, SK Nomor : KP. 941 Tahun 2023 tanggal 25 September 2023. Pemberian Izin Perpotongan dan PERSINGGUNGAN Jalur Kereta Api Berupa Fly Over Jalan Tol Ancol Timur - Pluit (Elevated) Section Harbour Road II Antara - Stasiun Ancol - Stasiun Tanjung Priok pada Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta Kepada PT. Citra Marga Nusaphala Persada TBK, SK Nomor : KP. 1224 Tahun 2023 tanggal 22 November 2023. <p>Kendala :-</p>	Pemohon akan lebih diberikan arahan dan akan selalu diingatkan terkait dokumen yang harus diperbaiki.	Kasubdit Jalur dan Bangunan KA WII

Jakarta, 16 Januari 2023

1 KEPALA SUBDIREKTORAT JALUR DAN BANGUNAN KA
WILAYAH I



MOH. FATAWI
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670827 199303 1 002




Ministry of Health of the Republic of Indonesia
 Directorate of Health Services and Health Insurance

Perencanaan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target uan-n				Realisasi uan-n		Capaian uan-n		Uraian	Rencana Tindak lanjut	Penanggung Jawab
				Target output		Target anggaran		Realisasi output	Realisasi anggaran	Capaian output	Capaian anggaran			
				Uraian	Anggaran	Uraian	Anggaran	Uraian	Anggaran	Uraian	Anggaran			
Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan	Rasio Rasio	Rasio									<p>Uraian</p> <p>Pengendalian mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit melalui kegiatan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi. Kegiatan ini meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan kebijakan dan prosedur mutu pelayanan kesehatan. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemantauan mutu pelayanan kesehatan. Evaluasi mutu pelayanan kesehatan secara berkala. Pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. <p>Kendala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perubahan kebijakan dan prosedur mutu pelayanan kesehatan. Perubahan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Perubahan lingkungan sosial dan budaya. Perubahan teknologi dan informasi. 			
Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan	Rasio Rasio	Rasio									<p>Uraian</p> <p>Pengendalian mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit melalui kegiatan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi. Kegiatan ini meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan kebijakan dan prosedur mutu pelayanan kesehatan. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemantauan mutu pelayanan kesehatan. Evaluasi mutu pelayanan kesehatan secara berkala. Pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. <p>Kendala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perubahan kebijakan dan prosedur mutu pelayanan kesehatan. Perubahan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Perubahan lingkungan sosial dan budaya. Perubahan teknologi dan informasi. 			
Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan	Rasio Rasio	Rasio									<p>Uraian</p> <p>Pengendalian mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit melalui kegiatan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi. Kegiatan ini meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan kebijakan dan prosedur mutu pelayanan kesehatan. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemantauan mutu pelayanan kesehatan. Evaluasi mutu pelayanan kesehatan secara berkala. Pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. <p>Kendala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perubahan kebijakan dan prosedur mutu pelayanan kesehatan. Perubahan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Perubahan lingkungan sosial dan budaya. Perubahan teknologi dan informasi. 			

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Target uan-n				Reasi uan-n		Capaian uan-n		Reasi	Rena Tindak lanjut	Penanggung Jaa
					Target utput		Target nggaran		Reasi utput	Reasi nggaran	Capaian utput	Capaian nggaran			
					u	e	u	e	u	e	u	e			
Menyusun dan melaksanakan Monev	Menyusun dan melaksanakan Monev	1	1												
Menyusun dan melaksanakan Monev	Menyusun dan melaksanakan Monev	1	1												

KIP SU DIR KT RT JUR D GU K



M D U K R
Lemb IV
N

**LAPORAN RASIO KETERHUBUNGAN JALUR KA ANTAR WILAYAH
SUBDIREKTORAT JALUR DAN BANGUNAN KA WILAYAH I PADA KEGIATAN
REAKTIVASI JALUR KA SEMARANG TAWANG - TANJUNG MAS
(MYC 2022-2023)**



**DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2023**

Reaktivasi Jalur Kereta Api Antara Stasiun Semarang Tawang – Pelabuhan Tanjung Emas Tahap II dan Emplasemen Pelabuhan Tanjung Emas Semarang (Multi years 2022 – 2023)



Peta Lokasi Reaktivasi Jalur Kereta Api Antara Semarang Tawang – Pelabuhan Tanjung Emas Tahap II dan Emplasemen Pelabuhan Tanjung Emas Semarang

Kegiatan Reaktivasi Jalur Kereta Api Antara Semarang Tawang – Pelabuhan Tanjung Emas tahap II dan Emplasemen Pelabuhan Tanjung Emas merupakan pekerjaan kontrak tahun jamak / *multi years contract* untuk tahun 2022 – 2023. Reaktivasi dan pembangunan jalur sepanjang $\pm 2,15$ KM dibiayai dengan sumber dana Rupiah Murni (RM), dimana alokasi pada Tahun 2022 sebesar Rp 38.756.363.000. Lingkup pekerjaan meliputi pekerjaan pengadaan bahan, pekerjaan umum, pekerjaan sipil, pekerjaan track, pekerjaan perlintasan untuk pembangunan JPL dan kelengkapannya, pekerjaan fasilitas, dan pekerjaan tambahan lainnya. Untuk pekerjaan pembangunan dibagi menjadi dua tahap dikarenakan terdapat kendala terkait penertiban lahan sepanjang 420 msp:

1. Tahap I

Telah selesai dilakukan pembangunan pada Tahun 2017 dengan track yang terbangun dari KM 0+000 - 0+280 = 280 m'sp dan KM 0+714 - 1+775 = 1.061 m'sp sehingga menyisakan jalur yang belum terhubung sepanjang 420 m'sp. Untuk lingkup pekerjaan yang telah dilaksanakan :

- a. Pekerjaan pembangunan badan jalan dan pemasangan track;

- b. Pekerjaan pemasangan wesel;
- c. Pekerjaan pemasangan pagar panel;
- d. Pekerjaan perkuatan tanah dasar dengan sistem panel serbaguna;
- e. Pekerjaan dinding penahan tanah dengan retaining wall;
- f. Pekerjaan pengadaan dan pemasangan saluran u ditch pracetak;
- g. Pekerjaan pembuatan box culvert.

2. Tahap II

Kegiatan lanjutan MYC 2022 – 2023, untuk rencana pembangunan dari 2 sebesar 1.661 m'sp (KM 0+280 - 0+714 dan KM 1+775 - 2+184) dengan progres fisik pekerjaan sebesar 100% dengan lingkup pekerjaan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- 1. Pengadaan barang
- 2. Pekerjaan umum
- 3. Pekerjaan sipil
- 4. Pekerjaan track
- 5. Pekerjaan perlintasan
- 6. dan Fasilitas lainnya

Sampai dengan 10 September 2023 untuk rasio Tanjung Mas telah dapat di hitung sebagai capaian dikarenakan untuk jalur telah terhubung dengan progres fisik yang dicapai sebesar 100 % dari rencana sebesar 100 %. Dengan rincian pekerjaan yang telah dilaksanakan pekerjaan track sepanjang 1.661 m'sp dengan rincian Km 0 + 280 s/d 0+714 dan Km 1 + 775 s/d 2+184 (Emplasemen Tanjung Mas), Box Culvert sebanyak 11 Buah dan 6 perlintasan sebidang.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan :

- 1. Pelaksanaan 11 Bulan (Oktober 2022 - September 2023)
- 2. Telah dilakukan Rapat Pembahasan Persiapan Pengujian Jalur Kereta Api Tanjung Mas - Semarang Tawang pada Tanggal 5 Oktober 2023. Untuk Rencana Pengujian Menunggu Kepastian Jadwal dari Rekan-Rekan Balai Pengujian Perkeretaapian.
- 3. Telah Dilakukan Uji Rancang Bangun Fisik yang Dilaksanakan pada Tanggal 20 s.d 24 Vovember 2023 dan Saat Ini dalam Proses Tindak Lanjut Terhadap Hasil Temuan di Lapangan.

Peran Direktorat Prasarana Perkeretaapian dalam reaktivasi jalur KA Semarang Tawang - Tanjung Mas :

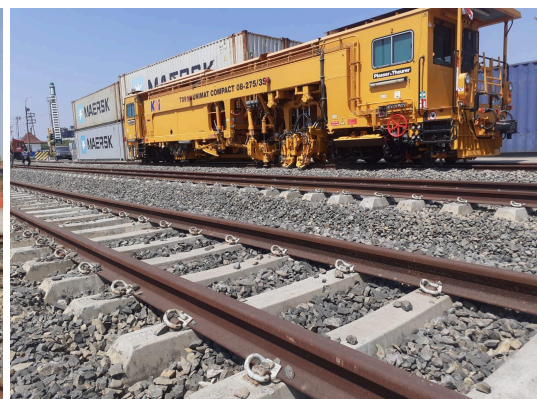
- 1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi rutin baik ke lapangan maupun melalui rapat online;
- 2. Memberikan masukan teknis terkait pekerjaan pembangunan.

LAMPIRAN DOKUMENTASI

1. Pengukuran Gradien Jalur 1,2 dan 3 Emplasemen Tanjung Mas



2. Pekerjaan MTT Jalur 1,2 dan 3 TPKS



3. Ultrasonic Test (self assessment)



4. Pekerjaan Perlintasan Sebidang





5. Uji Rancang Bangun Fisik yang Dilaksanakan pada Tanggal 20 s.d 24 Vovember 2023 dan Saat Ini dalam Proses Tindak Lanjut Terhadap Hasil Temuan di Lapangan.



PERRSI KTRUUG JURK T R I
SU DIRKT RT JUR D GU K I IPD KGI T
R KTI SI JUR K ST SIU KIMS - P U T JU G P R K

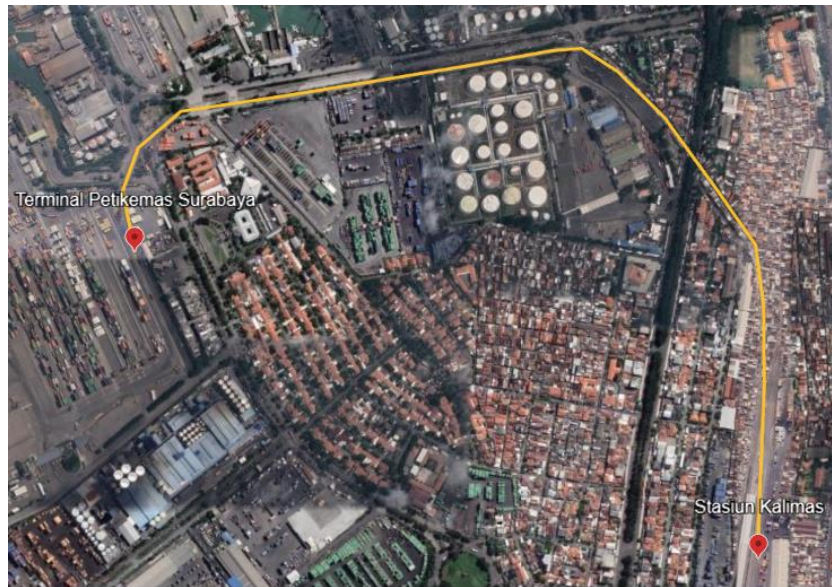


DIRKT RT PRSR P RKR T PI
DIRKT RT J DR P RKR T PI
K M T RI P R U U G R P U IK I D SI
T U

□

□

Reaksi Jalur Kereta Api Antara Stasiun Kalimas – Pelabuhan Tanjung Perak



Peta Lokasi Reaksi Jalur Kereta Api Antara Stasiun Kalimas dengan Terminal Petkemas Surabaya Pelabuhan Tanjung Perak

Reaksi jalar kereta api antara stasiun kalimas dengan pelabuhan tangjung perak merupakan salah satu bentuk interaksi yang penting dalam sistem transportasi. Hal ini menunjukkan bagaimana infrastruktur transportasi dapat menghubungkan berbagai wilayah dan mendukung aktivitas ekonomi serta sosial masyarakat. Keberadaan jalur kereta api yang menghubungkan stasiun kalimas dengan pelabuhan tangjung perak dapat meningkatkan efisiensi transportasi barang dan penumpang, serta membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan reaksi jalar kereta api antara stasiun kalimas dengan pelabuhan tangjung perak adalah kualitas infrastruktur yang ada. Hal ini meliputi kondisi rel, sarana prasarana stasiun, dan kualitas layanan yang diberikan kepada penumpang dan pengguna barang.

Di sisi lain, faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan reaksi jalar kereta api antara stasiun kalimas dengan pelabuhan tangjung perak adalah tingkat kepadatan penduduk di wilayah-wilayah tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi volume penumpang dan barang yang akan diangkut, sehingga memerlukan perencanaan yang matang.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengembangan reaksi jalar kereta api antara stasiun kalimas dengan pelabuhan tangjung perak adalah keterbatasan anggaran yang tersedia. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas infrastruktur yang akan dibangun dan layanan yang akan diberikan kepada penumpang dan pengguna barang.

Salah satu solusi yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan meningkatkan efisiensi biaya pembangunan dan operasional jalur kereta api. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengoptimalkan rute, meningkatkan kualitas layanan, dan meningkatkan tingkat keamanan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan reaksi jalar kereta api antara stasiun kalimas dengan pelabuhan tangjung perak adalah tingkat keamanan yang ada. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan penumpang dan pengguna barang terhadap layanan yang diberikan, sehingga memerlukan peningkatan tingkat keamanan yang signifikan.

MPiR D KUM T SI

Bedon r d m

- Vertical list of 14 empty boxes.



Perem ni Re v r ere m e b n n n er

□

□



mber den ne e r one den e b n n e en d r b o

□

- Vertical list of 5 empty boxes.

Indikator Kinerja

Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api

(Rate Of Accident)



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

GEDUNG KARYA
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

T D I S

Nomor 369/ND/K5/DJKA/2023

Direktur Jenderal Perkeretaapian
Direktur Jenderal Manajemen Perkeretaapian
Penyusunan Dokumen Perkeretaapian
20 Desember 2023

Berdasarkan surat perintah Menteri Neke No. VM/ND/...
Desember...
Neke No. ...
...
desember...

No	Penyusunan Dokumen	Materi	Orbit		
			Menit	Berita	Rincian
1

No	Penyusunan Dokumen	Materi	Orbit		
			Menit	Berita	Rincian
2

No	Penyusunan Dokumen	Materi	Penyusunan	
			Dokumen	Detail
3

No	Penyusunan Dokumen	Materi	Penyusunan	
			Rod	Rod
4

1
2
3



□

□

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Demikianlah pernyataan ini dibuat.

□

□

□

□

□



Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Nomor telepon: 021-52000000

Pembacaan

□ Saya telah membaca dan memahami seluruh isi dari surat pernyataan ini.

□ Saya menyetujui dan menandatangani surat pernyataan ini dengan kesadaran penuh.

□ Saya menyetujui dan menandatangani surat pernyataan ini.

□ Saya menyetujui dan menandatangani surat pernyataan ini.

□

□

□

□

□

KM-KA JANUARI 2023

NO	DAOP	PENUMPANG								BARANG	DINAS		TOTAL
		KOMERSIL	EKONOMI						NON PSO		DR	DL	
			PSO										
			JARAK JAUH	JARAK SEDANG	JARAK DEKAT	PSO KR D	KRL						
1	KRL (JAK)							1.268.167				1.268.167	
	KRL (YK)							43.186				43.186	
	BANDARA YIA (RAILINK)	37.420										37.420	
	BANDARA BASOETA (KCI)	39.187											
	Lokal Merak Dan Pramek				29.254	15.783						45.038	
2	DAOP1 JAK	157.335	9.655	19.310	15.147	0	0	103.810	80.496	14.570	31.409	431.733	
3	DAOP2 BD	69.691	9.352	50.190	89.168	0	0	68.377	10.989	591	3.798	302.156	
4	DAOP3 CN	269.227	26.097	13.083	0	0	0	313.699	139.803	0	84	761.993	
5	DAOP4 SM	108.271	17.426	0	0	7.492	0	288.482	161.426	26	5.909	589.031	
6	DAOP5 PWT	132.625	20.601	25.163	0	0	0	228.868	60.868	23	975	469.124	
7	DAOP6 YK	118.819	25.500	0	0	10.645	0	198.755	46.981	721	426	401.846	
8	DAOP7 MN	87.877	22.399	0	37.512	0	0	158.820	31.234	949	4.707	343.499	
9	DAOP8 SB	65.541	14.490	5.886	87.776	41.012	0	118.684	102.746	3.815	2.860	442.810	
10	DAOP9 JR	25.588	16.273	32.546	13.915	0	0	25.588	0	23	24.740	138.673	
	JAWA	1.111.581	161.794	146.178	272.772	74.932	1.311.353	1.505.083	634.543	20.718	74.908	5.274.675	
11	DIVRE I	51.381	0	32.442	21.815	0	0	4.153	39.499	0	0	149.290	
	BANDARA KNM (RAILINK)	20.411										20.411	
12	DIVRE II	0	0	0	14.992	0	0	16.378	8.628	0	4.029	44.027	
13	DIVRE III	18.882	0	23.923	0	0	0	0	421.794	0	439	465.037	
	LRT							64.982				64.982	
14	DIVRE IV	0	0	45.763	0	0	0	0	455.182	0	44.639	545.585	
	SUMATERA	90.674	0	102.129	36.806	0	0	85.514	925.103	0	49.107	1.289.332	
	PT.KAI	1.202.256	161.794	248.306	309.579	74.932	1.311.353	1.590.596	1.559.645	20.718	124.015	6.564.007	

**REALISASI KM KA
BULAN FEBRUARI 2023**

NO	URAIAN	JUMLAH KM-KA
1	KA PENUMPANG ANTAR KOTA	
	A. NON EKONOMI	1.887.052
	B. EKONOMI	751.565
TOTAL KM-KA PENUMPANG ANTAR KOTA		2.638.617
2	KA PENUMPANG PERKOTAAN	
	A. LOKAL NON EKONOMI	52.079
	B. LOKAL EKONOMI	387.092
	C. KRL RAILINK	1.237.962
	D. LRT	58.694
TOTAL KM-KA PENUMPANG PERKOTAAN		1.735.827
3	KA BARANG	1.456.506
TOTAL KM-KA		5.830.951

**REALISASI KM KA
BULAN MARET 2023**

NO	URAIAN	JUMLAH KM-KA
1	KA PENUMPANG ANTAR KOTA	
	A. NON EKONOMI	2.115.633
	B. EKONOMI	834.901
TOTAL KM-KA PENUMPANG ANTAR KOTA		2.950.534
2	KA PENUMPANG PERKOTAAN	
	A. LOKAL NON EKONOMI	61.862
	B. LOKAL EKONOMI	394.497
	C. KRL RAILINK	1.375.436
	D. LRT	64.982
TOTAL KM-KA PENUMPANG PERKOTAAN		1.896.777
3	KA BARANG	1.570.622
TOTAL KM-KA		6.417.933

**REALISASI KM KA
BULAN APRIL 2023**

NO	URAIAN	JUMLAH KM-KA
1	KA PENUMPANG	
	A. NON EKONOMI	1.367.788
	B. EKONOMI PSO	801.956
	C. EKONOMI NON PSO	1.613.407
	D. LRT	63.243
	E. KRL DAOP 1	1.248.399
	F. KRL DAOP 6	62.633
TOTAL KM-KA PENUMPANG		5.157.426
2	KA BARANG	1.341.876
3	KA DINASAN	129.684
TOTAL KM-KA		6.628.986

**REALISASI KM KA
BULAN MEI 2023**

NO	URAIAN	JUMLAH KM-KA
1	KA PENUMPANG	
	A. NON EKONOMI	1.394.083
	B. EKONOMI PSO	763.052
	C. EKONOMI NON PSO	1.613.933
	D. LRT	64.291
	E. KRL DAOP 1	348.398
	F. KRL DAOP 6	43.589
TOTAL KM-KA PENUMPANG		4.227.346
2	KA BARANG	1.586.584
3	KA DINASAN	151.912
TOTAL KM-KA		5.965.842

KM-KA JUNI 2023

NO	DAOP	PENUMPANG						BARANG	DINAS		TOTAL	
		KOMERSIL	EKONOMI						NON PSO	DR		DL
			PSO									
			JARAK JAUH	JARAK SEDANG	JARAK DEKAT	PSO KR D	KRL					
1	KRL (JAK)						1.453.605				1.453.604,772	
	KCI (MER)						28.311				28.310,520	
	KCI (BD)						89.646				89.646,420	
	KCI (YK)						59.951				59.951,069	
	KCI (SB)						177.863				177.862,980	
	BANDARA YIA (RAILINK)	50.699									50.698,620	
	BANDARA BASOETA (KCI)	64.433									64.432,800	
2	DAOP1 JAK	252.344	9.343	14.015	0	0	0	42.783	77.078	10.466	21.744	427.773,426
3	DAOP2 BD	129.067	9.051	48.571	12.043	0	0	9.051	6.857	0	1.332	215.971,107
4	DAOP3 CN	547.273	25.257	0	0	0	0	113.690	132.532	0	173	818.925,633
5	DAOP4 SM	341.269	17.337	0	0	7.250	0	86.454	151.944	368	3.102	607.724,537
6	DAOP5 PWT	333.010	19.629	24.324	0	0	0	48.295	52.839	60	1.097	479.253,413
7	DAOP6 YK	291.261	24.348	0	0	9.563	0	43.498	47.866	340	946	417.823,135
8	DAOP7 MN	202.645	21.529	0	0	0	0	45.365	29.913	918	2.462	302.832,488
9	DAOP8 SB	153.737	14.111	5.696	0	0	0	41.754	98.030	2.216	967	316.509,678
10	DAOP9 JR	57.789	15.748	31.496	13.466	0	0	0	0	60	18.973	137.531,933
	JAWA	2.423.526	156.353	124.102	25.509	16.813	1.809.376	430.890	597.059	14.429	50.797	5.648.852,531
11	DIVRE I	50.846	0	31.396	21.948	0	0	7.272	49.421	0	0	160.883,362
	BANDARA KNM (RAILINK)	16.383										16.382,880
12	DIVRE II	0	0	0	16.144	0	0	15.708	8.278	0	3.182	43.312,093
13	DIVRE III	18.273	0	23.151	0	0	0	0	497.535	0	0	538.958,888
	LRT							62.886				62.886,000
14	DIVRE IV	0	0	44.287	0	0	0	0	485.423	0	20.162	549.872,013
	SUMATERA	85.502	0	98.834	38.092	0	0	85.867	1.040.657	0	23.344	1.372.295,236
	PT.KAI	2.509.028	156.353	222.936	63.601	16.813	1.809.376	516.757	1.637.716	14.429	74.140	7.021.147,767

**REALISASI KM KA
BULAN JULI 2023**

NO	URAIAN	JUMLAH KM-KA
1	KA PENUMPANG	5.487.999
	A. NON EKONOMI	2.580.552
	B. EKONOMI PSO	2.397.212
	C. EKONOMI NON PSO	445.253
	D. LRT SUMATERA SELATAN	64.982
2	KA BARANG	1.734.413
3	DINASAN	94.153
TOTAL KM-KA		7.316.565

**REALISASI KM KA
BULAN AGUSTUS 2023**

NO	URAIAN	JUMLAH KM-KA
1	KA PENUMPANG	5.437.148
	A. NON EKONOMI	2.561.135
	B. EKONOMI PSO	2.366.469
	C. EKONOMI NON PSO	445.253
	D. LRT SUMATERA SELATAN	64.291
2	KA BARANG	1.759.266
3	DINASAN	86.309
TOTAL KM-KA		7.282.723

**REALISASI KM KA
BULAN SEPTEMBER 2023**

NO	URAIAN	JUMLAH KM-KA
1	KA PENUMPANG	5.245.507
	A. NON EKONOMI	2.481.921
	B. EKONOMI PSO	2.273.418
	C. EKONOMI NON PSO	427.282
	D. LRT SUMATERA SELATAN	62.886
2	KA BARANG	1.665.117
3	DINASAN	80.815
TOTAL KM-KA		6.991.439

KM-KA OKTOBER 2023

NO	DAOP	PENUMPANG								BARANG	DINAS		TOTAL	
		KOMERSIL	EKONOMI								NON PSO	DR		DL
			PSO											
			JARAK JAUH	JARAK SEDANG	JARAK DEKAT	PSO KR D	PERINTIS	KRL						
1	KRL (JAK)							1.448.480					1.448.480	
	KCI (MER)			29.254									29.254	
	KCI (BD)			92.635									92.635	
	KCI (YK)				42.940			14.892					57.833	
	KCI (SB)			183.792									183.792	
	BANDARA YIA (RAILINK)	20.722			13.761								34.483	
	BANDARA BASOETA (KCI)	65.412											65.412	
	LRT JABODEBEK	154.850											154.850	
2	DAOP1 JAK	261.433	9.655	14.482	0	0	0	0	44.287	93.295	10.844	36.701	470.697	
3	DAOP2 BD	132.864	9.352	50.190	12.444	0	0	0	9.352	7.792	0	933	222.928	
4	DAOP3 CN	568.705	26.099	0	0	0	0	0	117.691	157.454	0	752	870.700	
5	DAOP4 SM	362.718	18.131	0	0	7.492	0	0	96.054	181.076	380	1.389	667.240	
6	DAOP5 PWT	338.479	20.328	25.163	0	0	0	0	49.905	64.877	0	2.382	501.134	
7	DAOP6 YK	295.405	25.079	0	0	8.934	4.546	0	44.993	51.339	563	1.247	432.105	
8	DAOP7 MN	208.440	22.247	0	0	0	0	0	46.877	34.177	949	965	313.655	
9	DAOP8 SB	162.960	14.581	5.886	0	0	0	0	38.600	114.689	2.101	3.843	342.660	
10	DAOP9 JR	60.492	16.273	32.546	13.915	0	0	0	0	0	0	0	123.225	
	JAWA	2.632.480	161.745	128.267	345.801	59.366	4.546	1.463.372	447.760	704.698	14.838	48.211	6.011.083	
11	DIVRE I	49.776	0	32.442	22.680	0	1.455	0	7.999	55.547	0	3.634	173.533	
	BANDARA KNM (RAILINK)	20.411											20.411	
12	DIVRE II	0	0	0	26.154	0	7.059	0	0	10.712	0	0	43.925	
13	DIVRE III	18.882	0	23.923	0	0	0	0	0	437.342	0	15.190	495.337	
	LRT						64.982						64.982	
14	DIVRE IV	0	0	45.763	0	0	0	0	0	485.462	0	119	531.344	
	SUMATERA	89.069	0	102.129	48.833	0	73.497	0	7.999	989.063	0	18.943	1.329.532	
	PT.KAI	2.721.548	161.745	230.395	394.634	59.366	78.042	1.463.372	455.758	1.693.761	14.838	67.155	7.340.616	

KM-KA NOVEMBER 2023

NO	DAOP	PENUMPANG								BARANG	DINAS		TOTAL	
		KOMERSIL	EKONOMI								NON PSO	DR		DL
			PSO											
			JARAK JAUH	JARAK SEDANG	JARAK DEKAT	PSO KR D	PERINTIS	KRL						
1	KRL (JAK)								1.374.976				1.374.976	
	KCI (MER)				28.311								28.311	
	KCI (BD)				89.646								89.646	
	KCI (YK)					15.274			41.369				56.644	
	KCI (SB)				177.863								177.863	
	BANDARA YIA (RAILINK)	21.728			31.311								53.039	
	BANDARA BASOETA (KCI)	63.302											63.302	
	LRT JABODEBEK	93.072											93.072	
2	DAOP1 JAK	249.254	9.343	14.015	0	0	0	0	42.941	89.832	10.271	35.477	451.134	
3	DAOP2 BD	128.439	9.051	48.571	12.043	0	0	0	23.945	8.103	0	898	231.050	
4	DAOP3 CN	540.558	25.257	0	0	0	0	0	113.901	156.006	0	718	836.441	
5	DAOP4 SM	349.003	17.337	0	0	7.250	0	0	86.604	178.568	368	1.350	640.481	
6	DAOP5 PWT	321.296	19.629	24.351	0	0	0	0	48.331	65.771	0	2.371	481.749	
7	DAOP6 YK	281.833	24.348	0	0	8.646	4.399	0	43.498	51.877	630	1.178	416.410	
8	DAOP7 MN	202.645	21.529	0	0	0	0	0	45.365	34.108	918	952	305.518	
9	DAOP8 SB	156.760	14.111	5.696	0	0	0	0	37.355	112.728	2.023	3.756	332.429	
10	DAOP9 JR	58.540	15.748	31.496	13.466	0	0	0	0	0	0	0	119.250	
	JAWA	2.466.432	156.353	124.129	352.639	31.170	4.399	1.416.346	441.941	696.993	14.211	46.702	5.751.315	
11	DIVRE I	48.170	0	31.396	21.948	0	5.136	0	7.741	59.996	0	3.560	177.946	
	BANDARA KNM (RAILINK)	19.752											19.752	
12	DIVRE II	0	0	0	25.310	0	6.227	0	0	11.441	0	0	42.978	
13	DIVRE III	18.273	0	23.151	0	0	0	0	0	473.323	0	18.636	533.383	
	LRT						62.886						62.886	
14	DIVRE IV	0	0	44.287	0	0	0	0	0	475.613	0	98	519.998	
	SUMATERA	86.195	0	98.834	47.258	0	74.249	0	7.741	1.020.372	0	22.294	1.356.943	
	PT.KAI	2.552.627	156.353	222.963	399.897	31.170	78.649	1.416.346	449.681	1.717.365	14.211	68.996	7.108.258	

KM-KA DESEMBER 2023

NO	DAOP	PENUMPANG								BARANG	DINAS		TOTAL	
		KOMERSIL	EKONOMI								NON PSO	DR		DL
			PSO					KRL						
			JARAK JAUH	JARAK SEDANG	JARAK DEKAT	PSO KR D	PERINTIS							
1	KRL (JAK)							1.423.931					1.423.931	
	KCI (MER)				29.254								29.254	
	KCI (BD)				92.635								92.635	
	KCI (YK)					15.783		49.355					65.139	
	KCI (SB)				183.792								183.792	
	BANDARA YIA (RAILINK)	22.452			29.936								52.389	
	BANDARA BASOETA (KCI)	65.412											65.412	
	LRT JABODEBEK	164.456											164.456	
2	DAOP1 JAK	266.801	9.655	14.482	0	0	0	0	47.932	87.515	11.527	37.112	475.024	
3	DAOP2 BD	143.810	9.352	50.190	12.444	0	0	0	34.704	7.480	0	1.038	259.019	
4	DAOP3 CN	576.632	26.101	0	0	0	0	0	126.959	151.905	0	651	882.248	
5	DAOP4 SM	375.884	18.202	0	0	7.492	0	0	99.833	183.034	380	1.394	686.219	
6	DAOP5 PWT	345.230	20.251	25.163	0	0	0	0	56.315	59.537	0	2.149	508.645	
7	DAOP6 YK	311.873	25.270	0	0	8.934	4.546	0	49.391	54.899	647	1.362	456.923	
8	DAOP7 MN	225.974	22.247	0	0	0	0	0	50.240	38.843	949	1.003	339.256	
9	DAOP8 SB	166.919	14.581	5.886	0	0	0	0	42.816	112.536	2.215	3.809	348.763	
10	DAOP9 JR	60.492	16.273	32.546	13.915	0	0	0	2.020	0	0	0	125.245	
	JAWA	2.725.934	161.932	128.267	361.976	32.209	4.546	1.473.286	510.210	695.750	15.719	48.519	6.158.349	
11	DIVRE I	52.987	0	32.442	22.692	0	5.307	0	7.999	50.793	0	3.798	176.018	
	BANDARA KNM (RAILINK)	20.356											20.356	
12	DIVRE II	0	0	0	26.150	0	6.325	0	0	10.945	0	0	43.421	
13	DIVRE III	18.882	0	23.923	0	0	0	0	0	506.649	0	23.275	572.729	
	LRT						66.075						66.075	
14	DIVRE IV	0	0	45.763	0	0	0	0	0	529.712	0	98	575.574	
	SUMATERA	92.225	0	102.129	48.842	0	77.707	0	7.999	1.098.099	0	27.172	1.454.173	
	PT.KAI	2.818.160	161.932	230.395	410.818	32.209	82.253	1.473.286	518.208	1.793.849	15.719	75.691	7.612.521	

Indikator Kinerja
Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP)

III. Capaian Kinerja Tahun 2023

A. Realisasi Perjalanan Kereta Api

Bulanan	Renaksi		Program			Realisasi					
	Bulanan	Bulanan	Kumulatif	Frekuensi			Capaian				
				KA Penumpang	KA Barang	Total	Total Kumulatif	Bulanan	Kumulatif		
TW 1	1	Januari	84%	69.502	69.502	54.495	7.116	61.611	61.611	88,65%	88,65%
	2	Februari	84%	62.776	132.278	49.236	6.659	55.895	117.506	89,04%	88,83%
	3	Maret	84%	69.502	201.780	54.109	7.055	61.164	178.670	88,00%	88,55%
TW 2	4	April	84%	67.260	269.040	53.492	6.364	59.856	238.526	88,99%	88,96%
	5	Mei	84%	69.502	338.542	56.082	6.520	62.602	301.128	90,07%	88,95%
	6	Juni	84%	66.800	405.342	54.819	6.483	61.302	362.430	91,77%	89,41%
TW 3	7	Juli	84%	69.028	474.370	56.155	7.024	63.179	425.609	91,53%	89,72%
	8	Agustus	84%	69.654	544.024	56.414	6.984	63.398	489.007	91,02%	89,89%
	9	September	84%	71.548	615.572	58.731	6.412	65.143	554.150	91,05%	90,02%
TW 4	10	Oktober	84%	74.121	689.693	61.657	6.815	68.272	622.422	92,11%	90,25%
	11	November	84%	66.990	756.683	57.607	6.852	64.459	686.881	96,22%	90,76%
	12	Desember	84%	69.223	825.906	63.630	7.146	70.775	757.656	102,24%	91,74%

B. Jumlah Kedatangan Kereta Api Tepat Waktu (OTP)

BULAN	RENAKSI	REALISASI		KA BERANGKAT TEPAT				KA DATANG TEPAT				RATA RATA		PERSENTASE CAPAIAN		
		Bulanan	Barang + Penumpang	Barang	Penumpang	Barang + Penumpang	Kumulatif	Barang	Penumpang	Barang + Penumpang	Kumulatif	Berangkat + Datang	Kumulatif	Bulanan	Kumulatif	
TW 1	Januari	91%	61.611	6.406	51.688	58.094	58.094	5.932	49.340	55.172	55.172	56.633	56.633	91,92%	91,92%	
	Februari	91%	55.895	117.506	5.998	46.191	52.189	110.283	5.626	44.039	49.665	104.837	50.927	107.560	91,11%	91,54%
	Maret	91%	61.164	178.670	6.419	50.784	57.203	167.486	6.051	47.694	53.745	158.582	55.474	163.034	90,70%	91,25%
TW 2	April	91%	59.856	238.526	5.938	49.758	55.696	223.182	5.791	46.743	52.534	211.116	54.115	217.149	90,41%	91,04%
	Mei	91%	62.602	301.128	6.180	52.828	59.008	282.190	5.953	50.783	56.716	267.832	57.862	275.011	92,43%	91,33%
	Juni	91%	61.302	362.430	5.920	47.628	53.548	335.736	5.153	44.570	49.723	317.555	51.635	326.646	84,23%	90,13%
TW 3	Juli	91%	63.179	425.609	6.357	52.194	58.551	394.287	5.898	49.221	54.919	372.474	56.735	363.381	89,80%	90,08%
	Agustus	91%	63.398	489.007	6.385	53.258	59.643	453.930	5.441	50.826	56.267	428.741	57.955	441.336	91,41%	90,25%
	September	91%	65.143	554.150	5.839	56.339	61.163	515.098	5.131	53.135	58.266	487.007	59.717	501.053	91,67%	90,42%
TW 4	Oktober	91%	68.272	622.422	6.130	56.740	62.870	577.968	5.566	53.932	59.498	646.495	61.179	662.232	89,61%	90,33%
	November	91%	64.459	686.881	6.441	53.526	59.966	637.934	5.941	49.815	55.756	602.251	57.961	620.093	89,76%	90,28%
	Desember	91%	70.775	757.656	6.560	59.961	66.521	704.455	6.015	55.994	62.009	664.260	64.265	684.358	90,80%	90,33%

Keterangan:

- : Rencana Aksi (Renaksi) bulanan berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2023
- : Data sementara, akan dilakukan finalisasi data setelah evaluasi pelaksanaan Gapeka Triwulan IV Tahun 2023



Awang Meindra, S.SiT., MT
NIP. 19810516 200212 1 003

**Indikator Kinerja
Pemenuhan Target Angkutan
Kereta Api**

Lampiran Nota Dinas.

Nomor: 27/PO/2023/OJUA/2024

Tanggal: 23 Januari 2024

JUMLAH PENUMPANG KA TERANGKUT S.D TRIWULAN VI TA. 2023

1. KA PSO (PT KAI)

KA	Realisasi Jumlah Penumpang KA PSO Tahun 2023												TOTAL
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
KA Ekonomi Jarak Jauh	321.940	283.824	303.525	316.147	324.893	322.575	345.561	338.918	337.678	343.341	335.232	365.170	3.938.804
KA Ekonomi Jarak Sedang	485.733	418.138	453.492	470.299	510.518	527.917	560.236	522.512	527.803	552.319	535.580	588.652	6.153.199
KA Ekonomi Jarak Dekat	467.780	405.089	467.866	478.854	536.441	525.803	563.186	436.171	323.092	337.500	342.515	438.360	5.322.657
KRD Ekonomi	47.703	47.348	47.344	48.756	59.569	62.525	60.386	44.514	50.140	53.694	52.375	69.642	643.996
KA Ekonomi Lebaran	-	-	-	94.963	-	-	-	-	-	-	-	-	94.963
TOTAL	1.323.156	1.154.399	1.272.227	1.409.019	1.431.421	1.438.820	1.529.369	1.342.115	1.238.713	1.286.854	1.265.702	1.461.824	16.153.619
	Triwulan I		3.749.782	Triwulan II		8.029.042	Triwulan III		12.139.239	Triwulan IV		16.153.619	-

2. KA Komersial (PT KAI)

KERETA	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL
Eksekutif	918.124	797.557	889.525	1.028.647	954.972	1.054.150	1.223.356	1.038.456	1.017.129	1.068.952	1.050.254	1.234.416	12.275.538
Bisnis	124.464	103.588	112.046	155.347	129.167	142.651	164.286	121.924	125.657	133.801	137.224	192.792	1.642.947
Ekonomi	1.198.342	1.012.969	1.100.841	1.567.036	1.422.803	1.464.351	1.756.061	1.343.167	1.379.976	1.440.214	1.418.132	1.910.909	17.014.801
Lokal Eksekutif	22.276	17.891	20.824	33.306	27.239	32.567	37.172	24.930	26.918	28.519	27.394	41.339	340.375
Lokal Bisnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lokal Ekonomi	66.522	55.063	62.904	77.030	76.002	94.328	104.868	89.231	88.531	91.532	86.404	114.469	1.006.884
Wisata Ambarawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Priority	5.931	3.685	4.260	8.272	5.560	6.288	8.546	6.877	8.154	5.930	5.142	14.363	83.008
TOTAL	2.335.659	1.990.753	2.190.400	2.869.638	2.615.743	2.794.335	3.294.289	2.624.585	2.646.365	2.768.948	2.724.550	3.508.288	32.363.553
	TRIWULAN 1		6.516.812	TRIWULAN 2		14.796.528	TRIWULAN 3		23.361.767	TRIWULAN 4		32.363.553	-

3. KA Perintis (PT KAI)

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	TOTAL
LRT Sumsel	316.487	261.559	279.621	361.765	336.260	355.355	370.468	345.592	351.418	344.388	342.227	417.496	3.665.140
Cut Meutia	6.704	9.107	7.042	4.360	5.094	20.558	18.627	3.077	4.220	1.663	2.722	5.299	83.174
Mineks	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembah Anai	7.365	6.472	7.372	9.410	10.139	9.941	9.294	7.471	8.352	9.120	9.114	11.222	94.050
Kertalaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bathara Kresna	9.939	8.183	9.498	8.519	11.969	14.001	13.236	9.018	9.625	9.163	9.167	13.154	112.318
Datuk Belambangan	15.271	15.593	13.431	6.142	10.940	12.097	12.958	8.391	-	-	-	-	94.823
Amir Hamzah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andalan Celebes/Lontara	5.034	4.840	4.820	12.926	34.637	22.810	23.251	17.838	19.872	21.104	21.500	25.123	188.632
Jumlah	360.800	305.754	321.784	403.122	409.039	434.762	447.834	391.387	393.487	385.438	384.730	472.294	4.710.431
	Triwulan I		988.338	Triwulan II		2.235.261	Triwulan III		3.467.969	Triwulan IV		4.710.431	-

4. KA PSO (PT KCI)

KA	Realisasi Jumlah Penumpang KRL Tahun 2023												TOTAL
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
KRL Jabodetabek	22.716.957	20.810.770	23.855.703	21.401.906	23.715.677	23.292.386	25.211.050	24.978.901	25.081.976	26.793.455	26.170.698	26.861.198	290.890.677
KRL Yogyakarta	396.049	384.585	451.914	507.926	551.772	609.144	609.144	512.547	558.000	566.734	554.057	709.634	6.411.506
KA Lokal Wilayah I	255.271	245.313	262.662	265.136	299.313	306.412	331.897	271.073	306.032	328.205	333.038	413.126	3.617.478
KA Lokal Wilayah II	1.321.403	1.022.642	1.136.756	1.322.083	1.236.552	1.199.002	1.356.747	1.046.606	1.149.859	1.236.257	1.222.425	1.469.920	14.720.252
KA Lokal Wilayah VI	55.665	65.433	77.012	77.772	76.756	80.178	80.178	67.651	69.326	67.636	68.455	88.867	874.929
KA Lokal Wilayah VII	1.042.612	1.007.869	1.068.010	1.024.845	1.180.136	1.163.647	1.271.520	1.032.204	1.068.016	1.133.983	1.115.330	1.252.466	13.360.638
TOTAL	25.787.957	23.536.612	26.852.057	24.599.668	27.060.206	26.650.769	28.860.536	27.908.982	28.233.209	30.126.270	29.464.003	30.795.211	329.875.480
	Triwulan I		76.176.626	Triwulan II		154.487.269	Triwulan III		239.489.996	Triwulan IV		329.875.480	-

5. KA Komersial (PT KCI)

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
KA Bandara Soetta (SHIA)	120.070	114.117	138.650	142.444	163.135	166.284	179.718	180.734	183.889	189.633	196.074	195.625	1.970.373
Jumlah	120.070	114.117	138.650	142.444	163.135	166.284	179.718	180.734	183.889	189.633	196.074	195.625	1.970.373
	Triwulan I		372.837	Triwulan II		844.700	Triwulan III		1.389.041	Triwulan IV		1.970.373	-

6. KA PSO (PT RAILINK)

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
KA Bandara YIA	176.149	162.877	172.046	161.894	181.959	167.215	185.218	171.114	168.796	141.063	142.265	160.424	1.991.020
Srilelawangsa (MDN-BIJ_KBG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188.301	184.305	200.050	572.656
Srilelawangsa (MDN-ARB-KNM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.601	45.280	75.881
Jumlah	176.149	162.877	172.046	161.894	181.959	167.215	185.218	171.114	168.796	329.364	357.171	405.754	2.639.557
	Triwulan I		511.072	Triwulan II		1.022.140	Triwulan III		1.547.268	Triwulan IV		2.639.557	-

7. KA Komersial (PT RAILINK)

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
Kualanamu	36.107	36.008	39.448	36.316	39.896	35.940	36.048	34.379	35.994	39.305	21.632	23.743	414.816
Yogyakarta Ekspres	-	-	-	40.137	52.364	48.195	54.487	48.654	46.792	61.359	64.079	72.886	488.953
Jumlah	36.107	36.008	39.448	76.453	92.260	84.135	90.535	83.033	82.786	100.664	85.711	96.629	903.769
	Triwulan I		111.563	Triwulan II		364.411	Triwulan III		620.765	Triwulan IV		903.769	-

8. MRT Jakarta

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
MRT Jakarta	2.541.028	2.384.710	2.704.269	2.079.745	2.688.158	2.720.562	2.960.596	3.024.172	3.050.531	3.140.481	3.155.364	3.048.562	33.496.540
Jumlah	2.541.028	2.384.710	2.704.269	2.079.745	2.688.158	2.720.562	2.960.596	3.024.172	3.050.531	3.140.481	3.155.364	3.048.562	33.496.540
	Triwulan I		7.630.007	Triwulan II		15.118.472	Triwulan III		24.153.771	Triwulan IV		33.496.540	-

9. LRT Jakarta

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
LRT JAKARTA (Velodrome - K. Gading)	72.424	77.112	83.511	72.660	81.506	84.139	86.594	89.921	92.900	93.511	94.709	98.449	1.027.436
Jumlah	72.424	77.112	83.511	72.660	81.506	84.139	86.594	89.921	92.900	93.511	94.709	98.449	1.027.436
	Triwulan I		233.047	Triwulan II		471.352	Triwulan III		740.767	Triwulan IV		1.027.436	-

10. LRT Jabodebek

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
LRT Jabodebek	-	-	-	-	-	-	-	103.879	1.506.191	1.032.189	890.728	1.029.686	4.562.673
Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	103.879	1.506.191	1.032.189	890.728	1.029.686	4.562.673
	Triwulan I		-	Triwulan II		-	Triwulan III		1.610.070	Triwulan IV		4.562.673	-

11. Kereta Cepat Jakarta – Bandung

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
KCJB	-	-	-	-	-	-	-	-	55.601	172.608	482.053	482.056	1.192.318
Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	55.601	171.608	482.053	482.056	1.192.318
	Triwulan I		-	Triwulan II		-	Triwulan III		55.601	Triwulan IV		1.191.179	-

12. Jumlah Penumpang terangkut sampai dengan Triwulan IV TA. 2023

IKU	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Jumlah penumpang terangkut dengan KA	32.753.350	29.762.342	33.774.392	31.814.643	34.723.427	34.541.021	37.634.689	35.919.922	37.652.468	39.624.821	39.099.157	41.594.378
Jumlah	Triwulan I		96.290.084	Triwulan II		197.369.175	Triwulan III		308.576.254	Triwulan IV		428.894.610

Ket.

Data jumlah penumpang tersebut masih bersifat sementara karena semenjak pengoperasian Kereta Cepat Jakarta – Bandung terdapat beberapa data yang belum disampaikan sehingga diperlukan rekonsiliasi data.

JUMLAH BARANG KA TERANGKUT S.D TRIWULAN IV TA. 2023

1. Rekapitulasi Angkutan Barang Pulau Jawa TA. 2023

No	Komoditi	Januari	Februari	Maret	TW I
1	BBM	130.036	116.193	138.609	384,838
2	PUPUK	0	390	1.680	2,070
3	SEMEN	138.176	107.632	119.496	365,304
4	BATUBARA	33.120	27.793	15.912	76,825
5	HASIL PERKEBUNAN (CPO,PULP,KAYU, LATEX)	0	0	0	0
6	PETIKEMAS	348.170	306.462	399.343	1,053,975
7	KARET & KLINKER	0	0	0	0
8	RETAIL (ONS PARCEL UTARA & SELATAN,BHP)	12.933	12.273	13.376	38,582
9	LAINNYA (BANK INDONESIA, BEA KLB, ANGKUTAN DINAS, ANGKUTAN SATKER, MOTIS, BEA LANGSIR)	1.772	11.443	20.453	33,668
Total		664.207	582.186	708.869	1.955.262

No	Komoditi	April	Mei	Juni	TW II
1	BBM	134,701	140,140	129,879	404,720
2	PUPUK	1,200	1,650	1,140	3,990
3	SEMEN	74,928	125,344	130,040	330,312
4	BATUBARA	21,240	12,852	31,968	66,060
5	HASIL PERKEBUNAN (CPO,PULP,KAYU, LATEX)	0	0	0	0
6	PETIKEMAS	289,259	354,489	317,554	961,303
7	KARET & KLINKER	0	0	0	0
8	RETAIL (ONS PARCEL UTARA & SELATAN,BHP)	8,427	13,529	11,742	33,698
9	LAINNYA (BANK INDONESIA, BEA KLB, ANGKUTAN DINAS, ANGKUTAN SATKER, MOTIS, BEA LANGSIR)	15,247	25,361	19,429	60,038
Total		545,002	673,365	641,753	1,860,121

No	Komoditi	Juli	Agustus	September	TW III
1	BBM	155,596	154,168	147,693	457,458
2	PUPUK	2,580	2,880	1,740	7,200
3	SEMEN	152,880	159,418	153,932	466,230
4	BATUBARA	41,940	36,540	31,140	109,620
5	HASIL PERKEBUNAN (CPO,PULP,KAYU, LATEX)	0	0	0	0
6	PETIKEMAS	334,649	358,853	364,612	1,058,115
7	KARET & KLINKER	0	0	0	0
8	RETAIL (ONS PARCEL UTARA & SELATAN,BHP)	14,379	16,311	14,874	45,563
9	LAINNYA (BANK INDONESIA, BEA KLB, ANGKUTAN DINAS, ANGKUTAN SATKER, MOTIS, BEA LANGSIR)	7,083	8,926	9,992	26,001
Total		709,107	737,095	723,984	2,170,186

No	Komoditi	Oktober	November	Desember	TW IV
1	BBM	153,503	147,424	153,249	454,176
2	PUPUK	1,020	2,040	1,860	4,920
3	SEMEN	166,254	165,572	141,673	473,499
4	BATUBARA	42,804	35,748	37,800	116,352
5	HASIL PERKEBUNAN (CPO,PULP,KAYU, LATEX)	0	0	0	0
6	PETIKEMAS	363,883	392,449	400,311	1,156,644
7	KARET & KLINKER	0	0	0	0
8	RETAIL (ONS PARCEL UTARA & SELATAN,BHP)	14,362	14,602	14,649	43,612
9	LAINNYA (BANK INDONESIA, BEA KLB, ANGKUTAN DINAS, ANGKUTAN SATKER, MOTIS, BEA LANGSIR)	14,764	30,588	9,409	54,760
Total		756,590	788,422	758,951	2,303,962

2. Rekapitulasi Angkutan Barang Pulau Sumatera TA. 2023

No	Komoditi	Januari	Februari	Maret	TW I
1	BBM	64.602	57.480	63.908	185,990
2	PUPUK	0	0	0	0
3	SEMEN	126.720	99.750	99.300	325,770
4	BATUBARA	4.220.969	3.992.173	4.321.888	12,535,030
5	HASIL PERKEBUNAN (CPO,PULP,KAYU, LATEX)	35.599	48.728	66.069	150,396
6	PETIKEMAS	31.460	35.560	32.220	99,240
7	KARET & KLINKER	34.200	76.205	47.400	157,805
8	RETAIL (ONS PARCEL UTARA & SELATAN,BHP)	450	411	475	1,336
9	LAINNYA (BANK INDONESIA, BEA KLB, ANGKUTAN DINAS, ANGKUTAN SATKER, MOTIS, BEA LANGSIR)	4.110	10.805	10.405	25,320
Total		4.518.110	4.321.112	4.641.664	13.480.886

No	Komoditi	April	Mei	Juni	TW II
1	BBM	61,775	62,856	60,350	184,981
2	PUPUK	0	0	0	0
3	SEMEN	95,290	98,440	162,754	356,484
4	BATUBARA	4,031,994	4,199,633	4,481,203	12,712,829
5	HASIL PERKEBUNAN (CPO,PULP,KAYU, LATEX)	54,217	45,686	106,487	206,390
6	PETIKEMAS	42,178	32,480	30,000	104,658
7	KARET & KLINKER	64,155	1,800	33,300	99,255
8	RETAIL (ONS PARCEL UTARA & SELATAN,BHP)	368	479	434	1,282
9	LAINNYA (BANK INDONESIA, BEA KLB, ANGKUTAN DINAS, ANGKUTAN SATKER, MOTIS, BEA LANGSIR)	10,064	13,095	15,665	38,824
Total		4,360,041	4,454,469	4,890,194	13,704,704

No	Komoditi	Juli	Agustus	September	TW III
1	BBM	65,033	65,314	62,381	192,729
2	PUPUK	0	0		0
3	SEMEN	145,680	148,060	159,650	453,390
4	BATUBARA	4,592,148	4,576,972	3,994,761	13,163,881
5	HASIL PERKEBUNAN (CPO,PULP,KAYU, LATEX)	53,973	57,853	56,357	168,184
6	PETIKEMAS	32,860	33,440	38,540	104,840
7	KARET & KLINKER	112,800	74,550	58,200	245,550
8	RETAIL (ONS PARCEL UTARA & SELATAN,BHP)	419	442	418	1,279
9	LAINNYA (BANK INDONESIA, BEA KLB, ANGKUTAN DINAS, ANGKUTAN SATKER, MOTIS, BEA LANGSIR)	28,040	23,912	11,614	63,567
Total		5,030,953	4,980,544	4,381,923	14,393,420

No	Komoditi	Oktober	November	Desember	TW IV
1	BBM	63,413	64,575	67,303	195,291
2	PUPUK	0	0	0	0
3	SEMEN	171,270	174,270	188,300	533,840
4	BATUBARA	4,022,720	4,321,616	4,799,210	13,143,547
5	HASIL PERKEBUNAN (CPO,PULP,KAYU, LATEX)	35,067	25,244	46,816	107,128
6	PETIKEMAS	41,060	41,500	43,140	125,700
7	KARET & KLINKER	80,400	92,375	62,975	235,750
8	RETAIL (ONS PARCEL UTARA & SELATAN,BHP)	368	372	324	6,974
9	LAINNYA (BANK INDONESIA, BEA KLB, ANGKUTAN DINAS, ANGKUTAN SATKER, MOTIS, BEA LANGSIR)	15,600	23,303	6,234	45,137
Total		4,429,899	4,743,256	5,214,303	14,387,457

3. Jumlah Barang terangkut sampai dengan Triwulan IV TA. 2023

No	Komoditi	Januari	Februari	Maret	TW I
1	BBM	194.638	173.673	202.517	570,828
2	PUPUK	0	390	1.680	2,070
3	SEMEN	264.896	207.382	218.796	691,074
4	BATUBARA	4.254.089	4.019.966	4.337.800	12,611,855
5	HASIL PERKEBUNAN (CPO,PULP,KAYU, LATEX)	35.599	48.728	66.069	150,396
6	PETIKEMAS	379.630	342.022	431.563	1,153,215
7	KARET & KLINKER	34.200	76.205	47.400	157,805
8	RETAIL (ONS PARCEL UTARA & SELATAN,BHP)	13.383	12.684	13.851	39,918
9	LAINNYA (BANK INDONESIA, BEA KLB, ANGKUTAN DINAS, ANGKUTAN SATKER, MOTIS, BEA LANGSIR)	5.882	22.248	30.858	58,988
Total		5,182,317	4,903,298	5,350,533	15,436,148

No	Komoditi	April	Mei	Juni	TW II
1	BBM	196,476	202,996	190,229	589,702
2	PUPUK	1,200	1,650	1,140	3,990
3	SEMEN	170,218	223,784	292,794	686,796
4	BATUBARA	4,053,234	4,212,485	4,513,171	12,778,889
5	HASIL PERKEBUNAN (CPO,PULP,KAYU, LATEX)	54,217	45,686	106,487	206,390
6	PETIKEMAS	331,437	386,969	347,554	1,065,961
7	KARET & KLINKER	64,155	1,800	33,300	99,255
8	RETAIL (ONS PARCEL UTARA & SELATAN,BHP)	8,795	14,008	12,177	34,979
9	LAINNYA (BANK INDONESIA, BEA KLB, ANGKUTAN DINAS, ANGKUTAN SATKER, MOTIS, BEA LANGSIR)	25,311	38,456	35,094	98,862
Total		4,905,043	5,127,835	5,531,947	15,564,825

No	Komoditi	Juli	Agustus	September	TW III
1	BBM	220,629	219,482	210,075	650,186
2	PUPUK	2,580	2,880	1,740	7,200
3	SEMEN	298,560	307,478	313,582	919,620
4	BATUBARA	4,634,088	4,613,512	4,025,901	13,273,501
5	HASIL PERKEBUNAN (CPO,PULP,KAYU, LATEX)	53,973	57,853	56,357	168,184
6	PETIKEMAS	367,509	392,293	420,970	1,162,955
7	KARET & KLINKER	112,800	74,550	38,540	245,550
8	RETAIL (ONS PARCEL UTARA & SELATAN,BHP)	14,798	16,753	15,292	46,843
9	LAINNYA (BANK INDONESIA, BEA KLB, ANGKUTAN DINAS, ANGKUTAN SATKER, MOTIS, BEA LANGSIR)	35,123	32,838	21,607	89,568
Total		5,740,060	5,717,639	5,105,906	16,563,606

No	Komoditi	Oktober	November	Desember	TW IV
1	BBM	216,916	211,999	220,553	649,467
2	PUPUK	1,020	2,040	1,860	4,920
3	SEMEN	337,524	339,842	329,973	1,007,339
4	BATUBARA	4,065,524	4,357,364	4,837,010	13,259,899
5	HASIL PERKEBUNAN (CPO,PULP,KAYU, LATEX)	35,067	25,244	46,816	107,128
6	PETIKEMAS	404,943	433,949	443,451	1,282,344
7	KARET & KLINKER	80,400	92,375	62,975	235,750
8	RETAIL (ONS PARCEL UTARA & SELATAN,BHP)	14,730	14,973	14,973	44,677
9	LAINNYA (BANK INDONESIA, BEA KLB, ANGKUTAN DINAS, ANGKUTAN SATKER, MOTIS, BEA LANGSIR)	30,364	53,891	15,643	99,898
Total		5,186,489	5,531,677	5,973,253	16,691,420

Aditya Karsa
NIP. 19860902 200812 1 001

Indikator Kinerja
Persentase Pengoperasian Jalur KA Yang Sesuai
Dengan TQI



M I T I R I G R C K S I T S P R J J E K I R J T U
 U I T K R J S U D I R K T R T K K I K J U R D G U K R T P I

Periode Uraian Deskripsi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Target Uraian		Realisasi Uraian		Capaian Uraian		Keterangan	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
					Target	Output	Target	Anggaran	Realisasi	Output				Realisasi
Meningkatkan pelayanan dan keselamatan penumpang	Kualitas Pelayanan dan Keselamatan Penumpang	Layanan	100%	<p>Menyediakan informasi dan layanan kepada penumpang</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Menyediakan informasi dan layanan kepada penumpang</p>	<p>Penanggung Jawab</p>	
				<p>Menyediakan informasi dan layanan kepada penumpang</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Menyediakan informasi dan layanan kepada penumpang</p>	<p>Penanggung Jawab</p>
				<p>Menyediakan informasi dan layanan kepada penumpang</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Menyediakan informasi dan layanan kepada penumpang</p>
Meningkatkan pelayanan dan keselamatan penumpang	Kualitas Pelayanan dan Keselamatan Penumpang	Layanan	100%	<p>Menyediakan informasi dan layanan kepada penumpang</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Menyediakan informasi dan layanan kepada penumpang</p>	<p>Penanggung Jawab</p>	
				<p>Menyediakan informasi dan layanan kepada penumpang</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Menyediakan informasi dan layanan kepada penumpang</p>	<p>Penanggung Jawab</p>
				<p>Menyediakan informasi dan layanan kepada penumpang</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Menyediakan informasi dan layanan kepada penumpang</p>
Meningkatkan pelayanan dan keselamatan penumpang	Kualitas Pelayanan dan Keselamatan Penumpang	Layanan	100%	<p>Menyediakan informasi dan layanan kepada penumpang</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Menyediakan informasi dan layanan kepada penumpang</p>	<p>Penanggung Jawab</p>	
				<p>Menyediakan informasi dan layanan kepada penumpang</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Menyediakan informasi dan layanan kepada penumpang</p>	<p>Penanggung Jawab</p>
				<p>Menyediakan informasi dan layanan kepada penumpang</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Menyediakan informasi dan layanan kepada penumpang</p>



M U T I R I G R O C K S I T S P R J U E K I R J T U
U I T K R J S U D I R K T R T K I K J U R D G U K R T P I

Peraturan Deseler

Mena D Cerere	C R M B N	C R M B N	C R M B N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

FORMULASI INDIKATOR PROSENTASE KONDISI JALUR KERETA API YANG SESUAI TRACK QUALITY INDEX (TQI) MENUJU KECEPATAN MINIMUM 80 KM/JAM

Klasifikasi TQI	Kualifikasi		Panjang Jalur (Km'Jalur)	Jalur Terukur 2023 periode III		
				(Km'Jalur)		
TQI (Kecepatan 80 s.d 120 Km/jam)	Kategori 1	Kecepatan : 100 s.d 120 km/jam Kondisi : Nyaman	5.902,030	5.900,944	5.538,965	93,85
	Kategori 2	Kecepatan : 80 s.d 100 km/jam Kondisi : Aman				
TQI (Kecepatan 40 s.d 80 Km/jam)	Kategori 3	Kecepatan : 60 s.d 80 km/jam Kondisi : waspada		361,979	6,13%	
	Kategori 4	Kecepatan : 40 s.d 60 km/jam kondisi : Bahaya				

**REKAPITULASI TRACK QUALITY INDEX (TQI)
DI JAWA DAN SUMATERA**
Hasil Pengukuran Jalan Rel Menggunakan Kereta Ukur EM-120,HKPW-U76501 dan Accelerometer
Realisasi Periode III Tahun 2023

No	Wilayah	Panjang Track Periode II 2023 (km)	Panjang Terukur Periode II (km)	Panjang Track Periode III 2023 (km)	Panjang Terukur Periode III (km)	Kat.1 (Q)			Kat.2 (20<Q<35)			Kat.3 (35<Q<50)			Kat.4 (Q>50)		
						Realisasi periode II	Realisasi periode III	(meningkat/menurun)	Realisasi periode II	Realisasi periode III	(meningkat/menurun)	Realisasi periode II	Realisasi periode III	(meningkat/menurun)	Realisasi periode II	Realisasi periode III	(meningkat/menurun)
						(km)	(km)		(km)	(km)		(km)	(km)		(km)	(km)	
1	DAOP I JAKARTA	732,291	732,382	732,291	732,123	329,021	339,076	↑ 10,06	317,420	316,068	↓ -1,35	72,423	64,583	↓ -7,84	13,518	12,396	↓ -1,12
2	DAOP II BANDUNG	405,388	405,735	405,388	405,230	113,495	146,266	↑ 32,77	177,767	162,957	↓ -14,81	98,979	81,252	↓ -17,73	15,494	14,755	↓ -0,74
3	DAOP III CIREBON	548,32	548,320	548,32	548,320	457,915	492,601	↑ 34,69	87,198	54,495	↓ -32,70	3,091	1,224	↓ -1,87	0,116	-	↓ -0,12
4	DAOP IV SEMARANG	660,888	660,888	660,888	660,782	502,510	506,019	↑ 3,51	151,533	148,508	↓ -3,02	4,928	4,756	↓ -0,17	1,917	1,499	↓ -0,42
5	DAOP V PURWOKERTO	477,942	477,244	477,942	477,515	365,142	389,881	↑ 24,74	109,206	86,736	↓ -22,47	2,064	0,898	↓ -1,17	0,832	-	↓ -0,83
6	DAOP VI YOGYAKARTA	385,606	385,606	385,606	385,606	335,759	346,909	↑ 11,15	48,051	37,970	↓ -10,08	1,429	0,546	↓ -0,88	0,367	0,181	↓ -0,19
7	DAOP VII MADIUN	422,579	422,579	422,579	422,599	385,228	394,608	↑ 9,38	27,171	27,171	↓ -8,75	1,193	0,769	↓ -0,42	0,236	0,051	↓ -0,19
8	DAOP VIII SURABAYA	516,566	516,509	516,566	516,590	358,624	357,349	↓ -1,28	134,227	139,867	↑ 5,64	20,221	16,304	↓ -3,92	3,437	3,070	↓ -0,37
9	DAOP IX JEMBER	261,103	261,103	261,103	261,160	174,219	179,894	↑ 5,68	78,977	73,853	↓ -5,12	7,773	6,880	↓ -0,89	0,134	0,533	↑ 0,40
Jumlah Rata-Rata		4.410,683	4.410,366	4.410,683	4.409,925	3.021,913	3.152,603	↑ 130,69	1.140,301	1.047,625	↓ -92,68	212,101	177,212	↓ -34,89	36,051	32,485	↓ -3,57
1	DIVRE I SUMATERA UTARA	456,636	456,410	456,636	456,213	108,152	101,154	↓ -7,00	304,727	316,396	↑ 11,67	40,251	35,663	↓ -4,59	3,280	3,000	↓ -0,28
2	DIVRE II SUMATERA BARAT	107,044	107,068	107,044	107,139	4,900	4,100	↓ -0,80	67,933	63,193	↓ -4,74	31,926	36,626	↑ 4,70	2,309	3,220	↑ 0,91
3	DIVRE III PALEMBANG	479,488	479,488	479,488	479,488	126,879	129,540	↑ 2,66	299,867	321,209	↑ 21,34	48,373	26,633	↓ -21,74	4,369	2,106	↓ -2,26
4	DIVRE IV TANJUNG KARANG	448,179	448,179	448,179	448,179	59,170	51,706	↓ -7,46	347,588	351,439	↑ 3,85	39,736	43,595	↑ 3,86	1,685	1,439	↓ -0,25
Jumlah Rata-Rata		1.491,347	1.491,145	1.491,347	1.491,019	299,101	286,500	↓ -12,60	1.020,115	1.052,237	↑ 32,12	160,286	142,517	↓ -17,77	11,643	9,765	↓ -1,88
JUMLAH TOTAL		5.902,030	5.901,511	5.902,030	5.900,944	3.321,014	3.439,103	↑ 118,09	2.160,416	2.099,862	↓ -60,55	372,387	319,729	↓ -52,66	47,694	42,250	↓ -5,44

Indikator Kinerja
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap
Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian

**DIREKTORAT LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN KERETA API**

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN

BAB I

KUESIONER SURVEI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, serta menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu sub aksi pada sektor penegakan agraria dan tata ruang dan Reformasi Birokrasi adalah pembangunan Zona Integritas (ZI). Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan pegawainya berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) khususnya dalam penegakan integritas dan pelayanan yang berkualitas.

Ketentuan terkait pembangunan Zona Integritas diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah yang setiap pimpinan instansi pemerintah diminta untuk menetapkan unit kerja yang diusulkan meraih predikat WBK/WBBM.

Proses Pembangunan Zona Integritas difokuskan pada enam area perubahan yang salah satunya adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang ditandai dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu dilakukan penilaian kepuasan terhadap pelayanan oleh masing-masing Unit Kerja yang disebut dengan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran tersebut dilakukan dengan melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) serta Integritas di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS). Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau handphone masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui <https://skm.dephub.go.id/>.

Kuesioner yang tersedia dalam Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) mengandung setiap unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan peraturan sebagaimana dimaksud, meliputi:

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
3. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman;
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Instrumen yang digunakan dalam Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) diadopsi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023. Terdapat 14 pertanyaan yang terdiri dari 9 (sembilan) pertanyaan tentang persepsi kualitas layanan dan 5 (lima) pertanyaan tentang persepsi anti korupsi yang secara lengkap dapat dilihat pada Kuesioner berikut:

Kuesioner Survei IKM – IPK

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, n Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melakukan survei pelayanan publik. Mohon kesediaan untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan penilaian yang Bapak/Ibu/Saudara alami selama menggunakan layanan pada

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Harap jawab setiap pertanyaan sejujur mungkin. Semua jawaban dirahasiakan.

Terima kasih atas kerja sama anda.

I. KUALITAS LAYANAN

Pada bagian ini, kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait kualitas pemberian pelayanan pada unit layanan ini

1. Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sistem informasi pelayanan selalu tersedia dan dapat menjawab kebutuhan pengguna layanan, sistem informasi pelayanan mudah digunakan, serta sistem informasi pelayanan memiliki fasilitas interaktif dan FAQ.]



2. Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi persyaratan layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan persyaratan pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



3. Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi prosedur/alur layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan prosedur/alur pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



4. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi jangka waktu penyelesaian pelayanan dapat dipahami dengan jelas, jangka waktu penyelesaian pelayanan tersebut wajar, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



5. Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi biaya pelayanan dapat dipahami dengan jelas dan biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan yang diinformasikan, termasuk apabila biaya pelayanan diinformasikan gratis memang benar tidak dilakukan pembayaran.]



6. Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan

[Pertanyaan ini disampaikan untuk melihat apakah unit layanan memiliki sarana prasarana pendukung pelayanan seperti ruang khusus pelayanan, ruang tunggu, tempat parkir gratis, ruang bermain anak, ruang ibadah, toilet khusus pengguna layanan dan sarana bagi yang berkebutuhan khusus.]



7. Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah petugas mampu memberikan respon pelayanan dengan cepat kepada pengguna layanan baik melalui tatap muka langsung, maupun melalui aplikasi layanan daring, petugas mudah dikenali (memakai seragam, tanda pengenal, dll), petugas melayani dengan ramah (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun)]



8. Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sarana layanan konsultasi dan pengaduan beragam (tempat konsultasi dan pengaduan/hotline/call center/media online), prosedur untuk melakukan konsultasi dan pengaduan mudah, respon konsultasi dan pengaduan cepat serta tindak lanjut proses penanganan konsultasi dan pengaduan jelas.]



II. PERILAKU PENYIMPANGAN

Pada bagian ini, kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait perilaku petugas pelayanan yang menyimpang pada unit layanan ini.

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya.]



2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.]



3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transpor, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan.]



4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (Pungli bisa dikamouflasekan melalui berbagai istilah seperti “uang administrasi”, “uang rokok”, “uang terima kasih”, dsb).]



5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada praktik percaloan (Pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai).]



III. EVALUASI DAN PERBAIKAN

1. Sebelum menjawab survei ini, apakah ada pegawai/pejabat pada unit layanan ini yang mengarahkan Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban yang bagus-bagus/baik-baik saja?

Pengarahan Petugas/ Pegawai

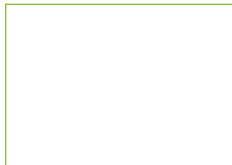
- Ya
 Tidak

2. Bagaimana penilaian Bapak/ Ibu terhadap pilihan dibawah ini yang perlu diperbaiki pada unit layanan ini

[Silahkan pilih bagian yang perlu diperbaiki pada unit layanan ini. Jawaban bisa dipilih lebih dari 1 (satu)]

- Kebijakan Pelayanan
 Profesionalisme SDM
 Kualitas Sarana Prasarana
 Sistem Informasi dan Pelayanan Publik
 Konsultasi dan Pengaduan
 Penghilangan Praktik Pungli
 Penghilangan Praktik Diluar Prosedur
 Penghilangan Praktik Percaloan
 Tidak ada yang perlu diperbaiki

Tanda Tangan



BAB II

METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara real time dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS). Penggunaan aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) sebagai tools pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) diharapkan dapat menganalisis data kualitatif secara langsung sehingga perbaikan atas pelayanan publik yang menjadi keluhan di tengah masyarakat dapat ditanggulangi dengan cepat dan tepat.

Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan di seluruh satuan kerja Kementerian Perhubungan baik di tingkat pusat maupun daerah secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau handphone masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui <https://skm.dephub.go.id/>.

Responden SPAK dan SPKP adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan. Dalam pelaksanaan survei, ditentukan sampel jumlah responden berdasarkan populasi pengguna layanan setiap bulannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, mensyaratkan responden minimal survei berjumlah 30 responden. Apabila penerima layanan dari Unit Kerja kurang dari 30 orang karena memang karakter Unit Kerja yang bukan pelayanan publik, maka tim melaksanakan survei akan menentukan dengan jumlah tertentu sesuai kaidah perhitungan statistik. Jumlah minimal responden SPAK dan SPKP setiap Unit Kerja ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah perhitungan statistik, yakni mengacu pada populasi pengguna layanan dalam satu bulan.

- Contoh perhitungan menggunakan Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = Jumlah sample (responden)

N = Jumlah Populasi (Pengguna layanan Satu Bulan)

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sample yang masih dapat ditolerir (contoh 5%)

Jika dalam satu bulan terdapat 150 pengguna layanan dan margin kesalahan yang ditentukan adalah 5% atau 0,05, maka perhitungannya adalah:

$$n = N / \{1 + (N \times e^2)\}$$

$$n = 150 / \{1 + (150 \times 0,05^2)\}$$

$$n = 109,09$$

Dengan demikian, ukuran responden minimal dari populasi 150 pengguna layanan adalah sebanyak 109 responden.

- Untuk memudahkan perhitungan dapat pula menggunakan tabel sample dari Krejcie and Morgan (Permenpan-RB No 14 Tahun 2017):

Tabel Sampel Morgan dan Krejcie

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	340	181	2600	331
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	100000	384

- a. Responden SPAK-SPKP Unit Utama Kementerian Perhubungan Manusia adalah : Pengguna Layanan di Unit Utama Kementerian Perhubungan.
- b. Responden SPAK-SPKP Kantor Wilayah
- c. Responden SPAK-SPKP Kantor Pertanahan

B. Metode Pencacahan

Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan secara mandiri oleh unit pemberi layanan, baik di tingkat Unit Utama, Kantor Wilayah, maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pengisian SKM dilakukan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan atau penerima layanan dilakukan melalui Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS), dengan cara melakukan scan barcode pada unit pemberi layanan atau dengan cara mengakses link survei yang diberikan oleh petugas layanan.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Untuk memperoleh nilai hasil survei dilakukan perhitungan otomatis oleh sistem yang terdapat dalam aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS), dengan berpedoman pada PermenPAN-RB Nomor 14 tahun 2017. Dalam aturan tersebut digunakan pendekatan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan, dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian, yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus “Hasil SKM Unit Pelayanan x 25”. Dengan demikian, nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, dan mutu serta kinerja unit pelayanan digambarkan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

D. Pengolahan Data

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{3} = 0,07$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

BAB III

PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

1. Hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK pada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Data Hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

No.	Bulan	Nilai IPK	Jumlah Responden	Diskriminasi	Kecurangan	Gratifikasi	Pungli	Calo
1	Maret	3.64	41	3.66	3.62	3.60	3.62	3.69
2	Juli	3.83	7	3.83	3.83	3.74	3.83	3.91
3	November	3.81	5	3.76	3.76	3.88	3.88	3.76
4	Desember	3.52	3	3.20	3.80	3.80	3.40	3.40
5	Mei	3.77	16	3.70	3.74	3.81	3.85	3.74
6	Juni	3.81	15	3.84	3.76	3.80	3.80	3.84
7	Agustus	3.82	6	3.80	3.90	3.80	3.80	3.80
8	Oktober	3.60	8	3.63	3.55	3.55	3.55	3.70
9	Januari	3.58	2	3.10	3.40	3.70	4	3.70
10	Februari	3.82	13	3.86	3.77	3.82	3.86	3.82
11	September	3.93	7	3.91	3.91	3.91	3.91	4
12	April	3.64	1	4	3.40	4	3.40	3.40
Nilai Agregat		3.73	124	3.69	3.70	3.78	3.74	3.73

Pada pelaksanaan survei periode Januari s.d Desember 2023, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.73 dalam skala 4 atau 16.32 dalam skala 17.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api telah memperoleh kategori Sangat Baik.

Secara lebih rinci, terdapat 5 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IPK) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api pada periode Januari s.d Desember 2023. Unsur Diskriminasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Kecurangan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Gratifikasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Pungli memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Calo memperoleh kategori Sangat Baik.

2. Hasil II. KUALITAS PELAYANAN - IKM pada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Data Hasil II. KUALITAS PELAYANAN - IKM Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

No.	Bulan	Nilai IKM	Jumlah Responden	Informasi	Persyaratan	Prosedur/Alur	Waktu Penyelesaian	Tarif/Biaya	Sarana Prasarana	Respon	Konsultasi dan Pengaduan
1	Maret	3.60	41	3.60	3.62	3.60	3.60	3.65	3.50	3.60	3.62
2	Juli	3.75	7	3.74	3.66	3.74	3.74	3.83	3.74	3.83	3.74
3	November	3.87	5	3.76	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88
4	Desember	3.63	3	3.80	3.80	3.60	3.60	3.60	3.80	3.40	3.40
5	Mei	3.65	16	3.66	3.63	3.74	3.63	3.63	3.59	3.55	3.78
6	Juni	3.71	15	3.76	3.68	3.64	3.72	3.68	3.68	3.76	3.76
7	Agustus	3.74	6	3.70	3.70	3.80	3.60	3.60	3.90	3.80	3.80
8	Oktober	3.66	8	3.78	3.63	3.85	3.55	3.63	3.55	3.63	3.70
9	Januari	3.10	2	3.40	3.10	3.40	3.40	3.10	2.80	3.10	2.50
10	Februari	3.70	13	3.68	3.77	3.72	3.72	3.68	3.72	3.77	3.54
11	September	3.75	7	3.66	3.83	3.74	3.57	3.83	3.66	3.83	3.91
12	April	3.85	1	4	3.40	4	4	4	4	3.40	4
Nilai Agregat		3.67	124	3.71	3.64	3.73	3.67	3.67	3.65	3.63	3.64

Pada pelaksanaan survei periode Januari s.d Desember 2023, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.67 dalam skala 4 atau 16.04 dalam skala 17.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api telah memperoleh kategori Sangat Baik.

Secara lebih rinci, terdapat 8 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IKM) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api pada periode Januari s.d Desember 2023. Unsur Informasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Persyaratan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Prosedur/Alur memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Waktu Penyelesaian memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Tarif/Biaya memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Sarana Prasarana memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Respon memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Konsultasi dan Pengaduan memperoleh kategori Sangat Baik.

Dengan Perolehan hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN, II. KUALITAS PELAYANAN pada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api tersebut, Unit Kerja/ Satuan Kerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api telah memenuhi syarat nilai minimal pengusulan WBK

3. Aspek Usulan Perbaikan dari Masyarakat dan Indikatornya

Berdasarkan data pada aplikasi Survei 3AS Case Survey Management System (CSMS), terdapat usulan perbaikan yang disampaikan oleh responden, terhadap beberapa aspek indikator penilaian dalam survei yang tergambar dalam diagram berikut:

B. Tindak Lanjut Hasil Survei

No	Indikator	Rekomendasi
1	Informasi pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan nomor help desk yang sigap dalam menjawab kebutuhan informasi pengguna layanan; 2. Menciptakan konten informasi pelayanan yang menarik di media sosial; 3. Memastikan pengumuman tentang informasi pelayanan mudah diakses oleh masyarakat.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan pelayanan dimuat secara lengkap pada informasi pelayanan; 2. Sinkronisasi persyaratan yang dimuat pada website atau pun media sosial lainnya dengan persyaratan yang ada di tempat layanan; 3. Persyaratan yang menyulitkan masyarakat perlu dievaluasi;
3	Prosedur/Alur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pengumuman alur prosedur pada ruang layanan; 2. Petugas menjelaskan prosedur pelayanan kepada pengguna layanan; 3. Melakukan sosialisasi alur pelayanan kepada masyarakat.
4	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pengumuman/standar pelayanan terkait jangka waktu pelayanan pada ruang pelayanan. 2. Petugas/duta layanan menyampaikan jangka waktu layanan 3. Adanya kanal informasi bagi masyarakat untuk memperoleh informasi waktu penyelesaian layanan
5	Tarif Biaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi mengenai tarif terhadap produk layanan dilakukan secara transparan dan masif di lingkungan kantor; 2. Penentuan besaran tarif layanan didasarkan pada biaya produksi dan melalui perhitungan yang wajar bagi pengguna layanan dan apabila memungkinkan didapatkan dari kesepakatan antara pemberi layanan dan pengguna layanan; 3. Publikasi kepada pengguna layanan agar tidak memberikan celah untuk pungutan liar dan melaporkan kepada loket pengaduan dan membayar sesuai tarif yang ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
6	Sarana prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Dasar dalam pelaksanaan pemberian layanan, seperti komputer, jaringan internet, dan sarana pendukung lainnya, serta ruangan pelayanan yang memadai (loket pelayanan, ruang tunggu, toilet dan prasarana lainnya); 2. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung dalam pelaksanaan pemberian layanan disediakan/diadakan selama mempercepat dan mendukung kenyamanan penerima layanan; 3. Kebersihan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dilakukan secara berkala oleh petugas yang berkompeten.
7	Respon petugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kejelasan dan ketepatan waktu dalam memberikan layanan, untuk dapat menciptakan kondisi ini diperlukan standar operasional prosedur dan terinternalisasi kepada seluruh petugas sehingga dapat mengerti kebutuhan masyarakat dan tanggap dalam menangani masalah pelanggan (masyarakat); 2. Petugas Front Office harus dapat bertindak cepat dan cekatan dalam memberikan layanan dan menangani masalah yang dihadapi pelanggan; 3. Petugas diwajibkan untuk memberikan 3S (Senyum, Sapa, Salam) dalam melayani masyarakat, dan menempatkan masyarakat sebagai "orang yang istimewa".
8	Konsultasi dan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya loket/segmen khusus konsultasi dan pengaduan didalam tempat pemberian layanan; 2. Semua jenis konsultasi dan pengaduan yang dilayani dituangkan kedalam sebuah daftar/matriks, sebagai prioritas perbaikan layanan dan peningkatan kualitas layanan; 3. Melakukan telaahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kepada pimpinan terkait konsultasi dan laporan pengaduan yang telah ditindaklanjuti.
9	Diskriminasi pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan SDM Pemberi layanan atas kesadaran pelayanan publik terkait kesetaraan dalam perbedaan;

No	Indikator	Rekomendasi
		2. Menumbuhkan semangat dan jiwa nasionalisme; 3. Menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada.
10	Pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan	1. Menerapkan nomor antrian secara transparan; 2. Melakukan validasi nomor antrian dengan produk layanan; 3. Penempatan pengawas petugas pemberi layanan.
11	Penerimaan Imbalan uang/barang/fasilitas di luar ketentuan	1. Memberikan penguatan/ pelatihan SDM khususnya Petugas Pelayanan tentang Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan Gratifikasi; 2. Menyediakan nomor telepon pengaduan dan email aktif serta mengoptimalkan lagi sistem Whistleblowing apabila menemukan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan; 3. Memasang banner/ spanduk dan infografis di media sosial yang menjelaskan bahwa Unit Layanan tidak meminta/ tidak menerima segala bentuk biaya diluar ketentuan serta mencantumkan nomor telepon aduan apabila menemukan hal tersebut.
12	Pungutan liar	1. Mengoptimalkan penggunaan teknologi dan informasi dimulai dari awal prosedur hingga akhir prosedur pelayanan; 2. Terdapat kejelasan seluruh biaya pelayanan beserta dasar hukumnya; 3. Memasang banner/ spanduk dan infografis di media sosial yang menjelaskan bahwa Unit Layanan tidak meminta/ tidak menerima segala bentuk biaya diluar ketentuan serta mencantumkan nomor telepon aduan apabila menemukan hal tersebut.
13	Percaloan/perantara	1. Memberikan sosialisasi tentang kemudahan layanan publik kepada masyarakat sehingga masyarakat akan lebih paham dan tidak mengandalkan orang ketiga (calo); 2. Mengidentifikasi area yang berpotensi terhadap percaloan; 3. Mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi untuk mengurangi frekuensi tatap muka antara petugas dengan masyarakat

Variabel	Indek	Indek 100	Indek 4	Predikat
Informasi	16.24	92.79	3.71	Sangat Baik
Persyaratan	15.93	91.01	3.64	Sangat Baik
Prosedur/Alur	16.30	93.17	3.73	Sangat Baik
Waktu Penyelesaian	16.05	91.70	3.67	Sangat Baik
Tarif/Biaya	16.08	91.86	3.67	Sangat Baik
Sarana Prasarana	15.98	91.30	3.65	Sangat Baik
Respon	15.88	90.72	3.63	Sangat Baik
Konsultasi dan Pengaduan	15.91	90.90	3.64	Sangat Baik
IKM	16.04	91.68	3.67	Sangat Baik

2. Penggunaan Perangkat

Personal Computer : 55
Samsung : 14
Android : 40
Apple iPhone : 15

3. Penggunaan Peramban (*Browser*) Perangkat

Firefox : 3
Safari : 16
Chrome : 105

4. Penggunaan (*Platform Operating System*)

Android	: 54
Mac OS X	: 2
Windows 10	: 53
iOS	: 15

**DIREKTORAT PRASARANA
PERKERETAAPIAN**

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN

BAB I

KUESIONER SURVEI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, serta menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu sub aksi pada sektor penegakan agraria dan tata ruang dan Reformasi Birokrasi adalah pembangunan Zona Integritas (ZI). Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan pegawainya berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) khususnya dalam penegakan integritas dan pelayanan yang berkualitas.

Ketentuan terkait pembangunan Zona Integritas diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah yang setiap pimpinan instansi pemerintah diminta untuk menetapkan unit kerja yang diusulkan meraih predikat WBK/WBBM.

Proses Pembangunan Zona Integritas difokuskan pada enam area perubahan yang salah satunya adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang ditandai dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu dilakukan penilaian kepuasan terhadap pelayanan oleh masing-masing Unit Kerja yang disebut dengan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.1 Pengukuran tersebut dilakukan dengan melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) serta Integritas di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) . Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau handphone masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui <https://skm.dephub.go.id/>.

Kuesioner yang tersedia dalam Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) mengandung setiap unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan peraturan sebagaimana dimaksud, meliputi:

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
3. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman;
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Instrumen yang digunakan dalam Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) diadopsi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023. Terdapat 14 pertanyaan yang terdiri dari 9 (sembilan) pertanyaan tentang persepsi kualitas layanan dan 5 (lima) pertanyaan tentang persepsi anti korupsi yang secara lengkap dapat dilihat pada Kuesioner berikut:

Kuesioner Survei IKM – IPK

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, n Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melakukan survei pelayanan publik. Mohon kesediaan untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan penilaian yang Bapak/Ibu/Saudara alami selama menggunakan layanan pada

Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Harap jawab setiap pertanyaan sejujur mungkin. Semua jawaban dirahasiakan.

Terima kasih atas kerja sama anda.

I. KUALITAS LAYANAN

Pada bagian ini, kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait kualitas pemberian pelayanan pada unit layanan ini

1. Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sistem informasi pelayanan selalu tersedia dan dapat menjawab kebutuhan pengguna layanan, sistem informasi pelayanan mudah digunakan, serta sistem informasi pelayanan memiliki fasilitas interaktif dan FAQ.]



2. Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi persyaratan layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan persyaratan pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



3. Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi prosedur/alur layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan prosedur/alur pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



4. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi jangka waktu penyelesaian pelayanan dapat dipahami dengan jelas, jangka waktu penyelesaian pelayanan tersebut wajar, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



5. Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi biaya pelayanan dapat dipahami dengan jelas dan biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan yang diinformasikan, termasuk apabila biaya pelayanan diinformasikan gratis memang benar tidak dilakukan pembayaran.]



6. Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan

[Pertanyaan ini disampaikan untuk melihat apakah unit layanan memiliki sarana prasarana pendukung pelayanan seperti ruang khusus pelayanan, ruang tunggu, tempat parkir gratis, ruang bermain anak, ruang ibadah, toilet khusus pengguna layanan dan sarana bagi yang berkebutuhan khusus.]



7. Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah petugas mampu memberikan respon pelayanan dengan cepat kepada pengguna layanan baik melalui tatap muka langsung, maupun melalui aplikasi layanan daring, petugas mudah dikenali (memakai seragam, tanda pengenal, dll), petugas melayani dengan ramah (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun)]



8. Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sarana layanan konsultasi dan pengaduan beragam (tempat konsultasi dan pengaduan/hotline/call center/media online), prosedur untuk melakukan konsultasi dan pengaduan mudah, respon konsultasi dan pengaduan cepat serta tindak lanjut proses penanganan konsultasi dan pengaduan jelas.]



II. PERILAKU PENYIMPANGAN

Pada bagian ini, kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait perilaku petugas pelayanan yang menyimpang pada unit layanan ini.

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya.]



2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.]



3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transpor, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan.]



4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (Pungli bisa dikamouflasekan melalui berbagai istilah seperti “uang administrasi”, “uang rokok”, “uang terima kasih”, dsb).]



5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada praktik percaloan (Pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai).]



III. EVALUASI DAN PERBAIKAN

1. Sebelum menjawab survei ini, apakah ada pegawai/pejabat pada unit layanan ini yang mengarahkan Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban yang bagus-bagus/baik-baik saja?

Pengarahan Petugas/ Pegawai

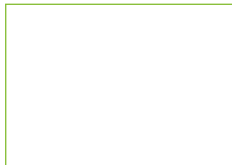
- Ya
 Tidak

2. Bagaimana penilaian Bapak/ Ibu terhadap pilihan dibawah ini yang perlu diperbaiki pada unit layanan ini

[Silahkan pilih bagian yang perlu diperbaiki pada unit layanan ini. Jawaban bisa dipilih lebih dari 1 (satu)]

- Kebijakan Pelayanan
 Profesionalisme SDM
 Kualitas Sarana Prasarana
 Sistem Informasi dan Pelayanan Publik
 Konsultasi dan Pengaduan
 Penghilangan Praktik Pungli
 Penghilangan Praktik Diluar Prosedur
 Penghilangan Praktik Percaloan
 Tidak ada yang perlu diperbaiki

Tanda Tangan



BAB II

METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara real time dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS). Penggunaan aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) sebagai tools pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) diharapkan dapat menganalisis data kualitatif secara langsung sehingga perbaikan atas pelayanan publik yang menjadi keluhan di tengah masyarakat dapat ditanggulangi dengan cepat dan tepat.

Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan di seluruh satuan kerja Kementerian Perhubungan baik di tingkat pusat maupun daerah secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau handphone masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui <https://skm.dephub.go.id/>.

Responden SPAK dan SPKP adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan. Dalam pelaksanaan survei, ditentukan sampel jumlah responden berdasarkan populasi pengguna layanan setiap bulannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, mensyaratkan responden minimal survei berjumlah 30 responden. Apabila penerima layanan dari Unit Kerja kurang dari 30 orang karena memang karakter Unit Kerja yang bukan pelayanan publik, maka tim melaksanakan survei akan menentukan dengan jumlah tertentu sesuai kaidah perhitungan statistik. Jumlah minimal responden SPAK dan SPKP setiap Unit Kerja ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah perhitungan statistik, yakni mengacu pada populasi pengguna layanan dalam satu bulan.

- Contoh perhitungan menggunakan Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = Jumlah sample (responden)

N = Jumlah Populasi (Pengguna layanan Satu Bulan)

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sample yang masih dapat ditolerir (contoh 5%)

Jika dalam satu bulan terdapat 150 pengguna layanan dan margin kesalahan yang ditentukan adalah 5% atau 0,05, maka perhitungannya adalah:

$$n = N / \{1 + (N \times e^2)\}$$

$$n = 150 / \{1 + (150 \times 0,05^2)\}$$

$$n = 109,09$$

Dengan demikian, ukuran responden minimal dari populasi 150 pengguna layanan adalah sebanyak 109 responden.

- Untuk memudahkan perhitungan dapat pula menggunakan tabel sample dari Krejcie and Morgan (Permenpan-RB No 14 Tahun 2017):

Tabel Sampel Morgan dan Krejcie

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	340	181	2600	331
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	100000	384

- a. Responden SPAK-SPKP Unit Utama Kementerian Perhubungan Manusia adalah : Pengguna Layanan di Unit Utama Kementerian Perhubungan.
- b. Responden SPAK-SPKP Kantor Wilayah
- c. Responden SPAK-SPKP Kantor Pertanian

B. Metode Pencacahan

Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan secara mandiri oleh unit pemberi layanan, baik di tingkat Unit Utama, Kantor Wilayah, maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pengisian SKM dilakukan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan atau penerima layanan dilakukan melalui Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS), dengan cara melakukan scan barcode pada unit pemberi layanan atau dengan cara mengakses link survei yang diberikan oleh petugas layanan.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Untuk memperoleh nilai hasil survei dilakukan perhitungan otomatis oleh sistem yang terdapat dalam aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS), dengan berpedoman pada PermenPAN-RB Nomor 14 tahun 2017. Dalam aturan tersebut digunakan pendekatan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan, dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian, yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus “Hasil SKM Unit Pelayanan x 25”. Dengan demikian, nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, dan mutu serta kinerja unit pelayanan digambarkan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

D. Pengolahan Data

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

<u>Bobot nilai rata-rata tertimbang</u> =	<u>Jumlah Bobot</u>	=	<u>1</u>	= 0,07
	<u>Jumlah Unsur</u>		<u>1</u>	
			<u>3</u>	

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

<u>SKM</u> =	<u>Total dari nilai persepsi per unsur</u>	x	<u>Nilai Penimbang</u>
	<u>Tota Unsur yang terisi</u>		

BAB III

PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

1. Hasil II. KUALITAS PELAYANAN - IKM pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Data Hasil II. KUALITAS PELAYANAN - IKM Direktorat Prasarana Perkeretaapian

No.	Bulan	Nilai IKM	Jumlah Responden	Informasi	Persyaratan	Prosedur/Alur	Waktu Penyelesaian	Tarif/Biaya	Sarana Prasarana	Respon	Konsultasi dan Pengaduan
1	Maret	3.66	45	3.64	3.72	3.67	3.63	3.71	3.69	3.64	3.59
2	Juli	3.70	22	3.65	3.67	3.67	3.70	3.73	3.73	3.73	3.70
3	November	3.65	66	3.66	3.67	3.66	3.62	3.62	3.66	3.65	3.67
4	Desember	3.76	10	3.82	3.76	3.76	3.82	3.64	3.70	3.76	3.82
5	Mei	3.57	18	3.60	3.60	3.53	3.50	3.63	3.57	3.53	3.57
6	Juni	3.71	6	3.70	3.70	3.70	3.70	3.80	3.70	3.70	3.70
7	Agustus	3.83	13	3.86	3.86	3.82	3.77	3.91	3.86	3.82	3.77
8	Oktober	3.74	23	3.77	3.71	3.69	3.71	3.79	3.71	3.77	3.77
9	Januari	3.75	22	3.75	3.75	3.75	3.75	3.78	3.73	3.73	3.78
10	Februari	3.72	12	3.70	3.70	3.65	3.70	3.75	3.75	3.75	3.75
11	September	3.65	18	3.63	3.70	3.60	3.57	3.80	3.60	3.63	3.63
12	April	3.81	10	3.82	3.82	3.82	3.82	3.76	3.82	3.76	3.82
Nilai Agregat		3.71	265	3.72	3.72	3.69	3.69	3.74	3.71	3.70	3.71

Pada pelaksanaan survei periode Januari s.d Desember 2023, Direktorat Prasarana Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.71 dalam skala 4 atau 16.24 dalam skala 17.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah memperoleh kategori Sangat Baik.

Secara lebih rinci, terdapat 8 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IKM) Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada periode Januari s.d Desember 2023. Unsur Informasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Persyaratan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Prosedur/Alur memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Waktu Penyelesaian memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Tarif/Biaya memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Sarana Prasarana memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Respon memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Konsultasi dan Pengaduan memperoleh kategori Sangat Baik.

2. Hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Data Hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK Direktorat Prasarana Perkeretaapian

No.	Bulan	Nilai IPK	Jumlah Responden	Diskriminasi	Kecurangan	Gratifikasi	Pungli	Calo
1	Maret	3.76	45	3.71	3.79	3.76	3.77	3.76
2	Juli	3.71	22	3.73	3.78	3.56	3.70	3.75
3	November	3.68	66	3.71	3.66	3.69	3.65	3.69
4	Desember	3.96	10	3.94	3.94	4	3.94	4
5	Mei	3.67	18	3.60	3.70	3.63	3.70	3.70
6	Juni	3.82	6	3.80	3.90	3.80	3.80	3.80
7	Agustus	3.88	13	3.95	3.86	3.86	3.86	3.86
8	Oktober	3.89	23	3.87	3.84	3.90	3.90	3.92
9	Januari	3.81	22	3.81	3.75	3.86	3.81	3.84
10	Februari	3.77	12	3.80	3.75	3.75	3.80	3.75
11	September	3.83	18	3.80	3.83	3.80	3.80	3.90
12	April	3.89	10	3.82	3.88	3.88	3.94	3.94
Nilai Agregat		3.81	265	3.79	3.81	3.79	3.81	3.83

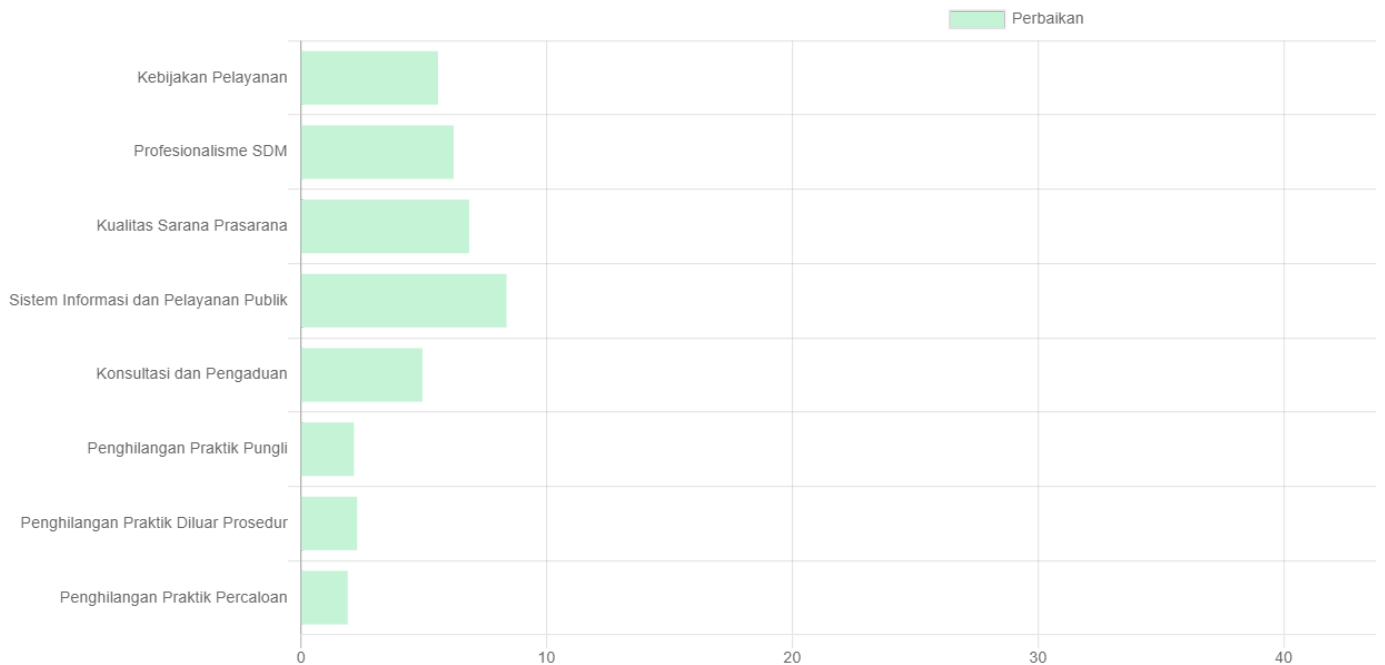
Pada pelaksanaan survei periode Januari s.d Desember 2023, Direktorat Prasarana Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.81 dalam skala 4 atau 16.65 dalam skala 17.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah memperoleh kategori Sangat Baik.

Secara lebih rinci, terdapat 5 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IPK) Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada periode Januari s.d Desember 2023. Unsur Diskriminasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Kecurangan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Gratifikasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Pungli memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Calo memperoleh kategori Sangat Baik.

Dengan Perolehan hasil II. KUALITAS PELAYANAN, III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian tersebut, Unit Kerja/ Satuan Kerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah memenuhi syarat nilai minimal pengusulan WBK

3. Aspek Usulan Perbaikan dari Masyarakat dan Indikatornya

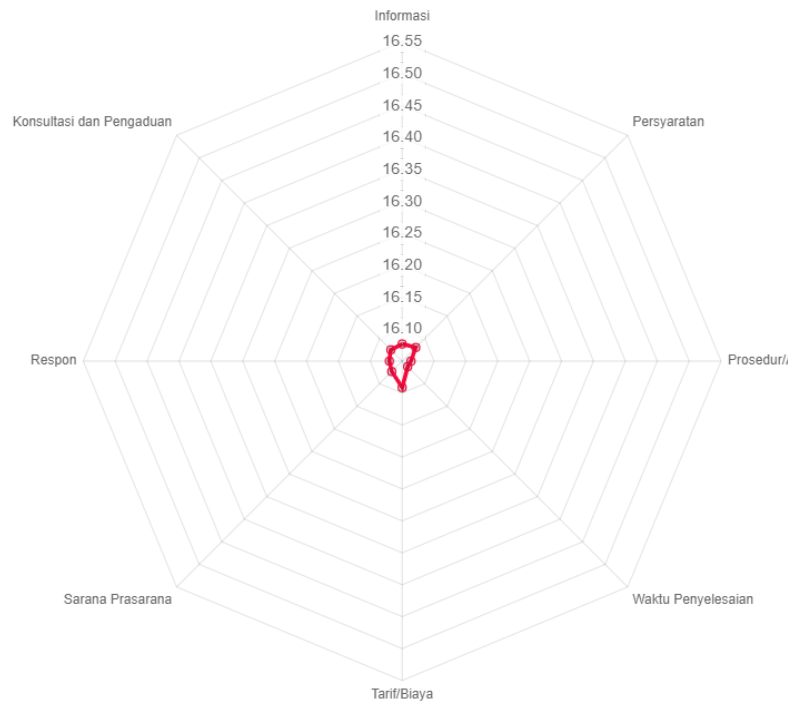
Berdasarkan data pada aplikasi Survei 3AS Case Survey Management System (CSMS), terdapat usulan perbaikan yang disampaikan oleh responden, terhadap beberapa aspek indikator penilaian dalam survei yang tergambar dalam diagram berikut:



B. Tindak Lanjut Hasil Survei

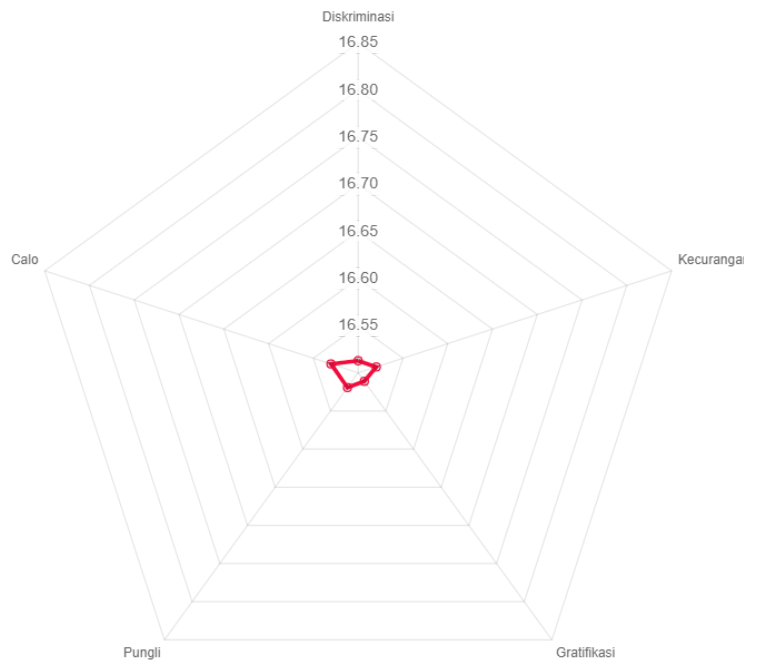
No	Indikator	Rekomendasi
1	Informasi pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan nomor help desk yang sigap dalam menjawab kebutuhan informasi pengguna layanan; 2. Menciptakan konten informasi pelayanan yang menarik di media sosial; 3. Memastikan pengumuman tentang informasi pelayanan mudah diakses oleh masyarakat.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan pelayanan dimuat secara lengkap pada informasi pelayanan; 2. Sinkronisasi persyaratan yang dimuat pada website atau pun media sosial lainnya dengan persyaratan yang ada di tempat layanan; 3. Persyaratan yang menyulitkan masyarakat perlu dievaluasi;
3	Prosedur/Alur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pengumuman alur prosedur pada ruang layanan; 2. Petugas menjelaskan prosedur pelayanan kepada pengguna layanan; 3. Melakukan sosialisasi alur pelayanan kepada masyarakat.
4	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pengumuman/standar pelayanan terkait jangka waktu pelayanan pada ruang pelayanan. 2. Petugas/duta layanan menyampaikan jangka waktu layanan 3. Adanya kanal informasi bagi masyarakat untuk memperoleh informasi waktu penyelesaian layanan
5	Tarif Biaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi mengenai tarif terhadap produk layanan dilakukan secara transparan dan masif di lingkungan kantor; 2. Penentuan besaran tarif layanan didasarkan pada biaya produksi dan melalui perhitungan yang wajar bagi pengguna layanan dan apabila memungkinkan didapatkan dari kesepakatan antara pemberi layanan dan pengguna layanan; 3. Publikasi kepada pengguna layanan agar tidak memberikan celah untuk pungutan liar dan melaporkan kepada loket pengaduan dan membayar sesuai tarif yang ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
6	Sarana prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Dasar dalam pelaksanaan pemberian layanan, seperti komputer, jaringan internet, dan sarana pendukung lainnya, serta ruangan pelayanan yang memadai (loket pelayanan, ruang tunggu, toilet dan prasarana lainnya); 2. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung dalam pelaksanaan pemberian layanan disediakan/diadakan selama mempercepat dan mendukung kenyamanan penerima layanan; 3. Kebersihan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dilakukan secara berkala oleh petugas yang berkompeten.
7	Respon petugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kejelasan dan ketepatan waktu dalam memberikan layanan, untuk dapat menciptakan kondisi ini diperlukan standar operasional prosedur dan terinternalisasi kepada seluruh petugas sehingga dapat mengerti kebutuhan masyarakat dan tanggap dalam menangani masalah pelanggan (masyarakat); 2. Petugas Front Office harus dapat bertindak cepat dan cekatan dalam memberikan layanan dan menangani masalah yang dihadapi pelanggan; 3. Petugas diwajibkan untuk memberikan 3S (Senyum, Sapa, Salam) dalam melayani masyarakat, dan menempatkan masyarakat sebagai "orang yang istimewa".
8	Konsultasi dan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya loket/segmen khusus konsultasi dan pengaduan didalam tempat pemberian layanan; 2. Semua jenis konsultasi dan pengaduan yang dilayani dituangkan kedalam sebuah daftar/matriks, sebagai prioritas perbaikan layanan dan peningkatan kualitas layanan; 3. Melakukan telaahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kepada pimpinan terkait konsultasi dan laporan pengaduan yang telah ditindaklanjuti.
9	Diskriminasi pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan SDM Pemberi layanan atas kesadaran pelayanan publik terkait kesetaraan dalam perbedaan;

No	Indikator	Rekomendasi
		2. Menumbuhkan semangat dan jiwa nasionalisme; 3. Menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada.
10	Pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan	1. Menerapkan nomor antrian secara transparan; 2. Melakukan validasi nomor antrian dengan produk layanan; 3. Penempatan pengawas petugas pemberi layanan.
11	Penerimaan Imbalan uang/barang/fasilitas di luar ketentuan	1. Memberikan penguatan/ pelatihan SDM khususnya Petugas Pelayanan tentang Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan Gratifikasi; 2. Menyediakan nomor telepon pengaduan dan email aktif serta mengoptimalkan lagi sistem Whistleblowing apabila menemukan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan; 3. Memasang banner/ spanduk dan infografis di media sosial yang menjelaskan bahwa Unit Layanan tidak meminta/ tidak menerima segala bentuk biaya diluar ketentuan serta mencantumkan nomor telepon aduan apabila menemukan hal tersebut.
12	Pungutan liar	1. Mengoptimalkan penggunaan teknologi dan informasi dimulai dari awal prosedur hingga akhir prosedur pelayanan; 2. Terdapat kejelasan seluruh biaya pelayanan beserta dasar hukumnya; 3. Memasang banner/ spanduk dan infografis di media sosial yang menjelaskan bahwa Unit Layanan tidak meminta/ tidak menerima segala bentuk biaya diluar ketentuan serta mencantumkan nomor telepon aduan apabila menemukan hal tersebut.
13	Percaloan/perantara	1. Memberikan sosialisasi tentang kemudahan layanan publik kepada masyarakat sehingga masyarakat akan lebih paham dan tidak mengandalkan orang ketiga (calo); 2. Mengidentifikasi area yang berpotensi terhadap percaloan; 3. Mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi untuk mengurangi frekuensi tatap muka antara petugas dengan masyarakat



III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK

Variabel	Indek	Indek 100	Indek 4	Predikat
Diskriminasi	16.60	94.87	3.79	Sangat Baik
Kecurangan	16.66	95.20	3.81	Sangat Baik
Gratifikasi	16.59	94.79	3.79	Sangat Baik
Pungli	16.65	95.15	3.81	Sangat Baik
Calo	16.74	95.66	3.83	Sangat Baik
IPK	16.65	95.13	3.81	Sangat Baik



2. Penggunaan Perangkat

Personal Computer Samsung Android Apple iPhone



Personal Computer : 88
Samsung : 22
Android : 115
Apple iPhone : 40

3. Penggunaan Peramban (*Browser*) Perangkat

Firefox Safari Opera Chrome



Firefox : 11
Safari : 40
Opera : 2
Chrome : 212

4. Penggunaan (*Platform Operating System*)

Android Mac OS X Windows 10 iOS



Android : 137
Mac OS X : 2
Windows 10 : 86
iOS : 40

**DIREKTORAT SARANA
PERKERETAAPIAN**

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN

BAB I

KUESIONER SURVEI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, serta menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu sub aksi pada sektor penegakan agraria dan tata ruang dan Reformasi Birokrasi adalah pembangunan Zona Integritas (ZI). Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan pegawainya berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) khususnya dalam penegakan integritas dan pelayanan yang berkualitas.

Ketentuan terkait pembangunan Zona Integritas diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah yang setiap pimpinan instansi pemerintah diminta untuk menetapkan unit kerja yang diusulkan meraih predikat WBK/WBBM.

Proses Pembangunan Zona Integritas difokuskan pada enam area perubahan yang salah satunya adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang ditandai dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu dilakukan penilaian kepuasan terhadap pelayanan oleh masing-masing Unit Kerja yang disebut dengan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.1 Pengukuran tersebut dilakukan dengan melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) serta Integritas di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) . Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau handphone masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui <https://skm.dephub.go.id/>.

Kuesioner yang tersedia dalam Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) mengandung setiap unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan peraturan sebagaimana dimaksud, meliputi:

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
3. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman;
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Instrumen yang digunakan dalam Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) diadopsi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023. Terdapat 14 pertanyaan yang terdiri dari 9 (sembilan) pertanyaan tentang persepsi kualitas layanan dan 5 (lima) pertanyaan tentang persepsi anti korupsi yang secara lengkap dapat dilihat pada Kuesioner berikut:

Kuesioner Survei IKM – IPK

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, n Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melakukan survei pelayanan publik. Mohon kesediaan untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan penilaian yang Bapak/Ibu/Saudara alami selama menggunakan layanan pada

Direktorat Sarana Perkeretaapian

Harap jawab setiap pertanyaan sejujur mungkin. Semua jawaban dirahasiakan.

Terima kasih atas kerja sama anda.

I. KUALITAS LAYANAN

Pada bagian ini, kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait kualitas pemberian pelayanan pada unit layanan ini

1. Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sistem informasi pelayanan selalu tersedia dan dapat menjawab kebutuhan pengguna layanan, sistem informasi pelayanan mudah digunakan, serta sistem informasi pelayanan memiliki fasilitas interaktif dan FAQ.]



2. Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi persyaratan layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan persyaratan pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



3. Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi prosedur/alur layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan prosedur/alur pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



4. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi jangka waktu penyelesaian pelayanan dapat dipahami dengan jelas, jangka waktu penyelesaian pelayanan tersebut wajar, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



5. Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi biaya pelayanan dapat dipahami dengan jelas dan biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan yang diinformasikan, termasuk apabila biaya pelayanan diinformasikan gratis memang benar tidak dilakukan pembayaran.]



6. Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan

[Pertanyaan ini disampaikan untuk melihat apakah unit layanan memiliki sarana prasarana pendukung pelayanan seperti ruang khusus pelayanan, ruang tunggu, tempat parkir gratis, ruang bermain anak, ruang ibadah, toilet khusus pengguna layanan dan sarana bagi yang berkebutuhan khusus.]



7. Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah petugas mampu memberikan respon pelayanan dengan cepat kepada pengguna layanan baik melalui tatap muka langsung, maupun melalui aplikasi layanan daring, petugas mudah dikenali (memakai seragam, tanda pengenal, dll), petugas melayani dengan ramah (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun)]



8. Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sarana layanan konsultasi dan pengaduan beragam (tempat konsultasi dan pengaduan/hotline/call center/media online), prosedur untuk melakukan konsultasi dan pengaduan mudah, respon konsultasi dan pengaduan cepat serta tindak lanjut proses penanganan konsultasi dan pengaduan jelas.]



II. PERILAKU PENYIMPANGAN

Pada bagian ini, kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait perilaku petugas pelayanan yang menyimpang pada unit layanan ini.

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya.]



2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.]



3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transpor, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan.]



4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (Pungli bisa dikamufleskan melalui berbagai istilah seperti “uang administrasi”, “uang rokok”, “uang terima kasih”, dsb).]



5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada praktik percaloan (Pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai).]



III. EVALUASI DAN PERBAIKAN

1. Sebelum menjawab survei ini, apakah ada pegawai/pejabat pada unit layanan ini yang mengarahkan Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban yang bagus-bagus/baik-baik saja?

Pengarahan Petugas/ Pegawai

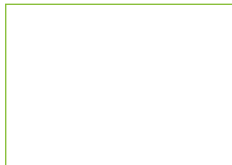
- Ya
 Tidak

2. Bagaimana penilaian Bapak/ Ibu terhadap pilihan dibawah ini yang perlu diperbaiki pada unit layanan ini

[Silahkan pilih bagian yang perlu diperbaiki pada unit layanan ini. Jawaban bisa dipilih lebih dari 1 (satu)]

- Kebijakan Pelayanan
 Profesionalisme SDM
 Kualitas Sarana Prasarana
 Sistem Informasi dan Pelayanan Publik
 Konsultasi dan Pengaduan
 Penghilangan Praktik Pungli
 Penghilangan Praktik Diluar Prosedur
 Penghilangan Praktik Percaloan
 Tidak ada yang perlu diperbaiki

Tanda Tangan



BAB II

METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara real time dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS). Penggunaan aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) sebagai tools pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) diharapkan dapat menganalisis data kualitatif secara langsung sehingga perbaikan atas pelayanan publik yang menjadi keluhan di tengah masyarakat dapat ditanggulangi dengan cepat dan tepat.

Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan di seluruh satuan kerja Kementerian Perhubungan baik di tingkat pusat maupun daerah secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau handphone masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui <https://skm.dephub.go.id/>.

Responden SPAK dan SPKP adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan. Dalam pelaksanaan survei, ditentukan sampel jumlah responden berdasarkan populasi pengguna layanan setiap bulannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, mensyaratkan responden minimal survei berjumlah 30 responden. Apabila penerima layanan dari Unit Kerja kurang dari 30 orang karena memang karakter Unit Kerja yang bukan pelayanan publik, maka tim melaksanakan survei akan menentukan dengan jumlah tertentu sesuai kaidah perhitungan statistik. Jumlah minimal responden SPAK dan SPKP setiap Unit Kerja ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah perhitungan statistik, yakni mengacu pada populasi pengguna layanan dalam satu bulan.

- Contoh perhitungan menggunakan Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = Jumlah sample (responden)

N = Jumlah Populasi (Pengguna layanan Satu Bulan)

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sample yang masih dapat ditolerir (contoh 5%)

Jika dalam satu bulan terdapat 150 pengguna layanan dan margin kesalahan yang ditentukan adalah 5% atau 0,05, maka perhitungannya adalah:

$$n = N / \{1 + (N \times e^2)\}$$

$$n = 150 / \{1 + (150 \times 0,05^2)\}$$

$$n = 109,09$$

Dengan demikian, ukuran responden minimal dari populasi 150 pengguna layanan adalah sebanyak 109 responden.

- Untuk memudahkan perhitungan dapat pula menggunakan tabel sample dari Krejcie and Morgan (Permenpan-RB No 14 Tahun 2017):

Tabel Sampel Morgan dan Krejcie

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	340	181	2600	331
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	100000	384

- a. Responden SPAK-SPKP Unit Utama Kementerian Perhubungan Manusia adalah : Pengguna Layanan di Unit Utama Kementerian Perhubungan.
- b. Responden SPAK-SPKP Kantor Wilayah
- c. Responden SPAK-SPKP Kantor Pertanian

B. Metode Pencacahan

Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan secara mandiri oleh unit pemberi layanan, baik di tingkat Unit Utama, Kantor Wilayah, maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pengisian SKM dilakukan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan atau penerima layanan dilakukan melalui Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS), dengan cara melakukan scan barcode pada unit pemberi layanan atau dengan cara mengakses link survei yang diberikan oleh petugas layanan.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Untuk memperoleh nilai hasil survei dilakukan perhitungan otomatis oleh sistem yang terdapat dalam aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS), dengan berpedoman pada PermenPAN-RB Nomor 14 tahun 2017. Dalam aturan tersebut digunakan pendekatan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan, dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian, yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus “Hasil SKM Unit Pelayanan x 25”. Dengan demikian, nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, dan mutu serta kinerja unit pelayanan digambarkan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

D. Pengolahan Data

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

<u>Bobot nilai rata-rata tertimbang</u> =	<u>Jumlah Bobot</u>	=	<u>1</u>	= 0,07
	<u>Jumlah Unsur</u>		<u>1</u>	
			<u>3</u>	

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

<u>SKM</u> =	<u>Total dari nilai persepsi per unsur</u>	x	<u>Nilai Penimbang</u>
	<u>Tota Unsur yang terisi</u>		

BAB III

PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

1. Hasil II. KUALITAS PELAYANAN - IKM pada Direktorat Sarana Perkeretaapian

Data Hasil II. KUALITAS PELAYANAN - IKM Direktorat Sarana Perkeretaapian

No.	Bulan	Nilai IKM	Jumlah Responden	Informasi	Persyaratan	Prosedur/Alur	Waktu Penyelesaian	Tarif/Biaya	Sarana Prasarana	Respon	Konsultasi dan Pengaduan
1	Maret	3.90	7	3.91	3.91	4	3.83	3.83	3.74	4	4
2	Juli	3.60	3	3.60	3.60	3.60	3.80	3.60	3.60	3.60	3.40
3	November	3.72	5	3.64	3.64	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.64
4	Desember	3.70	3	3.60	3.60	3.80	3.60	3.80	3.80	3.80	3.60
5	Mei	3.64	8	3.63	3.63	3.78	3.55	3.70	3.63	3.63	3.63
6	Juni	3.75	3	3.60	3.80	3.80	3.60	3.80	3.80	3.80	3.80
7	Agustus	3.59	6	3.60	3.60	3.50	3.50	3.70	3.50	3.60	3.70
8	Oktober	3.67	5	3.64	3.64	3.52	3.52	4	3.64	3.64	3.76
9	Januari	3.54	7	3.49	3.49	3.66	3.40	3.66	3.57	3.49	3.57
10	Februari	3.72	10	3.76	3.82	3.70	3.76	3.70	3.64	3.64	3.70
11	September	3.68	3	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.80	3.80	3.80
12	April	3.63	1	4	3.40	3.40	3.40	4	4	3.40	3.40
Nilai Agregat		3.68	61	3.67	3.64	3.68	3.61	3.76	3.71	3.68	3.67

Pada pelaksanaan survei periode Januari s.d Desember 2023, Direktorat Sarana Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.68 dalam skala 4 atau 16.09 dalam skala 17.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian telah memperoleh kategori Sangat Baik.

Secara lebih rinci, terdapat 8 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IKM) Direktorat Sarana Perkeretaapian pada periode Januari s.d Desember 2023. Unsur Informasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Persyaratan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Prosedur/Alur memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Waktu Penyelesaian memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Tarif/Biaya memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Sarana Prasarana memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Respon memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Konsultasi dan Pengaduan memperoleh kategori Sangat Baik.

2. Hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK pada Direktorat Sarana Perkeretaapian

Data Hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK Direktorat Sarana Perkeretaapian

No.	Bulan	Nilai IPK	Jumlah Responden	Diskriminasi	Kecurangan	Gratifikasi	Pungli	Calo
1	Maret	3.88	7	3.83	3.91	3.91	3.91	3.83
2	Juli	3.60	3	3.80	3.60	3.80	3.40	3.40
3	November	3.50	5	3.64	3.52	3.40	3.52	3.40
4	Desember	3.68	3	3.80	3.60	3.60	3.80	3.60
5	Mei	3.78	8	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78
6	Juni	3.84	3	3.80	3.80	3.80	3.80	4
7	Agustus	3.70	6	3.70	3.80	3.70	3.70	3.60
8	Oktober	3.86	5	3.88	3.76	3.88	3.88	3.88
9	Januari	3.69	7	3.66	3.74	3.66	3.66	3.74
10	Februari	3.87	10	3.88	3.88	3.82	3.88	3.88
11	September	3.92	3	3.80	3.80	4	4	4
12	April	4	1	4	4	4	4	4
Nilai Agregat		3.78	61	3.80	3.77	3.78	3.78	3.76

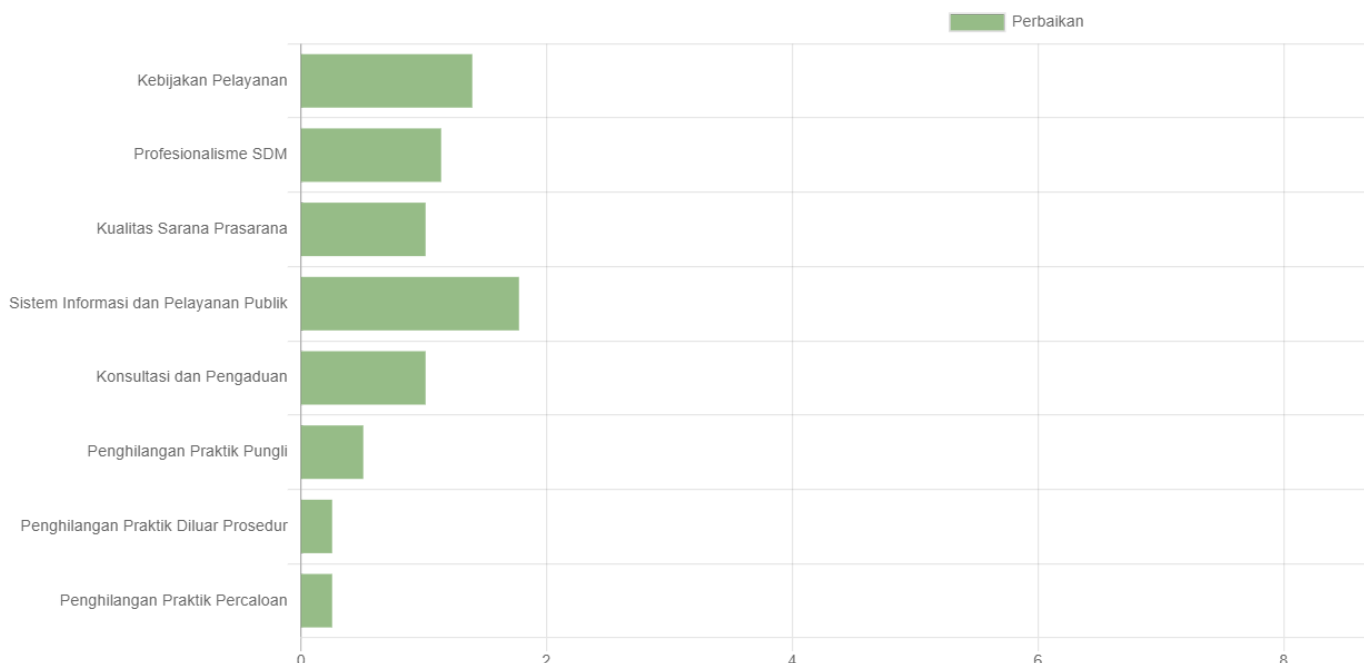
Pada pelaksanaan survei periode Januari s.d Desember 2023, Direktorat Sarana Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.78 dalam skala 4 atau 16.52 dalam skala 17.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian telah memperoleh kategori Sangat Baik.

Secara lebih rinci, terdapat 5 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IPK) Direktorat Sarana Perkeretaapian pada periode Januari s.d Desember 2023. Unsur Diskriminasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Kecurangan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Gratifikasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Pungli memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Calo memperoleh kategori Sangat Baik.

Dengan Perolehan hasil II. KUALITAS PELAYANAN, III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN pada Direktorat Sarana Perkeretaapian tersebut, Unit Kerja/ Satuan Kerja Direktorat Sarana Perkeretaapian telah memenuhi syarat nilai minimal pengusulan WBK

3. Aspek Usulan Perbaikan dari Masyarakat dan Indikatornya

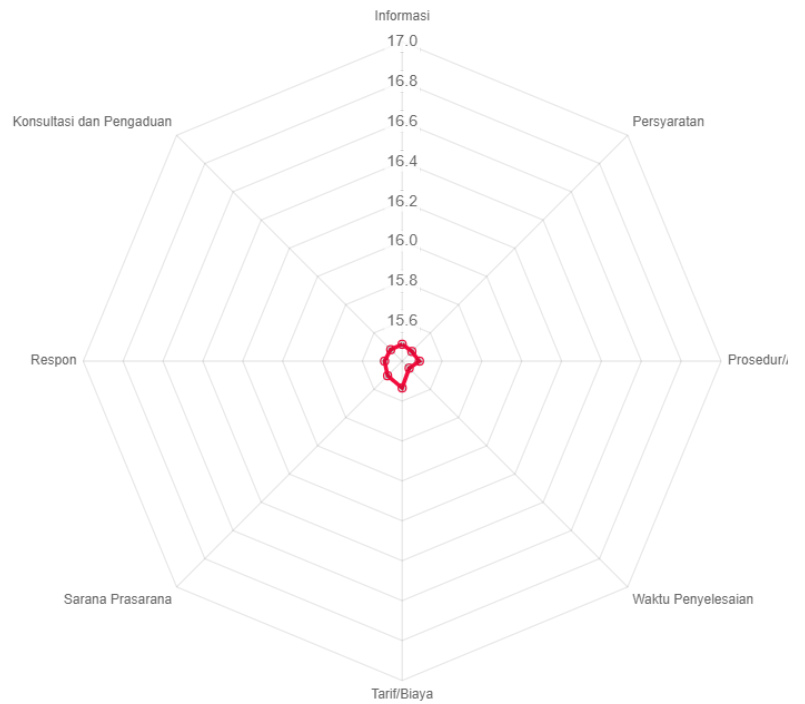
Berdasarkan data pada aplikasi Survei 3AS Case Survey Management System (CSMS), terdapat usulan perbaikan yang disampaikan oleh responden, terhadap beberapa aspek indikator penilaian dalam survei yang tergambar dalam diagram berikut:



B. Tindak Lanjut Hasil Survei

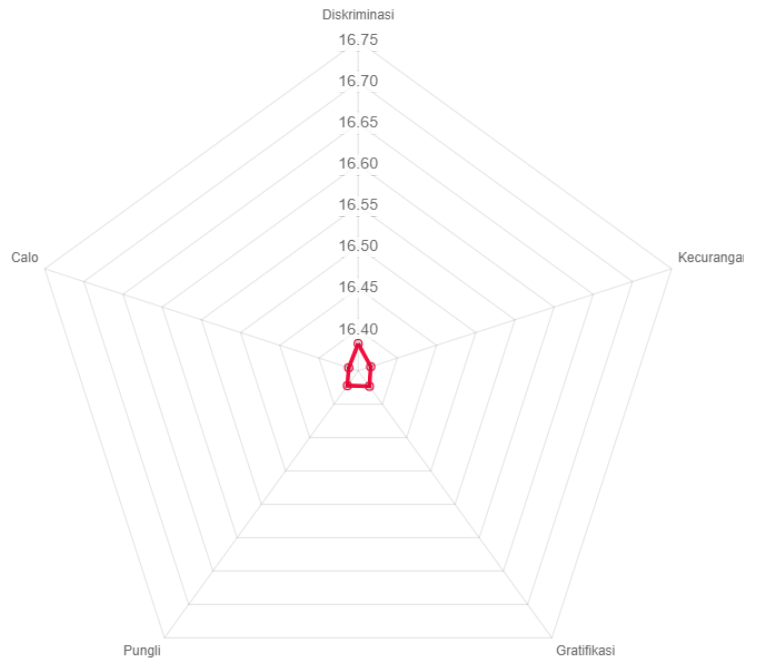
No	Indikator	Rekomendasi
1	Informasi pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan nomor help desk yang sigap dalam menjawab kebutuhan informasi pengguna layanan; 2. Menciptakan konten informasi pelayanan yang menarik di media sosial; 3. Memastikan pengumuman tentang informasi pelayanan mudah diakses oleh masyarakat.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan pelayanan dimuat secara lengkap pada informasi pelayanan; 2. Sinkronisasi persyaratan yang dimuat pada website atau pun media sosial lainnya dengan persyaratan yang ada di tempat layanan; 3. Persyaratan yang menyulitkan masyarakat perlu dievaluasi;
3	Prosedur/Alur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pengumuman alur prosedur pada ruang layanan; 2. Petugas menjelaskan prosedur pelayanan kepada pengguna layanan; 3. Melakukan sosialisasi alur pelayanan kepada masyarakat.
4	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pengumuman/standar pelayanan terkait jangka waktu pelayanan pada ruang pelayanan. 2. Petugas/duta layanan menyampaikan jangka waktu layanan 3. Adanya kanal informasi bagi masyarakat untuk memperoleh informasi waktu penyelesaian layanan
5	Tarif Biaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi mengenai tarif terhadap produk layanan dilakukan secara transparan dan masif di lingkungan kantor; 2. Penentuan besaran tarif layanan didasarkan pada biaya produksi dan melalui perhitungan yang wajar bagi pengguna layanan dan apabila memungkinkan didapatkan dari kesepakatan antara pemberi layanan dan pengguna layanan; 3. Publikasi kepada pengguna layanan agar tidak memberikan celah untuk pungutan liar dan melaporkan kepada loket pengaduan dan membayar sesuai tarif yang ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
6	Sarana prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Dasar dalam pelaksanaan pemberian layanan, seperti komputer, jaringan internet, dan sarana pendukung lainnya, serta ruangan pelayanan yang memadai (loket pelayanan, ruang tunggu, toilet dan prasarana lainnya); 2. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung dalam pelaksanaan pemberian layanan disediakan/diadakan selama mempercepat dan mendukung kenyamanan penerima layanan; 3. Kebersihan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dilakukan secara berkala oleh petugas yang berkompeten.
7	Respon petugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kejelasan dan ketepatan waktu dalam memberikan layanan, untuk dapat menciptakan kondisi ini diperlukan standar operasional prosedur dan terinternalisasi kepada seluruh petugas sehingga dapat mengerti kebutuhan masyarakat dan tanggap dalam menangani masalah pelanggan (masyarakat); 2. Petugas Front Office harus dapat bertindak cepat dan cekatan dalam memberikan layanan dan menangani masalah yang dihadapi pelanggan; 3. Petugas diwajibkan untuk memberikan 3S (Senyum, Sapa, Salam) dalam melayani masyarakat, dan menempatkan masyarakat sebagai "orang yang istimewa".
8	Konsultasi dan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya loket/segmen khusus konsultasi dan pengaduan didalam tempat pemberian layanan; 2. Semua jenis konsultasi dan pengaduan yang dilayani dituangkan kedalam sebuah daftar/matriks, sebagai prioritas perbaikan layanan dan peningkatan kualitas layanan; 3. Melakukan telaahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kepada pimpinan terkait konsultasi dan laporan pengaduan yang telah ditindaklanjuti.
9	Diskriminasi pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan SDM Pemberi layanan atas kesadaran pelayanan publik terkait kesetaraan dalam perbedaan;

No	Indikator	Rekomendasi
		2. Menumbuhkan semangat dan jiwa nasionalisme; 3. Menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada.
10	Pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan	1. Menerapkan nomor antrian secara transparan; 2. Melakukan validasi nomor antrian dengan produk layanan; 3. Penempatan pengawas petugas pemberi layanan.
11	Penerimaan Imbalan uang/barang/fasilitas di luar ketentuan	1. Memberikan penguatan/ pelatihan SDM khususnya Petugas Pelayanan tentang Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan Gratifikasi; 2. Menyediakan nomor telepon pengaduan dan email aktif serta mengoptimalkan lagi sistem Whistleblowing apabila menemukan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan; 3. Memasang banner/ spanduk dan infografis di media sosial yang menjelaskan bahwa Unit Layanan tidak meminta/ tidak menerima segala bentuk biaya diluar ketentuan serta mencantumkan nomor telepon aduan apabila menemukan hal tersebut.
12	Pungutan liar	1. Mengoptimalkan penggunaan teknologi dan informasi dimulai dari awal prosedur hingga akhir prosedur pelayanan; 2. Terdapat kejelasan seluruh biaya pelayanan beserta dasar hukumnya; 3. Memasang banner/ spanduk dan infografis di media sosial yang menjelaskan bahwa Unit Layanan tidak meminta/ tidak menerima segala bentuk biaya diluar ketentuan serta mencantumkan nomor telepon aduan apabila menemukan hal tersebut.
13	Percaloan/perantara	1. Memberikan sosialisasi tentang kemudahan layanan publik kepada masyarakat sehingga masyarakat akan lebih paham dan tidak mengandalkan orang ketiga (calo); 2. Mengidentifikasi area yang berpotensi terhadap percaloan; 3. Mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi untuk mengurangi frekuensi tatap muka antara petugas dengan masyarakat



III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK

Variabel	Indek	Indek 100	Indek 4	Predikat
Diskriminasi	16.61	94.92	3.80	Sangat Baik
Kecurangan	16.48	94.15	3.77	Sangat Baik
Gratifikasi	16.53	94.47	3.78	Sangat Baik
Pungli	16.53	94.43	3.78	Sangat Baik
Calo	16.45	93.97	3.76	Sangat Baik
IPK	16.52	94.39	3.78	Sangat Baik



2. Penggunaan Perangkat

Personal Computer Samsung iPad Android Apple iPhone



Personal Computer : 21
Samsung : 4
iPad : 5
Android : 26
Apple iPhone : 5

3. Penggunaan Peramban (*Browser*) Perangkat

Firefox Safari Chrome



Firefox : 3
Safari : 10
Chrome : 48

4. Penggunaan (*Platform Operating System*)

Android iOS Windows 10



Android : 30
iOS : 10
Windows 10 : 21

**DIREKTORAT KESELAMATAN
PERKERETAAPIAN**

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN

BAB I

KUESIONER SURVEI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, serta menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu sub aksi pada sektor penegakan agraria dan tata ruang dan Reformasi Birokrasi adalah pembangunan Zona Integritas (ZI). Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan pegawainya berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) khususnya dalam penegakan integritas dan pelayanan yang berkualitas.

Ketentuan terkait pembangunan Zona Integritas diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah yang setiap pimpinan instansi pemerintah diminta untuk menetapkan unit kerja yang diusulkan meraih predikat WBK/WBBM.

Proses Pembangunan Zona Integritas difokuskan pada enam area perubahan yang salah satunya adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang ditandai dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu dilakukan penilaian kepuasan terhadap pelayanan oleh masing-masing Unit Kerja yang disebut dengan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.1 Pengukuran tersebut dilakukan dengan melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) serta Integritas di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) . Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau handphone masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui <https://skm.dephub.go.id/>.

Kuesioner yang tersedia dalam Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) mengandung setiap unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan peraturan sebagaimana dimaksud, meliputi:

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
3. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman;
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Instrumen yang digunakan dalam Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) diadopsi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023. Terdapat 14 pertanyaan yang terdiri dari 9 (sembilan) pertanyaan tentang persepsi kualitas layanan dan 5 (lima) pertanyaan tentang persepsi anti korupsi yang secara lengkap dapat dilihat pada Kuesioner berikut:

Kuesioner Survei IKM – IPK

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, n Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melakukan survei pelayanan publik. Mohon kesediaan untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan penilaian yang Bapak/Ibu/Saudara alami selama menggunakan layanan pada

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Harap jawab setiap pertanyaan sejujur mungkin. Semua jawaban dirahasiakan.

Terima kasih atas kerja sama anda.

I. KUALITAS LAYANAN

Pada bagian ini, kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait kualitas pemberian pelayanan pada unit layanan ini

1. Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sistem informasi pelayanan selalu tersedia dan dapat menjawab kebutuhan pengguna layanan, sistem informasi pelayanan mudah digunakan, serta sistem informasi pelayanan memiliki fasilitas interaktif dan FAQ.]



2. Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi persyaratan layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan persyaratan pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



3. Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi prosedur/alur layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan prosedur/alur pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



4. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi jangka waktu penyelesaian pelayanan dapat dipahami dengan jelas, jangka waktu penyelesaian pelayanan tersebut wajar, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



5. Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi biaya pelayanan dapat dipahami dengan jelas dan biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan yang diinformasikan, termasuk apabila biaya pelayanan diinformasikan gratis memang benar tidak dilakukan pembayaran.]



6. Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan

[Pertanyaan ini disampaikan untuk melihat apakah unit layanan memiliki sarana prasarana pendukung pelayanan seperti ruang khusus pelayanan, ruang tunggu, tempat parkir gratis, ruang bermain anak, ruang ibadah, toilet khusus pengguna layanan dan sarana bagi yang berkebutuhan khusus.]



7. Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah petugas mampu memberikan respon pelayanan dengan cepat kepada pengguna layanan baik melalui tatap muka langsung, maupun melalui aplikasi layanan daring, petugas mudah dikenali (memakai seragam, tanda pengenal, dll), petugas melayani dengan ramah (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun)]



8. Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sarana layanan konsultasi dan pengaduan beragam (tempat konsultasi dan pengaduan/hotline/call center/media online), prosedur untuk melakukan konsultasi dan pengaduan mudah, respon konsultasi dan pengaduan cepat serta tindak lanjut proses penanganan konsultasi dan pengaduan jelas.]



II. PERILAKU PENYIMPANGAN

Pada bagian ini, kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait perilaku petugas pelayanan yang menyimpang pada unit layanan ini.

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya.]



2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.]



3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transpor, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan.]



4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (Pungli bisa dikamufleskan melalui berbagai istilah seperti “uang administrasi”, “uang rokok”, “uang terima kasih”, dsb).]



5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada praktik percaloan (Pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai).]



III. EVALUASI DAN PERBAIKAN

1. Sebelum menjawab survei ini, apakah ada pegawai/pejabat pada unit layanan ini yang mengarahkan Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban yang bagus-bagus/baik-baik saja?

Pengarahan Petugas/ Pegawai

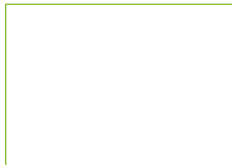
- Ya
 Tidak

2. Bagaimana penilaian Bapak/ Ibu terhadap pilihan dibawah ini yang perlu diperbaiki pada unit layanan ini

[Silahkan pilih bagian yang perlu diperbaiki pada unit layanan ini. Jawaban bisa dipilih lebih dari 1 (satu)]

- Kebijakan Pelayanan
 Profesionalisme SDM
 Kualitas Sarana Prasarana
 Sistem Informasi dan Pelayanan Publik
 Konsultasi dan Pengaduan
 Penghilangan Praktik Pungli
 Penghilangan Praktik Diluar Prosedur
 Penghilangan Praktik Percaloan
 Tidak ada yang perlu diperbaiki

Tanda Tangan



BAB II

METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara real time dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS). Penggunaan aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) sebagai tools pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) diharapkan dapat menganalisis data kualitatif secara langsung sehingga perbaikan atas pelayanan publik yang menjadi keluhan di tengah masyarakat dapat ditanggulangi dengan cepat dan tepat.

Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan di seluruh satuan kerja Kementerian Perhubungan baik di tingkat pusat maupun daerah secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau handphone masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui <https://skm.dephub.go.id/>.

Responden SPAK dan SPKP adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan. Dalam pelaksanaan survei, ditentukan sampel jumlah responden berdasarkan populasi pengguna layanan setiap bulannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, mensyaratkan responden minimal survei berjumlah 30 responden. Apabila penerima layanan dari Unit Kerja kurang dari 30 orang karena memang karakter Unit Kerja yang bukan pelayanan publik, maka tim melaksanakan survei akan menentukan dengan jumlah tertentu sesuai kaidah perhitungan statistik. Jumlah minimal responden SPAK dan SPKP setiap Unit Kerja ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah perhitungan statistik, yakni mengacu pada populasi pengguna layanan dalam satu bulan.

- Contoh perhitungan menggunakan Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = Jumlah sample (responden)

N = Jumlah Populasi (Pengguna layanan Satu Bulan)

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sample yang masih dapat ditolerir (contoh 5%)

Jika dalam satu bulan terdapat 150 pengguna layanan dan margin kesalahan yang ditentukan adalah 5% atau 0,05, maka perhitungannya adalah:

$$n = N / \{1 + (N \times e^2)\}$$

$$n = 150 / \{1 + (150 \times 0,05^2)\}$$

$$n = 109,09$$

Dengan demikian, ukuran responden minimal dari populasi 150 pengguna layanan adalah sebanyak 109 responden.

- Untuk memudahkan perhitungan dapat pula menggunakan tabel sample dari Krejcie and Morgan (Permenpan-RB No 14 Tahun 2017):

Tabel Sampel Morgan dan Krejcie

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	340	181	2600	331
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	100000	384

- a. Responden SPAK-SPKP Unit Utama Kementerian Perhubungan Manusia adalah : Pengguna Layanan di Unit Utama Kementerian Perhubungan.
- b. Responden SPAK-SPKP Kantor Wilayah
- c. Responden SPAK-SPKP Kantor Pertanian

B. Metode Pencacahan

Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan secara mandiri oleh unit pemberi layanan, baik di tingkat Unit Utama, Kantor Wilayah, maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pengisian SKM dilakukan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan atau penerima layanan dilakukan melalui Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS), dengan cara melakukan scan barcode pada unit pemberi layanan atau dengan cara mengakses link survei yang diberikan oleh petugas layanan.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Untuk memperoleh nilai hasil survei dilakukan perhitungan otomatis oleh sistem yang terdapat dalam aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS), dengan berpedoman pada PermenPAN-RB Nomor 14 tahun 2017. Dalam aturan tersebut digunakan pendekatan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan, dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian, yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus "Hasil SKM Unit Pelayanan x 25". Dengan demikian, nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, dan mutu serta kinerja unit pelayanan digambarkan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

D. Pengolahan Data

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{3} = 0,07$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

BAB III

PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

1. Hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Data Hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

No.	Bulan	Nilai IPK	Jumlah Responden	Diskriminasi	Kecurangan	Gratifikasi	Pungli	Calo
1	Maret	3.86	5	3.88	3.88	3.88	3.76	3.88
2	Juli	4	2	4	4	4	4	4
3	Desember	3.98	5	4	4	3.88	4	4
4	Mei	4	4	4	4	4	4	4
5	Juni	4	1	4	4	4	4	4
6	Agustus	4	1	4	4	4	4	4
7	Oktober	3.81	5	3.76	3.76	4	3.76	3.76
8	Januari	3.88	3	3.80	3.80	3.80	4	4
9	Februari	3.80	3	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80
10	September	3.68	3	3.60	3.80	3.80	3.60	3.60
11	April	3.85	4	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85
Nilai Agregat		3.90	36	3.88	3.90	3.91	3.89	3.90

Pada pelaksanaan survei periode Januari s.d Desember 2023, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.90 dalam skala 4 atau 17.04 dalam skala 17.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian telah memperoleh kategori Sangat Baik.

Secara lebih rinci, terdapat 5 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IPK) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian pada periode Januari s.d Desember 2023. Unsur Diskriminasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Kecurangan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Gratifikasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Pungli memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Calo memperoleh kategori Sangat Baik.

2. Hasil II. KUALITAS PELAYANAN - IKM pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Data Hasil II. KUALITAS PELAYANAN - IKM Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

No.	Bulan	Nilai IKM	Jumlah Responden	Informasi	Persyaratan	Prosedur/Alur	Waktu Penyelesaian	Tarif/Biaya	Sarana Prasarana	Respon	Konsultasi dan Pengaduan
1	Maret	3.54	5	3.52	3.64	3.64	3.28	3.64	3.52	3.52	3.52
2	Juli	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4
3	Desember	3.82	5	3.76	3.76	3.76	3.76	4	3.88	3.88	3.76
4	Mei	3.94	4	3.85	3.85	4	3.85	4	4	4	4
5	Juni	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4
6	Agustus	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4
7	Oktober	3.85	5	4	4	4	4	3.76	3.52	3.76	3.76
8	Januari	3.65	3	3.60	3.60	3.80	3.60	3.80	3.60	3.80	3.40
9	Februari	3.70	3	3.20	3.80	3.80	3.80	3.80	3.60	3.80	3.80
10	September	3.70	3	3.60	3.60	3.60	3.80	3.60	3.80	3.80	3.80
11	April	3.83	4	3.70	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85
Nilai Agregat		3.82	36	3.75	3.83	3.86	3.81	3.86	3.80	3.86	3.81

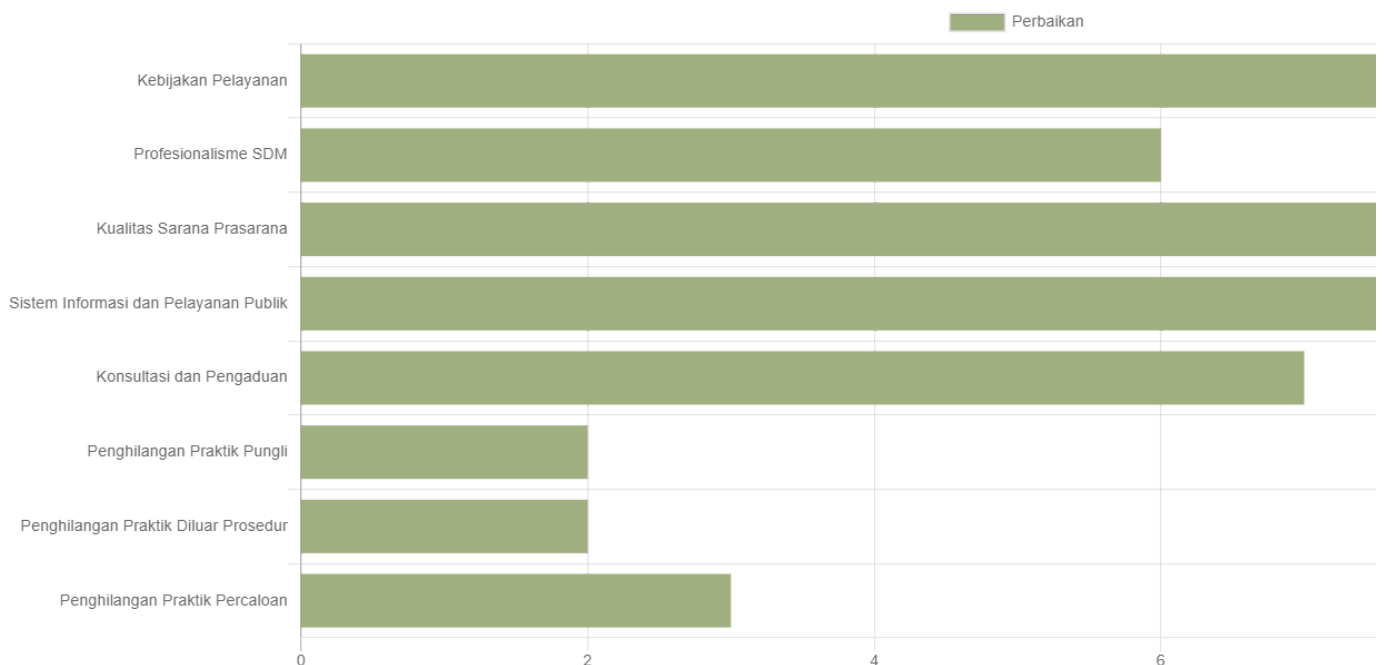
Pada pelaksanaan survei periode Januari s.d Desember 2023, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.82 dalam skala 4 atau 16.72 dalam skala 17.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian telah memperoleh kategori Sangat Baik.

Secara lebih rinci, terdapat 8 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IKM) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian pada periode Januari s.d Desember 2023. Unsur Informasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Persyaratan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Prosedur/Alur memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Waktu Penyelesaian memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Tarif/Biaya memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Sarana Prasarana memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Respon memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Konsultasi dan Pengaduan memperoleh kategori Sangat Baik.

Dengan Perolehan hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN, II. KUALITAS PELAYANAN pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian tersebut, Unit Kerja/ Satuan Kerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian telah memenuhi syarat nilai minimal pengusulan WBK

3. Aspek Usulan Perbaikan dari Masyarakat dan Indikatornya

Berdasarkan data pada aplikasi Survei 3AS Case Survey Management System (CSMS), terdapat usulan perbaikan yang disampaikan oleh responden, terhadap beberapa aspek indikator penilaian dalam survei yang tergambar dalam diagram berikut:



B. Tindak Lanjut Hasil Survei

No	Indikator	Rekomendasi
1	Informasi pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan nomor help desk yang sigap dalam menjawab kebutuhan informasi pengguna layanan; 2. Menciptakan konten informasi pelayanan yang menarik di media sosial; 3. Memastikan pengumuman tentang informasi pelayanan mudah diakses oleh masyarakat.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan pelayanan dimuat secara lengkap pada informasi pelayanan; 2. Sinkronisasi persyaratan yang dimuat pada website atau pun media sosial lainnya dengan persyaratan yang ada di tempat layanan; 3. Persyaratan yang menyulitkan masyarakat perlu dievaluasi;
3	Prosedur/Alur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pengumuman alur prosedur pada ruang layanan; 2. Petugas menjelaskan prosedur pelayanan kepada pengguna layanan; 3. Melakukan sosialisasi alur pelayanan kepada masyarakat.
4	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pengumuman/standar pelayanan terkait jangka waktu pelayanan pada ruang pelayanan. 2. Petugas/duta layanan menyampaikan jangka waktu layanan 3. Adanya kanal informasi bagi masyarakat untuk memperoleh informasi waktu penyelesaian layanan
5	Tarif Biaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi mengenai tarif terhadap produk layanan dilakukan secara transparan dan masif di lingkungan kantor; 2. Penentuan besaran tarif layanan didasarkan pada biaya produksi dan melalui perhitungan yang wajar bagi pengguna layanan dan apabila memungkinkan didapatkan dari kesepakatan antara pemberi layanan dan pengguna layanan; 3. Publikasi kepada pengguna layanan agar tidak memberikan celah untuk pungutan liar dan melaporkan kepada loket pengaduan dan membayar sesuai tarif yang ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
6	Sarana prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Dasar dalam pelaksanaan pemberian layanan, seperti komputer, jaringan internet, dan sarana pendukung lainnya, serta ruangan pelayanan yang memadai (loket pelayanan, ruang tunggu, toilet dan prasarana lainnya); 2. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung dalam pelaksanaan pemberian layanan disediakan/diadakan selama mempercepat dan mendukung kenyamanan penerima layanan; 3. Kebersihan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dilakukan secara berkala oleh petugas yang berkompeten.
7	Respon petugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kejelasan dan ketepatan waktu dalam memberikan layanan, untuk dapat menciptakan kondisi ini diperlukan standar operasional prosedur dan terinternalisasi kepada seluruh petugas sehingga dapat mengerti kebutuhan masyarakat dan tanggap dalam menangani masalah pelanggan (masyarakat); 2. Petugas Front Office harus dapat bertindak cepat dan cekatan dalam memberikan layanan dan menangani masalah yang dihadapi pelanggan; 3. Petugas diwajibkan untuk memberikan 3S (Senyum, Sapa, Salam) dalam melayani masyarakat, dan menempatkan masyarakat sebagai "orang yang istimewa".
8	Konsultasi dan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya loket/segmen khusus konsultasi dan pengaduan didalam tempat pemberian layanan; 2. Semua jenis konsultasi dan pengaduan yang dilayani dituangkan kedalam sebuah daftar/matriks, sebagai prioritas perbaikan layanan dan peningkatan kualitas layanan; 3. Melakukan telaahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kepada pimpinan terkait konsultasi dan laporan pengaduan yang telah ditindaklanjuti.
9	Diskriminasi pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan SDM Pemberi layanan atas kesadaran pelayanan publik terkait kesetaraan dalam perbedaan;

No	Indikator	Rekomendasi
		2. Menumbuhkan semangat dan jiwa nasionalisme; 3. Menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada.
10	Pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan	1. Menerapkan nomor antrian secara transparan; 2. Melakukan validasi nomor antrian dengan produk layanan; 3. Penempatan pengawas petugas pemberi layanan.
11	Penerimaan Imbalan uang/barang/fasilitas di luar ketentuan	1. Memberikan penguatan/ pelatihan SDM khususnya Petugas Pelayanan tentang Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan Gratifikasi; 2. Menyediakan nomor telepon pengaduan dan email aktif serta mengoptimalkan lagi sistem Whistleblowing apabila menemukan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan; 3. Memasang banner/ spanduk dan infografis di media sosial yang menjelaskan bahwa Unit Layanan tidak meminta/ tidak menerima segala bentuk biaya diluar ketentuan serta mencantumkan nomor telepon aduan apabila menemukan hal tersebut.
12	Pungutan liar	1. Mengoptimalkan penggunaan teknologi dan informasi dimulai dari awal prosedur hingga akhir prosedur pelayanan; 2. Terdapat kejelasan seluruh biaya pelayanan beserta dasar hukumnya; 3. Memasang banner/ spanduk dan infografis di media sosial yang menjelaskan bahwa Unit Layanan tidak meminta/ tidak menerima segala bentuk biaya diluar ketentuan serta mencantumkan nomor telepon aduan apabila menemukan hal tersebut.
13	Percaloan/perantara	1. Memberikan sosialisasi tentang kemudahan layanan publik kepada masyarakat sehingga masyarakat akan lebih paham dan tidak mengandalkan orang ketiga (calo); 2. Mengidentifikasi area yang berpotensi terhadap percaloan; 3. Mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi untuk mengurangi frekuensi tatap muka antara petugas dengan masyarakat

No.	Tgl. Survei	Nama Lengkap	Nomor Handphone	Pekerjaan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Jenis Layanan yang diterima
35	Jumat, 28 April 2023 Jam 15:53			Karyawan BUMN	21-30 Tahun	Laki-Laki	Strata 1 (S1)	Tidak Memilih Jenis layanan
36	Minggu, 30 April 2023 Jam 13:58			Swasta	21-30 Tahun	Laki-Laki	Strata 1 (S1)	Tidak Memilih Jenis layanan

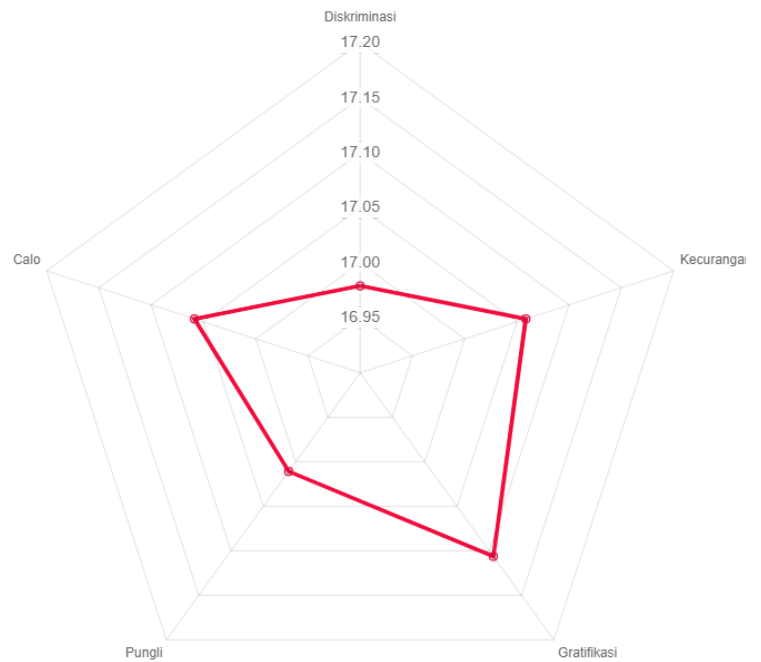
B. DATA DUKUNG LAINNYA

1. HASIL AGREGAT SURVEI JANUARI S.D DESEMBER 2023

Jumlah Responden : 36

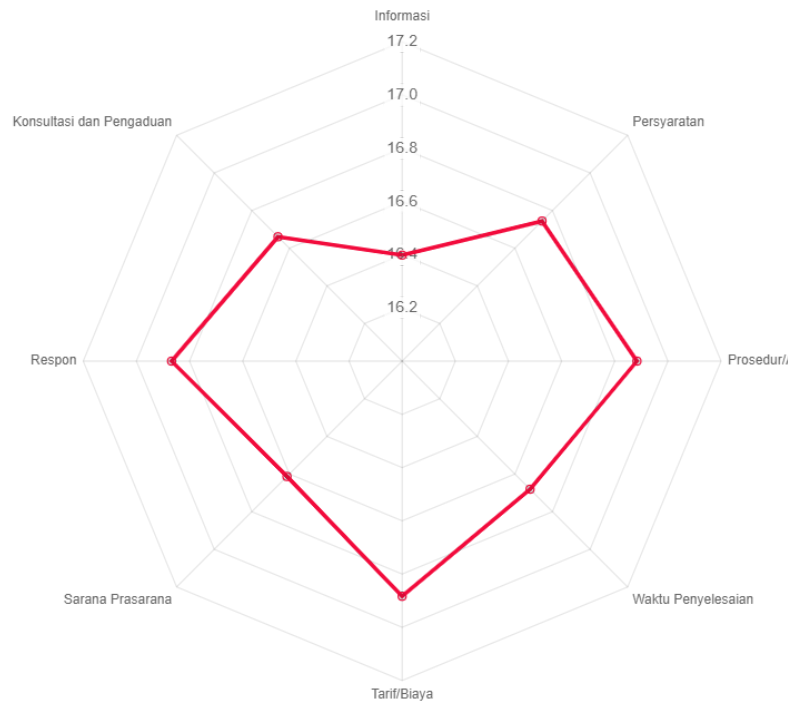
III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK

Variabel	Indek	Indek 100	Indek 4	Predikat
Diskriminasi	16.98	97.02	3.88	Sangat Baik
Kecurangan	17.06	97.48	3.90	Sangat Baik
Gratifikasi	17.11	97.75	3.91	Sangat Baik
Pungli	17.01	97.20	3.89	Sangat Baik
Calo	17.06	97.48	3.90	Sangat Baik
IPK	17.04	97.39	3.90	Sangat Baik



II. KUALITAS PELAYANAN - IKM

Variabel	Indek	Indek 100	Indek 4	Predikat
Informasi	16.40	93.70	3.75	Sangat Baik
Persyaratan	16.74	95.68	3.83	Sangat Baik
Prosedur/Alur	16.88	96.48	3.86	Sangat Baik
Waktu Penyelesaian	16.68	95.32	3.81	Sangat Baik
Tarif/Biaya	16.88	96.48	3.86	Sangat Baik
Sarana Prasarana	16.61	94.93	3.80	Sangat Baik
Respon	16.87	96.39	3.86	Sangat Baik
Konsultasi dan Pengaduan	16.66	95.20	3.81	Sangat Baik
IKM	16.72	95.52	3.82	Sangat Baik



2. Penggunaan Perangkat

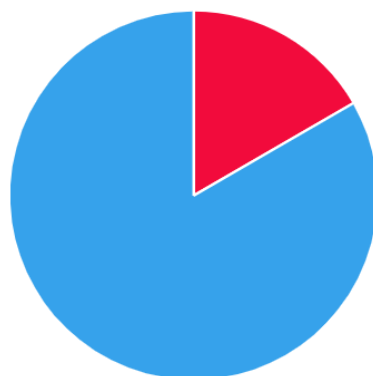
Personal Computer Samsung Android Apple iPhone



Personal Computer : 15
Samsung : 6
Android : 9
Apple iPhone : 6

3. Penggunaan Peramban (Browser) Perangkat

Safari Chrome



Safari : 6
Chrome : 30

4. Penggunaan (Platform Operating System)

Android iOS Windows 10



Android : 15
iOS : 6
Windows 10 : 15

**BALAI PENGELOLA KERETA API
RINGAN SUMATERA SELATAN**

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT BERDASARKAN HASIL SURVEI INTERNAL BPKAR-SS TAHUN 2023

URAIAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	TW I	APRIL	MEI	JUNI	TW II	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	TW III	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TW IV
JUMLAH RESPONDEN	291	389	354	1034	370	370	375	1115	380	380	375	1135	358	375	372	1105
RATA - RATA INDEKS KEPUASAN (SKALA 1 – 100)	88	88	88	88	89	88	89	89	89	89	89	89	89	88	89	89
KETERANGAN	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK
RATA - RATA INDEKS KEPUASAN (SKALA 1 – 4)	3.52	3.54	3.54	3.53	3.57	3.53	3.59	3.56	3.58	3.57	3.57	3.57	3.58	3.53	3.57	3.56
KETERANGAN	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK

KEPALA SEKSI PEMANFAATAN
SARANA DAN PRASARANA



ADITYA YUNianto
NIP. 19850609 200712 1 001

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN

BAB I

KUESIONER SURVEI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, serta menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu sub aksi pada sektor penegakan agraria dan tata ruang dan Reformasi Birokrasi adalah pembangunan Zona Integritas (ZI). Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan pegawainya berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) khususnya dalam penegakan integritas dan pelayanan yang berkualitas.

Ketentuan terkait pembangunan Zona Integritas diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah yang setiap pimpinan instansi pemerintah diminta untuk menetapkan unit kerja yang diusulkan meraih predikat WBK/WBBM.

Proses Pembangunan Zona Integritas difokuskan pada enam area perubahan yang salah satunya adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang ditandai dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu dilakukan penilaian kepuasan terhadap pelayanan oleh masing-masing Unit Kerja yang disebut dengan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.1 Pengukuran tersebut dilakukan dengan melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) serta Integritas di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) . Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau handphone masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui <https://skm.dephub.go.id/>.

Kuesioner yang tersedia dalam Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) mengandung setiap unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan peraturan sebagaimana dimaksud, meliputi:

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
3. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman;
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Instrumen yang digunakan dalam Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) diadopsi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023. Terdapat 14 pertanyaan yang terdiri dari 9 (sembilan) pertanyaan tentang persepsi kualitas layanan dan 5 (lima) pertanyaan tentang persepsi anti korupsi yang secara lengkap dapat dilihat pada Kuesioner berikut:

Kuesioner Survei IKM – IPK

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, n Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melakukan survei pelayanan publik. Mohon kesediaan untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan penilaian yang Bapak/Ibu/Saudara alami selama menggunakan layanan pada

Balai Pengelola Kereta Api Ringan

Harap jawab setiap pertanyaan sejujur mungkin. Semua jawaban dirahasiakan.

Terima kasih atas kerja sama anda.

I. KUALITAS LAYANAN

Pada bagian ini, kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait kualitas pemberian pelayanan pada unit layanan ini

1. Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sistem informasi pelayanan selalu tersedia dan dapat menjawab kebutuhan pengguna layanan, sistem informasi pelayanan mudah digunakan, serta sistem informasi pelayanan memiliki fasilitas interaktif dan FAQ.]



2. Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi persyaratan layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan persyaratan pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



3. Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi prosedur/alur layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan prosedur/alur pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



4. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi jangka waktu penyelesaian pelayanan dapat dipahami dengan jelas, jangka waktu penyelesaian pelayanan tersebut wajar, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



5. Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi biaya pelayanan dapat dipahami dengan jelas dan biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan yang diinformasikan, termasuk apabila biaya pelayanan diinformasikan gratis memang benar tidak dilakukan pembayaran.]



6. Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan

[Pertanyaan ini disampaikan untuk melihat apakah unit layanan memiliki sarana prasarana pendukung pelayanan seperti ruang khusus pelayanan, ruang tunggu, tempat parkir gratis, ruang bermain anak, ruang ibadah, toilet khusus pengguna layanan dan sarana bagi yang berkebutuhan khusus.]



7. Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah petugas mampu memberikan respon pelayanan dengan cepat kepada pengguna layanan baik melalui tatap muka langsung, maupun melalui aplikasi layanan daring, petugas mudah dikenali (memakai seragam, tanda pengenal, dll), petugas melayani dengan ramah (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun)]



8. Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sarana layanan konsultasi dan pengaduan beragam (tempat konsultasi dan pengaduan/hotline/call center/media online), prosedur untuk melakukan konsultasi dan pengaduan mudah, respon konsultasi dan pengaduan cepat serta tindak lanjut proses penanganan konsultasi dan pengaduan jelas.]



II. PERILAKU PENYIMPANGAN

Pada bagian ini, kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait perilaku petugas pelayanan yang menyimpang pada unit layanan ini.

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya.]



2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.]



3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transpor, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan.]



4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (Pungli bisa dikamufleskan melalui berbagai istilah seperti “uang administrasi”, “uang rokok”, “uang terima kasih”, dsb).]



5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada praktik percaloan (Pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai).]



III. EVALUASI DAN PERBAIKAN

1. Sebelum menjawab survei ini, apakah ada pegawai/pejabat pada unit layanan ini yang mengarahkan Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban yang bagus-bagus/baik-baik saja?

Pengarahan Petugas/ Pegawai

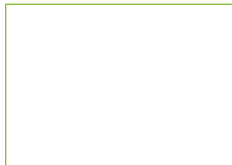
- Ya
 Tidak

2. Bagaimana penilaian Bapak/ Ibu terhadap pilihan dibawah ini yang perlu diperbaiki pada unit layanan ini

[Silahkan pilih bagian yang perlu diperbaiki pada unit layanan ini. Jawaban bisa dipilih lebih dari 1 (satu)]

- Kebijakan Pelayanan
 Profesionalisme SDM
 Kualitas Sarana Prasarana
 Sistem Informasi dan Pelayanan Publik
 Konsultasi dan Pengaduan
 Penghilangan Praktik Pungli
 Penghilangan Praktik Diluar Prosedur
 Penghilangan Praktik Percaloan
 Tidak ada yang perlu diperbaiki

Tanda Tangan



BAB II

METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara real time dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS). Penggunaan aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) sebagai tools pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) diharapkan dapat menganalisis data kualitatif secara langsung sehingga perbaikan atas pelayanan publik yang menjadi keluhan di tengah masyarakat dapat ditanggulangi dengan cepat dan tepat.

Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan di seluruh satuan kerja Kementerian Perhubungan baik di tingkat pusat maupun daerah secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau handphone masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui <https://skm.dephub.go.id/>.

Responden SPAK dan SPKP adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan. Dalam pelaksanaan survei, ditentukan sampel jumlah responden berdasarkan populasi pengguna layanan setiap bulannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, mensyaratkan responden minimal survei berjumlah 30 responden. Apabila penerima layanan dari Unit Kerja kurang dari 30 orang karena memang karakter Unit Kerja yang bukan pelayanan publik, maka tim melaksanakan survei akan menentukan dengan jumlah tertentu sesuai kaidah perhitungan statistik. Jumlah minimal responden SPAK dan SPKP setiap Unit Kerja ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah perhitungan statistik, yakni mengacu pada populasi pengguna layanan dalam satu bulan.

- Contoh perhitungan menggunakan Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = Jumlah sample (responden)

N = Jumlah Populasi (Pengguna layanan Satu Bulan)

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sample yang masih dapat ditolerir (contoh 5%)

Jika dalam satu bulan terdapat 150 pengguna layanan dan margin kesalahan yang ditentukan adalah 5% atau 0,05, maka perhitungannya adalah:

$$n = N / \{1 + (N \times e^2)\}$$

$$n = 150 / \{1 + (150 \times 0,05^2)\}$$

$$n = 109,09$$

Dengan demikian, ukuran responden minimal dari populasi 150 pengguna layanan adalah sebanyak 109 responden.

- Untuk memudahkan perhitungan dapat pula menggunakan tabel sample dari Krejcie and Morgan (Permenpan-RB No 14 Tahun 2017):

Tabel Sampel Morgan dan Krejcie

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	340	181	2600	331
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	100000	384

- a. Responden SPAK-SPKP Unit Utama Kementerian Perhubungan Manusia adalah : Pengguna Layanan di Unit Utama Kementerian Perhubungan.
- b. Responden SPAK-SPKP Kantor Wilayah
- c. Responden SPAK-SPKP Kantor Pertanian

B. Metode Pencacahan

Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan secara mandiri oleh unit pemberi layanan, baik di tingkat Unit Utama, Kantor Wilayah, maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pengisian SKM dilakukan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan atau penerima layanan dilakukan melalui Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS), dengan cara melakukan scan barcode pada unit pemberi layanan atau dengan cara mengakses link survei yang diberikan oleh petugas layanan.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Untuk memperoleh nilai hasil survei dilakukan perhitungan otomatis oleh sistem yang terdapat dalam aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS), dengan berpedoman pada PermenPAN-RB Nomor 14 tahun 2017. Dalam aturan tersebut digunakan pendekatan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan, dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian, yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus “Hasil SKM Unit Pelayanan x 25”. Dengan demikian, nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, dan mutu serta kinerja unit pelayanan digambarkan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

D. Pengolahan Data

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

<u>Bobot nilai rata-rata tertimbang</u> =	<u>Jumlah Bobot</u>	=	<u>1</u>	= 0,07
	<u>Jumlah Unsur</u>		<u>1</u>	
			<u>3</u>	

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

<u>SKM</u> =	<u>Total dari nilai persepsi per unsur</u>	x	<u>Nilai Penimbang</u>
	<u>Tota Unsur yang terisi</u>		

BAB III

PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

1. Hasil II. KUALITAS PELAYANAN - IKM pada Balai Pengelola Kereta Api Ringan

Data Hasil II. KUALITAS PELAYANAN - IKM Balai Pengelola Kereta Api Ringan

No.	Bulan	Nilai IKM	Jumlah Responden	Informasi	Persyaratan	Prosedur/Alur	Waktu Penyelesaian	Tarif/Biaya	Sarana Prasarana	Respon	Konsultasi dan Pengaduan
1	Maret	3.78	19	3.75	3.78	3.81	3.84	3.87	3.72	3.65	3.84
2	Juli	3.62	25	3.66	3.66	3.57	3.66	3.76	3.50	3.42	3.74
3	November	3.79	13	3.77	3.86	3.86	3.95	3.91	3.58	3.54	3.82
4	Desember	3.76	13	3.86	3.54	3.82	3.72	3.82	3.77	3.72	3.82
5	Mei	3.79	59	3.82	3.77	3.81	3.77	3.83	3.76	3.84	3.74
6	Juni	3.72	23	3.66	3.69	3.79	3.74	3.82	3.66	3.69	3.71
7	Agustus	3.79	12	3.70	3.95	3.65	3.75	3.95	3.70	3.90	3.70
8	Oktober	3.62	22	3.43	3.48	3.56	3.59	3.84	3.73	3.65	3.67
9	Januari	3.64	31	3.61	3.61	3.73	3.57	3.83	3.61	3.63	3.55
10	Februari	3.64	21	3.60	3.54	3.66	3.54	3.69	3.77	3.71	3.60
11	September	3.82	13	3.77	3.91	3.86	3.86	3.77	3.77	3.77	3.86
12	April	3.79	20	3.79	3.79	3.70	3.85	3.88	3.73	3.85	3.76
Nilai Agregat		3.73	271	3.70	3.72	3.73	3.74	3.83	3.69	3.70	3.73

Pada pelaksanaan survei periode Januari s.d Desember 2023, Balai Pengelola Kereta Api Ringan secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.73 dalam skala 4 atau 16.32 dalam skala 17.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan telah memperoleh kategori Sangat Baik.

Secara lebih rinci, terdapat 8 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IKM) Balai Pengelola Kereta Api Ringan pada periode Januari s.d Desember 2023. Unsur Informasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Persyaratan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Prosedur/Alur memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Waktu Penyelesaian memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Tarif/Biaya memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Sarana Prasarana memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Respon memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Konsultasi dan Pengaduan memperoleh kategori Sangat Baik.

2. Hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK pada Balai Pengelola Kereta Api Ringan

Data Hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK Balai Pengelola Kereta Api Ringan

No.	Bulan	Nilai IPK	Jumlah Responden	Diskriminasi	Kecurangan	Gratifikasi	Pungli	Calo
1	Maret	3.87	19	3.84	3.87	3.87	3.91	3.84
2	Juli	3.82	25	3.86	3.64	3.88	3.88	3.86
3	November	3.90	13	3.86	3.91	3.86	3.95	3.91
4	Desember	3.82	13	3.77	3.77	3.77	3.91	3.91
5	Mei	3.89	59	3.89	3.86	3.92	3.88	3.89
6	Juni	3.88	23	3.87	3.90	3.90	3.87	3.87
7	Agustus	3.76	12	3.70	3.75	3.90	3.75	3.70
8	Oktober	3.79	22	3.75	3.75	3.84	3.81	3.81
9	Januari	3.82	31	3.71	3.77	3.88	3.90	3.85
10	Februari	3.70	21	3.69	3.74	3.69	3.71	3.69
11	September	3.94	13	3.95	4	4	3.77	3.95
12	April	3.89	20	3.82	3.82	3.94	3.94	3.94
Nilai Agregat		3.84	271	3.81	3.81	3.87	3.86	3.85

Pada pelaksanaan survei periode Januari s.d Desember 2023, Balai Pengelola Kereta Api Ringan secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.84 dalam skala 4 atau 16.80 dalam skala 17.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan telah memperoleh kategori Sangat Baik.

Secara lebih rinci, terdapat 5 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IPK) Balai Pengelola Kereta Api Ringan pada periode Januari s.d Desember 2023. Unsur Diskriminasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Kecurangan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Gratifikasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Pungli memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Calo memperoleh kategori Sangat Baik.

Dengan Perolehan hasil II. KUALITAS PELAYANAN, III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN pada Balai Pengelola Kereta Api Ringan tersebut, Unit Kerja/ Satuan Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan telah memenuhi syarat nilai minimal pengusulan WBK

3. Aspek Usulan Perbaikan dari Masyarakat dan Indikatornya

Berdasarkan data pada aplikasi Survei 3AS Case Survey Management System (CSMS), terdapat usulan perbaikan yang disampaikan oleh responden, terhadap beberapa aspek indikator penilaian dalam survei yang tergambar dalam diagram berikut:

B. Tindak Lanjut Hasil Survei

No	Indikator	Rekomendasi
1	Informasi pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan nomor help desk yang sigap dalam menjawab kebutuhan informasi pengguna layanan; 2. Menciptakan konten informasi pelayanan yang menarik di media sosial; 3. Memastikan pengumuman tentang informasi pelayanan mudah diakses oleh masyarakat.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan pelayanan dimuat secara lengkap pada informasi pelayanan; 2. Sinkronisasi persyaratan yang dimuat pada website atau pun media sosial lainnya dengan persyaratan yang ada di tempat layanan; 3. Persyaratan yang menyulitkan masyarakat perlu dievaluasi;
3	Prosedur/Alur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pengumuman alur prosedur pada ruang layanan; 2. Petugas menjelaskan prosedur pelayanan kepada pengguna layanan; 3. Melakukan sosialisasi alur pelayanan kepada masyarakat.
4	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pengumuman/standar pelayanan terkait jangka waktu pelayanan pada ruang pelayanan. 2. Petugas/duta layanan menyampaikan jangka waktu layanan 3. Adanya kanal informasi bagi masyarakat untuk memperoleh informasi waktu penyelesaian layanan
5	Tarif Biaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi mengenai tarif terhadap produk layanan dilakukan secara transparan dan masif di lingkungan kantor; 2. Penentuan besaran tarif layanan didasarkan pada biaya produksi dan melalui perhitungan yang wajar bagi pengguna layanan dan apabila memungkinkan didapatkan dari kesepakatan antara pemberi layanan dan pengguna layanan; 3. Publikasi kepada pengguna layanan agar tidak memberikan celah untuk pungutan liar dan melaporkan kepada loket pengaduan dan membayar sesuai tarif yang ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
6	Sarana prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Dasar dalam pelaksanaan pemberian layanan, seperti komputer, jaringan internet, dan sarana pendukung lainnya, serta ruangan pelayanan yang memadai (loket pelayanan, ruang tunggu, toilet dan prasarana lainnya); 2. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung dalam pelaksanaan pemberian layanan disediakan/diadakan selama mempercepat dan mendukung kenyamanan penerima layanan; 3. Kebersihan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dilakukan secara berkala oleh petugas yang berkompeten.
7	Respon petugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kejelasan dan ketepatan waktu dalam memberikan layanan, untuk dapat menciptakan kondisi ini diperlukan standar operasional prosedur dan terinternalisasi kepada seluruh petugas sehingga dapat mengerti kebutuhan masyarakat dan tanggap dalam menangani masalah pelanggan (masyarakat); 2. Petugas Front Office harus dapat bertindak cepat dan cekatan dalam memberikan layanan dan menangani masalah yang dihadapi pelanggan; 3. Petugas diwajibkan untuk memberikan 3S (Senyum, Sapa, Salam) dalam melayani masyarakat, dan menempatkan masyarakat sebagai "orang yang istimewa".
8	Konsultasi dan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya loket/segmen khusus konsultasi dan pengaduan didalam tempat pemberian layanan; 2. Semua jenis konsultasi dan pengaduan yang dilayani dituangkan kedalam sebuah daftar/matriks, sebagai prioritas perbaikan layanan dan peningkatan kualitas layanan; 3. Melakukan telaahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kepada pimpinan terkait konsultasi dan laporan pengaduan yang telah ditindaklanjuti.
9	Diskriminasi pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan SDM Pemberi layanan atas kesadaran pelayanan publik terkait kesetaraan dalam perbedaan;

No	Indikator	Rekomendasi
		2. Menumbuhkan semangat dan jiwa nasionalisme; 3. Menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada.
10	Pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan	1. Menerapkan nomor antrian secara transparan; 2. Melakukan validasi nomor antrian dengan produk layanan; 3. Penempatan pengawas petugas pemberi layanan.
11	Penerimaan Imbalan uang/barang/fasilitas di luar ketentuan	1. Memberikan penguatan/ pelatihan SDM khususnya Petugas Pelayanan tentang Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan Gratifikasi; 2. Menyediakan nomor telepon pengaduan dan email aktif serta mengoptimalkan lagi sistem Whistleblowing apabila menemukan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan; 3. Memasang banner/ spanduk dan infografis di media sosial yang menjelaskan bahwa Unit Layanan tidak meminta/ tidak menerima segala bentuk biaya diluar ketentuan serta mencantumkan nomor telepon aduan apabila menemukan hal tersebut.
12	Pungutan liar	1. Mengoptimalkan penggunaan teknologi dan informasi dimulai dari awal prosedur hingga akhir prosedur pelayanan; 2. Terdapat kejelasan seluruh biaya pelayanan beserta dasar hukumnya; 3. Memasang banner/ spanduk dan infografis di media sosial yang menjelaskan bahwa Unit Layanan tidak meminta/ tidak menerima segala bentuk biaya diluar ketentuan serta mencantumkan nomor telepon aduan apabila menemukan hal tersebut.
13	Percaloan/perantara	1. Memberikan sosialisasi tentang kemudahan layanan publik kepada masyarakat sehingga masyarakat akan lebih paham dan tidak mengandalkan orang ketiga (calo); 2. Mengidentifikasi area yang berpotensi terhadap percaloan; 3. Mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi untuk mengurangi frekuensi tatap muka antara petugas dengan masyarakat

B. DATA DUKUNG LAINNYA

1. HASIL AGREGAT SURVEI JANUARI S.D DESEMBER 2023

Jumlah Responden : 271

II. KUALITAS PELAYANAN - IKM

Variabel	Indek	Indek 100	Indek 4	Predikat
Informasi	16.19	92.54	3.70	Sangat Baik
Persyaratan	16.25	92.88	3.72	Sangat Baik
Prosedur/Alur	16.34	93.36	3.73	Sangat Baik
Waktu Penyelesaian	16.35	93.45	3.74	Sangat Baik
Tarif/Biaya	16.75	95.73	3.83	Sangat Baik
Sarana Prasarana	16.15	92.28	3.69	Sangat Baik
Respon	16.18	92.45	3.70	Sangat Baik
Konsultasi dan Pengaduan	16.34	93.35	3.73	Sangat Baik
IKM	16.32	93.25	3.73	Sangat Baik

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK

Variabel	Indek	Indek 100	Indek 4	Predikat
Diskriminasi	16.67	95.23	3.81	Sangat Baik
Kecurangan	16.69	95.37	3.81	Sangat Baik
Gratifikasi	16.93	96.76	3.87	Sangat Baik
Pungli	16.87	96.42	3.86	Sangat Baik
Calo	16.85	96.26	3.85	Sangat Baik
IPK	16.80	96.01	3.84	Sangat Baik

2. Penggunaan Perangkat

Personal Computer : 2
Samsung : 28
Android : 185
LG : 1
Apple iPhone : 55

3. Penggunaan Peramban (*Browser*) Perangkat

Firefox : 2
Safari : 55
Opera : 1
Chrome : 213

4. Penggunaan (*Platform Operating System*)

Android : 214
iOS : 55
Windows : 2
10

**BALAI PENGUJIAN
PERKERETAAPIAN**

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN

BAB I

KUESIONER SURVEI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, serta menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu sub aksi pada sektor penegakan agraria dan tata ruang dan Reformasi Birokrasi adalah pembangunan Zona Integritas (ZI). Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan pegawainya berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) khususnya dalam penegakan integritas dan pelayanan yang berkualitas.

Ketentuan terkait pembangunan Zona Integritas diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah yang setiap pimpinan instansi pemerintah diminta untuk menetapkan unit kerja yang diusulkan meraih predikat WBK/WBBM.

Proses Pembangunan Zona Integritas difokuskan pada enam area perubahan yang salah satunya adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang ditandai dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu dilakukan penilaian kepuasan terhadap pelayanan oleh masing-masing Unit Kerja yang disebut dengan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.1 Pengukuran tersebut dilakukan dengan melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) serta Integritas di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) . Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau handphone masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui <https://skm.dephub.go.id/>.

Kuesioner yang tersedia dalam Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) mengandung setiap unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan peraturan sebagaimana dimaksud, meliputi:

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
3. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman;
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Instrumen yang digunakan dalam Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) diadopsi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023. Terdapat 14 pertanyaan yang terdiri dari 9 (sembilan) pertanyaan tentang persepsi kualitas layanan dan 5 (lima) pertanyaan tentang persepsi anti korupsi yang secara lengkap dapat dilihat pada Kuesioner berikut:

Kuesioner Survei IKM – IPK

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, n Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melakukan survei pelayanan publik. Mohon kesediaan untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan penilaian yang Bapak/Ibu/Saudara alami selama menggunakan layanan pada

Balai Pengujian Perkeretaapian

Harap jawab setiap pertanyaan sejujur mungkin. Semua jawaban dirahasiakan.

Terima kasih atas kerja sama anda.

I. KUALITAS LAYANAN

Pada bagian ini, kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait kualitas pemberian pelayanan pada unit layanan ini

1. Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sistem informasi pelayanan selalu tersedia dan dapat menjawab kebutuhan pengguna layanan, sistem informasi pelayanan mudah digunakan, serta sistem informasi pelayanan memiliki fasilitas interaktif dan FAQ.]



2. Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi persyaratan layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan persyaratan pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



3. Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi prosedur/alur layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan prosedur/alur pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



4. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi jangka waktu penyelesaian pelayanan dapat dipahami dengan jelas, jangka waktu penyelesaian pelayanan tersebut wajar, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



5. Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi biaya pelayanan dapat dipahami dengan jelas dan biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan yang diinformasikan, termasuk apabila biaya pelayanan diinformasikan gratis memang benar tidak dilakukan pembayaran.]



6. Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan

[Pertanyaan ini disampaikan untuk melihat apakah unit layanan memiliki sarana prasarana pendukung pelayanan seperti ruang khusus pelayanan, ruang tunggu, tempat parkir gratis, ruang bermain anak, ruang ibadah, toilet khusus pengguna layanan dan sarana bagi yang berkebutuhan khusus.]



7. Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah petugas mampu memberikan respon pelayanan dengan cepat kepada pengguna layanan baik melalui tatap muka langsung, maupun melalui aplikasi layanan daring, petugas mudah dikenali (memakai seragam, tanda pengenal, dll), petugas melayani dengan ramah (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun)]



8. Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sarana layanan konsultasi dan pengaduan beragam (tempat konsultasi dan pengaduan/hotline/call center/media online), prosedur untuk melakukan konsultasi dan pengaduan mudah, respon konsultasi dan pengaduan cepat serta tindak lanjut proses penanganan konsultasi dan pengaduan jelas.]



II. PERILAKU PENYIMPANGAN

Pada bagian ini, kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait perilaku petugas pelayanan yang menyimpang pada unit layanan ini.

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya.]



2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.]



3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transpor, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan.]



4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (Pungli bisa dikamufleskan melalui berbagai istilah seperti “uang administrasi”, “uang rokok”, “uang terima kasih”, dsb).]



5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada praktik percaloan (Pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai).]



III. EVALUASI DAN PERBAIKAN

1. Sebelum menjawab survei ini, apakah ada pegawai/pejabat pada unit layanan ini yang mengarahkan Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban yang bagus-bagus/baik-baik saja?

Pengarahan Petugas/ Pegawai

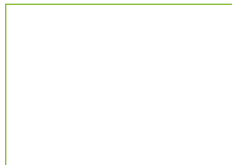
- Ya
 Tidak

2. Bagaimana penilaian Bapak/ Ibu terhadap pilihan dibawah ini yang perlu diperbaiki pada unit layanan ini

[Silahkan pilih bagian yang perlu diperbaiki pada unit layanan ini. Jawaban bisa dipilih lebih dari 1 (satu)]

- Kebijakan Pelayanan
 Profesionalisme SDM
 Kualitas Sarana Prasarana
 Sistem Informasi dan Pelayanan Publik
 Konsultasi dan Pengaduan
 Penghilangan Praktik Pungli
 Penghilangan Praktik Diluar Prosedur
 Penghilangan Praktik Percaloan
 Tidak ada yang perlu diperbaiki

Tanda Tangan



BAB II

METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara real time dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS). Penggunaan aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS) sebagai tools pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) diharapkan dapat menganalisis data kualitatif secara langsung sehingga perbaikan atas pelayanan publik yang menjadi keluhan di tengah masyarakat dapat ditanggulangi dengan cepat dan tepat.

Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan di seluruh satuan kerja Kementerian Perhubungan baik di tingkat pusat maupun daerah secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau handphone masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui <https://skm.dephub.go.id/>.

Responden SPAK dan SPKP adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan. Dalam pelaksanaan survei, ditentukan sampel jumlah responden berdasarkan populasi pengguna layanan setiap bulannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, mensyaratkan responden minimal survei berjumlah 30 responden. Apabila penerima layanan dari Unit Kerja kurang dari 30 orang karena memang karakter Unit Kerja yang bukan pelayanan publik, maka tim melaksanakan survei akan menentukan dengan jumlah tertentu sesuai kaidah perhitungan statistik. Jumlah minimal responden SPAK dan SPKP setiap Unit Kerja ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah perhitungan statistik, yakni mengacu pada populasi pengguna layanan dalam satu bulan.

- Contoh perhitungan menggunakan Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = Jumlah sample (responden)

N = Jumlah Populasi (Pengguna layanan Satu Bulan)

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sample yang masih dapat ditolerir (contoh 5%)

Jika dalam satu bulan terdapat 150 pengguna layanan dan margin kesalahan yang ditentukan adalah 5% atau 0,05, maka perhitungannya adalah:

$$n = N / \{1 + (N \times e^2)\}$$

$$n = 150 / \{1 + (150 \times 0,05^2)\}$$

$$n = 109,09$$

Dengan demikian, ukuran responden minimal dari populasi 150 pengguna layanan adalah sebanyak 109 responden.

- Untuk memudahkan perhitungan dapat pula menggunakan tabel sample dari Krejcie and Morgan (Permenpan-RB No 14 Tahun 2017):

Tabel Sampel Morgan dan Krejcie

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	340	181	2600	331
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	100000	384

- a. Responden SPAK-SPKP Unit Utama Kementerian Perhubungan Manusia adalah : Pengguna Layanan di Unit Utama Kementerian Perhubungan.
- b. Responden SPAK-SPKP Kantor Wilayah
- c. Responden SPAK-SPKP Kantor Pertanian

B. Metode Pencacahan

Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan secara mandiri oleh unit pemberi layanan, baik di tingkat Unit Utama, Kantor Wilayah, maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pengisian SKM dilakukan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan atau penerima layanan dilakukan melalui Aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS), dengan cara melakukan scan barcode pada unit pemberi layanan atau dengan cara mengakses link survei yang diberikan oleh petugas layanan.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Untuk memperoleh nilai hasil survei dilakukan perhitungan otomatis oleh sistem yang terdapat dalam aplikasi 3AS Case Survey Management System (CSMS), dengan berpedoman pada PermenPAN-RB Nomor 14 tahun 2017. Dalam aturan tersebut digunakan pendekatan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan, dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian, yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus "Hasil SKM Unit Pelayanan x 25". Dengan demikian, nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, dan mutu serta kinerja unit pelayanan digambarkan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

D. Pengolahan Data

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{3} = 0,07$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

BAB III

PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

1. Hasil II. KUALITAS PELAYANAN - IKM pada Balai Pengujian Perkeretaapian

Data Hasil II. KUALITAS PELAYANAN - IKM Balai Pengujian Perkeretaapian

No.	Bulan	Nilai IKM	Jumlah Responden	Informasi	Persyaratan	Prosedur/Alur	Waktu Penyelesaian	Tarif/Biaya	Sarana Prasarana	Respon	Konsultasi dan Pengaduan
1	Juli	3.83	767	3.83	3.84	3.83	3.82	3.81	3.83	3.83	3.82
2	November	3.79	362	3.80	3.79	3.81	3.78	3.78	3.79	3.78	3.79
3	Desember	3.78	329	3.79	3.78	3.79	3.79	3.77	3.77	3.78	3.78
4	Agustus	3.78	235	3.75	3.80	3.79	3.77	3.77	3.78	3.79	3.76
5	Oktober	3.81	567	3.81	3.81	3.81	3.81	3.80	3.78	3.81	3.81
6	September	3.80	515	3.78	3.80	3.79	3.80	3.79	3.80	3.81	3.79
Nilai Agregat		3.80	2,775	3.79	3.80	3.80	3.80	3.79	3.79	3.80	3.79

Pada pelaksanaan survei periode s.d Desember 2023, Balai Pengujian Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.80 dalam skala 4 atau 16.61 dalam skala 17.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian telah memperoleh kategori Sangat Baik.

Secara lebih rinci, terdapat 8 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IKM) Balai Pengujian Perkeretaapian pada periode s.d Desember 2023. Unsur Informasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Persyaratan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Prosedur/Alur memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Waktu Penyelesaian memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Tarif/Biaya memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Sarana Prasarana memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Respon memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Konsultasi dan Pengaduan memperoleh kategori Sangat Baik.

2. Hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK pada Balai Pengujian Perkeretaapian

Data Hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK Balai Pengujian Perkeretaapian

No.	Bulan	Nilai IPK	Jumlah Responden	Diskriminasi	Kecurangan	Gratifikasi	Pungli	Calo
1	Juli	3.85	767	3.84	3.84	3.85	3.86	3.86
2	November	3.83	362	3.82	3.82	3.82	3.83	3.84
3	Desember	3.82	329	3.80	3.82	3.82	3.84	3.83
4	Agustus	3.81	235	3.80	3.79	3.81	3.83	3.83
5	Oktober	3.84	567	3.83	3.82	3.84	3.85	3.84
6	September	3.84	515	3.83	3.83	3.84	3.85	3.85
Nilai Agregat		3.83	2,775	3.82	3.82	3.83	3.85	3.84

Pada pelaksanaan survei periode s.d Desember 2023, Balai Pengujian Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.83 dalam skala 4 atau 16.76 dalam skala 17.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian telah memperoleh kategori Sangat Baik.

Secara lebih rinci, terdapat 5 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IPK) Balai Pengujian Perkeretaapian pada periode s.d Desember 2023. Unsur Diskriminasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Kecurangan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Gratifikasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Pungli memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Calo memperoleh kategori Sangat Baik.

3. Aspek Usulan Perbaikan dari Masyarakat dan Indikatornya

Berdasarkan data pada aplikasi Survei 3AS Case Survey Management System (CSMS), terdapat usulan perbaikan yang disampaikan oleh responden, terhadap beberapa aspek indikator penilaian dalam survei yang tergambar dalam diagram berikut:

B. Tindak Lanjut Hasil Survei

No	Indikator	Rekomendasi
1	Informasi pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan nomor help desk yang sigap dalam menjawab kebutuhan informasi pengguna layanan; 2. Menciptakan konten informasi pelayanan yang menarik di media sosial; 3. Memastikan pengumuman tentang informasi pelayanan mudah diakses oleh masyarakat.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan pelayanan dimuat secara lengkap pada informasi pelayanan; 2. Sinkronisasi persyaratan yang dimuat pada website atau pun media sosial lainnya dengan persyaratan yang ada di tempat layanan; 3. Persyaratan yang menyulitkan masyarakat perlu dievaluasi;
3	Prosedur/Alur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pengumuman alur prosedur pada ruang layanan; 2. Petugas menjelaskan prosedur pelayanan kepada pengguna layanan; 3. Melakukan sosialisasi alur pelayanan kepada masyarakat.
4	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pengumuman/standar pelayanan terkait jangka waktu pelayanan pada ruang pelayanan. 2. Petugas/duta layanan menyampaikan jangka waktu layanan 3. Adanya kanal informasi bagi masyarakat untuk memperoleh informasi waktu penyelesaian layanan
5	Tarif Biaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi mengenai tarif terhadap produk layanan dilakukan secara transparan dan masif di lingkungan kantor; 2. Penentuan besaran tarif layanan didasarkan pada biaya produksi dan melalui perhitungan yang wajar bagi pengguna layanan dan apabila memungkinkan didapatkan dari kesepakatan antara pemberi layanan dan pengguna layanan; 3. Publikasi kepada pengguna layanan agar tidak memberikan celah untuk pungutan liar dan melaporkan kepada loket pengaduan dan membayar sesuai tarif yang ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
6	Sarana prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Dasar dalam pelaksanaan pemberian layanan, seperti komputer, jaringan internet, dan sarana pendukung lainnya, serta ruangan pelayanan yang memadai (loket pelayanan, ruang tunggu, toilet dan prasarana lainnya); 2. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung dalam pelaksanaan pemberian layanan disediakan/diadakan selama mempercepat dan mendukung kenyamanan penerima layanan; 3. Kebersihan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dilakukan secara berkala oleh petugas yang berkompeten.
7	Respon petugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kejelasan dan ketepatan waktu dalam memberikan layanan, untuk dapat menciptakan kondisi ini diperlukan standar operasional prosedur dan terinternalisasi kepada seluruh petugas sehingga dapat mengerti kebutuhan masyarakat dan tanggap dalam menangani masalah pelanggan (masyarakat); 2. Petugas Front Office harus dapat bertindak cepat dan cekatan dalam memberikan layanan dan menangani masalah yang dihadapi pelanggan; 3. Petugas diwajibkan untuk memberikan 3S (Senyum, Sapa, Salam) dalam melayani masyarakat, dan menempatkan masyarakat sebagai "orang yang istimewa".
8	Konsultasi dan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya loket/segmen khusus konsultasi dan pengaduan didalam tempat pemberian layanan; 2. Semua jenis konsultasi dan pengaduan yang dilayani dituangkan kedalam sebuah daftar/matriks, sebagai prioritas perbaikan layanan dan peningkatan kualitas layanan; 3. Melakukan telaahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kepada pimpinan terkait konsultasi dan laporan pengaduan yang telah ditindaklanjuti.
9	Diskriminasi pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan SDM Pemberi layanan atas kesadaran pelayanan publik terkait kesetaraan dalam perbedaan; 2. Menumbuhkan semangat dan jiwa nasionalisme; 3. Menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada.
10	Pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan nomor antrian secara transparan; 2. Melakukan validasi nomor antrian dengan produk layanan; 3. Penempatan pengawas petugas pemberi layanan.
11	Penerimaan Imbalan uang/barang/fasilitas di luar ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan penguatan/ pelatihan SDM khususnya Petugas Pelayanan tentang Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan Gratifikasi; 2. Menyediakan nomor telepon pengaduan dan email aktif serta mengoptimalkan lagi sistem Whistleblowing apabila menemukan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan; 3. Memasang banner/ spanduk dan infografis di media sosial yang menjelaskan bahwa Unit Layanan tidak meminta/ tidak menerima segala bentuk biaya diluar ketentuan serta mencantumkan nomor telepon aduan apabila menemukan hal tersebut.
12	Pungutan liar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan penggunaan teknologi dan informasi dimulai dari awal prosedur hingga akhir prosedur pelayanan; 2. Terdapat kejelasan seluruh biaya pelayanan beserta dasar hukumnya; 3. Memasang banner/ spanduk dan infografis di media sosial yang menjelaskan bahwa Unit Layanan tidak meminta/ tidak menerima segala bentuk biaya diluar ketentuan serta mencantumkan nomor telepon aduan apabila menemukan hal tersebut.
13	Percaloan/perantara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan sosialisasi tentang kemudahan layanan publik kepada masyarakat sehingga masyarakat akan lebih paham dan tidak mengandalkan orang ketiga (calo); 2. Mengidentifikasi area yang berpotensi terhadap percaloan; 3. Mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi untuk mengurangi frekuensi tatap muka antara petugas dengan masyarakat

B. DATA DUKUNG LAINNYA

1. HASIL AGREGAT SURVEI S.D DESEMBER 2023

Jumlah Responden : 2,775

II. KUALITAS PELAYANAN - IKM

Variabel	Indek	Indek 100	Indek 4	Predikat
Informasi	16.60	94.87	3.79	Sangat Baik
Persyaratan	16.64	95.10	3.80	Sangat Baik
Prosedur/Alur	16.64	95.10	3.80	Sangat Baik
Waktu Penyelesaian	16.61	94.89	3.80	Sangat Baik
Tarif/Biaya	16.57	94.68	3.79	Sangat Baik
Sarana Prasarana	16.59	94.80	3.79	Sangat Baik
Respon	16.62	94.96	3.80	Sangat Baik
Konsultasi dan Pengaduan	16.59	94.78	3.79	Sangat Baik
IKM	16.61	94.90	3.80	Sangat Baik

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK

Variabel	Indek	Indek 100	Indek 4	Predikat
Diskriminasi	16.71	95.49	3.82	Sangat Baik
Kecurangan	16.71	95.48	3.82	Sangat Baik
Gratifikasi	16.76	95.75	3.83	Sangat Baik
Pungli	16.83	96.15	3.85	Sangat Baik
Calo	16.81	96.07	3.84	Sangat Baik
IPK	16.76	95.79	3.83	Sangat Baik

2. Penggunaan Perangkat

Personal Computer : 5
Samsung : 184
Android : 2,335
Apple iPhone : 251

3. Penggunaan Peramban (*Browser*) Perangkat

Firefox : 2
Safari : 251
Mozilla : 2
Opera : 12
Chrome : 2,508

4. Penggunaan (*Platform Operating System*)

Android : 2,519
Mac OS X : 2
Windows 10 : 3
iOS : 251

Lampiran VII
Dokumentasi Pembahasan Capaian
Kinerja Tahun 2023

No. ST : KP.004/2/12/K1/DJKA/2023
Lokasi : Bogor



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN
PEMBAHASAN DAN REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 DAN EVALUASI
PEMANFAATAN APLIKASI PELAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN
DIREKTORATJENDERAL PERKERETAAPIAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JANUARI 2024

**PEMBAHASAN DAN REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 DAN EVALUASI
PEMANFAATAN APLIKASI PELAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN
DIREKTORATJENDERAL PERKERETAAPIAN**

A. DASAR PENUGASAN

1. Surat Undangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: UM.207/1/14/K1/DJKA/2024 tanggal 8 Januari 2024 perihal Undangan Rapat.
2. Surat Perintah Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: KP.004/2/12/K1/DJKA/2023 tanggal 10 Januari 2024

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tempat : Salak Heritage Hotel Bogor dan Aplikasi *Zoom Meetings*
2. Tanggal : Kamis s.d Sabtu / 11 s.d 13 Januari 2024
3. Peserta Rapat :
 - a. Perwakilan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PANRB (narasumber);
 - b. Perwakilan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA;
 - c. Perwakilan Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
 - d. Perwakilan Direktorat Sarana Perkeretaapian;
 - e. Perwakilan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
 - f. Perwakilan Bagian Keuangan, Setditjen Perkeretaapian;
 - g. Perwakilan Bagian Hukum, Setditjen Perkeretaapian;
 - h. Perwakilan Bagian SDM dan umum, Setditjen Perkeretaapian;
 - i. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
 - j. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
 - k. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
 - l. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
 - m. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
 - n. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
 - o. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
 - p. Perwakilan Balai Pengujian Perkeretaapian;
 - q. Perwakilan Balai Perawatan Perkeretaapian;
 - r. Perwakilan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
 - s. Perwakilan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.
4. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Registrasi;
 - b. Mekanisme pelaksanaan reviu laporan kinerja;
 - c. Pembahasan capaian kinerja dan reviu konsep Laporan Kinerja Tahun 2023/Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 serta Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi Pelaporan Kinerja untuk Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Eselon III;

- d. Pembahasan dan penyusunan konsep Laporan Kinerja Tahun 2023/Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV tahun 2023 Unit Eselon I Ditjen Perkeretaapian;
- e. Penyusunan laporan kegiatan.

C. POKOK - POKOK PEMBAHASAN

1. Penyampaian materi dari Perwakilan KemenPANRB terkait Laporan Kinerja

- a. Tujuan LKIP adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemberi amanah (atasan), sebagai bentuk akuntabilitas publik, dan sebagai bentuk manajemen internal (bentuk usaha menemukan *Room of Improvement* pada struktur anggaran dan struktur perencanaan).
- b. Siklus SAKIP pada proses pelaporan kinerja yaitu proses berkelanjutan (*continuitas*) dari tahap perencanaan ke tahap pengukuran kinerja, lalu ke tahap pelaporan kinerja, lalu tahap evaluasi pelaporan kinerja dan berikutnya hasil evaluasi pelaporan kinerja tersebut nantinya digunakan untuk bahan Perjanjian Kinerja periode berikutnya.
- c. Format laporan capaian kinerja triwulan dalam PermanPAN 53 Tahun 2014 sebagai dasar penyusunan perjanjian kinerja dan dasar penyusunan pelaporan kinerja yaitu berisikan indikator kinerja:
 - 1) Rasio konektivitas antar wilayah;
 - 2) Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (*rate of accident*).
 - 3) Presentase *on time performance* (OTP) transportasi kereta api;
 - 4) Pemenuhan target angkutan penumpang kereta api;
 - 5) Pemenuhan target angkutan barang kereta api;
 - 6) Presentase pengoperasian jalur KA yang sesuai TQI.
- d. Disarankan pada format laporan kinerja disarankan untuk menambahkan analisis perbandingan antar capaian tahun berjalan dengan capaian periode akhir Renstra. Hal ini bertujuan untuk memantau serta melakukan evaluasi apakah capaian target di periode Renstra sudah realistis atau belum, serta untuk merumuskan kegiatan apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai target akhir periode Renstra (tahun ke lima).
- e. Disarankan kedepannya dalam penyusunan PK dilakukan review juga terhadap bahasa sasaran, yaitu sasaran adalah kondisi yang ingin dicapai pada periode akhir Renstra (tahun kelima). Bahasa Sasaran yaitu bahasa perubahan dari kondisi semula ke kondisi yang lebih baik (contohnya ada kata meningkatkan/mengembangkan).
- f. Pada Analisis Capaian Kinerja ketika menguraikan capaian kinerja pada masing-masing Indikator Kinerja, langkah-langkah yang dapat dilakukan diantaranya:
 - 1) Mendefinisikan alasan/urgensi perkeretaapian Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Program sebagai indikator kinerja yang harus ditingkatkan;

- 2) Membandingkan antara target dengan realisasi;
 - 3) Disarankan untuk menambahkan analisis perbandingan capaian kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 - 4) Disarankan bila memungkinkan untuk menambahkan analisis perbandingan capaian kinerja dengan standar nasional atau internasional (jika ada);
 - 5) Disarankan untuk menambahkan analisis dampak/outcome yang muncul dari pelaksanaan program (*subject* dampak bisa berupa masyarakat/*stakeholder*/lainnya);
 - 6) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 - 7) Pada penyajian kegiatan capaian indikator kinerja, disarankan untuk menambahkan data pendukung untuk memperkaya isian laporan, misalnya dengan menambahkan elemen grafis terutama foto, grafik, gambar, tabel dan pendukung lainnya terkait capaian kinerja indikator tersebut (per masing-masing indikator);
 - 8) Disarankan untuk analisis sebaiknya disajikan dalam bentuk paragraf uraian.
- g. Untuk Analisis Capaian Kinerja Realisasi Anggaran langkah yang dapat dilakukan yaitu:
- 1) Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja, bisa dianalisis untuk setiap Sasaran Strategis atau setiap indikator kinerja.
 - 2) Menguraikan analisis penggunaan sumber daya dan analisis efisiensi.
- h. Sesi Diskusi bersama Narasumber MenPANRB**
- 1) Narasumber perwakilan MenPANRB menyampaikan bahwasanya tidak ada acuan format revidi karena diserahkan kewenangannya ke APIP/Inspektorat masing-masing K/L, sehingga untuk kewenangan revidi LKIP disarankan sebaiknya mengikuti format AKIP Kementerian Perhubungan.
 - 2) Analisis *Benchmarking* hanya untuk indikator-indikator yang bisa dibandingkan secara nasional atau secara internasional, jika tidak ada tidak masalah. Disarankan untuk melakukan indikator mana saja yang bisa dilakukan *benchmarking* skala internasional, misalnya seperti indikator *Rate of Accident* dan indikator Rasio Konektivitas.
 - 3) KemenPANRB menyampaikan bahwasanya target minimal harus sama dengan capaian tahun lalu, sedangkan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menyampaikan target harus lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Kesimpulannya sebaiknya menentukan target yang realistis dicapai.

- 4) Dalam penyusunan Renstra 2025 – 2029 perlu dilakukan analisis yang detail dan menggunakan bahasa sasaran dan bahasa target (SMART), dimensi indikator.
- 5) Perlu ditambahkan analisis perbandingan presentase capaian dengan Renstra.
- 6) Disampaikan dari KemenPANRB untuk target indikator yaitu minimal sama dengan tahun lalu, namun Itjen menyarankan lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
- 7) Diharapkan pada sasaran penggunaan Bahasa Sasaran dioptimalkan, pada target indikator menggunakan Bahasa Target dengan optimal dan SMART serta menggunakan Dimensi Indikator. Penetapan target juga disarankan menggunakan *based line* periode sebelumnya.

2. **Monitoring Pemanfaatan Aplikasi Pelaporan Kinerja**

- a. Diharapkan untuk unit kerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian, BTP Bandung dan BTP Padang untuk mengupload dokumen PK Revisi II Tahun 2023 di E-SAKIP Reviu. Diharapkan untuk tiap unit kerja Eselon II dan Eselon III untuk segera mengupload dokumen monitoring rencana aksi bulan Oktober s.d bulan Desember.
- b. Tiap unit kerja Eselon II dan Eselon III diharapkan segera melakukan pengisian aplikasi E-Performance diharapkan untuk melengkapi dokumen.
- c. Tiap unit kerja Eselon II dan Eselon III diharapkan segera melengkapi monitoring rencana aksi pada SILAKI.
- d. Tiap unit kerja Eselon II dan Eselon III diharapkan segera melakukan pengecekan rincian output pada pemantauan komponen aplikasi e-monev bapenas.

3. **Penyusunan Laporan Kinerja & Laporan Monitoring Kinerja Triwulan IV 2023**

- a. Pada catatan dan rekomendasi hasil evaluasi Inspektorat Jenderal disarankan agar melakukan reviu terhadap Laporan Kinerja, penyampaian dokumen Laporan Kinerja tepat waktu, serta melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit kerja secara berjenjang.
- b. Diperlukannya informasi terkait analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional/Internasional (*benchmark* kinerja) dilakukan terhadap sebagian besar IKU/IKK pada Laporan Kinerja.
- c. Diperlukannya informasi terkait efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja tidak terbatas hanya anggaran namun juga terkait sumber daya manusia, dll pada Laporan Kinerja.
- d. Diperlukannya informasi terkait upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) yang dapat dilaksanakan/ kesan yang nyata, sehingga realisasi secara keseluruhan IKU/IKK termasuk kriteria setidaknya masih *on the right track* yaitu realisasi capaian kinerja IKU/IKK antara 90% s.d. 110%.

- e. □ Beberapa informasi yang harus dilaporkan di LKIP atau laporan capaian kinerja Triwulan IV diantaranya yaitu:
- 1) □ Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian Strategi, Kebijakan, Aktivitas dan Anggaran dalam mencapai kinerja → upaya peningkatan kinerja.
 - 2) □ Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi → upaya peningkatan kinerja.
 - 3) □ Informasi dalam laporan kinerja berkala digunakan dalam penyesuaian aktivitas & penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja → upaya peningkatan kinerja.
 - 4) □ Dokumen Laporan Kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) → analisa.
 - 5) □ Dokumen Laporan Kinerja menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja → analisa.
 - 6) □ Setiap unit/satuan kerja/pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja termasuk pemantauan atas pengukuran capaian kinerja secara berjenjang. → dokumen pendukung.
 - 7) □ Diperlukan informasi capaian/realisasi fisik masing-masing unit kerja → analisa.
 - 8) □ Pencantuman analisis SMART → uraian Perjanjian Kinerja.
 - 9) □ Upaya perubahan Budaya Kinerja dan yang patut dihargai pada pelaporan kinerja → tindak lanjut rekomendasi.
 - 10) □ Evaluasi terhadap prediksi capaian kinerja yang tidak On The Right Track → analisa.
- f. □ Format Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan:
- 1) □ Pada Bab I Sub Bab 1.5 terkait Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan, perlu diuraikan sesuaikan kondisi tahun 2023. Urgensi terkait dengan indikator juga bisa dimasukkan ke dalam poin ini.
 - 2) □ Pada Bab II Sub Bab 2.1 perlu ditambahkan uraian singkat mengenai Renstra dan uraian mengenai Revisi I PK dan Revisi II PK serta keterangan justifikasi perubahannya.
 - 3) □ Pada Bab III Sub Bab 3.2 butir A disarankan untuk menambahkan selengkap-lengkapnyanya data pendukung termasuk *impact* terkait indikatornya beserta foto, grafik, gambar, tabel pendukung. Serta alternatif solusi yang perlu dilakukan (*termasuk uraian pengaruh terhadap penyesuaian Strategi, Kebijakan, Aktivitas, Anggaran, Organisasi, Jabatan/Pegawai*).
 - 4) □ Pada Bab III Sub Bab 3.2 butir C perlu ditambahkan perbandingan realisasi kinerja terhadap target akhir periode Renstra.
 - 5) □ Pada Bab III Sub Bab 3.2 butir D agar ditambahkan analisis perbandingan realisasi kinerja sebagian besar indikator dengan perbandingan skala nasional/internasional (50% indikator + 1 indikator).

- 6) Pada Bab III Sub Bab 3.3 perlu ditambahkan analisis efisiensi Sumber Data (anggaran, SDM, dll).
- 7) Pada Bab III Sub Bab 3.4 perlu apabila memungkinkan ditambahkan dukungan program Prioritas Nasional.
- 8) Pada Bab III Sub Bab 3.6 pada realisasi anggaran disarankan untuk melengkapi dengan *crosscutting* anggaran, kondisi perencanaan anggaran, dll).
- 9) Pada Bab IV Sub Bab 4.1 sebaiknya ditambahkan upaya perubahan Budaya Kinerja apa saja yang sudah dilakukan.
- 10) Pada Bab IV Sub Bab 4.3 terkait Rekomendasi Peningkatan Kinerja sebaiknya dilakukan sinkronisasi data dengan yang disajikan pada Bab III.
- 11) Lampiran yang perlu disampaikan yaitu:
 - a) Lampiran I. Rencana Kinerja Tahunan
 - b) Lampiran II. Perjanjian Kerja (revisi terakhir)
 - c) Lampiran III. Komitmen Rekomendasi Peningkatan Kinerja
 - d) Lampiran IV. Monitoring Rencana Aksi
 - e) Lampiran V. Data Dukung Capaian Kinerja Yang Valid
 - f) Lampiran VI. Dokumentasi dan Laporan Pembahasan Kinerja di Internal
- Format mandatory Laporan Tahunan/LKIP bisa mengacu *Benchmarking* LKIP Kementerian Keuangan.

4. **Reviu Laporan Kinerja 2023**

- a. KemenPANRB membebaskan mekanisme terkait Reviu Laporan Kinerja 2023. Reviu Draft LKIP Unit Kerja Ditjen Perkeretaapian Tahun 2023 berisikan hasil evaluasi dokumen LKIP Tahun 2022, Dokumen yang disampaikan (dalam reviu saat ini), serta pelaksanaan reviu (meliputi kelengkapan format laporan kinerja, mekanisme penyusunan dan substansi atas dokumen LKIP).
- b. Format Draft LKIP 2023 dapat diakses pada link berikut:
<http://lnk.dephub.go.id/UQJuK>

5. **Reviu Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon II dan Eselon III di lingkungan Ditjen Perkeretaapian**

a. **Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api**

- 1) Hasil Evaluasi Dokumen LKIP Tahun 2022 akan diakomodir di LMCK Triwulan dan LKIP tahun 2023
- 2) Draft dokumen LKIP LLAKA Tahun 2023 tahap penyusunan karena menunggu data dukung.
- 3) Kelengkapan Format Laporan Kinerja masih dalam proses penyusunan.
- 4) Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja masih dalam tahap proses penyusunan dan dikoordinasikan dengan tim SAKIP.
- 5) Subtansi atas Dokumen LKIP Dit. LLAKA Tahun 2023 antara lain:
 - a) IKK Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti.

Target TW IV yaitu 80,00 dan realisasi TW IV 80,00 (capaian 100%, terpenuhinya 7 kegiatan dari target 7 kegiatan).

Analisa Keberhasilan: Koordinasi yang intens kepada stakeholder terkait dalam rangka penyempurnaan dokumen hasil kajian studi kelayakan serta survei investigasi dan rancangan dasar.

b) IKK Persentase Pencapaian Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian.

Target TW IV yaitu 69,00 dan realisasi TW IV 69,00 (capaian 100%, terpenuhinya 5 kegiatan dari target 5 kegiatan).

Analisa Keberhasilan: Telah melaksanakan koordinasi aktif dan pembahasan revidi dengan pihak terkait sehingga kegiatan dapat diselesaikan.

c) IKK Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api berdasarkan GAPEKA

Target TW IV yaitu 84,00 dan realisasi TW IV 90,78 (capaian 100%). Total kumulatif perjalanan kereta api dari Januari s.d. Desember 2023 sebanyak 686.881 KA dari program 756.683 KA.

Analisa keberhasilan: Terpenuhinya target dipengaruhi seiring dengan meningkatnya frekuensi perjalanan LRT Jabodebek periode tanggal 1 – 14 Oktober 2023 dan beroperasinya KA Feeder Whoosh sejak tanggal 3 Oktober 2023.

d) IKK Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu.

Target TW IV yaitu 91,00 dan realisasi TW IV 90,28 (capaian 99%). Keberangkatan dan kedatangan tepat waktu kereta api dari Januari s.d. Desember 2023 sebanyak 620.093 KA dari jumlah frekuensi kereta api sebanyak 686.881 KA. Komponen data ini termasuk data dari KAI, data KCJB, data LRT Sumatera Selatan dan data kereta api di Sulawesi Selatan.

Analisa Kegagalan: Tidak terpenuhinya Target IKU Tahun 2023 dipengaruhi karena adanya andil kelambatan dari faktor Jalan Rel dan Jembatan (40,79%), Anjlogan (26,87%), dan Sarana (12,64%). Data LRT Jabodebek dan MRT menggunakan *headway*.

e) IKK Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api

Target TW IV yaitu 53,88 dan realisasi TW IV 57,11 (capaian 106%). Total angkutan penumpang Januari s.d. November 387.301.870 Pnp dari jumlah target 425.107.168 Pnp dengan rata-rata realisasi angkutan penumpang tiap bulan sebesar 35.209.958 KA.

Analisa Keberhasilan:

- Peningkatan angkutan penumpang pada KRL Jabodebek, beroperasinya LRT Jabodebek, dan beroperasinya KCJB.
- Meningkatnya permintaan dan produksi barang yang mengakibatkan naiknya penggunaan KA Barang terutama pada angkutan pupuk, dan angkutan hasil perkebunan.

- f) IKK Persentase Pemenuhan NSPK Bidang LLAKA.
Target TW IV yaitu 82,00 dan realisasi TW IV 84,00 (capaian 102%).
Analisa Keberhasilan:
Melakukan koordinasi yang intens dan diskusi yang mendalam kepada stakeholder terkait dalam penyusunan NSPK guna memperoleh data sekunder sesuai kebutuhan analisis.
- g) IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA.
Target TW IV yaitu 3,60 dan realisasi TW IV 3,67 (capaian 102%).
Analisa Keberhasilan:
Kualitas pelayanan Informasi Persyaratan, Prosedur/Alur, Waktu penyelesaian, Tarif/biaya, Sarana Prasarana, Respon, Konsultasi dan Pengawasan sangat baik.
- h) IKK Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat LLAKA
Target TW IV yaitu 100,00 dan realisasi TW IV 56,61 (capaian 56,61%).
Total realisasi PNBP Periode Januari s.d. Desember 2023 Bidang LLAKA adalah sebesar Rp. 570.215.398.829,- dari target PNBP sebesar Rp. 1.101.432.822.000,-
- Penerimaan PNBP Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/Track Access Charge (TAC) Tahun 2023 sebesar Rp. 568.455.398.829,00.
 - Penerimaan PNBP dari bidang Perizinan sampai dengan bulan Desember 2023 adalah sebesar: Rp.1.760.000.000,-
- Analisa kegagalan:
Penerimaan PNBP TAC diperoleh dari PNBP TAC terutang pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 belum diperoleh penerimaan PNBP TAC dari Badan Usaha Wajib Bayar yang telah dilakukan pengiriman surat penagihan sampai Triwulan III Tahun 2023.
- i) IKK Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA
Target TW IV yaitu 80,00 dan realisasi TW IV 87,50 (capaian 109%).
Analisa keberhasilan:
- Pembahasan Laporan yang dilakukan oleh Tim Teknis di Direktorat LLAKA dilakukan sesuai dengan jadwal.
 - Pengawasan terhadap Pengguna Anggaran salah satunya dengan cara penyesuaian terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah ditetapkan agar target Capaian Kinerja Tercapai.
 - Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap sisa Anggaran di Tahun Anggaran berjalan.
- j) IKK Nilai AKIP Direktorat LLAKA
Target TW IV yaitu 80,00 dan realisasi TW IV 83,35 (capaian 104%).
- k) IKK Tingkat Maturitas SPIP Direktorat LLAKA

Target TW IV yaitu 3,00 dan realisasi TW IV 3,20 (capaian 107%). Namun untuk penulisan baiknya ditulis 3 karena menggunakan satuan level (pembulatan ke bawah).

b. Direktorat Prasarana Perkeretaapian;

1) IKK Rasio Keterhubungan Jalur Kereta Api Antar Wilayah

Target TW IV yaitu 0,45 dan realisasi TW IV 0,440 (capaian 98,44%). Kendala pencapaian target tahun 2023 pada PKW Sawahlunto, sampai dengan bulan November 2023 belum dilaksanakan pengujian prasarana perkeretaapian dikarenakan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang belum melengkapi Syarat-syarat teknis Pengujian sebagaimana berdasarkan surat Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor : KA.605/3/3/K3/DJKA/2023 Tgl 16 Mei 2023 Tentang Permintaan Dokumen Persyaratan sertifikasi uji pertama jalur dan bangunan KA lintas Sawahlunto - Muaro Kalaban.

2) IKK Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai Dengan TQI Kategori I Dan II

Target TW IV yaitu 92,87 dan realisasi TW IV 93,85 (capaian 101,05%). Realisasi ini berdasarkan hasil pengukuran TQI Periode ke 3 Tahun 2023 terdiri dari panjang jalur KA kategori 1 dan 2 sepanjang 5.538,965 Km dan kategori 3 dan 4 sepanjang 361,979 Km.

3) IKK Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api dengan Teknologi Handal

Target TW IV yaitu 63,92 dan realisasi TW IV 63,92 (capaian 100%). Analisa keberhasilan yaitu dengan penambahan interlocking sistem persinyalan elektrik pada tahun 2023 sebanyak 8 interlocking elektrik yaitu :

a) Interlocking elektrik pada Stasiun Pasar Minggu, Stasiun Universitas Indonesia, Stasiun Depok Baru telah dilaksanakan Switch Over St. Depok Baru dan St. Universitas Indonesia pada Bulan Juni 2023.

b) Interlocking elektrik LRT Jabodebek yang ada di OCC Depo Jatimulya, telah dilakukan peresmian LRT Jabodebek pada bulan Agustus 2023 oleh Presiden RI dan sudah beroperasi untuk melayani publik;

c) Interlocking Woosh menggunakan CTCS (Chinese Train Control System)-3 dengan teknologi GoA2 di 4 Stasiun yaitu Tegalluar, Padalarang, Karawang, Halim telah dilakukan Peresmian pada bulan Oktober oleh Presiden RI dan sudah beroperasi untuk melayani publik;

4) IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Target TW IV yaitu 3,60 dan realisasi TW IV 3,70 (capaian 103,05%). Capaian ini merupakan nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat bulan Januari s.d Desember 2023.

5) IKK Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian

Target TW IV yaitu 94,80% dan realisasi TW IV 94,93 (capaian 100,13%). Capaian ini berhasil dikarenakan penerbitan sertifikat kelaikan prasarana

perkeretaapian pada tahun 2023 sebanyak 447 sertifikat yang terdiri 144 sertifikat kelaikan jalur dan bangunan KA dan 303 sertifikat kelaikan fasilitas operasi kereta api.

- 6) IKK Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian.
Target TW IV yaitu 89,19% dan realisasi TW IV 91,89% (capaian 103,02%). Penambahan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian yang telah disusun dan ditetapkan pada tahun 2023 sebanyak 9 NSPK/Peraturan/Pedoman.
- 7) IKK Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian.
Target TW IV yaitu 81,00 dan realisasi TW IV 83,95 (capaian 103,64%).
- 8) IKK Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian
Target TW IV yaitu 3,00 dan realisasi TW IV 3,00 (capaian 100%).
- 9) IKK Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian
Target TW IV yaitu 89,50% dan realisasi TW IV 91,85% (capaian 102,62%). Rincian realisasinya yaitu Penyerapan Anggaran 89,79%, Konsistensi 99,11%, Capaian RO 100%, Nilai Efisiensi 75,53%.
- 10) IKK Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian
Target TW IV yaitu 100% dan realisasi TW IV 80,54%. Analisa kegagalannya dikarenakan:
 - a) Akun 425287 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Perhubungan sebesar Rp 85.750.000,-
 - b) Akun 425519 Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya sebesar Rp 920.800.000,-
 - c) Akun 425913 Pengembalian Belanja Modal Tahun YLL sebesar 461.037.557,-
 - d) Akun 522131 sebesar Rp. 5.471.302.674; (Pengembalian Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Konstruksi dan Supervisi)

c. Direktorat Sarana Perkeretaapian;

- 1) IKK Persentase rekomendasi kebijakan bidang fasilitas sarana yang telah ditindaklanjuti
Target TW IV yaitu 66,67 dan realisasi TW IV 66,67 (capaian 100%). Telah dilaksanakan pembahasan laporan akhir pada bulan Desember 2023 dan konsultan ahli sudah menyampaikan dokumen studi reuiu DED Depo KRL Cikarang dan SMN kepada Direktorat Sarana Perkeretaapian. Realisasi kinerja hingga bulan Desember 2023 berdasarkan baseline tahun 2020-2023 antara lain:
 - a) Kebijakan fasilitas sarana KRL Lintas Yogyakarta-Solo (2020);
 - b) Kebijakan fasilitas Sarana Milik Negara di Sumatera Utara (2020);
 - c) Kebijakan DED (Detail Engineering Design) Balai Yasa Kereta Rel Listrik Yogyakarta- Solo (2022);
 - d) Studi reuiu DED Depo KRL Cikarang dan SMN (2023).

- 2) IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian
Target TW IV yaitu 3,20 dan realisasi TW IV 3,68 (capaian 115,01%).
Capaian indeks kepuasan masyarakat bulan Desember 3,68 dari skala 4 dengan jumlah responden sebanyak 3 orang. Sehingga kumulatif hingga bulan Desember sebesar 3,68 dari skala 4 dengan responden sebanyak 61.
Rencana Tindak Lanjut akan dilakukan evaluasi capaian nilai indeks kepuasan masyarakat tahun 2023.
- 3) IKK Pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara
Target TW IV yaitu 86,36 dan realisasi TW IV 86,60 (capaian 100,28%).
Analisa pencapaian target:
Kegiatan pengadaan 1 unit Railways Crane untuk Wilayah Sumatera Selatan merupakan kegiatan MYC 2022-2024, maka ditargetkan pekerjaan selesai di Tahun 2024. Progress dari kegiatan pengadaan sebagai berikut:
- a) Telah dilakukan kontrak pada tanggal 15 Desember 2022
 - b) Telah dilakukan pembayaran termin II pada bulan April 2023 dan pembayaran termin III pada bulan Desember 2023.
 - c) Komponen Hydraulic Winch, Proping Arm, Slewing Cylinder, Wheelset, Steel Plates masih dalam proses pengadaan.
 - d) Keterlambatan kedatangan komponen dan part disebabkan pengaruh perang Ukraina-Rusia.
 - e) Progres pekerjaan fisik per Desember 2023 mencapai 47%.
- Rencana tindak lanjut kedepannya Subdit pengelolaan Sarana Milik Negara akan melakukan koordinasi dan pengawasan pekerjaan pengadaan 1 unit railways crane untuk wilayah Sumatera Selatan (MYC 2022-2024) agar selesai sesuai target penyelesaian di tahun 2024. Rencana akan dilakukan pembayaran progress termin IV dan termin V pada tahun 2024.
- 4) IKK Pemenuhan sertifikat kelaikan sarana perkeretaapian
Target TW IV yaitu 76,19 dan realisasi TW IV 103,23 (capaian 135,49%).
Persentase (kumulatif) capaian sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian hingga bulan Desember 2023 adalah sebesar 103,23%. Dengan capaian jumlah kumulatif hingga bulan Desember sebanyak 10.839 sertifikat, dengan rincian 4284 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I dan 6555 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II.
Rencana tindak lanjut:
- a) Mempercepat progress sertifikasi sarana;
 - b) Meningkatkan Koordinasi dengan Balai Pengujian dan Operator Sarana Perkeretaapian terkait percepatan progres sertifikasi sarana;
 - c) Meningkatkan performa aplikasi SISAKA.
- 5) IKK Persentase sarana perkeretaapian yang dilakukan Rampcheck dengan hasil baik/ temuan minor
Target TW IV yaitu 90,00 dan realisasi TW IV 90,06 (capaian 100,67%).
Realisasi kumulatif pelaksanaan *rampcheck* sarana perkeretaapian hingga

bulan Desember 2023 adalah 90,6% dengan jumlah sarana baik (memenuhi checksheet) sebanyak 3467 unit dari 3826 sarana yang diperiksa. Rencana tindak lanjut kedepannya akan dilakukan kegiatan *rampcheck* sarana perkeretaapian, secara periodik Subdit pengembangan dan pengawasan sarana melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan dan perawatan sarana. Selanjutnya melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rampcheck tahun 2023 agar pelaksanaan rampcheck di tahun 2024 dapat memenuhi target.

6) IKK Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian

Target TW IV yaitu 70,37 dan realisasi TW IV 70,37 (capaian 100%). *Baseline* NSPK Direktorat Sarana Perkeretaapian yang masih berlaku ada 19 dokumen. Posisi Kegiatan pada bulan Desember tahun 2023, sudah dilakukan pembahasan laporan akhir pada:

- a) Studi Standar Pemeriksaan dan Perawatan Sarana Perkeretaapian
- b) Studi Penyusunan Standar Spesifikasi Teknis Kendaraan Railroad
- c) Studi Penyusunan Pedoman Evaluasi Rancang Bangun Konstruksi Rangka Dasar, Badan, Alat Perangkai dan Bogie Sarana Perkeretaapian
- d) Kajian Optimalisasi Pengelolaan Sarana Perkeretaapian Milik Negara untuk mendukung pembangunan transportasi perkeretaapian
- e) Kegiatan Validasi Umur Data Perawatan dan Pemeriksaan untuk digunakan data pengujian berkala sarana perkeretaapian
- f) Kegiatan Studi Penyusunan Standar dan Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Gantung
- g) Pembangunan Sistem Aplikasi Penetapan Identitas Sarana Perkeretaapian Berbasis Digital

Rencana tindak lanjut akan dilakukan pengesahan studi terhadap NSPK yang telah selesai dilaksanakan.

7) IKK Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian

Target TW IV yaitu 90,00 dan realisasi TW IV 86,38 (capaian 95,97%). Kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian hingga bulan Desember 2023 sebanyak Rp 80.454.542.769 dari pagu anggaran Rp 81.546.079.000 dengan persentase keuangan sebesar 98,66% dan realisasi fisik sebesar 100%. Kedepannya akan dilakukan rencana tindak lanjut dengan evaluasi capaian tahun 2023 agar target tahun 2024 dapat tercapai.

8) IKK Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana perkeretaapian

Target TW IV yaitu 100,00 dan realisasi TW IV 127,95 (capaian 127,95%). Kumulatif Capaian Realisasi PNBP Direktorat Sarana Perkeretaapian hingga bulan Desember 2023 sebesar Rp 1.716.745.000 dari target sebesar Rp 1.341.500.000 dengan persentase sebesar 127,95%. Rencana tindak

lanjutnya akan dilakukan pemantauan terhadap Perolehan PNBPN Bidang Sarana Perkeretaapian pada setiap periode.

9) IKK Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian

Target TW IV yaitu 80,00 dan realisasi TW IV 80,50 (capaian 100,63%). Hasil Evaluasi dan Implementasi SAKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 80,50 (Predikat A) dengan interpretasi "Memuaskan" dengan rincian perencanaan kinerja: 22,80, pengukuran kinerja: 24,60, pelaporan kinerja 11,85 dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : 21,25. Kedepannya akan dilakukan koordinasi dengan anggota tim SK SAKIP 2023 terkait ketersediaan data capaian Triwulan IV dan LKIP 2023 serta melakukan evaluasi kinerja tahun 2023.

10) IKK Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Sarana Perkeretaapian

Target TW IV yaitu 3,00 dan realisasi TW IV 3,00 (capaian 100%). Kedepannya akan dilakukan evaluasi terhadap PM Maturitas Penyelenggaraan SPIP Direktorat Sarana dan melakukan persiapan pelaksanaan Manajemen Risiko tahun 2024.

d. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;

1) IKK Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)

Target TW IV yaitu 75,00 dan realisasi TW IV 75,00 (capaian 100%). Akan dilaksanakan bimtek terkait dengan penerapan SMKP kepada penyelenggara perkeretaapian sebelum dilakukan Audit SMK. Pada tahun 2023 dilaksanakan Audit SMKP Tingkat transisi kepada 3 penyelenggara perkeretaapian yaitu MRT, KCI, LRT Jakarta dengan nilai baik/memuaskan. Sehingga pada tahun ke 4 renstra (2020-2023) Terdapat 6 hasil Audit Penerapan SMKP oleh Penyelenggara Perkeretaapian dengan nilai baik/memuaskan dengan rincian sebagai berikut:

a) Tingkat Awal : MRT, KCI, LRT Jakarta

b) Tingkat Transisi : MRT, KCI, LRT Jakarta

c) Dengan demikian realisasi tahun ke 4 renstra (2020-2023) tercapai 75% sesuai dengan target

d) Akan dilaksanakan Audit SMKP Pada tahun 2024 untuk pencapaian target yang di tetapkan.

2) IKK Pemenuhan Sertifikat Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian

Target TW IV yaitu 48,81 dan realisasi TW IV 69,18 (capaian 141,73%). Direktorat Keselamatan Perkeretaapian telah melaksanakan diklat Auditor dan diklat Asisten Penguji Sarana dan Prasarana pada bulan September dan bulan Oktober 2023. Selanjutnya dilakukan sertifikasi SDM Regulator Perkeretaapian sebanyak 642 orang, sehingga realisasi pada tahun ke 4 Renstra sebesar 69,18% (melebihi target yang ditetapkan). Kedepannya akan berupaya untuk meningkatkan pencapaian sertifikasi SDM Regulator guna menjamin kompetensi SDM regulator dalam menjalankan tugasnya.

3) IKK Pemenuhan Sertifikat Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian

Target TW IV yaitu 89,31 dan realisasi TW IV 123,18 (capaian 137,92%). Pada tahun 2023 penambahan sertifikat SDM Operator sebanyak 10.711 sertifikat. Realisasi Indikator Kinerja Persentase Sertifikat Kompetensi Operator Perkeretaapian (TEKNIS) pada tahun ke 4 renstra di TW IV sebanyak 23.608 (12.922+10.711) sudah terpenuhi sehingga target pada TW IV sebesar 89,31 atau 16.977 sertifikat tercapai dan melampaui target yang ditetapkan. Kedepannya akan ditingkatkan lagi pencapaian sertifikat SDM Operator guna pencapaian target selanjutnya.

- 4) IKK Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang Menjadi Kebijakan Stakeholder/Sudah Diimplementasikan/Ditindaklanjuti
Target TW IV yaitu 50,00 dan realisasi TW IV 51,60 (capaian 103,20%). Akan dilakukan koordinasi dengan subdit terkait dan memantau instansi/operator untuk menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan.
- 5) IKK Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian
Target TW IV yaitu 69,23 dan realisasi TW IV 74,35 (capaian 107,40%). Pada Tahun 2023 terdapat penambahan NSPK sebanyak 10 NSPK, dengan demikian realisasi pada Tahun ke 4 Renstra sebesar 74,35% atau 29 NSPK, sehingga capaian melebihi target yang ditetapkan sebesar 69,23%.
- 6) IKK Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian
Target TW IV yaitu 66,67 dan realisasi TW IV 66,67 (capaian 100%). Pada tanggal 23 November 2022 sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 19 Tahun 2022, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia memberikan akreditasi kepada Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD yang berlaku sampai dengan 23 November 2027. Berdasarkan hal tersebut, dari tahun 2020 s.d. triwulan IV 2023 telah terakreditasi 4 Badan Lembaga Pendidikan Perkeretaapian atau 66,67% dari target Renstra. Kedepannya akan dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Badan Hukum Pendidikan dan Pelatihan SDM Perkeretaapian serta Bimbingan Teknis Bidang Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian.
- 7) IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.
Target TW IV yaitu 3,60 dan realisasi TW IV 3,82 (capaian 106%). Selanjutnya Direktorat Keselamatan Perkeretaapian akan melakukan upaya peningkatan terhadap kualitas pelayanan dan mensosialisasikan link survey kepuasan masyarakat.
- 8) IKK Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
Target TW IV yaitu 90,00 dan realisasi TW IV 86,14 (capaian 95,71%). Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian pada aplikasi SMART Kemenkeu adalah 86,14 dengan rincian sebagai penyerapan 99,20, konsistensi 99,72, CRO 100, Efisiensi, 0,8 dan Nilai Efisiensi 51,99.

Selanjutnya Direktorat Keselamatan Perkeretaapian akan melaksanakan dan meningkatkan kegiatan yang mendukung realisasi keuangan dan fisik dan mendorong penyerapan anggaran.

- 9) IKK Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian
Target TW IV yaitu 100,00 dan realisasi TW IV 86,56 (capaian 86,56%). Pada bulan Desember 2023 terdapat penambahan jumlah PNBP sebesar Rp250.363.160 sehingga total sampai dengan bulan Desember 2023 jumlah realisasi PNBP sebesar Rp.1.904.413.160 dari target yang telah ditetapkan sebesar 2.200.000.000, sehingga target belum tercapai.
- 10) IKK Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
Target TW IV yaitu 80,81 dan realisasi TW IV 82,15 (capaian 101,66%). Kedepannya akan dilengkapi hasil rekomendasi oleh Setditjen Perkeretaapian.
- 11) IKK Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Target TW IV yaitu 3 dan realisasi TW IV 3 (capaian 100%).

e. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta

- 1) IKK Rasio Konektivitas wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta
Target TW IV yaitu 0,62 dan realisasi TW IV 0,62 (capaian 100%). Terkait Jasa Penilai Publik (KJPP) Pembebasan Lahan untuk Gedung Penunjang Operasional dan Akses Jalan Gudang terpaksa pekerjaannya tidak dapat dilaksanakan karena belum tersedianya lokasi pembebasan lahan untuk Gedung Penunjang Operasional dan Akses Jalan Gudang. Selain itu Kode anggaran tidak sesuai dengan judul wilayah pekerjaan. Selain itu terkait kegiatan RKL - RPL Reaktivasi Jalur KA Rangkasbitung - Labuan Tahap I karena belum ada arahan lebih lanjut dari pimpinan terkait pekerjaan tersebut maka pekerjaan tidak bisa terlaksana.
- 2) IKK Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta
Target TW IV yaitu 88,96 dan realisasi TW IV 90,76 (capaian 102,06%). Untuk Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II adalah 90,79% (611,62 Kmsp) dengan Panjang Jalur KA terukur 673,681 Kmsp.
- 3) IKK Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta
Target TW IV yaitu 97,22 dan realisasi TW IV 98,72 (capaian 101,54%). Kegiatan yang dilakukan antara lain:
 - a) Penambahan Interlocking elektrik di 3 stasiun dari pekerjaan peningkatan fasilitas operasi KA Jabodetabek yaitu Pasar Minggu, UI, Depok Baru.

- b) Untuk Triwulan 4 terdapat penambahan di beberapa stasiun yaitu Stasiun KCIC Halim dan Karawang, serta stasiun LRT Jabodebek, MRT, LRT Jakarta.
 - c) Total sinyal interlocking berbasis elektrik tahun 2023 di BTP Kelas I Jakarta menjadi 77 unit dari rencana sampai tahun 2024 sebanyak 78 unit.
 - d) Peningkatan Sistem Elektrifikasi Perkeretaapian di Jabodetabek.
- 4) IKK Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta
Target TW IV yaitu 62,01 dan realisasi TW IV 63,03 (capaian 101,64%). Realisasi kumulatif angkutan pnp s.d Triwulan IV Tahun 2023 adalah 888.797.663 Orang (27,16%) dan angkutan barang 16.125.685 ton (35,87%), total keseluruhan 63,03%. Realisasi TW I s/d Triwulan IV Tahun 2023 saja, untuk Angk Penumpang 346.919.999 Orang dan untuk Angkutan Barang 3.578.213 Ton.
- 5) IKK Tingkat keselamatan Transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta
Target TW IV yaitu 100,00 dan realisasi TW IV 99,68 (capaian 99,68%). Untuk Realisasi Triwulan IV, tidak terdapat kejadian kecelakaan KA. Untuk s/d Triwulan IV 2023 terdapat total 2 kejadian kecelakaan. Kecelakaan pertama pada saat Triwulan I, dan kecelakaan kedua pada saat Triwulan III.
- 6) IKK Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian
Target TW IV yaitu 100,00 dan realisasi TW IV 100,00 (capaian 100%). Untuk Realisasi PNBP BTP Kelas I Jakarta di Triwulan IV pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp 358.141.955,- dengan rincian:
- a) Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu (Mulia KSO) senilai Rp 121.236.683,-
 - b) Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu (PT. Gapura Karya Mandiri) senilai Rp 10.309.805,-
 - c) Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu (Lubuk KSO) senilai Rp 13.858.800,-
 - d) Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (Sewa coffe corner ruang 2.2 St Manggarai bisnis) senilai Rp 103.395.000,-
 - e) Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan senilai Rp 40.000.000,-
 - f) Sedangkan untuk Realisasi PNBP BTP Kelas I Jakarta di Triwulan I pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp 106.436.628,- , di Triwulan II sebesar Rp 16.070.250,- dan di Triwulan III sebesar Rp 136.709.695,-
Sehingga Total Realisasi PNBP BTP Kelas I Jakarta sampai dengan Triwulan IV pada Tahun 2023 yaitu sebesar **Rp. 617.358.528,-**.

7) IKK Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta

Target TW IV yaitu 82,00 dan realisasi TW IV 37,58 (capaian 45,83%). Perkeretaapian Kelas I Jakarta berdasarkan nilai pada dashboard SMART Kemenkeu yaitu sebesar 37,58%. Target ini tidak tercapai. Selanjutnya BTP Jakarta akan mengupayakan peningkatan penyerapan anggaran dan efisiensi.

Pagu Tahun 2023 sampai dengan Triwulan IV saat ini sebesar Rp 827.180.179.000, dikarenakan di bulan Desember ada penambahan Pagu sebesar Rp. 123.803.526.000 ,- dari pagu sebelumnya, dengan Realiasi Anggaran BTP Jakarta pada Triwulan IV berdasarkan e-MON per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 434.798.436.230 (52,56%) sedangkan untuk SPAN sebesar Rp. 434.789.069.787 (52,56%).

8) IKK Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta

Target TW IV yaitu 81,00 dan realisasi TW IV 80,35 (capaian 99,19%). Target tidak tercapai dikarenakan pelaporan yang kurang lengkap dan kurang tepat waktu, dan beberapa capaian IKK yang belum on the track. Dengan kegiatan yang telah dilakukan yaitu:

a) Pengisian LKE di Silaki.

b) Telah menyusun Laporan monitoring capaian kinerja BTP Kelas I Jakarta pada Triwulan III dan progress untuk TW IV dan LAKIP.

c) Penyesuaian anggaran dengan kegiatan di POK, sampai revisi 16.

9) IKK Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta

Target TW IV yaitu 3,00 dan realisasi TW IV 3,00 (capaian 100%).

f. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung

1) IKK Rasio Konektivitas Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian

Target TW IV yaitu 0,55 dan realisasi TW IV 0,55 (capaian 100%). Agar dapat diuraikan kegiatan pendukungnya seperti kegiatan pembangunan skybridge, saat ini dilaporkan kegiatan telah selesai.

2) IKK Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian

Target TW IV yaitu 87 dan realisasi TW IV 87 (capaian 100%). Data yang digunakan hasil pengukuran periode III 2023 dari DAOP Kegiatan pendukung yang dilaksanakan yaitu Jalur Ganda Sukabumi

3) IKK Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian

Target TW IV yaitu 67,74 dan realisasi TW IV 67,74 (capaian 100%). Data sudah inline dengan Direktorat Prasarana.

4) IKK Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian

Target TW IV yaitu 39,60 dan realisasi TW IV 41,35. Data sudah inline dengan Direktorat Prasarana.

5) IKK Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian

6) IKK Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian

7) IKK Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian

8) IKK Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian

g. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang

1) IKK Rasio Konektivitas Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang

Target TW IV yaitu 0,42 dan realisasi TW IV 0,42 (capaian 100%). Pada bulan Desember 2023, rasio konektivitas tercapai 0,42 dengan jalur terhubung sebanyak 15 dari 36 titik konektivitas yang telah direncanakan terhubung. Reaktivasi Stasiun Semarang Tawang dan Pelabuhan Tanjung Mas sudah selesai secara fisik progress pekerjaan 100% dan telah dilaksanakan pengujian pertama namun perlu dilakukan tindak lanjut untuk beberapa temuan pengujian.

Akan dilakukan segera pemenuhan tindak lanjut temuan dari hasil pengujian pertama dan segera dilakukan permohonan pengajuan pengujian paling lambat awal bulan februari 2024

2) IKK Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang

Target TW IV yaitu 99,24 dan realisasi TW IV 99,50 (capaian 100,26%). Berdasarkan data pengukuran periode III dari KA Ukur PT KAI terdapat kenaikan dari capaian TW III yang semula 99,24 menjadi 99,50. Untuk meningkatkan nilai TQI, terdapat pekerjaan peningkatan jalur di tahun 2024 antara lain:

a) Pembangunan jalur ganda semarang solo fase I;

b) Peningkatan jalur KA Maos-Cilacap;

c) Peningkatan Jalur KA Solo-Wonogiri;

d) Perawatan dan pengoperasian prasarana (IMO).

3) IKK Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang

Target TW IV yaitu 86,67 dan realisasi TW IV 86,67 (capaian 100%). Perbandingan antara unit fasilitas operasi yang berbasis elektrik (104 unit) dengan jumlah keseluruhan unit fasilitas operasi yang beroperasi berjumlah 120 unit, dengan rincian 104 sinyal elektrik, 16 sinyal mekanik. Untuk meningkatkan kehandalan fasilitas operasi berbasis sinyal elektrik, pada T.A 2023 di BTP Semarang akan melaksanakan kegiatan peningkatan sistem persinyalan pada stasiun kalioso yang semula mekanik menjadi elektrik yang berprogress 96,26%. Serta akan dilakukan penggantian sistem sinyal elektrik dengan sistem terbaru pada lintas tegal pekalongan dan prupuk purwokerto, sementara masih dalam proses lelang ulang, pada tahun 2024.

- 4) IKK Pemenuhan target angkutan KA di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang
Target TW IV yaitu 116,50 dan realisasi TW IV 117,84 (capaian 101,15%). Capaian realisasi angkutan KA bulan Desember 2023 sebanyak 2.563.617 penumpang dan 242.898 ton barang, sehingga capaian kumulatif total (2020-2023) sebesar (117,84%) dari target 2023 sebesar 116,5%. Kenaikan penumpang terjadi dikarenakan terdapat penambahan perjalanan pada gapeka yang baru serta adanya angkutan natal dan tahun baru.
- 5) IKK Persentase realisasi perjalanan kereta api perintis di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang
Target TW IV yaitu 100 dan realisasi TW IV 100 (capaian 100%). Pada Bulan Desember 2023 dari 124 perjalanan yang direncanakan, tercapai 100% dengan frekuensi sebanyak 124 perjalanan KA dengan kapasitas angkutan penumpang perintis sebesar 13.154 penumpang. BTP Semarang telah melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan Triwulan IV 2023 bulan oktober dan November 2023 untuk memantau operasional KA Perintis agar sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
- 6) IKK Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Semarang
Target TW IV yaitu 100 dan realisasi TW IV 98,52 (capaian 98,52%). Pada TW IV 2023 terdapat 1 kecelakaan kereta api di bulan oktober 2023 yaitu anjlokkan KA di petak jalan antara wates –stasiun sentolo.
- 7) IKK Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Semarang terealisasi 49,53% dari target 81%. Perlu adanya pengoptimalan penyerapan anggaran agar nilai pada SMART dapat maksimal.
- 8) IKK Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Semarang telah terealisasi sebesar 112,8% dari target 100%, capaian sebesar 112,8%.
- 9) IKK Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Semarang telah terealisasi sebesar 80,45% dari rencana 79%.
- 10) IKK Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Semarang telah terealisasi menggunakan level 3.

h. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya

- 1) Pada IKK terkait dengan rasio konektivitas wilayah capaian telah terealisasi 0,33% dari target 0,33% (capaian 100%).
- 2) Pada IKK terkait dengan TQI capaian telah terealisasi 98% dari target 97% (capaian 101%).
- 3) Pada IKK Persentase fasop dengan teknologi handal telah terealisasi 42,7% dari target 42,7 (capaian 100%)

- 4) Pada IKK target angkutan KA telah terealisasi 109% dari target 108% (capaian 101%).
- 5) Pada IKK tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian telah terealisasi 100 dari target 100 (capaian 100%)
- 6) Pada IKK kualitas pelaksanaan anggaran telah terealisasi 97,62% dari target 100% (capaian 97,62%)
- 7) Pada IKK realisasi PNBPN telah terealisasi sebesar 110% dari target 100 (capaian 110%)
- 8) Pada IKK nilai AKIP telah terealisasi 82,45 dari target 81 (capaian 102%)
- 9) Pada IKK tingkat maturitas SPIP telah mendapat penilaian dan terealisasi di level 3 sehingga capaian telah 100%

i. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan

- 1) Pada IKK 1 terkait dengan rasio konektivitas wilayah capaian telah terealisasi 0,44% dari target 0,44% (capaian 100%).
- 2) Pada IKK 2 terkait dengan TQI capaian telah terealisasi 91,5% dari target 90% (capaian 101%).
- 3) Pada IKK 3 terkait Fasop dengan teknologi handal telah terealisasi 51,7% dari target 51,7% (capaian 100%)
- 4) Pada IKK 4 target angkutan KA telah terealisasi 45% dari target 42% (capaian 107%).
- 5) Pada IKK 5 realisasi perjalanan KA perintis telah terealisasi sebesar 100% dari target 100% (capaian 100%)
- 6) Pada IKK 6 tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian telah terealisasi 100 dari target 100 (capaian 100%)
- 7) Pada IKK 7 realisasi PNBPN telah terealisasi sebesar 100% dari target 100 (capaian 100%)
- 8) Pada IKK 8 kualitas pelaksanaan anggaran telah terealisasi 43,86% dari target 99% (capaian 44,30%)
- 9) Pada IKK 9 nilai AKIP telah terealisasi 81,7 dari target 79 (capaian 103%)
- 10) Pada tingkat maturitas SPIP telah mendapat penilaian dan terealisasi di level 3 sehingga capaian telah 100%
- 11) Rekomendasi hasil evaluasi dokumen LKIP tahun 2022 akan diakomodir pada laporan monitoring capaian kinerja triwulan dan LKIP tahun 2023.
- 12) Dokumen yang disampaikan dalam reuiu berupa bahan paparan capaian kinerja tahun 2023 dan draft dokumen LKIP masih tahap penyusunan dan dikoordinasikan dengan tim SAKIP.
- 13) SPIP dan SAKIP rekomendasi dapat dimasukkan kepada rencana dan tindak lanjut untuk kedepannya.
- 14) Pelaksanaan anggaran pada penyerapan masih rendah akibat tidak bisa terserapnya 6 kegiatan. Agar dipantau nilai pada SMART
- 15) Keselamatan fokus pada kondisi prasarana, sarana dan SDM, Eksternal (keamanan sarana, prasarana dan SDM).

- 16) Analisis pada pemenuhan target angkutan KA khususnya penumpang perlu didetailkan/ditambahkan terkait penambahan layanan baru KA Perintis Datuk Blambangan.
- 17) Rasio dan TQI sudah sesuai, namun perlu penyamaan data base dengan Direktorat Teknis.
- 18) LKIP tahun 2023, analisis keberhasilan dan Upaya peningkatan dan kendala agar didetailkan berikut dengan dokumentasi dll, SMART agar dipantau sebagai acuan PK Tahun 2024, Data angkutan dan data lainnya agar dapat diisi.

j. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang

- 1) Pada IKK terkait dengan rasio konektivitas wilayah capaian telah terealisasi 0,5% dari target 0,63% (capaian 80%).
- 2) Pada IKK terkait dengan TQI capaian telah terealisasi 62,8% dari target 68,02% (capaian 92,33%).
- 3) Pada IKK target angkutan KA telah terealisasi 71,42% dari target 83,44% (capaian 104,24%).
- 4) Pada IKK realisasi perjalanan KA perintis telah terealisasi sebesar 99,59% dari target 100% (capaian 99,59%)
- 5) Pada IKK tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian telah terealisasi 100 dari target 100 (capaian 100%)
- 6) Pada IKK kualitas pelaksanaan anggaran telah terealisasi 86% dari target 86% (capaian 100%)
- 7) Pada IKK realisasi PNBPN telah terealisasi sebesar 108,88% dari target 100 (capaian 108,88%)
- 8) Pada IKK nilai AKIP telah terealisasi 82,45 dari target 81 (capaian 102%)
- 9) Pada IKK tingkat maturitas SPIP telah mendapat penilaian dan terealisasi di level 3 sehingga capaian telah 100%
- 10) Rekomendasi hasil evaluasi dokumen LKIP tahun 2022 akan diakomodir pada laporan monitoring capaian kinerja triwulan III dan akan ditindaklanjuti pada triwulan IV 2023 dan LKIP tahun 2023.
- 11) Dokumen yang disampaikan dalam revidi berupa bahan paparan capaian kinerja tahun 2023 dan draft dokumen LKIP masih tahap penyusunan dan dikoordinasikan dengan tim SAKIP.
- 12) Pada IKK terkait TQI pedoman TQI akan disusun dengan hasil standar pengukuran yang sama sehingga realisasi tidak naik/turun.
- 13) Pada Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian fokus kepada prasarana, sarana dan SDM. perlintasan sebidang tidak mempengaruhi tingkat keselamatan.
- 14) Pada IKK nilai AKIP dan Tingkat maturitas SPIP rekomendasi dari ITJEN menjadi rencana kedepan yang harus di tindak lanjuti.

k. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang

- 1) Pada IKK 1 terkait dengan rasio konektivitas wilayah capaian telah terealisasi 0,71% dari target 0,71% (capaian 100%).

- 2) Pada IKK 2 terkait dengan TQI capaian telah terealisasi 92,04 dari target 89,84 (capaian 102,45%).
- 3) Pada IKK 3 terkait dengan fasilitas operasi dengan teknologi handal terealisasi sebesar 25,30 dari target 25,30 (capaian 100%)
- 4) Pada IKK 4 target angkutan KA telah terealisasi 79,53% dari target 74,78% (capaian 106,35%)
- 5) Pada IKK 5 tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian telah terealisasi 91,38 dari target 100 (capaian 91,38%)
- 6) Pada IKK 6 terkait dengan kualitas pelaksanaan anggaran telah terealisasi 93,86% dari target 83,71% (capaian 112,12%)
- 7) Pada IKK 7 terkait dengan nilai AKIP telah terealisasi 81,85 dari target 73 (capaian 103,6)
- 8) Pada IKK 8 terkait dengan tingkat maturitas SPIP telah mendapat penilaian dan terealisasi di level 3 sehingga capaian telah 100%
- 9) Rekomendasi dari hasil evaluasi dokumen LKIP 2022 akan diakomodir pada triwulanan dan pada LKIP tahun 2023.
- 10) Dokumen yang disampaikan pada saat reuiu masih dalam bahan paparan capaian kinerja tahun 2023 dan draft dokumen LKIP masih proses penyusunan yang dikoordinasikan dengan tim SAKIP.
- 11) Pada rasio konektivitas perlu diuraikan kegiatan pendukung (apabila ada) dan rencana kedepannya apa yang akan di lakukan.
- 12) Pada kualitas pelaksanaan anggaran Pada nilai SMART, nilai CRO sudah diatas dari nilai penyerapan, namun dalam penentuan target masih belum maksimal sehingga capaian lebih dari 100% (112,12%).

I. Balai Pengujian Perkeretaapian

- 1) IKK Pemenuhan Pengujian kelaikan sarana perkeretaapian telah terealisasi pada triwulan IV sebesar 79,73% dari target 77,35% (capaian 103,08%)
- 2) IKK Pemenuhan pengujian kompetensi SDM Perkeretaapian telah terealisasi pada triwulan IV sebesar 44,83 % dari target 44,63% (capaian 100,45%)
- 3) IKK Pemenuhan pengujian kelaikan prasarana perkeretaapian telah terealisasi pada triwulan IV sebesar 85,21% dari target 80,83% (capaian 105,42%)
- 4) IKK IKM terhadap pelayanan public yang diselenggarakan BPP telah terealisasi pada triwulan IV sebesar 3,65% dari target 3,20% (capaian 114,06%)
- 5) IKK Persentase kualitas pelaksanaan anggarantelah terealisasi pada triwulan IV sebesar 96,46% dari target 90% (capaian 107,18%)
- 6) IKK Persentase realisasi PNPB telah terealisasi pada triwulan IV sebesar 98,43% dari target 100% (capaian 98,43%)
- 7) IKK Nilai AKIP telah terealisasi pada triwulan IV sebesar 81,85% dari target 81% (capaian 101,05%)
- 8) IKK Tingkat maturitas SPIP telah terealisasi pada level 3

- 9) Terhadap hasil evaluasi dokumen LKIP tahun 2022 akan diakomodir pada LMCK triwulanan dan LKIP tahun 2023
- 10) Kelengkapan format laporan kinerja masih dalam proses penyusunan dan dikoordinasikan dengan tim SAKIP
- 11) Analisis dan Upaya peningkatan kinerja agar didetailkan kembali

m. Balai Perawatan Perkeretaapian

- 1) IKK Meningkatnya kehandalan sarana perkeretaapian telah terealisasi sebesar 97,86% pada Triwulan IV dari target 100% (capaian 97,86%).
- 2) IKK Persentase kualitas pelaksanaan anggaran telah terealisasi sebesar 70,86% pada triwulan IV dari target sebesar 91%.
- 3) IKK Persentase realisasi PNBPN telah terealisasi sebesar 41,28% dari target pada triwulan IV sebesar 100% (capaian kinerja 41,28%)
- 4) IKK Nilai AKIP berdasarkan hasil penilaian telah terealisasi sebesar 82,45% pada triwulan IV dari target 80% (capaian 103,06%)
- 5) IKK Tingkat maturitas SPIP realisasi pada triwulan IV dengan level 3
- 6) Dari hasil evaluasi dokumen LKIP tahun 2022 rekomendasi akan ditindaklanjuti pada laporan triwulan III dan LKIP 2023.
- 7) Terhadap IKK Persentase sarana perkeretaapian milik negara yang siap operasi perlu Uraikan secara detil Analisis Kegagalan yang menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya kinerja, serta jelaskan secara detil Upaya peningkatan kinerja yang akan datang.
- 8) Terhadap IKK Kualitas pelaksanaan anggaran
- 9)
- 10)
- 11)

n. Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan

- 1) IKK 1 Pemenuhan target angkutan kereta api ringan Sumsel dengan target 2023 sebesar 53,02% dengan realisasi 60,14%
- 2) IKK 2 Persentase kedatangan KA target sebesar 98,9% dengan realisasi 99,84%
- 3) IKK 3 IKM target sebesar 3,52% dengan realisasi 3,56%
- 4) IKK 4 Persentasi gangguan operasional target sebesar 100% dengan realisasi 100%
- 5) IKK 5 Tingkat keselamatan transportasi target sebesar 100% dengan realisasi 100%

- 6) IKK 6 Realisasi PNBPN target sebesar 100% dengan realisasi 88,59%
- 7) IKK 7 Pelaksanaan anggaran target sebesar 93,11% dengan realisasi 81,68%
- 8) IKK 8 Nilai AKIP target sebesar 78% dengan realisasi 78,55%
- 9) IKK 9 SPIP target 3 dengan realisasi 3
- 10) Rekomendasi hasil evaluasi dokumen LKIP tahun 2022 akan diakomodir pada laporan monitoring capaian kinerja triwulan dan LKIP tahun 2023.
- 11) Dokumen yang disampaikan dalam reuiu berupa bahan paparan capaian kinerja tahun 2023 dan draft dokumen LKIP masih tahap penyusunan dan dikoordinasikan dengan tim SAKIP.
- 12) Analisa keberhasilan agar dilengkapi/diperkaya terkait data (kendala, tindak lanjut, Upaya peningkatan, dokumentasi dll)
- 13) SMART, Pengisian pada CRO agar dicek kembali dan disamakan dengan target dikarenakan semua kegiatan telah dilaksanakan.
- 14) PNBPN, agar dicek kembali data yang ditampilkan masih berbeda dengan aplikasi SPAN. Jika ada perbedaan agar dikoordinasikan dengan Bag. Keu
- 15) Capaian IKM telah disepakati dengan unit kerja lain bahwa menggunakan rata - rata nilai IKM perbulan.

o. Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan

- 1) IKK Pemenuhan target angkutan kereta api ringan Sumsel dengan target 2023 sebesar 0,24% dengan realisasi 0,24% (capaian 100%)
- 2) Pada IKK terkait dengan fasilitas operasi dengan teknologi handal terealisasi sebesar 100 dari target 92,8 (capaian 108%)
- 3) Pada IKK target angkutan KA telah terealisasi 43,1% dari target 41% (capaian 105%)
- 4) Pada IKK Persentase kedatangan dan keberangkatan kereta api telah terealisasi sebesar 92,71% dari target 90% (capaian 103%)
- 5) Pada IKK tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian telah terealisasi 100 dari target 100 (capaian 100%)
- 6) Pada IKK terkait dengan kualitas pelaksanaan anggaran telah terealisasi 89,37% dari target 90,11% (capaian 99,17%)
- 7) Pada IKK terkait dengan nilai AKIP telah terealisasi 79,75% dari target 78 (capaian 102,2%)
- 8) Pada IKK terkait dengan tingkat maturitas SPIP telah mendapat penilaian dan terealisasi di level 3 sehingga capaian telah 100%
- 9) Pada IKK Realisasi PNBPN telah terealisasi sebesar 100% dari target 100% (capaian 100%)
- 10) Pada IKK PNBPN Perlu dilakukan pengecekan dokumen Revisi PK II terkait penambahan PNBPN Umum dari pembagian keuntungan PJPK dengan PT. CRI, karena seharusnya penambahan PNBPN sudah termasuk dalam Revisi PK II.

D. Kesimpulan dan Tindak Lanjut

- a. Tujuan LKIP adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemberi amanah (atasan), sebagai bentuk akuntabilitas publik, dan sebagai bentuk manajemen internal (bentuk usaha menemukan Room of Improvement pada struktur anggaran dan struktur perencanaan).
- b. Unit kerja perlu berperan aktif untuk mengecek kelengkapan dan validitas pengisian data capaian kinerja pada aplikasi kinerja secara berkala.
- c. Diperlukan peningkatan kepatuhan dan substansi pelaporan kinerja pada Laporan Monitoring Kinerja Triwulan IV sesuai catatan hasil implementasi SAKIP Itjen Kementerian Perhubungan.
- d. Perwakilan KemenPANRB menyarankan untuk menambahkan analisis dampak/outcome yang muncul dari pelaksanaan program (*subject* dampak bisa berupa masyarakat/*stakeholder*/lainnya);
- e. Terkait mekanisme reviu dokumen pelaporan kinerja diserahkan ke APIP, sehingga akan dilakukan reviu dokumen menggunakan referensi format terkait.
- f. Direktorat LLKA perlu melakukan sinkronisasi data angkutan penumpang kereta api khusus terkait dengan adanya isu penghitungan angkutan penumpang pada Kereta Cepat Jakarta – Bandung.
- g. Data Kinerja PNBPN periode Triwulan IV 2023 agar mengacu pada aplikasi SPAN Kementerian Keuangan serta dikoordinasikan dengan Bagian Keuangan Setditjen Perkeretaapian untuk sinkronisasi.
- h. Masing – masing unit kerja agar menindaklanjuti hasil reviu terhadap dokumen/draft sementara LKIP 2023, sesuai dengan catatan pada capaian kinerja tahunan (triwulan IV).

D. PENUTUP

Demikian laporan ini buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11 Januari 2024

NOTULENSI



(Kelompok Evaluasi dan Pelaporan)

Dokumentasi



